PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
TAHUN 2013-2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Papua
2013

GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Gubernur Provinsi Papua untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

12. Undang-Undang...../3

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. *Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);*
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

23. Peraturan Presiden...../4

23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
24. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 – 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Otonomi Khusus Papua.

4. Gubernur ialah Kepala Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang kabupaten dan kota.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
12. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Papua dan DPRP yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.

21. Program adalah...../6

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
23. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) RPJMD disusun berdasarkan asas :
   a. demokrasi;
   b. berkeadilan;
   c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
   d. transparansi;
   e. tata kelola pemerintahan yang baik;
   f. berkelanjutan;
   g. Kearifan lokal dan
   h. berwawasan lingkungan.

(2) RPJMD disusun secara sistematis, sinergis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD dan RTRW.

Pasal 3

(1) RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:
   a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
   b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
   c. partisipasi masyarakat; dan
   d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

(2). Program Lintas SKPD...../7

(2) Program Lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

(3) Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, sebagai dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

(4) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

(5) Uraian secara rinci RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang teridiri dari :

a. Pendahuluan : latar belakang, maksud dan tujuan, hubungan antar RPJMD dengan dokumen lainnya, dan sistematika penulisan;
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah;
c. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan : kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelola keuangan masa lalu, kerangka pendanaan, dan kebijakan pengelola keuangan daerah;
d. Analisis Isu-Isu Strategis : permasalahan pembangunan, dan isu strategis;
e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran : visi, misi, tujuan dan sasaran;
f. Arah Kebijakan dan Strategi : strategi, dan arah kebijakan;
g. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah : kebijakan umum program pembangunan daerah;
h. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan : bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi, bidang penguatan otonomi khusus, bidang kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian, bidang infrastruktur dan sarana prasarana;
i. Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
j. Pedoman Transisi : pedoman transisi, dan kaedah pelaksanaan; dan
k. Penutup.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.

Pasal 7

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bappeda.

(2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD.

Pasal 8

(1) Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

(3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.

(4) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan.

(5) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRP.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, DPRP melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi Papua 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019.

(2) Gubernur pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.

(4) Apabila sampai dengan tahun kedua sejak habisnya masa jabatan Gubernur sebagaimana diatur pada ayat (2) belum terpilih Gubernur untuk masa jabatan berikutnya, RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan pada tahun berikutnya sampai terpilih Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 November 2013

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 8 November 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018

I. UMUM

Provinsi Papua pada awalnya adalah Provinsi Irian Jaya yang terbentuk berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Hingga tahun 2013, Provinsi Papua telah 50 tahun menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan pengakuan dan kewenangan khusus bagi Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua dalam pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan adat istiadat dan potensi yang dimiliki sehingga penyelesaian permasalahan pembangunan dapat ditanggulangi secara lebih kontekstual untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hingga tahun 2013, pemerintahan era otonomi khusus telah berjalan 11 tahun sejak efektifnya pelaksanaan pemerintah di era otonomi khusus tahun 2012 dan telah banyak memberikan warna dan perubahan diberbagai sendi kehidupan masyarakat. Namun, belum secara optimal dapat menyentuh permasalahan pembangunan secara substantif untuk mengurangi ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan antardaerah. Untuk itu, diperlukan perencanaan guna melaksanakan langkah peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, sehingga dapat lebih terfokus pada upaya pengurangan ketimpangan (*in-equity*) pembangunan dengan memperkokoh aspek kemandirian orang asli Papua dalam kapasitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*). Penyusunan RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018 ini, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan...../2

Yang dimaksud dengan ”demokrasi” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bahwa rencana pembangunan jangka menengah harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat dan menjadi ikatan sosial dalam komunitas sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bersama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Ayat (2)...../3

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas



GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE,SIP,MH



WAKIL GUBERNUR PAPUA

KLEMEN TINAL, SE, MM

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD Provinsi Papua 2013-2018 merupakan penjabaran Visi dan Misi Saya dan Saudara Klemen Tinal sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan RPJM Nasional serta aspirasi yang merupakan Harapan Seluruh Rakyat (HASRAT) Papua yang berada di wilayah perbatasan, di lembah dan di gunung-gunung, di pesisir pantai, dirawa-rawa dan pulau-pulau terpencil. HASRAT Papua terdiri dari **pemenuhan kebutuhan dasar** seperti Pendidikan yang mudah dan berkualitas, pelayanan kesehatan yang mudah dan murah, peningkatan perekonomian masyarakat secara mandiri, pelayanan sosial yang berkualitas, peningkatan pelayanan keagamaan, pemenuhan infrastruktur dasar; **kebebasan** seperti bebas dari rasa takut, bebas berpendapat, bebas beraktivitas sesuai talenta yang Tuhan berikan, namun kebebasan ini juga diseimbangkan dan menghormati hak-hak orang lain; serta menumbuhakan **kepercayaan diri** yaitu meningkatnya harkat dan martabat serta daya saing seluruh orang Papua.

Untuk itu saya berharap, dokumen RPJMD ini bukan hanya berguna bagi pemerintah Provinsi Papua saja, tetapi menjadi rujukan dan pegangan bagi seluruh stakeholders di Provinsi Papua tanpa terkecuali, untuk bersama-sama mewujudkan visi **KITA** bersama yaitu **Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.** Visi yang kita ingin wujudkan ini, tidak mungkin terwujud jika Pemerintah Provinsi Papua tidak mendapatkan dukungan luas dari seluruh pelaku pembangunan, Pemerintah, Agama, Adat, MRP, DPRP, TNI, POLRI, Mitra Kerja pembangunan daerah, sektor swasta, BUMN, Instansi Vertikal dan seluruh masyarakat Papua.

Saya selaku Gubernur mengajak kepada semua aparatur daerah untuk bekerja menjalankan RPJMD Provinsi Papua secara sungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan hati. Sebaik apapun dokumen RPJMD ini kita susun, tidak akan berarti apapun tanpa implementasi nyata di masyarakat terutama orang asli Papua. Tantangan Papua kedepan begitu besar, kita memerlukan terobosan, kreatifitas dan inovatif dalam melakukan akselerasi pembangunan. Semoga RPJMD ini menjadi rujukan kita untuk bekerja dan berkarya demi terpenuhinya harapan seluruh rakyat Papua.

Sekian dan terima kasih.

Gubernur Papua,

Lukas Enembe, SIP,MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR GRAFIK x

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Hubungan Antar RPJMD Dengan Dokumen Lainnya 7
1.5. Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 12
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 12
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 35
2.3. Aspek Pelayanan Umum 77
2.4. Aspek Daya Saing Daerah 109
2.5. Standar Pelayanan Minimum (SPM) 118
2.6. Mellenium Development Goals (MDGs) 119

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 121
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 121
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 133
3.3. Kerangka Pendanaan 137
3.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 141

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 147
4.1. Permasalahan Pembangunan 148
4.2. Isu Strategis 159

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 164
5.1. Visi 164
5.2. Misi 168
5.3. Tujuan dan Sasaran 172

BAB VI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 191
6.1. Strategi 191
6.2. Arah Kebijakan 201

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 246
7.1. Kebijakan Umum 246
7.2. Program Pembangunan Daerah 259

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 330

BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH 391

BAB X PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 396

BAB XI PENUTUP 398

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nama Kabupaten, Ibu Kota, Jumlah Distrik dan Kampung	13
Tabel 2.2	Luas Laut dan Panjang Garis Pantai di Provinsi Papua	15
Tabel 2.3	Jenis Tutupan Lahan di Provinsi Papua	17
Tabel 2.4	Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Papua	18
Tabel 2.5	Potensi Mineral Logam dan Non Logam	26
Tabel 2.6	Hasil Identifikasi Bahaya Menurut Pembagian Wilayah	31
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk	32
Tabel 2.8	Banyaknya Pemeluk Agama menurut Golongan Agama dan Kabupaten/Kota Tahun 2012	34
Tabel 2.9	Persentase Kontribusi PDRB Sektoral Provinsi Papua Dengan Tambang Tahun 2007-2011	37
Tabel 2.10	Persentase Kontribusi PDRB Sektoral Provinsi Papua Tanpa Tambang Tahun 2007-2011	38
Tabel 2.11	Nilai PDRB Sektoral Provinsi Papua Menurut Harga Berlaku Tahun 2007-2011	39
Tabel 2.12	Nilai PDRB Sektoral Provinsi Papua Menurut Harga Konstan Tahun 2007-2011	39
Tabel 2.13	Laju Inflasi di Provinsi Papua Tahun 2007-2011	41
Tabel 2.14	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di Indonesia dan PapuaTahun 2010-2011	44
Tabel 2.15	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Di Papua Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2006-2011	45
Tabel 2.16	Perbandingan IPM Papua dengan Provinsi Lainnya di Indonesia	46
Tabel 2.17	Kecenderungan Komponen-Komponen IPMTahun 2006 – 2011	47
Tabel 2.18	Perbandingan IPM Kabupaten dan Kota di Provinsi PapuaTahun 2006-2011	48
Tabel 2.19	Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Indeks Pembangunan Gender Terendah di Seluruh Indonesia tahun 2009-2010	55
Tabel 2.20	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua	55
Tabel 2.21	Angka Melek Huruf Tahun 2007 s/d 2011 Menurut Kabupaten/KotaProvinsi Papua	56
Tabel 2.22	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua	59
Tabel 2.23	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2007-2011Kabupaten/Kota di Papua	60

Tabel 2.24	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua	62
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2006-2010	63
Tabel 2.26	Rasio Murid Sekolah dan Guru Di Provinsi Papua Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua Tahun 2007-2010	64
Tabel 2.27	Angka Harapan Hidup (AHH) Papua	68
Tabel 2.28	Kondisi Bayi Lahir di Papua	69
Tabel 2.29	Perkembangan Angka kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua	69
Tabel 2.30	Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua	69
Tabel 2.31	Cakupan Penderita Malaria Di Papua	71
Tabel 2.32	Cakupan Penderita HIV-AIDS Di Papua	71
Tabel 2.33	Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua	72
Tabel 2.34	Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2009 Menurut Kabupaten/Kota	72
Tabel 2.35	Beberapa Pendapat Ilmuwan Antropologi Mengenai Pengelompokan Masyarakat Dan Budaya Asli Papua	75
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Di Papua Tahun 2009-2011	79
Tabel 2.37	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua	79
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Papua Tahun 2011	80
Tabel 2.39	Guru dan Murid Tahun 2011	81
Tabel 2.40	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua	82
Tabel 2.41	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua	82
Tabel 2.42	Tingkat Kelulusan Siswa di Provinsi Papua	83
Tabel 2.43	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010Menurut Kabupaten/KotaProvinsi Papua	83
Tabel 2.44	Perkembangan Jumlah Puskesmas, Pustu, Puskesmas Keliling dan Posyandu Provinsi Papua Tahun 2006 – 2010	85
Tabel 2.45	Perkembangan JumlahTenaga Dokter dan Medis Lainnya di Provinsi Papua	86

Tabel 2.46	Panjang Jalan Di Provinsi Papua Di Rinci Menurut Status Jalan, Kawasan Pembangunan dan Kabupaten/Kota Tahun 2008	89
Tabel 2.47	Bandar Udara Pusat Penyebaran	90
Tabel 2.48	Kondisi Pelabuhan Udara Perintis	91
Tabel 2.49	Kondisi Pelabuhan Laut Utama Di Provinsi Papua	93
Tabel 2.50	Luasan Terumbu Karang di Pesisir	95
Tabel 2.51	Pusat Kegiatan Pengembangan	97
Tabel 2.52	Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	99
Tabel 2.53	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua	100
Tabel 2.54	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua	100
Tabel 2.55	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua	100
Tabel 2.56	Penyandang PMKS Menurut Jenis Dan Kabupaten/Kota Tahun 2011	101
Tabel 2.57	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Pengusahaan Tahun 2007	104
Tabel 2.58	Potensi Perkebunan Rakyat Tahun 2008	104
Tabel 2.59	Luas Hutan Menurut Peta Paduserasi (Ha)	105
Tabel 2.60	Produksi Perikanan (ton)	107
Tabel 2.61	Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2007 s/d 2008 Provinsi Papua	111
Tabel 2.62	Kepadatan Jaringan Listrik PLN Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2010	114
Tabel 2.63	Potensi Sungai di Provinsi Papua Sebagai Pembangkit Tenaga Listrik	114
Tabel 2.64	Rencana dan Realisasi PMDN dan PMAdi Provinsi Papua Tahun 2007-2009	115
Tabel 2.65	Posisi Dana Simpanan dan Posisi Kredit Rupiah dan Valuata Asingdi Provinsi PapuaTahun 2007 – 2009 (Rp trilyun)	117
Tabel 2.66	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Provinsi Papua	117
Tabel 2.67	Rasio Ketergantungan Tahun 2007–2011 Provinsi Papua	118
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 s/d Tahun 2012	123
Tabel 3.2	Derajat Otonomi Fiskal dan Rata-Rata Provinsi	124
Tabel 3.3	Prediksi Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Pemerintah Provinsi Papua (Periode 2013-2018)	125
Tabel 3.4	Realisasi APBD Provinsi Papua Periode Tahun Anggaran 2008-2012	127
Tabel 3.5	Target dan Realisasi APBD Provinsi Papua Periode TA 2008-2012	129

Tabel 3.6	Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Papua Per-Akhir TA 2007-2011	132
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tahun 2010-2012	133
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tahun 2009-2012	134
Tabel 3.9	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Papua Tahun 2008-2011 (%)	134
Tabel 3.10	Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Papua Tahun 2009-2012	135
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Papua	136
Tabel 3.12	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi Papua	137
Tabel 3.13	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Tahun 2008-2012	138
Tabel 3.14	Proyeksi Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018 (dalam miliar rupiah)	138
Tabel 3.15	Ruang Fiskal (Kapasitas riil fiskal) Provinsi Papua Periode 2007 – 2011	139
Tabel 3.16	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	140
Tabel 5.1	Indikator Makro Pembangunan Tahun 2013-2018	172
Tabel 5.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Papua	180
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	260
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	336
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	393

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
Gambar 1.2	Keterhubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	9
Gambar 2.1	Peta Administratif Provinsi Papua	14
Gambar 2.2	Peta Produksi Perikanan Budidaya	26
Gambar 2.3	Peta Persentase Orang Asli Papua dan Non Papua	36
Gambar 2.4	Peta Kemiskinan Tahun 2011	43
Gambar 2.5	Peta IPM Papua tahun 2011	50
Gambar 2.6	Peta Angka Melek Huruf Papua tahun 2011	51
Gambar 2.7	IPM dan AHH Provinsi Papua tahun 2011	52
Gambar 2.8	Peta Pengeluaran Perkapita Tahun 2011	53
Gambar 2.9	Peta Angka Kematian Bayi Provinsi Papua Tahun 2010	67
Gambar 2.10	Peta Jumlah Balita Gizi Buruk Provinsi Papua Tahun 2011	70
Gambar 2.11	Peta Budaya Papua Berdasarkan Penyebaran Bahasa	77
Gambar 2.12	Peta Rumah Tangga	113
Gambar 5.1	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang	164
Gambar 5.2	Visi Papua 2013-2018	165
Gambar 6.1	Strategi dan Jangka Waktu Pencapaiannya	195
Gambar 6.2	Fokus Pembangunan Provinsi Papua 2013-2018	202
Gambar 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua	203

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase Penggunaan Lahan Provinsi Papua	18
Grafik 2.2	Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010	34
Grafik 2.3	PDRB Provinsi Papua 2007-2011	37
Grafik 2.4	PDRB Perkapita dengan Tambang dan Tanpa Tambang (Juta Rupiah) Tahun 2007-2011	40
Grafik 2.5	Perkembangan Prosentase Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 1999-2011	42
Grafik 2.6	Perkembangan Gini Rasio Provinsi Papua Tahun 2005-2011	44
Grafik 2.7	Perbedaan Capaian IPM dan IPG antara Provinsi Papua dan Nasional 2004 – 2010	54
Grafik 2.8	Kampung Tanpa Fasilitas Sekolah (%)	58
Grafik 2.9	Rasio Guru-Sekolah Di Provinsi Papua Tahun 2010	65
Grafik 2.10	Proyeksi Angka Kematian Bayi di Provinsi Papua 2000-2025	66
Grafik 2.11	Rasio Puskesmas Terhadap Penduduk (Per 100.000 Penduduk) Papua dan Indonesia 2007-2011	85
Grafik 2.12	Jumlah Rumah Sakit (Umum+Khusus) Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2011	86
Grafik 2.13	Jumlah Dokter, Bidan dan Perawat Di Papua Tahun 2007-2011	87
Grafik 2.14	Jumlah Bidan dan Perawat Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2011	87
Grafik 2.15	Distribusi Panjang Jalan Menurut Statusnya Tahun 2009 (dalam%)	88
Grafik 2.16	Kondisi Jalan Di Provinsi Papua Tahun 2009 (dalam %)	89
Grafik 2.17	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009	94
Grafik 2.18	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010	96
Grafik 2.19	Perkembangan Produktifitas Lahan Tanaman Pangan Di Provinsi Papua	103
Grafik 3.1	Komposisi dan Trend Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2008 s/d 2012	121
Grafik 3.2	Proyeksi PAD, Total Pendapatan dan DOFD Provinsi Papua Tahun 2013 s/d 2018	125
Grafik 3.3	Rasio Efektivitas Komponen Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2007-2011	128

BAB I

PENDAHULUAN













BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD memuat visi, misi, dan program pembangunan dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas selama lima tahun. Selanjutnya, RPJMD ini harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) .

1.1. Latar Belakang

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program rioritas gubernur dan wakil gubernur terpilih. Provinsi Papua telah berhasil melaksanakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis dan telah dilantik dan diambil sumpahnya pada 9 April 2013. Untuk itu, sesuai amanat undang-undang maka harus disusun RPJMD Provinsi Papua periode 2013-2018.
2. Provinsi Papua pada awalnya adalah Provinsi Irian Jaya yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Hingga tahun 2013, Provinsi Papua telah 50 tahun lebih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian berbagai persoalan multidimensional masih terjadi sehingga menimbulkan berbagai ketidak puasan dari kalangan masyarakat asli Papua dan bahkan mengarah pada munculnya potensi disintegrasi bangsa. Isu ketertinggalan diberbagai bidang pembangunan di Provinsi Papua selalu menjadi agenda priroritas pembangunan disetiap periode pemerintahan, tetapi belum kunjung memberikan dampak yang nyata pada kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP).

3. Untuk itu, pemerintah mengajukan skema khusus pendekatan pembangunan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang ini memberikan pengakuan dan kewenangan khusus bagi Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua dalam pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan adat istiadat dan potensi yang dimiliki sehingga penyelesaian permasalahan pembangunan dapat ditanggulangi secara lebih kontekstual untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hingga tahun 2013, pemerintahan era otonomi khusus telah berjalan 11 tahun sejak efektif pelaksanaannyapada tahun 2002, telah banyak memberikan warna dan perubahan diberbagai sendi kehidupan masyarakat, meskipun belum dapat menyentuh permasalahan pembangunan secara substantif untuk mengurangi ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan antar daerah. Untuk itu, diperlukan satu kajian mendalam untuk perbaikan pelaksanaan otonomi khusus di Papua sehingga dapat lebih fokus pada upaya pengurangan ketimpangan (in-equity) pembangunan dengan memperkokoh aspek kemandirian orang asli Papua dalam kapasitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
4. Untuk itu, pasangan gubernur dan wakil gubernur Papua, Bapak Lukas Enembe dan Bapak Klemen Tinal, mengajak semua komponen masyarakat di Provinsi Papua untuk bersatu membangun masa depan Papuadengan ***mengisi lembaran baru di babak baru menuju peradaban baru***.
5. Untuk memulai langkah besar tersebut harus dirumuskan strategi pembangunan yang tepat, desain kebijakan yang lebih menyentuh dan terukur yang didukung pelaksanaan kewenangan penuh, skema anggaran yang terbagi secara adil dan merata,serta pengawasan yang terkendali yang dibingkai dalam satu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. RPJMD 2013-2018akan menjadi landasan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan di Provinsi Papua selama lima tahun kedepan, sebagai arah dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua untuk bersama mewujudkan ***Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.***

Penyusunan RPJMD Propinsi Papua 2013–2018 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan Penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusunyang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program SKPD dan lintas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

3) Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Propinsi Papua. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Provinsi Papua menjadi rancangan akhir RPJMD Provinsi Papua.

5) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD, yaitu Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Propinsi Papua 2013–2018 dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Papua 2013-2018.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu, landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Papua:

1.2.1. Undang-Undang

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk undang-undang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
9. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

1.2.2. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); dan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

1.2.3 Peraturan Daerah Khusus

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk peraturan daerah khusus, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua;
2. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penataan Permukiman
4. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 14 tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 16 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua;
7. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan;
8. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 tahun 2008 tentang Hak kekayaan Intelektual Orang Asli Papua;
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua;
10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua;
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Papua; dan
12. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. RPJMD ini sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bermitra masyarakat, secara berjenjang.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018 adalah:

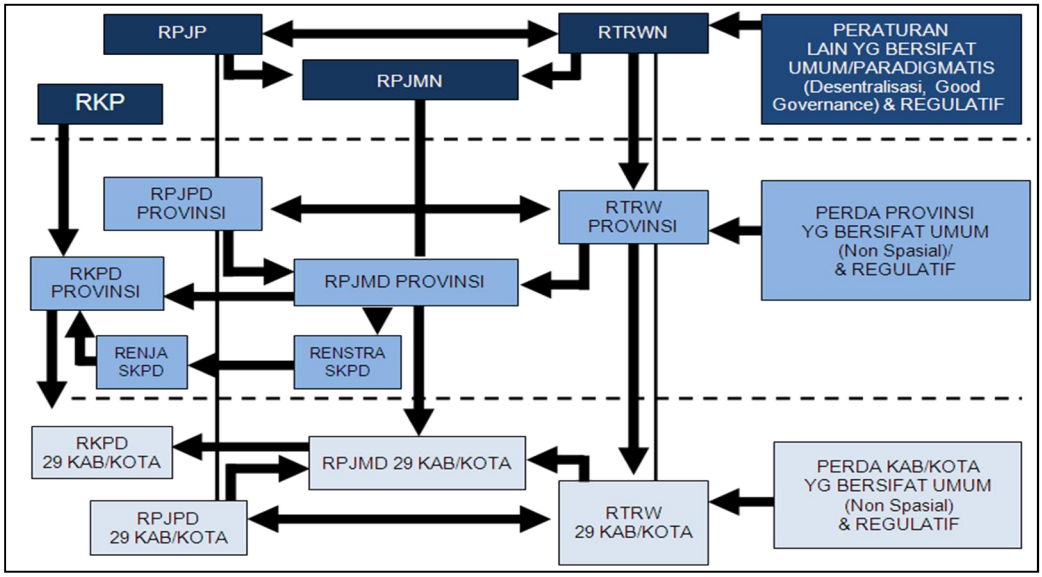
1. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih.
2. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi.

1.4. Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional. Oleh karena itu, sistem perencanaan pembangunan daerah harus saling bersinergi mulai dari tingkat nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota.Masing-masing tingkatan perencanaan memiliki tujuan dan sasran yang spesifik, tetapi juga memiliki tujuan dan sasaran agregatif dari sistem perencanaan yang ada dibawahnya.

Hirarki penyusunannya RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua 2005-2025. Adapun keterkaitan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



a. RPJMD Provinsi Papua merupakan satu kesatuan dalam sIstem perencanaan nasional dengan mengacu kepada RPJP Daerah Provinsi Papua 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua;
b. RPJMD Provinsi Papua menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD untuk jangka lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya;
c. RPJMD Provinsi Papua menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

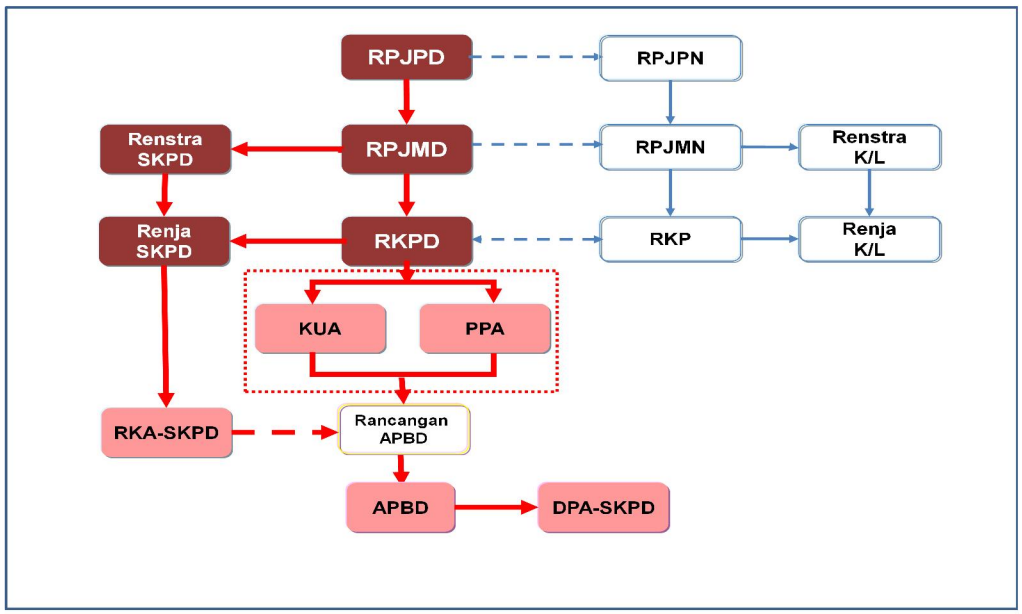
Selain dalam keterkaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain, dokumen RPJMD juga terkait dengan dokumen anggaran. Hubungan antardokumen perencanaan dan kesinambungannya dengan fungsi penganggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan RPJP, RPJM dan RKP. RPJP Provinsi Papua merupakan hasil integral dari perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap dinamika lingkungan, baik skala internasional, nasional, maupun regional.

Secara hirarki, RPJP Provinsi Papua disusun berdasarkan analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis serta mengacu pada RPJP Nasional. Adapun RPJM Provinsi Papua merupakan penjelmaan dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Provinsi Papua dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Provinsi Papua juga menjelaskan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, dan program kewilayahan dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Keterhubungan antardokumen perencanaan pembangunan dan kesinambungannya dengan fungsi penganggaran dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 1.2 Keterhubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran



Dari gambar di atas dapat disimpulkan;

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannnya.

Demi mengefektifkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui alokasi dana APBD, perbaikan sistem perencanaan pembangunan secara integral tidak dapat ditunda lagi demi memberikan hasil berupa perbaikan hasil-hasil pembangunan yang lebih bermafaat bagi masyarakat Provinsi Papua.
Penyusunan RPJMD Provinsi Papua antara lain didasarkan pada kajian aspek tata ruang yang ada. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan aspek penataan ruang merupakan suatu keharusan untuk memastikan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB - I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Hubungan Antar RPJMD Dengan Dokumen Lainnya
1.5. Sistematika Penulisan

BAB - II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB - III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3. Kerangka Pendanaan

BAB - IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan
4.2. Isu Strategis

BAB - V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi
5.2. Misi
5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB - VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Arah Kebijakan
6.2 Strategi

BAB - VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan Umum
7.2 Program Pembangunan Daerah

BAB - VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

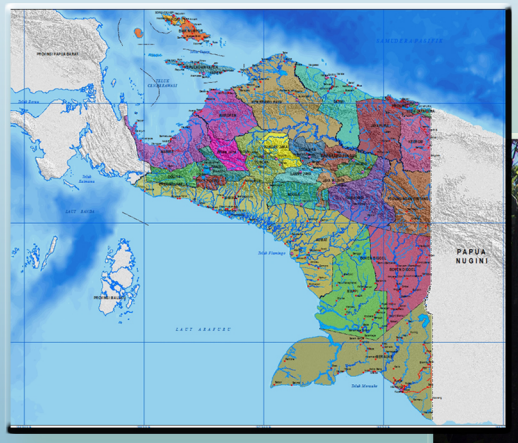
BAB - IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

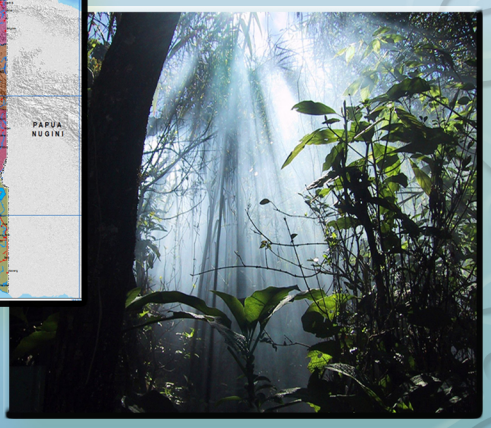
BAB - X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB – XI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH













BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran Umum kondisi Provinsi Papua memberikan informasi tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Provinsi Papua secara umum saat ini. Gambaran umum menjadi pijakan penyusunan rencana pembangunan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah. Hal-hal lain yang dianggap perlu dapat ditambahkan pada subbab aspek geografi dan demografi.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Provinsi Papua perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah

Bab ini menggambarkan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari, kondisi/kawasan, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

Letak dan Kondisi Geografis

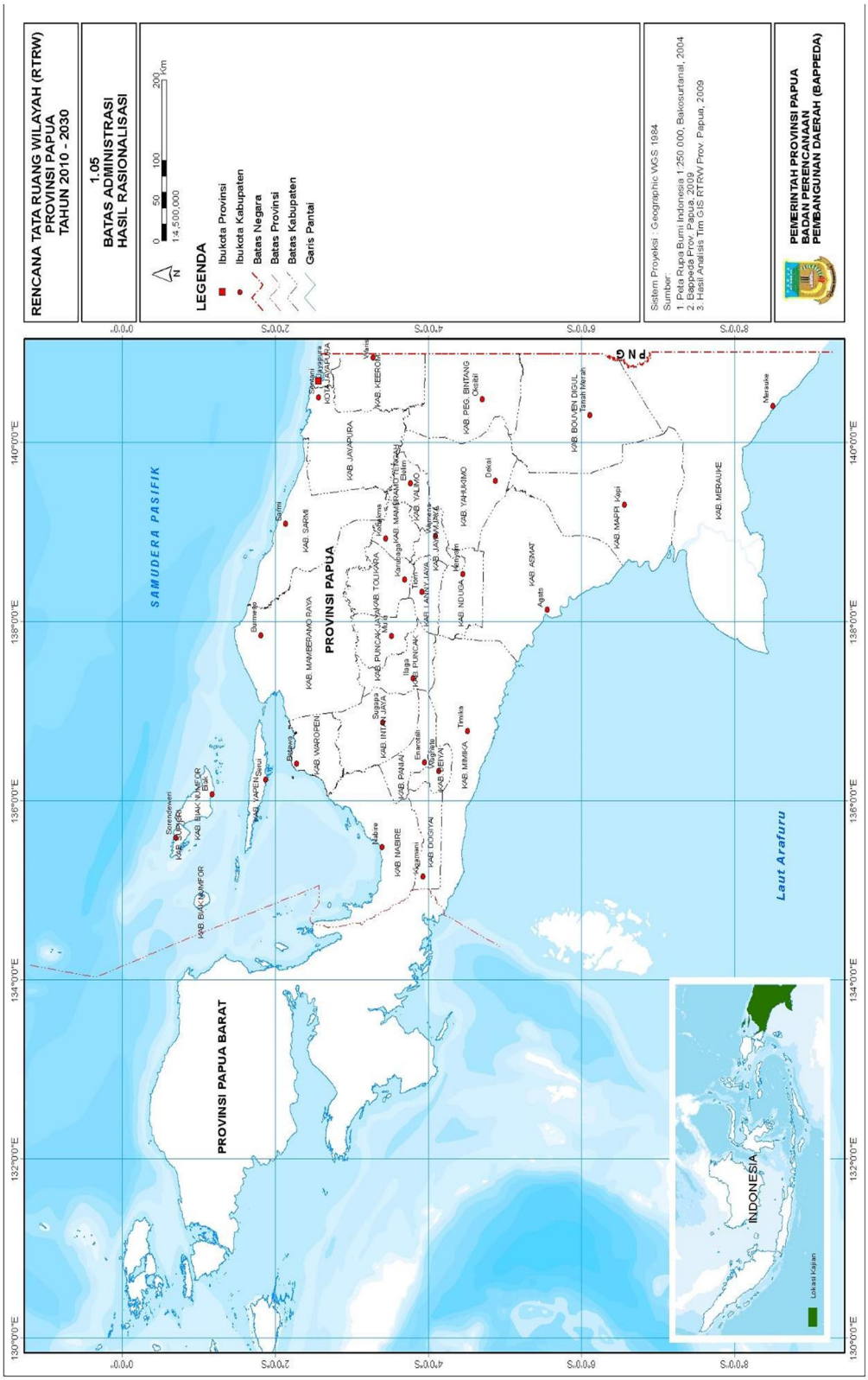
Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat $1^0$00’ LU - $9^0$30’ LS dan 134^0 BT - $141^0$01’ BT. Dengan luas 322.476km^2, Papua merupakan Provinsi terluas di Indonesia. Provinsi ini secara administratif berbatasan dengan :

Sebelah Utara	:	Samudra Pasifik
Sebelah Selatan	:	Laut Arafuru
Sebelah Barat	:	Papua Barat
Sebelah Timur	:	Papua Nugini

Provinsi Papua hingga tahun 2012, terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota dengan perkembangan jumlah distrik 389 dan 3.619 kampung. Dari kabupaten ini dibagi dalam kelompok geografis sebagai berikut :

Tabel 2.1 Nama Kabupaten, Ibu Kota, Jumlah Distrik dan Kampung

NAMA KABUPATEN	IBU KOTA	DISTRIK	KAMPUNG
DATARAN MUDAH AKSES		**113**	**915**
Kab. Biak Numfor	Biak	19	187
Kab. Jayapura	Sentani	19	144
Kab. Keerom	Arso	7	61
Kab. Merauke	Merauke	20	168
Kab. Nabire	Nabira	14	81
Kab. Sarmi	Sarmi	10	86
Kab. Yapen Waropen	Serui	14	111
Kota Jayapura	Jayapura	5	39
Kab. Supiori	Sorendiweri	5	38
DATARAN SULIT AKSES		**75**	**713**
Kab. Asmat	Agats	10	175
Kab. Boven Digoel	Tanah Merah	20	112
Kab. Mamberamo Raya	Burmeso	8	58
Kab. Mamberamo Tengah	Kobakma	5	59
Kab. Mappi	Keppi	10	137
Kab. Mimika	Timika	12	85
Kab. Waropen	Waren	10	87
PEGUNUNGAN TENGAH		**201**	**1991**
Kab. Deiyai	Tigi	5	30
Kab. Dogiyai	Kigamani	10	79
Kab. Intan Jaya	Sugapa	6	37
Kab. Jayawijaya	Wamena	11	117
Kab. Lanny Jaya	Tion	10	143
Kab. Nduga	Kenyam	8	32
Kab. Paniai	Enarotali	10	70
Kab. Pegunungan Bintang	Oksibil	34	277
Kab. Puncak	Ilaga	8	80
Kab. Puncak Jaya	Mulia	8	67
Kab. Tolikara	Karubaga	35	514
Kab. Yahukimo	Dekai	51	518
Kab. Yalimo	Elelim	5	27
JUMLAH		**389**	**3619**



Gambar 2.1 Peta Administratif Provinsi Papua

Selain berupa daratan, Provinsi Papua juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan yaitu Laut Arafuru dan Samudera Pasifik. Keadaan ini membuat Papua sangat kaya akan potensi di bidang perikanan laut tangkap. Kabupaten Mimika dan Mamberamo Raya merupakan dua kabupaten yang memiliki luas wilayah laut terluas yaitu masing-masing 2.832,30 km^2 dan 1.650 km^2. Pengembangan ekonomi berdasarkan potensi ikan tangkap sangat potensial.

Tabel 2.2 Luas Laut dan Panjang Garis Pantai di Provinsi Papua

KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	LUAS WILLAYAH LAUT	SATUAN	PANJANG GARIS PANTAI
Supiori	Km^2	35,83	Km	281
Biak Numfor	Km^2	47,85	Km	548,9
Yapen	Km^2	40,03	Km	897,72
Waropen	Km^2	666,69	Km	225,59
Sarmi	Km^2	31,85	Km	306, 10
Nabire	Km^2	234,97	Km	560,18
Mamberamo Raya	Km^2	1650,37	Km	291,55
Jayapura	Km^2	1,35	Km	134,5
Kota Jayapura	Km^2	2,81	Km	116,77
Mimika	Km^2	2832,3	Km	444,44
Mappi	Km^2	582,14	Km	161,5
Asmat	Km^2	2845,91	Km	287,71
Merauke	Km^2	3179,51	Km	775,16

Sumber : BPS, Provinsi Kabupaten dan Kota tahun 2008, Bakorsutanl, dan hasil pengukuran GIS skala 1:250.000 tahun 2009 dari citra landsat 2000.

Selain karena letaknya yang berbatasan dengan laut, Provinsi Papua juga merupakan kawasan strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea dan Australia di mana sebagian pulau yang berbatasan dengan kedua negara tersebut ada yang berpenduduk dan ada yang tidak berpenduduk.

Topografi

Wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir dan pegunungan yang berada pada ketinggian diantara 0 – 3.000 meter dari permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak Jaya dengan ketinggian 2.980 mdpl sedangkan yang paling rendah adalah Kota Jayapura dengan ketinggian rata-rata 4 mdpl. Berdasarkan ketinggian wilayah, rata-rata suhu udara di Papua berkisar antara 19,8^o hingga 28,4^o.

Klimatologi

Iklim Papua termasuk dalam iklim hutan hujan tropis (*tropical rain forest*), yang dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan dan angin muson menyebabkan Papua kaya akan flora dan

faunan khas hutan hujan tropis. Secara umum musim kemarau di Papua terjadi di bulan Juni–September, dan musim hujan di bulan Desember – Maret, dengan masa peralihan pada bulan April–Mei dan bulan Oktober – November. Terdapat 32,4% tanah di wilayah Papua berada di kelas kemiringan di atas 40 derajat dan rawa-rawa yang luas terutama disepanjang pesisir pantai selatan Papua yang terbentang hingga ke hulu sungai-sungai di pedalaman.

Geologi

Provinsi Papua merupakan tepi dari *The Australian Continent* dan merupakan pertemuan dua lempeng bumi yang menyebabkan adanya tiga deretan pegunungan yaitu (1) di lingkar luar terdapat Pegunungan Utara, (2) di lingkar dalam terdapat deretan Pegunungan Selatan, dan (3) deretan Pegunungan Tengah. Kondisi ini menjadikan Papua rawan gempa dan masuk dalam cicin api gempa (*ring of the fire*), tetapi juga kaya akan mineral seperti emas, perak, dan tembaga.

Hidrologi

Provinsi Papua memiliki 64 DAS (Daerah Aliran Sungai) dengan total panjang sungai adalah 35,924.737 dan total luas daerah tangkapan adalah 572,753.823 KM^2. Keberadaan DAS ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan sumber daya air yang berlimpah. Sungai-sungai besar yang terbentang dan danau yang tersebar di Papua dapat menjadi sumber energi listrik yang terbaharukan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi produkif, pendapatan asli daerah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dibutuhkan terobosan khusus untuk melakukan terobosan dan lompatan pembangunan melalui investasi besar penyediaan listrik yang terbaharukan.

Tutupan Lahan

Provinsi Papua memiliki kawasan hutan yang luas dengan tutupan lahan yang relatif masih utuh. Dari data luas tutupan lahan tampak bahwa hutan lahan kering primer dan hutan rawa primer merupakan daerah yang terluas yaitu masing-masing sekitar 15 juta ha (49%) dan 4,5 juta ha (14,5%); kemudian hutan lahan kering sekunder seluas 3,2 juta ha (10,5%) dan savana seluas 1,4 juta ha (4,5%). Selebihnya terbagi dalam klasifikasi pertanian, permukiman, tanah terbuka, dan rawa.

Berdasarkan fungsinya, hutan lindung dan hutan produksi memiliki luasan yang hampir sama masing-masing sekitar 8,3 juta Ha dan 8,2 juta Ha. Sedangkan untuk jenis penggunaan hutan produksi konversi dan KSA/KPA mencapai luasan 6,4 juta Ha dan 5,6 juta Ha. Sisanya

adalah untuk jenis fungsi hutan produksi terbatas (1,8 juta Ha), APL seluas 0,8 juta Ha, dan Perairan sekitar 0,5 juta Ha.

Tabel 2.3 Jenis Tutupan Lahan di Provinsi Papua

NO	JENIS TUTUPAN LAHAN	JUMLAH	JUMLAH (%)
1	Hutan Primer	4,542,154.66	45.823
2	Hutan Sekunder	4,383,019.79	13.811
3	Hutan Mangrove Primer	742,610.75	2.340
4	Hutan Mangrove Sekunder	96,531.22	0.304
5	Hutan Rawa Primer	4,354,628.24	13.722
6	Hutan Rawa Sekunder	1,171,162.93	3.690
7	Hutan Tanaman Industri	1,798.96	0.006
8	Tudak Teridentifikasi	8,645.24	0.027
9	Perkebunan	68,595.77	0.216
10	Permukiman	38,139.60	0.120
11	Tambang	1,765.92	0.006
12	Pertanian Lahan Kering + Semak	873,569.88	2.753
13	Pertanian Lahan Kering	74,027.74	0.233
14	Rawa	645,046.07	2.033
15	Savana	719,222.39	2.266
16	Sawah	12,961.80	0.041
17	Semak Belukar	886,999.71	2.795
18	Semak Belukar Rawa	1,972,028.60	6.214
19	Tambak	523.85	0.002
20	Tanah Terbuka	445,829.49	1.405
21	Transmigrasi	67,130.52	0.212
22	Tubuh Air	628,251.12	1.980
23	Tudak Teridentifikasi	8,645.24	0.027
	Jumlah	31,735,453.79	100

Sumber : RTRW 2012, Pemerintah Provinsi Papua

Berdasarkan fungsinya, hutan lindung dan hutan produksi memiliki luasan masing-masing sekitar 7,83 juta Ha dan 4,7 juta Ha. Sedangkan untuk jenis penggunaan hutan produksi konversi dan KSA/KPA mencapai luasan 4,1 juta Ha dan 6,7 juta Ha. Sisanya adalah untuk jenis fungsi hutan produksi terbatas (5,9 juta Ha), APL seluas 1,7 juta Ha, dan Perairan sekitar 1,015 juta Ha.

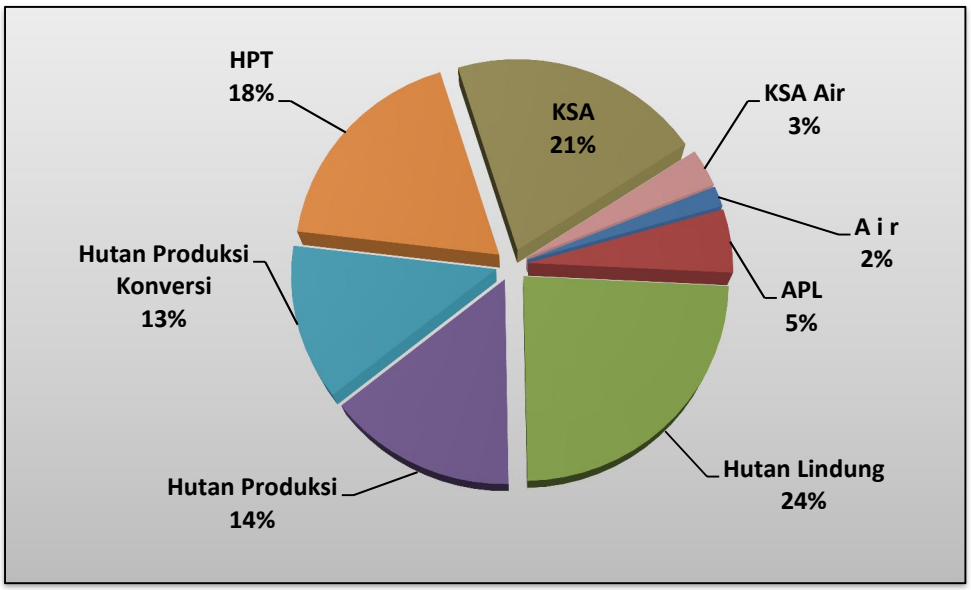
Tabel 2.4 Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Papua

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan
1	A i r	551.789,45
2	APL	1.707.014,50
3	Hutan Lindung	7.838.861,32
4	Hutan Produksi	4.767.346,35
5	Hutan Produksi Konversi	4.136.177,07
6	HPT	5.982.030,10
7	KSA	6.755.034,81
8	KSA Air	1.019.016,51
	JUMLAH	**32.757.270,10**

Sumber : RTRW 2012, Pemerintah Provinsi Papua

Jika dilihat dari persentasenya, penggunaan lahan di Provinsi Papua dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.1 Persentase Penggunaan Lahan Provinsi Papua



Dengan kondisi hutan di Papua berkomitmen untuk menjaga 90% luas hutan menempatkan Provinsi Papua sebagai paru-paru dunia dan penjaga iklim regional. Tetapi hingga kini masyarakat Papua belum mendapatkan nilai tambah dari kesediaan menjaga hutan dan ekosistem lainnya untuk kepentingan bersama, melalui skema kompensasi yang telah banyak didengungkan masyarakat internasional berkaitan dengan upaya penurunan gas emisi akibat perusakan hutan dan lahan (REDD) yang berakibat pada ancaman pemanasan global (global warming).

Tipologi Ekoregional

Tipologi ekoregional terbentuk berdasarkan gabungan karakteristik ekologi, sosial, budaya dan ekonomi. Berdasarkan keragaman kondisi Papua yang telah dijelaskan di atas, karakteristik Papua dapat dikelompokan dalam empat tipe ekoregion.

a. Dataran Rendah Utara

Zona dataran rendah di Provinsi Papua terhampar meluas dari sepanjang pantai hingga ke wilayah tepi jajaran pegunungan. Zona dataran rendah di Utara membentang dari Barat-Timur Provinsi Papua mulai dari Kabupaten Nabire hingga ke Kabupaten Keerom. Wilayah Kabupaten Mamberamo memiliki zona dataran rendah yang luas, namun pada wilayah Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura zona dataran rendah relatif sempit. Sedangkan kelerangan di dataran rendah bagian Utara Provinsi Papua relatif landai dengan kelas lereng 0-7%.

Persebaran penduduk pada wilayah dataran Utara hampir merata antara daerah pantai dan dataran rendah dan perbukitan.Berkebun dan meramu sagu merupakan kegiatan utama masyarakat yang tinggal di wilayah ini.Ikan dan hasil binatang buruan menjadi sumber pangan tambahan.Mereka senang mengembara dalam kelompok kecil.

Berdasarkan pendekatan proses-proses hidrologi yang dibentuk oleh proses geologi dan topografi didalam sebuah lanskap, wilayah dataran rendah di bagian Utara Papua memiliki tipe management unit *Tidal Lowlands*. Pada wilayah ini proses hidrologi yang dominan berpengaruh adalah pasang surut air laut dan efek yang dimilikinya dalam mengubah pola drainase dan sedimentasi – pada saat air pasang, aliran drainase yang harusnya mengalir turun akan tergenang karena efek dari air pasang ini. Sehingga wilayah ini cenderung membentuk habitat wetlands dan juga rawa gambut (sebanyak 95% lahan gambut di Papua berada di wilayah ini). Akibat dari pola pasang surut harian (dan juga bulanan) serta efeknya yang menyebabkan pola aliran drainase terhambat, maka proses hidrologi di wilayah ini bergerak ke samping menyebrang blok dan dibatasi oleh sungai-sungai. Pembangunan di wilayah ini biasanya melibatkan drainase yang dapat mempengaruhi wilayah yang lebih besar dari areal pembangunan. Untuk itu jika di wilayah ini terdapat rencana pembangunan lahan pertanian, maka lokasinya harus dipisahkan dari lokasi wilayah konservasi agar dapat efisien. Begitu juga jika akan dibangun wilayah konservasi , maka pembangunannya harus dipisahkan dari wilayah pertanian, mengingat karakteristik dari lanskap tersebut. Sehingga tidak terjadi *conflict management unit*.

Penutupan lahan di wilayah ini didominasi oleh hutan lahan kering, hutan rawa primer dan sekunder, dengan sedikit hutan mangrove primer, pertanian lahan kering bercampur semak dan savannah. Hutan dataran rendah ini mengandung sangat banyak jenis spesies

dan merupakan habitat terkaya per kilometer persegi jika dibandingklan dengan habitat hutan lainnya. Struktur kanopi hutan ini kompleks, dengan tajuk pohon yang menonjol dan tidak rata. Pohon pada hutan bukit dapat bertumbuh sampai dengan 50m lebih, didominasi oleh pohon *Pometia, Ficus, Intsia, Terminalia, Garcinia, Myristica, Maniltoa*. Di bawah kanopi semak, tumbuhan perambat dan pemanjat (liana), palem, rotan, pandan, paku-pakuan, jahe-jahean dan epifit yang banyak beragam jenisnya bertumbuh menciptakan strutur vertikalnya yang komplek. *Palmae* (termasuk rotan) adalah salah satu komponen yang sangat penting fungsinya dalam hutan daratan rendah dan paling kaya akan jenis. Sedangkan ciri savana adalah padang rumput yang luas dengan pepohonan yang agak jarang. Di Papua hanya dapat ditemukan di bagian tenggara disekitar Merauke (Trans-Fly). Habitat ini mengalami iklim dengan kemarau panjang dan kemudian hujan lebat dan banjir. Karena iklim yang ekstrim ini, maka hanya beberapa jenis pepohonan dapat bertumbuh.Pohon-pohon savana didominasi oleh *Melaleuca* spp. *Acacia s*pp. dan *Eucalyptus* spp. Walaupun demikian, di wilayah dimana tanah tidak mengalami banjir karena ketinggian beberapa meter atas permukaan air, saat musim hujan bertumbuh hutan monsoon. Hutan lebat ini hampir sama strukturnya dengan Hutan dataran rendah.

Sedangkan hasil analisis terhadap keterwakilan ekosistem dibawah ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayahnya memiliki tingkat keterwakilan ekosistem sekitar 41%-50% dan sebagian kecil lainnya sekitar 51%-60%, hal ini berarti bahwa nilai keterwakilan ekosistem berada pada range menengah, namun untuk mempertahankan ekosistem di wilayah ini maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan me-realokasi sejumlah kawasan (setidaknya) ke dalam hutan produksi terbatas. Jasa-jasa ekosistem pada wilayah ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah. Sedangkan karakteristik bencana pada wilayah ini dapat dilihat pada tabel 2 dibawah.

b. Pegunungan Tengah

Topografi pada wilayah ini didominasi oleh perbukitan dan pegunungan memanjang sekitar 650 kilometer berarah timur-barat yang ditempati oleh hutan hujan tropis dengan beberapa puncak gunung ditutupi oleh salju abadi di bagian tengah. Pada bagian tengah rangkaian pegunungan tinggi terdapat Pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena terdapat 3 puncak tertinggi yang walaupun terdapat pada garis khatulistiwa namun selalu diselimuti oleh salju abadi di Puncak Jayawijaya dengan ketinggian 5,030 m, Puncak Trikora 5,160 m dan Puncak Yamin 5,100 m.

Kelompok masyarakat yang mendiami wilayah ini terdiri dari beberapa suku bangsa dengan pola pemukiman tetap secara berkelompok di lembah-lembah Pegunungan Mooke dan Sudirman. Komunitas hidup dalam rumah-rumah besar dengan ikatan horisontal yang

kuat. Penghidupan utama komunitas di wilayah ini adalah berternak babi dan pembudidayaan Ubi jalar dan pisang. Selain berburu dan memetik hasil dari hutan sebagai sumber pangan tambahan.

Berdasarkan pendekatan proses-proses hidrologi yang dibentuk oleh proses geologi dan topografi didalam sebuah lanskap, wilayah dataran rendah di bagian Utara Papua memiliki tipe management unit *Uplands Watersheds* atau DAS Dataran Tinggi. Pada wilayah ini proses hidrologi sangat dipengaruhi oleh sistem Daerah Aliran Sungai, yang terdiri dari sistem hulu dan hilir. Sehingga berbagai bentuk pengelolaan untuk unit ini akan berpengaruh dari hulu hingga hilir, namun tidak berpengaruh pada unit disebelahnya. Sebagai contoh jika terdapat kenaikan erosi atau sedimentasi di sebuah sistem DAS, maka hal ini akan mempengaruhi wilayah hilirnya, namun tidak akan mempengaruhi wilayah DAS di sebelahnya. Selain itu juga dimungkinkan untuk melakukan konversi atau alih fungsi lahan pada wilayah di sebelah DAS (wilayah konservasi) namun alih fungsi tersebut harus tetap mempertahankan alur hidrologi dan mengontrol erosi.

Sedangkan penutupan lahan di wilayah ini didominasi oleh hutan lahan kering primer dan sekunder, savannah, serta hutan rawa primer. Habitat zona pegunungan atas berbeda sekali dengan hutan di bawahnya.Di atas 3.000m d.p.l pepohon Cemara diselimuti keseluruhan dengan lumut. Habitat lain yang dominan adalah tipe yang terbuka – seperti savana, lahan gambut dan padang rumput dengan berbagai jenis Paku pohon (*Chyathea* spp). Semak dan perdu seperti *Rhododendron dan Vaccinium* menyusul 'batas garis pohon' sebagai 'hutan sub-alpin'. Di atasnya lagi (4.000m d.p.l.) terdapat zona alpin dimana hanya sedikit jenis herba-herba, rumput dan lumut dapat bertumbuh dalam bentuk padang rumput dan tundra.

Sedangkan hasil analisis keterwakilan ekosistem pada wilayah ini menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan ekosistem berada diatas 70% yang artinya sangat baik. Jasa-jasa ekosistem pada wilayah ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah. Sedangkan karakteristik bencana pada wilayah ini dapat dilihat pada tabel 2 dibawah.

c. Dataran Rendah Selatan

Dataran rendah di bagian Selatan Papua secara umum dibagi menjadi dua sistem yaitu:

- ***Lahan Rawa Pasang Surut Dataran Rendah*;** Bagian Wilayah Selatan Papua merupakan wilayah pantai yang menuju kearah laut sebagai akibat dari akumulasi dari endapan tubuh air sejak jaman es terakhir, yang juga merupakan hasil dari endapan alluvial dan materi-materi laut serta pertumbuhan wilayah delta selama beberapa waktu sejak jaman es terakhir (sekitar 18.000 tahun yang lalu). Lahan rawa pasang surut yang berada di wilayah Kabupaten Mimika, Asmat dan sebagian di Mappi dan Merauke yang

telah dibentuk oleh proses-proses tersebut memiliki batuan geologi muda dan terdiri atas wilayah lahan gambut yang kompleks, rawa-rawa air tawar dan air asin, serta mangrove. Sungai-sungainya merupakan sungai pasang surut yang sistem hidrologinya dipengaruhi oleh pasang surut air laut hampir sepanjang tahun. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawa-rawa dataran rendah seperti suku adat Kamoro dan Asmat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya umumnya dengan berburu dan mengumpulkan sumber makanan seperti sagu, serta memancing di wilayah yang cukup luas di daerah ini. Perencanaan ruang dalam konteks/skala lanskap perlu didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan yang jelas mengenai pola pemanfaatan sumber daya alam, yang masih terfragmentasi.

- ***Lahan Kering Dataran Rendah*;** dataran rendah dari Plateu Oriomo dan layangan batuan Digul di Kabupaten Mappi, Merauke dan Boven Digoel membentuk bagian unik dari *Trans-Fly Eco-Region* yang membentang ke arah Papua New Guinea. Sistem lahan ini terdiri dari permukaan datar dan bergelombang, diukir dengan lembah-lembah sungai yang berdasar rata dan sungai kecil yang berawa-rawa. Lahan-lahan kering ini merupakan bentang alam yang terkikis sejak lama secara geologis dengan tanah yang kering, dan alluvium baru yang hanya terdapat di pertemuan lembah sungai dan rawa-rawa. Kesuburan yang rendah dan erosi merupakan ciri dari bentang alam ini. Banjir yang dalam biasa terjadi di lembah-lembah sungai yang rendah dan rawa-rawa. Genangan dangkal dari curah hujan terjadi pada sisa-sisa dataran tinggi tua yang datar dengan sistem drainase yang buruk.

  Sedangkan pengelolaan ruang untuk *lahan kering dataran rendah* perlu memperhatikan kesesuaian lahan untuk pertanian di daerah lempeng yang tererosi. Lahan yang cocok untuk pertanian kebanyakan terletak di bagian selatan dataran ini, namun adanya iklim muson dan panjangnya musim kemarau menjadi hambatan bagi daerah ini untuk bercocok tanam. Di bagian Utara, kombinasi antara tingginya curah hujan, kelerengan dan tekstur tanah yang ringan menyebabkan wilayah ini rawan erosi dan tidak sesuai untuk lahan pertanian. Lebih lanjut kesesuaian untuk pembangunan di wilayah rawa-rawa lebak dan lembah sungai serta sungai-sungai kecil akan sangat bergantung pada fenomena banjir, teknologi, pertimbangan lingkungan dan dampak hidrologi pada bagian muara. Faktor-faktor penting dalam pengelolaan pola ruang (spasial) di lahan dataran tinggi adalah dengan mengenali hal-hal berikut: ketidakpastian dan kesesuaian lahan pertanian yang terbatas, nilai-nilai konservasi dan tradisi serta hak-hak masyarakat adat.

d. Kepulauan & Pesisir

Zona pesisir di Papua terdiri atas pulau-pulau seperti Biak dan Yapen dibagian Utara, Kimaam di bagian Selatan serta wilayah pesisir di daerah pulau utama. Ekosistem di zona pesisir terdiri dari wilayah mangrove yang sangat luas -- khususnya di bagian Utara, terumbu karang dan hamparan rumput laut – khususnya di bagian selatan, serta vegetasi pesisir lainnya seperti semak belukar, hutan cemara dan pohon kelapa. Informasi mengenai distribusi terumbu karang dan rumput laut serta kondisi keduanya sangat terbatas, padahal ekosistem tersebut terancam keberadaannya oleh pembangunan berskala besar dan perubahan iklim. Saat ini masyarakat di wilayah pesisir selain menjadi nelayan, mereka juga mempraktikkan budidaya pertanian untuk kelangsungan hidupnya dengan berladang keladi/talas dan ubi jalar dan dikombinasikan dengan mencari sagu dan berburu.

Zona pesisir Papua sangat bervariasi dan dapat dibagi kedalam ekosistem perairan air laut dan ekosistem perairan yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut laut. Zona Pesisir Papua merupakan zona pesisir terluas di Indonesia dengan panjang garis pantai mencapai lebih dari 3,800 Km yang termasuk didalamnya vegetasi pesisir dan pantai sepanjang Provinsi Papua dan Papua Barat. Wilayahnya memiliki topografi yang relatif datar dan tidak didominasi oleh rawa pasang surut, didalamnya juga terdapat pantai-pantai berpasir yang luas dengan campuran vegetasi pesisir, dari mulai gigir pantai hingga daratan hutan tinggi. Pola yang kompleks dari gigir dan cekungan dapat ditemui di sepanjang garis pantai dengan komunitas vegetasi yang khas; juga terdapat hutan pada gigir yang lebih tinggi dan vegetasi rawa (termasuk rawa-rawa sagu) pada cekungan perairan diantara gigir-gigir (dimana air laut/asin menyusup kedalam wilayah mangrove). Habitat-habitat ini umumnya berpopulasi padat dan memiliki persentasi luas lahan pertanian yang lebih tinggi dibandingkan dengan lanskap lainnya di Papua.

Papua memiliki wilayah mangrove terluas di Indonesia dan terkaya di dunia karena lokasinya terletak diantara pusat keanekaragaman hayati Indo-Melasian dan Australia. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama didalam zona pesisir, di Papua zona ini didominasi oleh hamparan hutan mangrove yang luas yang terletak disepanjang pantai utara dari delta Barat Mamberamo hingga pantai Waropen, dan sepanjang pantai Selatan dari Mimika hingga sungai Digul dan pinggiran Pulau Kimaan. Keberadaan mangrove penting untuk sektor perikanan di Papua dan menyediakan lahan untuk bersarang bagi spesies muara yang penting seperti ikan, kepiting udang yang dapat dimanfaatkan untuk perikehidupan dan ekonomi masyarakat lokal.

Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2010-2030 maka potensi pengembangan wilayah dalam jangka panjang adalah sebagai berikut :

Potensi Pertanian dan Perkebunan

Potensi pengembangan lahan pertanian di Papua masih terbuka sangat lebar melalui klarifikasi status lahan untuk pembangunan pertanian oleh Pemerintah dan masyarakat adat, pengembangan infrastruktur pertanian termasuk jaringan irigasi, jaringan jalan pendukung pertanian, pasar, peningkatan SDM secara konsisten dan terpadu, dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun sektor pertanian. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan yang tersedia secara tepat dan lestari bukan tidak mungkin mengangkat Provinsi Papua sebagai sentra produksi pertanian di wilayah timur, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, dan melestarikan sumber pangan lokal yang sudah terbukti adaptif untuk ketahanan pangan dan kelestarian budaya setempat.

Kegiatan perkebunan juga masih terbatas pada komoditas dengan orientasi pada pasar lokal. Meski demikian, beberapa investasi perkebunan untuk kako dan kopi telah menunjukkan kemajuan dan layak dikembangkan dengan basis pengelolaan oleh masyarakat adat.

Perikanan Tangkap

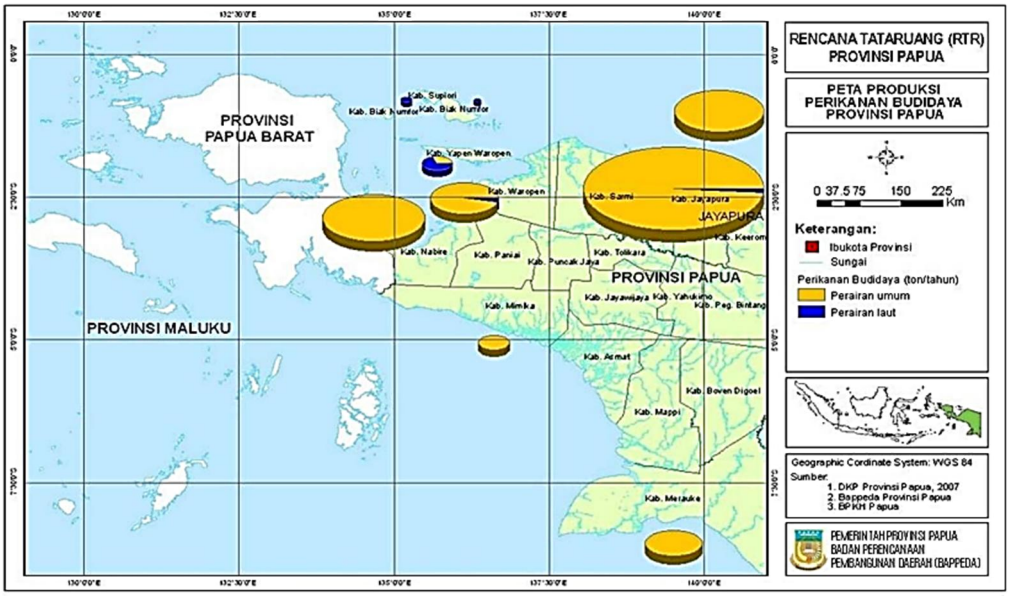
Potensi lestari untuk ikan pelagis besar secara keseluruhan adalah 612.200 ton/tahun dan perikanan demersal untuk perairan Arafuru dan sekitar perairan Papua sendiri sebesar 230.400 ton/tahun.Namun demikian, jika mengacu pada hasil penelitian Uktoselja (1998), khususnya pada ikan cakalang yang ditangkap di perairan Indonesia Timur termasuk Papua, peningkatan produksi di atas perlu dicermati secara mendalam dan hati-hati. Sebagai petaan dapat dikemukakan bahwa persentase ukuran ikan cakalang > 2.6 kg yang tertangkap mengalami penurunan, dari 85,3% pada tahun 1991 menjadi 36,8% pada tahun 1996 (Uktolseja, 1998). Untuk jelasnya lihat pada Peta 3.44 mengenai Peta Potensi Perikanan Laut di Provinsi Papua.

Di samping itu, selain potensi ikan-ikan pelagis dan ikan demersal yang telah disebutkan diatas, masih terdapat beberapa potensi perikanan laut Papua antara lain kepiting lobster, pari, udang serta beberapa potensi budidaya kerapu dan rumput laut. Kepiting banyak ditemui di Kabupaten Waropen, sedangkan udang banyak ditemui di sekitar pesisir Asmat, Mappi, Sarmi dan Kabupaten Nabire. Begitu pula lobster banyak ditemui di Kabupaten

Sarmi.Sebagaimana tertera pula dalam Lampiran IX PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN, tertulis tentang kawasan andalan perikanan berada di daerah-daerah berikut:

- Timika (Tembagapura) dan sekitarnya
- Kawasan Biak
- Kawasan Merauke dan sekitarnya
- Kawasan Mamberamo – Lereh (Jayapura) dan sekitarnya
- Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih – Biak dan sekitarnya
- Kawasan Andalan Laut Jayapura – Sarmi

Gambar 2.2 Peta Produksi Perikanan Budidaya



Perikanan Budidaya

Peta produksi Perikanan budidaya di Propinsi Papua tersebar diseluruh pesisir dan pulau-pulaunya meski masih termanfaatkan terbatas di daerah Pesisir Jayapura dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan baronang, sedangkan untuk perairan laut terbesar di Kabupaten Biak dengan budidaya unggulan rumput laut yang dapat terus ditingkatkan produktivitasnya. Perlu perhatian melalui penguatan infratruktur dan persiapan sumberdaya manusia perikanan yang handal melalui sekolah kejuruan dan kursus ketrampilan dan fasilitasi pemerintah dalam membuka pasar komoditas yang lebih luas dan menjanjikan.

Pertambangan

Pulau Papua terbetuk dari hasil benturan Lempeng Benua Australia *(Australia Plate)* yang bergerak ke Utara dengan Lempeng Pasifik (*Pacific Crustal Plate)* yang bergerak ke arah Barat. Akibat benturan antara lempeng tersebut di atas menimbulkan keuntungan dan

kerugian. Keuntungannya adalah dengan terjadinya penerobosan batuan beku dengan komposisi sedang ke dalam batuan sedimen di atasnya, memungkinkan terbentuknya mineralisasi logam yang berasosiasi dengan perak dan emas. Konsentrasi mineral - mineral logam diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua.

Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral yang besar seperti emas dan tembaga, telah diketahui sepanjang jalur tersebut dari Amerika Selatan, Philipina, Papua New Guinea sampai ke Selandia Baru. Potensi ini sangat menguntungkan bagi Provinsi Papua seperti yang saat ini tengah diekspolitasi oleh PT. Freeport Indonesia (PFI).

Dari data sekunder yang terhimpun, diperoleh data potensi mineral logam maupun non logam yang dapat dilihat pada Tabel. Potensi Mineral Logam dan Non Logam untuk daerah-daerah yang potensial di seluruh Provinsi Papua.

Tabel 2.5 Potensi Mineral Logam dan Non Logam

KABUPATEN /KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL	KETERANGAN
Kota Jayapura*	S.Numbai, Kodam	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Positif)
	S. Yapis, Kel. Imbi	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. APO	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. Entrop	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. Perumnas IV	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Positif)
	S. Borgonjie	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. Kujabu, Waena	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
Kab. Jayapura	Sentani	Kobal	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)
		Tungsten	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)
		Nikel	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)
		Asbes	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)
	S. Kemiri	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	Senatani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. Deyau, Sentani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)

KABUPATEN /KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL	KETERANGAN
	S. Sawe, Sentani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. Ayapo, Sentani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Positif)
	S. Tami	Krom	Kadar 3.45-42.52%
			(Data Kanwil DPE)
	Tg. Tanahmerah	Talk	Sebagai Lapisan Atau Lensa Dengan Tebal 1 Meter,
			Dijumpai Pada Batas Serpentinit Dan Sekis Kristalin
	Waris	Emas	Data Kanwil DPE
		Tembaga	Cu 1284 Ppm
		Timah Hitam	Pb 3312 Ppm
	Web	Emas	Anomali Geokimia
		Perak	
	Arso	Krom	Indikasi
		Batubara	Indikasi
	Depapre	Marmer	Data Kanwil DPE
	Bonggo	Batubara	Indikasi
	Genyem,	Batubara	Kadar 4470 Kal/Gram, Belerang 5.6%,
	Nimboran		Abu 12.5%, Kelembaban 18.2%
			Karbon Tertambat27.3%, Zat Terbang 42.1%
	Siduarsi	Nikel Laterit	Indikasi
	S. Pis dan S.Pas	Emas	Indikasi
	Senggi	Tembaga	Anomali 669 Ppm
		Timah Hitam	Anomali 2482 Ppm
Kab. Jayawijaya	Kurulu	Pasir Kuarsa	Sumberdaya 387 Juta Metrik Ton, Kadar Sio292.2-99.6%
		Batu Gamping	Kadar Cao 39.05-50.75% Dan Mgo 0.35-3.76%
	Assolokobal	Pasir Kuarsa	Sumberdaya 21.594.200 Ton
		Batu Gamping	Cadangan 3.391.300 Ton
	Asologaima	Batubara	Data Kanwil DPE (Indikasi)
	Borme Utara	Emas	Anomali Geokimika (Indikasi)
	Okbibab	Tungsten	Indikasi
	Soba	Pb-Zn	Indikasi
		(Timbal-Seng)	Indikasi
	Holuwon	Pb-Zn	Indikasi
		(Timbal-Seng)	Indikasi
	Bokondini	Tembaga	Indikasi

KABUPATEN /KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL	KETERANGAN
		Emas	Indikasi
	Tiom	Emas, Batugaram	Indikasi
	Mbua	Batubara	Indikasi
	Nalca	Emas	Anomali Geokimia (Indikasi)
	Dabera	Emas	Data PT Freeport Ind
		Tembaga	Indikasi
	Aboyi	Emas	Indikasi
		Molibdenum	Indikasi
Kab. Nabire	Yaur (Kwatisore)	Pasir Kuarsa	Sumberdaya 4.095 Juta Ton
		Granit	Sumberdaya 125 Juta Ton
		Marmer	Penyebaran 16.25 Km2
			Sumberdaya 163 Juta Ton
			Berwarna Abu-Abu Kehitaman,Kuat Tekan 942-100 Kg/Cm2
			Penyerapan Air 0.09-10, Berat Jenis 2.76-2.78
	Logari	Emas	Anomali Geokimia, Data PT IEMC
	S. Sanoba, Nabire	Emas	Data Kanwil DPE (Positif)
	S. Nabaruwa, Nabire	Emas	Data Kanwil DPE (Positif)
	Nabaruwa, Nabire	Marmer	Sumberdaya 150 Juta Ton
	Uwapa	Seng	Indikasi
		Kaolin	Sumberdaya 12 Juta Ton
	S. Bumi, Topo	Emas	Data Kanwil DPE
	S. Cemara, Topo	Emas	Data Kanwil DPE
	Haiura	Emas	Anomali Geokimia
		Tembaga	Data PT IEMC
	Wapoga	Emas	Anomali Geokimia
			Data PT IEMC
Kab. Biak Numfor	Supiori	Emas	Data Kanwil DPE
		Batukapur	Indikasi
	Korido	Kalsit	Berupa Bongkah Berukuran 15-20 Cm
	Biak	Phosphat	Indikasi
		Pasir Besi	Indikasi
Yapen Waropen	Waropen Bawah	Emas	Data Kanwil DPE
	Waropen Atas	Batubara	Indikasi
	Yapen	Pasir Besi	Indikasi

KABUPATEN /KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL	KETERANGAN
	P. Num	Nikel	Indikasi
Merauke	Jair	Emas	Indikasi
		Perak	Indikasi
	Mediptana	Tembaga	Kadar Cu 50.90 Ppm
		Timah Hitam	Kadar Pb 55.80 Ppm
		Seng	Kadar Zn 7.87 Ppm
	Kuoh	Emas	Indikasi
Puncak Jaya	Obaa	Emas	Indikasi
		Perak	Indikasi
	Ilu	Arsenit	Indikasi
		Tembaga	Nilai Anomali, Cu 16-60.6 Ppm, Pb 11.1-37.1 Ppm
	Ilaga	Arsenit	Anomali Geokimia
		Tembaga	Data PT Freeport Ind
		Emas	PT NBM
		Perak	
Paniai	Enarotali	Pasir Kuarsa	
	Bilogai (Wabu)	Emas	Cadangan Terindikasi
		Garnet	Data PT Freeport Ind
	Mapia	Emas	Cadangan Terindikasi
		Tembaga	PT NBM
	Kemabu	Tembaga	Anomali Geokimia
		Emas	Data PT Freeport Ind
	Uwagimamo	Emas	Anomali Geokimia
		Tembaga	Data PT Freeport Ind
		Bismuth	
	Mandoga	Tembaga	Anomali Geokimia
		Emas	Data PT Freeport Ind
	Komopa	Tembaga	Cadangan Terindikasi
		Emas	PT NBM
Mimika	Tembagapura	Tembaga	Telah Diusahakan PT FI
		Perak	Kadar Cu 1.59%,Au 1.78Ppm
		Emas	

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua
Keterangan : Kabupaten pemekaran masih digabung dengan kabupaten induk

Pariwisata

Papua memiliki kekayaan multidimensional mulai dari keadaan alamnya yang menakjubkan mulai dari puncak gunung tertinggi, lembah dan ngarai yang indah, hutan terbentang luas dengan flora dan fauna unik dan endemik, pesisir pantai terbentang dan gugusan pulau yang

indah, isi laut yang tiada tara, adat budaya masyarakat asli yang unik dan sejarah internasional maka potensi wisata Papua patut ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah.

Provinsi Papua juga memiliki taman nasional, yaitu Taman Nasional Lorentz di Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat, Taman Nasional Wasur di Merauke dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Nabire sehingga Papua memiliki potensi pariwisata terlengkap di Indonesia dan dunia. Meski demikian, kekayaan maha dahsyat ini belum tersentuh secara pofesional segingga potensi belum tergali dan belum memberikan dampak secara signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, hingga saat ini telah ditetapkan obyek wisata potensil Papua dibagi menjadi tujuh kawasan/obyek wisata ditambah satu jenis obyek wisata yang belum berhasil teridentifikasi jenisnya, seperti berikut ini:

- Kawasan Wisata Bahari : termasuk kategori Wisata Bahari adalah obyek wisata yang terdapat di pantai, teluk, danau, tanjung, dan laut.
- Kawasan Wisata Air Terjun : Obyek Wisata Air Terjun, termasuk obyek wisata sungai.
- Kawasan Wisata Pulau: Provinsi Papua selain sebagai salah satu pulau besar di Indonesia, juga memiliki ratusan pulau-pulau kecil.
- Kawasan Wisata Budaya: Provinsi Papua, selain kaya akan sumberdaya alam, juga memiliki keragaman budaya lokal yang tinggi dan unik. Budaya orang Papua didominasi oleh refleksi hubungan mereka dengan alam dan leluhurnya.
- Kawasan Wisata Sejarah: Provinsi Papua selain memiliki obyek wisata seperti yang telah disebutkan di atas, juga memiliki obyek wisata yang bernuansa sejarah, terutama yang memetakan jejak sejarah perjuangan Provinsi Papua.
- Obyek Wisata Religi: Di Provinsi Papua juga terdapat obyek wisata yang berlatar belakang keagamaan, yang disebut sebagai Obyek Wisata Religi.
- Kawasan Wisata Alam: Panorama alam di Provinsi Papua, baik di darat maupun di laut, banyak menyimpan pesona alam yang bisa menyejukkan hati dan pandangan bagi pencinta keindahan alami.

Obyek Wisata Lain-lain: Dari sumber-sumber kawasan/obyek wisata potensil terdapat beberapa obyek wisata yang belum teridentifikasi jenisnya, yaitu: KP Asmat (Kabupaten Asmat), TW Parieri (Kabupaten Biak Numfor), SM. D. Bian (Kabupaten Boven Digoel), DS. Anguruk (Kabupaten Mappi), TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika), KP Paradoi (Kabupaten Nabire), dan KP. Kurudu dan KP. Paradoi (Kabupaten Waropen).

Pemanfaatan potensi wisata di atas harus terus dioptimalkan dengan menyediakan sumberdaya manuasi pengelola yang handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi dengan penyediaan paket wisata dan pengelolaan

potensi pariwisata yang memenuhi standart internasional, dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Pemerintah Provinsi mendorong pengembangan jalur transportasi pariwisata dengan mengoptimalkan prasarana yang telah ada dan pembangunan jaringan baru yang potensial di beberapa titik strategis serta menjamin rasa aman para wisatawan.

2.1.1. Wilayah Rawan Bencana

Beberapa wilayah di Provinsi Papua rentan terhadap bencanadan telah diidentifikasikan seperti tampak pada (Tabel II.8). Berdasarkan hasil identifikasi tampak bahwa bahaya geologi sering terjadi di wilayah Pesisir Selatan Papua dan Pesisir Utara dan Kepulauan Papua. Sedangkan bahaya tanah longsor juga teridentifikasi sering terjadi dikedua wilayah tersebut ditambah sebagian wilayah Pegunungan Tengah.Pulau Papua terbetuk dari hasil benturan Lempeng Benua Australia *(Australia Plate)* yang bergerak ke Utara dengan Lempeng Pasifik (*Pacific Crustal Plate)* yang bergerak ke arah Barat. Hal ini menempatkan Papua sebagai wilayah rawan gempa tektonik yang terjadi hingga 36 kali di tahun 2012. Untuk bahaya Tsunami pernah terjadi di wilayah Pesisir Utara dan Kepulauan. Sedangkan bahaya iklim seperti banjir terjadi di wilayah Papua Selatan dan Utara.Adapun bahaya kekeringan terjadidi wilayah Pegunungan Tengah meskipun seluruh wilayah Papua juga berpotensi untuk mengalami kekeringan.

Sedangkan untuk bahaya kekeringan di Papua, rata-rata pada wilayah pembagian menunjukkan bahwa bahaya tersebut mungkin terjadi pada sebagian besar wilayah di Papua. Khusunya pada wilayah Pegunungan tepatnya Jayawijaya, Tolikara dan Yahukimo tampak terlihat bahwa bahaya iklim kekeringan sering terjadi pada ketiga daerah tersebut.

Tabel 2.6 Hasil Identifikasi Bahaya Menurut Pembagian Wilayah

Pembagian Wilayah	Kabupaten/ Kota	Bahaya Geologi				Bahaya Iklim		
		Gempa Bumi	Tsunami	Gunung Api	Tanah Longsor	Badai Tropis	Banjir	Kekeringan
Pesisir Selatan Papua	Asmat	o	x	x	v	o	v	o
	Boven Digoel	o	x	x	v	x	o	o
	Mappi	o	x	x	o	v	v	o
	Merauke	o	x	x	o	v	v	v
	Mimika	o	x	x	v	o	vv	o
Pesisir Utara Papua dan Kepulauan	Biak	vv	v	x	o	v	v	o
	Dogiyai	v	o	x	o	o	o	o
	Jayapura	vv	o	x	vv	o	vv	o
	Keerom	vv	o	x	vv	o	vv	o
	Kota Jayapura	vv	o	x	vv	v	vv	o

Pembagian Wilayah	Kabupaten/ Kota	Bahaya Geologi				Bahaya Iklim		
		Gempa Bumi	Tsunami	Gunung Api	Tanah Longsor	Badai Tropis	Banjir	Kekeringan
	Mamb. Raya	v	o	x	v	o	v	o
	Nabire	vv	o	x	v	o	o	o
	Sarmi	vv	o	x	v	v	o	o
	Supiori	vv	v	x	o	v	o	o
	Waropen	v	v	x	v	o	o	o
	Yapen	v	v	x	v	v	o	o
Tengah PapuaPegunungan	Jayawijaya	v	x	x	vv	x	v	vv
	Lanny Jaya	v	x	x	o	x	o	v
	Mamb. Tengah	v	x	x	o	x	v	o
	Nduga	v	x	x	o	x	o	o
	Paniai	v	x	x	v	x	v	o
	Peg. Bintang	v	x	x	vv	x	o	o
	Puncak	v	x	x	o	x	o	v
	Puncak Jaya	v	x	x	v	x	o	v
	Tolikara	v	x	x	o	x	o	vv
	Yahukimo	v	x	x	vv	x	v	vv
	Yalimo	v	x	x	o	x	o	o

Keterangan:

x = Tidak terjadi
o = Mungkin terjadi
v = Telah terjadi
vv = Sering terjadi

Sumber :

1. Katalog gempa bumi merusak, BADAN GEOLOGI (2006)
2. Atlat Nasional Indonesia, BAKOSURTANAL (2008)
3. Badan Kesatuan Bangsa Prov. Papua (2009)

2.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan hasil Sensus 2010 penduduk Papua berjumlah 2.833.381 jiwa atau rata-rata mengalami pertumbuhan 5,24% per tahun. Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ini adalah yang tertinggi di Indonesia selama kurun waktu 2000-2010. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2009-2010 sebesar dari 2.097.482 jiwa dan meningkat menjadi 2,833,381 jiwa yang diakibatkan oleh migrasi. Keterbukaan informasi, tingginya potensi pemanfaatan sumber daya alam dan kesempatan berusaha menjadi salah satu faktor pemicu migrasi ke wilayah ini. Daerah dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Tolikara (12,59%) sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang hanya sekitar 2,48 %.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	LUAS WILAYAH	KEPADATAN (ORG/KM2)
1	Merauke	195.716	43.240.95	4,53
2	Jayawijaya	196.085	27.649.45	7.09
3	Jayapura	111.943	14.350.95	7.80

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	LUAS WILAYAH	KEPADATAN (ORG/KM2)
4	Nabire	129.893	11.544.68	11.25
5	Yapen Waropen	82.951	2.424.56	34.21
6	Biak Numfor	126.798	1.965.05	64.53
7	Paniai	153.432	11.479.21	22.30
8	Puncak Jaya	101.148	5.329.30	18.98
9	Mimika	182.001	22.903.78	7.95
10	Boven Digoel	55.784	27.880.73	2.00
11	Mappi	81.658	25.944.01	3.15
12	Asmat	76.577	18.427.31	4.16
13	Yahukimo	164.512	12.955.75	12.70
14	Pegunungan Bintang	65.434	16.043.91	4.08
15	Tolikara	114.427	5.176.42	22.11
16	Sarmi	32.971	10.704.98	3.08
17	Keerom	48.536	8.767.58	5.54
18	Waropen	24.639	15.255.78	1.62
19	Supiori	15.874	969.260	16.38
20	Mamberamo Raya	18.365	16.852.18	1.09
21	Nduga	79.053	4.748.97	16.65
22	Lanny Jaya	148.522	2.961.09	50.16
23	Mamberamo Tengah	39.537	9.100.01	4.34
24	Yalimo	50.763	36.739.30	1.38
25	Puncak	93.218	10.421.83	8.94
26	Dogiyai	84.230	5.258.67	16.02
27	Intan Jaya	40.490	9.336,60	-
28	Deiyai	62.119	2.325,88	-
29	Kota Jayapura	256.705	786.18	326.52
	Jumlah	**2.833.381**	**322.476**	**3.74**

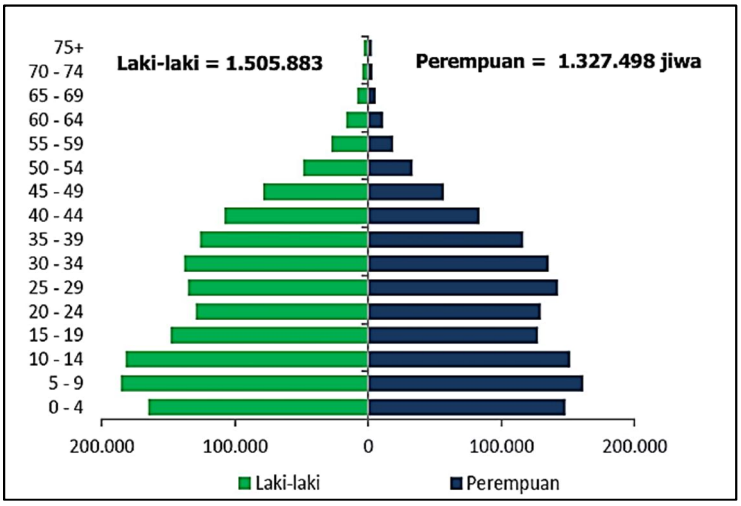
Sumber : Papua Dalam Angka (2011)

Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah di Kota Jayapura sebanyak 9,56% diikuti oleh Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayawijaya dengan persentase yang hampir sama yaitu masing-masing sekitar 6,9%. Wilayah lain dengan jumlah penduduk tinggi adalah di Kabupaten Yahukimo, Mimika, Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Paniai, Puncak Jaya, Tolikara, dan Lanny Jaya. Sedangkan sisanya rata-rata berpenduduk kurang dari 100.000 jiwa. Sebaran penduduk rata-rata 8,9 jiwa per km^2 dengan kepadatan tertinggi di Kota Jayapura 326 jiwa per km^2.

Kondisi di atas menunjukkan terjadinya ketidak seimbangan antara pertambahan jumlah penduduk dengan ketersediaan fasilitas kesejahteraan sehingga menyebabkan indikator kesejahteraan penduduk selama 30 tahun belakangan ini hanya meningkat tipis.

Kemampuan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat yang mempengaruhi kualitas SDM ke depan seperti pendidikan, kesehatan, dan akses pada sarana dan prasarana kebutuhan hidup dasar. Jika pemerintah gagal membagun penduduk menjadi SDM yang bermutu maka justru akan menjadi beban pembangunan yang sangat berat, namun sebaliknya, jika mampu membangun SDM yang handal maka akan menjadi bonus pembangunan di masa depan.

Grafik 2.2 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010



Sumber : Papua Dalam Angka (2011)

Data piramida penduduk (Gambar II.4) menunjukkan komposisi penduduk usia 0 – 14 tahun masih lebih banyak dibandingkan usia 14 tahun ke atas, yang mengindikasikan telah terjadi tingginya angka kelahiran bayi, dan tingginya angka kematian ketika memasuki usia tua, terutama di atas 60 tahun. Rasio ketergantungan penduduk cukup tinggi yaitu 48,3%, artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 48 jiwa tidak produktif sehingga pendapatan keluarga banyak yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Dari penduduk Papua pada tahun 2009 yang berjumlah sekitar 2,9 juta jiwa,sebagian besar (77%) tinggal di perdesaan sedangkan 33% sisanya tinggal di perkotaan. Lebih lanjut, dari jumlah penduduk Papua, 37,53% merupakan penduduk miskin dengan rata-rata garis kemiskinan mencapai Rp 282.776,-/kapita/bulan, di mana 96% penduduk miskin tinggal di perdesaan dan 4% sisanya di perkotaan. Pembangunan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas penduduk Papua harus menjadi agenda utama pembangunan.

Tabel 2.8 Banyaknya Pemeluk Agama menurut Golongan Agama dan Kabupaten/Kota Tahun 2012

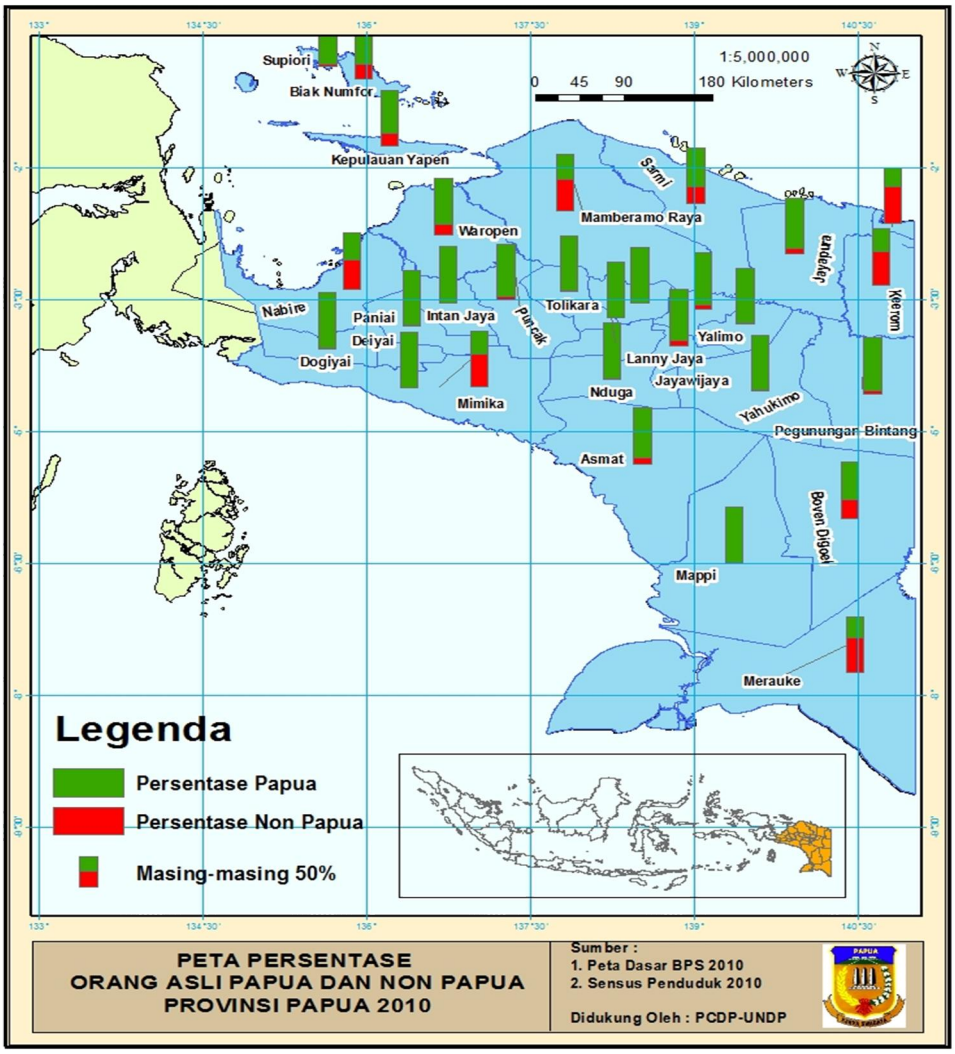
No	Kabupaten/ Kota	Kristen/Protestan	Khatolik	Islam	Hindu	Budha
Kabupaten/Regency						

No	Kabupaten/ Kota	Kristen/Protestan	Khatolik	Islam	Hindu	Budha
1	Merauke	62.753	87.103	85.926	1.007	750
2	Jayawijaya	350.150	104.998	8.426	77	20
3	Jayapura	85.335	28.365	32.060	463	215
4	Paniai	215.130	43.861	2.947	38	6
5	Puncak Jaya	117.630	50.980	5.211	10	6
6	Nabire	97.785	101.990	45.580	685	455
7	Mimika	75.980	102.036	63.981	476	150
8	Kepulauan Yapen	112.780	2.178	18.617	99	36
9	Biak Numfor	115.227	6.127	35.224	300	255
10	Boven Digoel	15.500	26.921	8.888	260	35
11	Mappi	25.335	66.396	9.137	30	16
12	Asmat	31.582	56.145	4.131	23	8
13	Yahukimo	417.225	13.200	1.700	5	2
14	Pegunungan Bintang	65.335	68.260	244	-	-
15	Tolikara	231.748	590	311	5	-
16	Sarmi	30.625	1.058	7.481	35	38
17	Keerom	20.379	16.155	20.806	588	25
18	Waropen	30.225	1.500	9.500	20	1
19	Supiori	20.311	110	834	7	-
20	Mamberamo Raya	-	-	-	-	-
21	Nduga	-	-	-	-	-
22	Lanny Jaya	-	-	-	-	-
23	Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-
24	Yalimo	-	-	-	-	-
25	Puncak	-	-	-	-	-
26	Dogiyai	-	-	-	-	-
27	Deiyai	-	-	-	-	-
28	Intan Jaya	-	-	-	-	-
Kota/Municipality						
71	Jayapura	200.870	68.709	95.506	1.524	1.847

Sumber : BPS Provinsi Papua tahun 2012

Selanjutnya penduduk Papua berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel II.7 diatas, jumlah penduduk Papua pada tahun 2012 yang memeluk agama Protestan 2.32 Juta jiwa atau sekitar 63,88 persen dari penduduk Papua. Sementara pemeluk agama kristen Katolik mencapai 23,29 persen, Islam 12,56 persen dan sisinya pemeluk agama Hindu dan Budha.

Gambar 2.3 Peta Persentase Orang Asli Papua dan Non Papua



2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan perkembangan hasil pembangunan ditinjau dari sisi ukuran kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta seni dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*)

PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) Provinsi Papua pada tahun 2011 dengan tambang diestimasikan berdasarkan harga berlaku sebesar Rp 76,37 Trilliun dan berdasarkan harga konstant 2000 sebesar 21,13 Triliun rupiah. Perbedaan nilai PDRB dengan tambang dan tanpa tambang baik pada harga konstan tahun 2000 dan harga berlaku, dan menunjukkan tingginya ketergantungan Papua pada sektor ekstraktifsebagai sumber penerimaan utama bagi Provinsi Papua. Pertumbuhan PDRB dengan tambang yang

tidak konsisten pada kedua jenis harga, tetapi dengan kecenderungan konsisten menurun terhadap PDRB. Untuk itu perlu digali sumber-sumber penerimaan yang baru yangberasal dari pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan maupun dari kegiatan ekonomi lainnya yang tidak bersifat ekstraktif sumber daya alam.

Grafik 2.3 PDRB Provinsi Papua 2007-2011



Trend pertumbuhan PDRB Harga Berlaku di Papua dari tahun 2007 – 2011 mengalami fluktuasi, pada tahun 2010 nilai PDRB mencapai 800 miliar lebih, dan ditahun 2011 mengalami penurunan menjadi 700 miliar lebih.

Tabel 2.9 Persentase Kontribusi PDRB Sektoral Provinsi Papua Dengan Tambang Tahun 2007-2011

Dengan Tambang

NO	LAPANGAN USAHA	HARGA BERLAKU					HARGA KONSTAN				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pertanian	10,01	10,32	9,53	9,32	11,71	17,01	18,06	15,40	16,55	18,18
2.	Pertambangan	**68,72**	**64,73**	**65,79**	**64,35**	**52,46**	**51,58**	**45,29**	**49,68**	**42,29**	**33,18**
3.	Industri Pengolahan	1,62	1,62	1,42	1,41	1,86	2,48	2,56	2,23	2,49	2,85
4.	Listrik dan Air Bersih	0,16	0,16	0,14	0,14	0,17	0,23	0,24	0,21	0,23	0,26
5.	Bangunan	4,66	6,01	6,12	7,24	10,66	6,34	7,67	7,21	9,11	11,25
6.	Perdagangan	4,44	4,87	4,48	4,49	5,94	6,39	7,19	6,56	7,49	8,71
7.	Pengankutan dan Komunikasi	4,05	4,52	4,36	4,43	5,76	6,10	7,10	6,64	7,80	9,04
8.	Keuangan, Sewa, dan Jasa	1,48	1,77	2,17	2,12	2,74	2,30	2,72	3,22	3,54	4,06
9.	Jasa-jasa	4,86	6,00	5,98	6,50	8,69	7,57	9,16	8,84	10,51	12,48
(P D R B)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Papua Dalam Angka (2007-2012)

PDRB Papua pada tahun 2010 tanpa tambang didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai 24,38% dan menurun dari 30% ditahun 2007. Penurunan kontribusi sektor pertanian ini harus mendapatkan perhatian khusus karena merupakan kegiatan perekonomian utama (70%)di Papua. Penurunan ini harus dilihat pula dari aspek sosial, karena telah terjadi revolusi perubahan konsumsi karbohidrat utama masyarakat Papua dari sagu dan ubi-ubian ke beras yang bukan produk lokal (*eksternal supply*).

Tabel 2.10 Persentase Kontribusi PDRB Sektoral Provinsi Papua Tanpa Tambang Tahun 2007-2011

TanpaTambang

No.	LAPANGAN USAHA	Harga Berlaku					Harga Konstan				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pertanian	**32,00**	**29,26**	**27,85**	**26,13**	**24,64**	**35,13**	**33,01**	**30,61**	**28,67**	**27,21**
2.	Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	5,18	4,59	4,15	3,96	3,92	5,13	4,69	4,43	4,32	4,26
4.	Listrik dan Air Bersih	0,52	0,45	0,42	0,38	0,36	0,48	0,44	0,42	0,40	0,38
5.	Bangunan	14,89	17,03	17,89	20,32	22,42	13,09	14,02	14,33	15,78	16,84
6.	Perdagangan	14,20	13,80	13,11	12,60	12,50	13,20	13,14	13,04	12,97	13,03
7.	Pengankutan dan Komunikasi	12,95	12,83	12,73	12,43	12,11	12,59	12,98	13,20	13,51	13,52
8.	Keuangan, Sewa, dan Jasa	4,73	5,01	6,35	5,94	5,77	4,75	4,98	6,40	6,13	6,08
9.	Jasa-jasa	15,53	17,02	17,49	18,23	18,28	15,63	16,74	17,58	18,21	18,68
(P D R B)		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Papua Dalam Angka (2007-2012)

Perubahan pola konsumsi ini mendorong penurunan kebutuhan pasar lokal (*demond*) atas bahan pangan lokal yang tergantikan beras sehingga masyarakat (petani) menurunkan *supply* nya. Dampaknya, Papua saat ini telah memasuki kerentanan pangan akibat ketergantungan yang besar pada pangan luar. Hal ini juga cenderung terjadi pada berbagai jenis pangan lain seperti daging dan ikan. Jika tidak diantisipasi, dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tidak mungkin mendorong terjadinya kerawanan sosial. Hingga tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Papua berdasar ADH konstran mengalami kontraksi sebesar -5,67 persen dimana setahun sebelumnya juga turun -3,16 persen. Pertumbuhan negatif juga terjadi pada tahun 2008 (-1,40 persen). Sementara dengan mengeliminir nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Papua lebih stabil. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 (12,38 persen) dan yang terendah pada tahun 2007 (8,77 persen). Sedangkan pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sebesar 9,27 persen.

Tabel 2.11 Nilai PDRB Sektoral Provinsi Papua Menurut Harga Berlaku Tahun 2007-2011

NO	LAPANGAN USAHA	HARGA BERLAKU				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pertanian	5.544.526	6.349.117	7.324.831	8.177.698	8.946.428
2.	Pertambangan	38.056.447	39.820.882	50.587.068	56.484.335	40.067.808
3.	Industri Pengolahan	896.875	996.533	1.091.227	1.239.178	1.421.574
4.	Listrik dan Air Bersih	89.277	97.926	109.227	119.917	129.435
5.	Bangunan	2.579.329	3.695.789	4.706.277	6.359.197	8.139.832
6.	Perdagangan	2.460.000	2.993.356	3.447.701	3.943.339	4.538.793
7.	Pengankutan dan Komunikasi	2.244.086	2.782.868	3.348.771	3.890.630	4.397.800
8.	Keuangan, Sewa, dan Jasa	820.177	1.086.379	1.670.981	1.858.564	2.092.983
9.	Jasa-jasa	2.689.736	3.693.389	4.600.595	5.703.719	6.635.964
(P D R B)		**55.380.453**	**61.516.238**	**76.886.679**	**87.776.577**	**76.370.616**

Sumber : Papua Dalam Angka (2007-2012)

Nilai PDRB Papua jika dilihat berdasarkan Harga berlaku dit ahun 2007 sampai dengan 2011 terus mengalami kenaikan, meski ditahun 2011 terjadi penurunan dari 87 miliar rupiah menjadi 76 miliar rupiah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi di Papua mengalami pertumbuhan yang sedikit menurun, akan tetapi jika dilihat secara rinci per komponen PDRB terlihat jelas bahwa penurunan PDRB yang terjadi hanya ada pada sektor Pertambangan, untuk itu jika ingin melihat secara riil pertumbuhan ekonomi di Papa alangkah baikanya menggunakan nilai PDRB tanpa tambang, sebab penggerak ekonomi terbesar di Papua berasal bukan dari sektor Pertambangan melainkan sektor-sektor lain seperti Pertanian dan Bangunan.

Tabel 2.12 Nilai PDRB Sektoral Provinsi Papua Menurut Harga Konstan Tahun 2007-2011

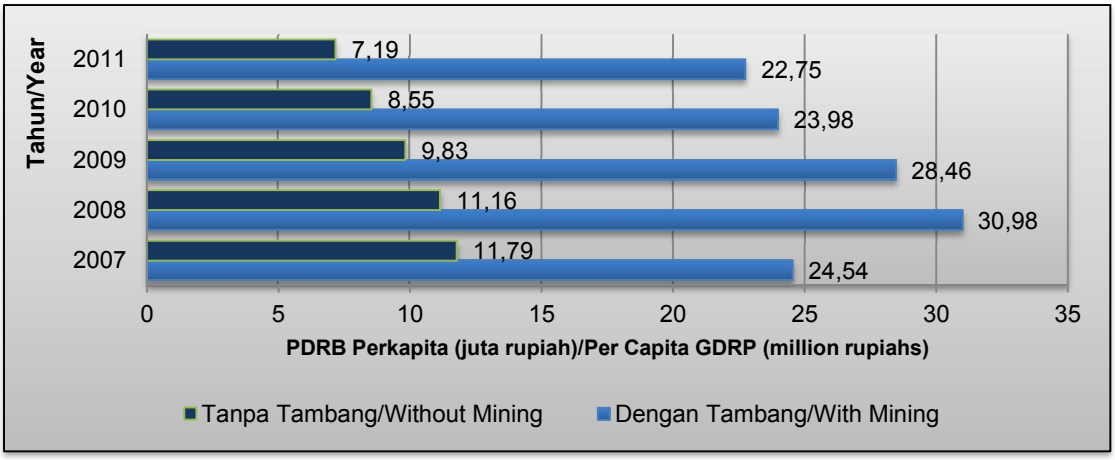
NO	LAPANGAN USAHA	HARGA KONSTAN				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pertanian	3.265.898	3.419.070	3.563.404	3.707.520	3.842.414
2.	Pertambangan	9.903.030	8.574.105	11.495.767	9.475.035	7.014.070
3.	Industri Pengolahan	476.966	485.599	515.784	558.797	601.471
4.	Listrik dan Air Bersih	44.284	45.990	48.651	51.569	54.159
5.	Bangunan	1.216.807	1.452.253	1.668.187	2.041.293	2.378.490
6.	Perdagangan	1.227.526	1.360.778	1.518.245	1.677.490	1.840.838
7.	Pengankutan dan Komunikasi	1.170.528	1.344.367	1.536.705	1.747.416	1.910.113
8.	Keuangan, Sewa, dan Jasa	441.792	515.545	745.120	792.777	858.343
9.	Jasa-jasa	1.453.465	1.734.136	2.046.580	2.355.386	2.637.638
(P D R B)		**19.200.297**	**18.931.842**	**23.138.444**	**22.407.284**	**21.137.538**

Sumber : Papua Dalam Angka (2007-2012)

Dari data PDRB berdasarkan penggunaan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2010 masih digerakkan oleh konsumsi masyarakat di mana dari tahun ke tahun persentasenya meningkat yaitu dari 35,78% pada tahun 2006 menjadi 43,42% pada tahun 2010. PDRB penggunaan berdasarkan harga konstan akan tampak bahwa kegiatan ekonomi di bidang ekspor-impor di Papua sangat fluktuatif dan dengan devisit sangat tinggi dari Rp 2,2 trilyun pada tahun 2008 menjadi Rp 5 trilyun pada tahun 2010, meskipun sempat mengalami perbaikan pada tahun 2009 yaitu mengalami minus Rp 1,1 trilyun. Sebagian besar nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di Papua tahun 2011 digunakan untuk konsumsi rumah tangga (54,86 persen pada tahun 2011). Disusul untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik 36,38 persen, konsumsi pemerintah 27,03 persen dan net ekspor 26 persen. Pada tahun 2011 konsumsi rumah tangga tumbuh 6,55 persen daritahun sebelumnya. Tidak jauh berbeda,komponen konsumsi pemerintah dan PMTB tumbuh 9,21 persen dan 7,92persen. Sementara itu, di tahun yang sama nilai ekspor mengalami penurunanyang signifikan yakni sebesar -30,11persen. Kondisi ini menegaskan kembali bahwa tingkat ketergantungan Papua terhadap produk dan jasa dari luar sangat tinggi, dan pertumbuhan sektor riil di Papua yang cenderung konsisten pada angka sangat rendah.

Pada tahun 2009, PDRB per kapita tertinggi terdapat di Kabupaten Mimika, Boven Digoel, Kota Jayapura dan Supiori yaitu masing-masing sebesar Rp 295,51 juta, Rp 37,31 juta dan Rp 26,57 juta,serta Rp 26,49 juta.Tingginya PDRB perkapita Mimika disebabkan tingginya produksi PT Freeport di sektor pertambangan yang menyumbang sekitar 60 persen dari PDRB Papua. Jika hasil sektor pertambangan dihilangkan, PDRB perkapita Mimika hanya Rp 14,24 juta. PRDB perkapita terkecil adalah Kabupaten Yahukimo yang hanya mencapai Rp. 1,55 juta.

Grafik 2.4 PDRB Perkapita dengan Tambang dan Tanpa Tambang (Juta Rupiah) Tahun 2007-2011



Sumber: PDRB Provinsi Papua, 2012

Dengan menggunakan kriteria Bank Dunia, distribusi pendapatan Provinsi Papua cenderung tidak mengalami perbaikan selama 5 tahun terakhir (2006-2010). Sepanjang periode ini 40 persen rumah tangga yang tergolong berpendapatan rendah setiap tahunnya rata-rata memperoleh bagian pendapatan per kapita hanya sekitar 16,74 persen, sedangkan untuk 20 persen rumah tangga yang berpendapatan tinggi memperoleh pembagian yang sangat besar dengan rata-rata per tahun sekitar 45,31 persen. Kondisi tersebut menandakan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Papua mengalami ketimpangan sedang (*moderate inequality*). Namun, bila menggunakan indikator angka Rasio Gini, sepanjang tahun 2005-2010 Rasio Gini berada pada rata-rata 0,36 yang berarti termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

b. Laju Inflasi Daerah

Laju inflasi digambarkan oleh BPS Papua dalam Papua dalam Angka 2012 dengan kondisi inflasi di Kota Jayapura tahun 2011. Paket komoditas Kota Jayapura naik dari 318 komoditas menjadi 352 komoditas.Kota Jayapura pada tahun 2011 mengalami inflasi sebesar 3,40 persen lebih rendah dibanding Nasional sebesar 3,79 persen.Inflasi yang terjadi di Kota Jayapura disebabkan adanya kenaikan indeks dari 122,80 pada bulan Desember 2010 menjadi 126,97 pada bulan Desember 2011.

Tabel 2.13 Laju Inflasi di Provinsi Papua Tahun 2007-2011

URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	RATA-RATA PERTUMBUHAN
Inflasi	10,35	12,55	1,92	4,48	3,40	6,54

Sumber : Papua Dalam Angka (2007-2012)

Kelompok Bahan Makanan yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Kota Jayapura Tahun 2010 yakni sebesar 1,64 persen disusul kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,53 persen; kelompok Sandang sebesar 0,44 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,43 persen; Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,32 persen; Sedangkan kelompok lainya memberikan andil yang tidak terlalu besar yaitu: kelompok kesehatan sebesar dan kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga masing-masing sebesar 0,02 persen.

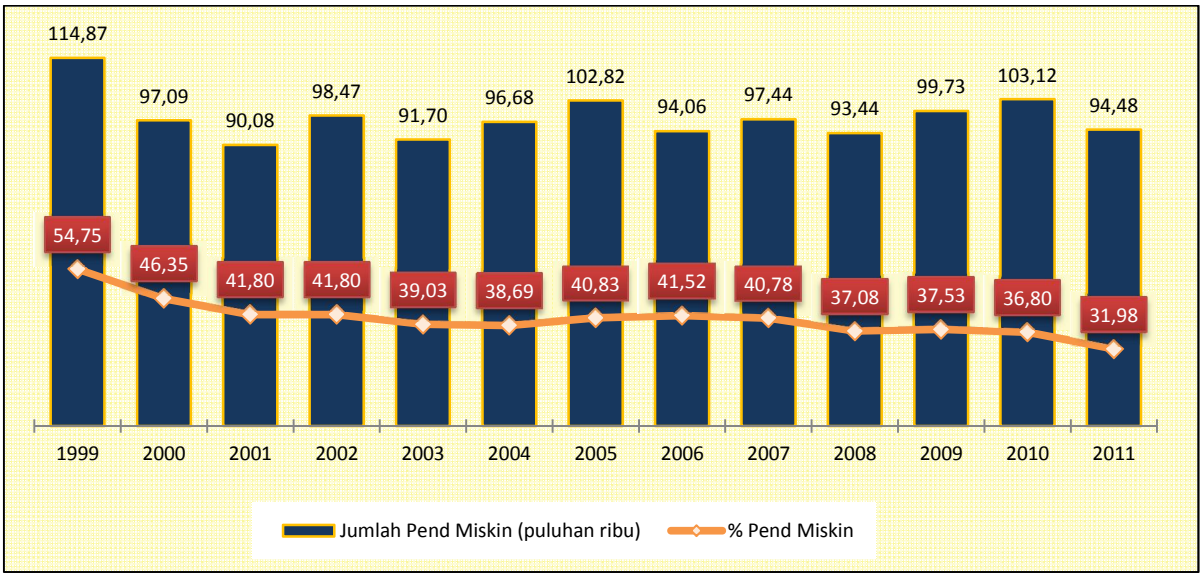
c. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang paling mendesak dan selalu menjadi prioritas untuk ditanggulangi, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya sangat besar

terhadap pelaksanaan pembangunan, misalnya dapat mengurangi produktifitas, memperbesar konflik multidimensi, meningkatkan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan sebagainya. Oleh karena itu, seberapa besar pun jumlahnya, selama masih ada penduduk yang dikategorikan miskin, pemerintah provinsi telah berkomitmen untuk mengentaskannya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Papua ketika dihadapkan dengan kondisi bahwa kebanyakan jumlah penduduk miskin berada di daerah-daerah pegunungan dan pedalaman yang sangat sulit di jangkau dari pusat ibu kota, menjadikan terisolasinya penduduk darijangkauan pasar, informasi dan teknologi.

Jika dilihat capaian selama 10 Tahun terakhir dimana tingkat kemiskinan menurun hingga 17,95%. Papua harus optimis target tersebut dapat tercapai meskipun harus bekerja dua kali lebih keras dari sepuluh Tahun terakhir. Pada Tahun 2011 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 31,98%. Namun demikian persentase penduduk miskin di Provinsi Papua masih lebih tinggi dari rata-rata Nasional, yaitu sebesar 14,15%. Kondisi tersebut menempatkan Papua pada peringkat ke-33 dari 33 Provinsi di Indonesia. Kecenderungan proporsi penduduk miskin di Papua dari Tahun 1999–2010 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.5 Perkembangan Prosentase Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 1999-2011

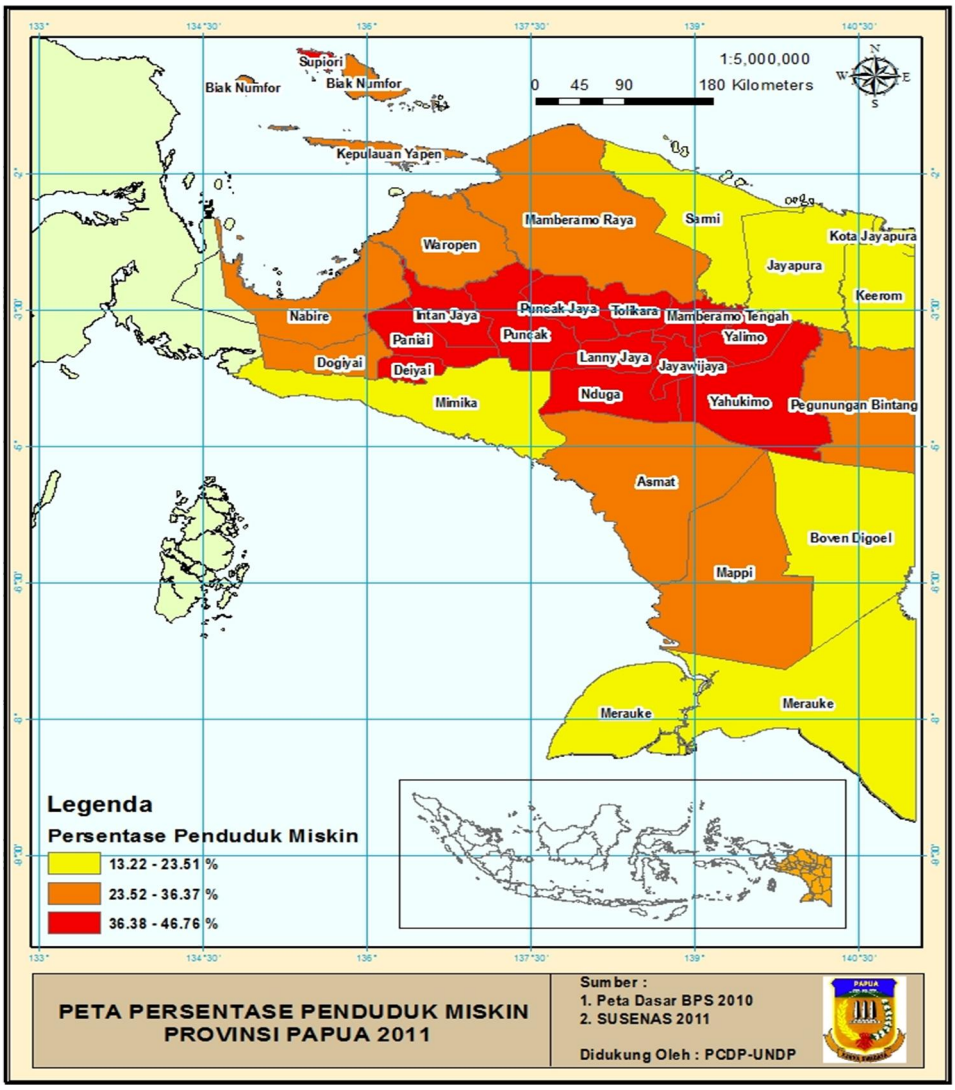


Sumber : BPS Provinsi Papua (2011)

Namun apabila melihat peta kemiskinan di bawah ini, meskipun prosentase kemiskinan Papua mengalami penurunan, tapi nampak ketimpangan wilayah masih sangat tinggi khususnya didaerah atau kabupaten pegunungan.

Dari grafik di dibawah dapat dilihat bahwa konsentrasi kemiskinan lebih banyak di daerah pegunungan tengah dan wilayah kota. Tingginya kemiskinan di wilayah pegunungan tengah tidak terlepas dari rendahnya ketersediaan infrastruktur dan rendahnya akses pasar di wilayah-wilayah tersebut. Sedangkan kemiskinan di wilayah perkotaan disebabkan oleh tingginya arus migrasi yang tidak diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja di daerah perkotaan di daerah perkotaan yang disebabkan masih terkonsentrasinya pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan.Kesenjangan antar-wilayah di Provinsi Papua terlihat dalam hal angka kemiskinan. Ketimpangan tersebut terjadi baik antara daerah pegunungan tengah yang terisolir dan daerah yang berdekatan dengan pantai maupun antara daerah perkotaan dan perdesaan. Menurut hasil Susenas tahun 2010, persentase penduduk miskin di wilayah dekat pantai lebih kecil (kurang dari 40%) bila dibandingkan dengan 14 kabupaten di wilayah pegunungan tengah yang masing-masing dihuni lebih dari 40% penduduk miskin.

Gambar 2.4 Peta Kemiskinan Tahun 2011



Tabel 2.14 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di Indonesia dan PapuaTahun 2010-2011

TINGKAT KEMISKINAN (%)	PAPUA			INDONESIA		
	2010	2011	PERUBAHAN	2010	2011	PERUBAHAN
Perkotaan	5,55	4,60	-0,95	9,87	9,23	-0,64
Perdesaan	46,02	41,58	-4,45	16,56	15,72	-0,84
Jumlah	36,80	31,98	-4,81	13,33	12,49	-0,84
Kesenjangan Kota-Desa	40,48	36,98	-	6,69	6,49	-

Sumber : BPS, 2011 (Kondisi Maret)

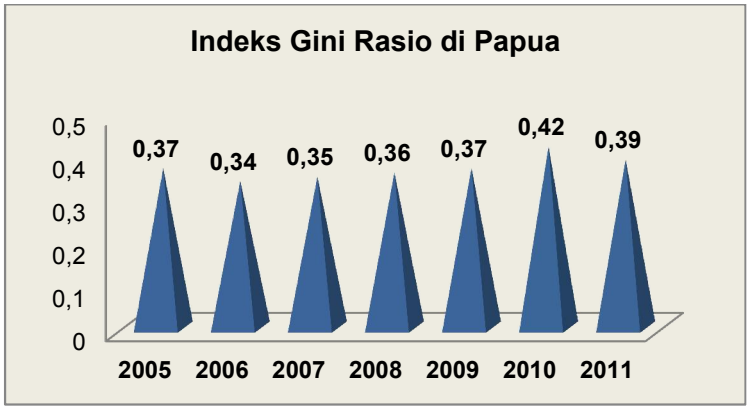
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat di perdesaan sangat bergantung pada alam. Selain mencari ikan di laut, menokok sagu, mereka terbiasa berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahan makanan yang mereka peroleh tidak dapat diperjuabelikan, karena tidak tersedianya pasar sebagai tempat jual beli barang. Alhasil mereka hanya mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan jenis makanan kurang bervariasi dan kemungkinan memiliki kandungan gizi rendah.

d. Ketimpangan Pendapatan

Gini Rasio

Gini rasio pendapatan penduduk Papua pada periode 2005-2009 menggambarkan distribusi pendapatan dengan ketimpangan rendah. Namun pada tahun 2010, ketimpangan pendapatan yang terjadi meningkat menjadi 0,42 dan tergolong ketimpangan sedang. Kenaikan gini rasio tersebut mengindiaksikan ketimpangan pendapatan di Provinsi Papua semakin meningkat. Oleh kerena itu, pemerataan pendapatan harus terus diupayakan dengan pembangunan ekonomi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga ketimpangan pendapatan dapat dikurangi.

Grafik 2.6 Perkembangan Gini Rasio Provinsi Papua Tahun 2005-2011



Pada tahun 2011, Gini rasio di Papua mengalami penurunan disbanding tahun sebelumya, yaitu 0,42 menjadi 0,39. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi papua mengalami penurunan dan program-program yang dijalankan pemerintah selama ini hendaknya terus ditingkatkan dalam rangka penurunan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.

Kriteria Bank Dunia

Bank dunia mengelompokkan penduduk sesuai dengan besarnya pendapatan, yaitu 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Pada tahun 2011, 40 persen rumah tangga berpendapatan rendah di Papua dapat menikmati 16,76 persen pendapatan. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi papua memiliki ketimpangan sedang/menengah. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, persentase pendapatan pada kelas 40 persen penduduk dengan rendah meningkat, ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pada tahun 2011 cenderung menurun.

Tabel 2.15 Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Di Papua Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2006-2011

Tahun	40% Terendah	40% Menengah	20% Tinggi
2006	18,13	37,98	43,89
2007	16,25	41,61	42,14
2008	16,51	39,69	43,80
2009	16,96	36,18	46,87
2010	15,86	34,28	49,86
2011	16,76	37,62	45,62

Sumber : Indikator Penting Provinsi Papua tahun 2012

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Prestasi pembangunan kesejahteraan sosial suatu wilayah telah banyak menggunakan ukuran non ekonomi. Salah satu pendekatan nonekonomi yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), danstandar hidup layak (*decent living*). Dalam prakteknya ada 4komponenpokok yang digunakan untuk mengukur besarnya angka IPM, yaitu (1) angka harapan hidup, (2) angka melek huruf, (3)rata-rata lama sekolah, dan (4) angka pengeluaran riil perkapita.

Jika diamati selama tahun 2004-2011, pencapaian angka IPM di Provinsi Papua selalu mengalami pertumbuhan yang positip, lihat Tabel 2.13. Pada tahun 2004 misalkan, angka IPM Provinsi Papua mencapai 60,90. Selanjutnya di tahun 2006 mengalami peningkatan yang cukup berarti yakni sebanyak 1,18 poin sehingga angka IPM bergerak naik menjadi 62,08. Peningkatan ini terus berlanjut, hingga pada tahun 2011, angka IPM Papua telah mencapai 65,36 walaupun mengalami kecenderungan mengecil. Capaian IPM ini menurut konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh UNDP masuk dalam kategori menengah bawah yaitu capaian IPM antara 50,0 – 65,9.

Tabel 2.16 Perbandingan IPM Papua dengan Provinsi Lainnya di Indonesia

PROVINSI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Urutan 10 Besar Teratas								
01. DKI Jakarta	75.80	76.07	76.33	76.59	77.03	77.36	77.60	77.97
02. Sulawesi Utara	73.40	74.21	74.37	74.68	75.16	75.68	76.09	76.54
03. Riau	72.20	73.63	73.81	74.63	75.09	75.60	76.07	76.53
04. Yogykarta	72.90	73.50	73.70	74.15	74.88	75.23	75.77	76.32
05. Kalimantan Timur	72.20	72.94	73.26	73.77	74.52	75.11	75.56	76.22
06. Kepulauan Riau	70.80	72.23	72.79	73.68	74.18	74.54	75.07	75.78
07. Kalimantan Tengah	71.70	73.22	73.40	73.49	73.88	74.36	74.64	75.06
08. Sumatera Utara	71.40	72.03	72.46	72.78	73.29	73.80	74.19	74.65
09. Sumatera Barat	70.50	71.19	71.65	72.23	72.96	73.44	73.78	74.28
10. Sumatera Selatan	69.60	70.23	71.09	71.40	72.05	72.61	72.95	73.42
Urutan 5 Terbawah								
29. Papua Barat	63.70	64.83	66.08	67.28	67.95	68.58	69.15	69.65
30. Maluku Utara	66.40	66.95	67.51	67.82	68.18	68.63	69.03	69.47
31. NTT	62.70	63.59	64.83	65.36	66.15	66.60	67.26	67.75
32. NTB	60.60	62.42	63.04	63.71	64.12	64.66	65.20	66.23
33. Papua	60.90	62.08	62.75	63.41	64.00	64.53	64.94	65.36
Indonesia (BPS)	**68.70**	**69.57**	**70.10**	**70.59**	**71.17**	**71.76**	**72.27**	**72.77**

Sumber : BPS Indonesia

Membandingkan perkembangan antarprovinsi di Indonesia sepanjang tahun 2004-2011, bisa disimpulkan bahwa IPM Provinsi Papua meningkatrelatif cepat, dengan pertumbuhan diatas rata-rata nasional. Rata-rata nasional, capaian IPM untuk periode 2004-2011 mengalami pertumbuhan 0,83% pertahun atau rata-rata meningkat 0,64 point. Sedangkan capaian IPM

Papua untuk kurun waktu yang sama, mengalami kenaikan yang lebih tinggi meskipun kemudian cenderung mengecil. Dari tahun 2004-2005, misalnya, capaian IPM Papua mengalami peningkatan sebesar 1,18 point (1,94%), kemudian melambat pada tahun 2010-2011menjadi sebesar 0,42 point (0,65%). Bila dibandingkan dengan perkembangan IPM di beberapa daerah lain, angka IPM Provinsi Papua terlihat paling rendah. Dengan kata lain kualitas pembangunan manusia yang berhasil diciptakan oleh Pemerintah Papua selama ini masih rendah dibandingkan misalnya dengan Maluku Utara, NTT, NTB. Keenam provinsi ini memiliki angka IPM rata-rata di atas 67,00. Bahkan dengan daerah pemekarannya sendiri yakni Papua Barat, kualitas pembangunan manusia Papua masih terbilang lebih rendah. Provinsi Papua Barat setiap tahunnya mampu mencetak angka IPM rata-rata sebesar 67,00. Seluruh fakta tersebut mengindikasikan bahwa sumber daya perencanaan dan penganganggaran yang disediakan selama ini belum dapat dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia, meskipun sebenarnya sudah *on the rigth track*. Misalkan dalam hal bidang pendidikan yang direpresentasikan melalui komponen melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Berbagai hambatan peningkatan mutu sumber daya manusia di wilayah Papua, adalah terbatasnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas, belum meratanya penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana transportasi serta kemiskinan yang masih sangat tinggi dan besarnya senjangan sosial-ekonomi antarpenduduk.

Tabel 2.17 Kecenderungan Komponen-Komponen IPMTahun 2006 – 2011

TAHUN	HARAPAN HIDUP (TAHUN)	ANGKA MELEK HURUF (PERSEN)	LAMA SEKOLAH (TAHUN)	PENGELUARAN PERKAPITA (RIBU Rp)	IPM PROVINSI
2006	67,60	75,41	6,30	589,30	62,75
2007	67,90	75,41	6,52	593,42	63,41
2008	68,10	75,41	6,52	599,65	64,00
2009	68,35	75,58	6,57	603,88	64,53
2010	68,60	75,60	6,66	606,38	64,94
2011	68,85	75,81	6,69	609,18	65,36

Sumber : Indikator Penting, BPS Provinsi Papua, 2011 sampai 2012

Sepanjang tahun 2006-20011, tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua paling rendah di seluruh Indonesia. Perkembangannya setiap tahun juga menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti, cenderung stagnan. Sebagai misal diantara tahun 2006 - 2011 persentase melek huruf penduduk di Provinsi Papua mengalami perkembangan yang stagnan sebesar 75,81 persen setiap tahun. Begitu juga dengan lama

sekolah dapat dikatakan juga berkembang stagnan, dimana selama tahun 2006 hingga 2008 tidak mengalami pertambahan, selalu 6,5 tahun. Terjadi kenaikan ditahun 2011 menjadi 6,69 tapi kenaikannya hanya 0,1 persen. Baik melek huruf maupun rata-rata lama sekolah di Papua ini terpaut sangat jauh bila dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan. Di Indonesia rata-rata melek huruf penduduk 15 tahun ke atas adalah 92,4 persen, sedangkan rata-rata lama sekolah adalah 7,6 tahun.

Selain IPM yang rendah, terjadinya ketimpangan pencapaian IPM antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua juga merupakan masalah yang krusial untuk dipecahkan. Oleh karena adanya ketimpangan IPM sekaligus juga menandakan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini berdampak buruk bagi proses pembangunan yang berkelanjutan di Papua. Ketimpangan IPM antar wilayah dapat menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan pemborosan atau inefisiensi dalam memanfaatkan anggaran belanja pembangunan. Untuk itu penting sekali bagi Papua untuk mengurangi ketimpangan IPM yang terjadi, terutama sekali ketimpangan IPM antara daerah-daerah di pegunungan dan pedalaman dengan pesisir dan dataran rendah.

Tabel 2.18 Perbandingan IPM Kabupaten dan Kota di Provinsi PapuaTahun 2006-2011

No	Kabupaten/kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Merauke	62,50	64,03	64,44	64,77	65,73	66.19
2	Jayawijaya	52,40	52,97	54,72	55,09	56,24	56.60
3	Jayapura	68,80	69,97	71,02	71,66	72,25	72.75
4	Nabire	65,20	65,60	66,10	66,54	66,81	67.33
5	Kepulauan Yapen	67.00	68,06	68,68	69,13	69,69	70.19
6	Biak Numfor	67,30	68,55	68,99	69,35	69,95	70.33
7	Paniai	58,50	58,74	59,17	59,53	59,90	60.22
8	Puncak Jaya	67.00	67,20	67,78	68,21	68,27	68.34
9	Mimika	67,10	67,84	67,99	68,49	69,09	69.68
10	Boven Digoel	48,30	48,65	49,20	49,56	50,21	50.64
11	Mappi	48.00	49,04	49,59	49,88	50,45	50.83
12	Asmat	48,30	49,53	50,27	50,86	51,55	51.92
13	Yahukimo	48.00	48,31	48,85	49,22	49,59	50.30
14	Pegunungan Bintang	47,20	47,38	47,94	48,54	48,99	49.45
15	Tolikara	49,60	50,38	50,85	51,48	52.00	52.43
16	Sarmi	65,20	65,90	66,35	66,65	66,84	67.15
17	Keerom	66,90	67,99	68,55	68,89	69,26	69.64

No	Kabupaten/kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011
18	Waropen	61,60	61,97	62,46	62,85	63,27	63.71
19	Supiori	66,20	66,92	67,55	68,06	68,46	68.92
20	Mamberamo Raya	-	-	-	58,57	59,39	59.86
21	Nduga	-	-	-	47,74	48,02	48.43
22	Lanny Jaya	-	-	-	48,57	49,90	50.20
23	Mamberamo Tengah	-	-	-	48,18	48,96	49.32
24	Yalimo	-	-	-	48,16	48,55	48.90
25	Puncak	-	-	-	48,71	49.00	49.35
26	Dogiyai	-	-	-	49,23	50,03	50.49
27	Intan Jaya	-	-	-	47,94	48,42	48.74
28	Deiyai	-	-	-	48,02	48,57	49.31
29	Kota Jayapura	73,10	73,84	74,56	75,16	75,76	76.29
Papua		70,10	70,80	71,70	64,53	64,94	65,36

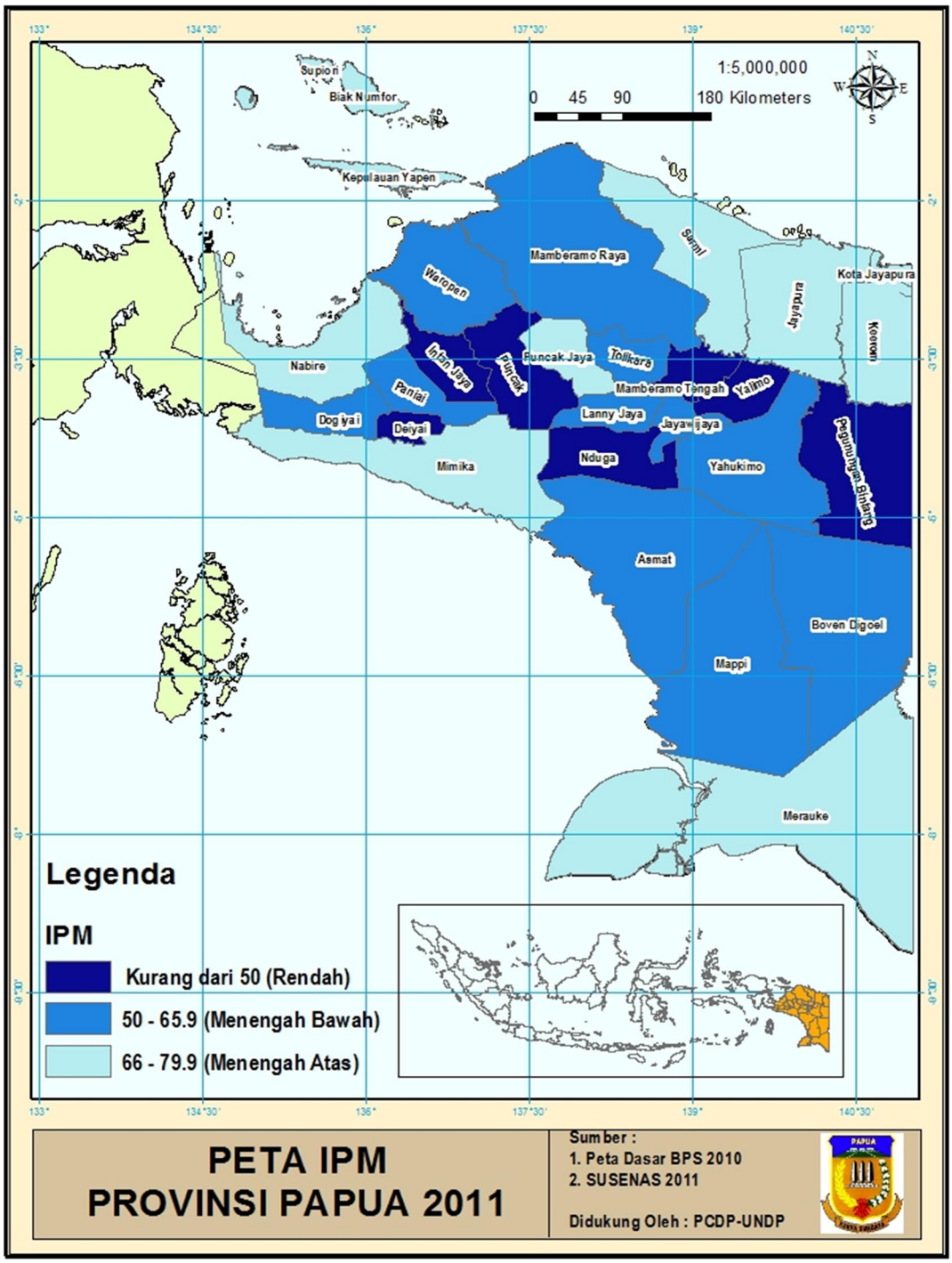
Sumber : BPS Papua (2012)

Ketika membandingkan IPM untuk kabupaten dan kota di Provinsi Papua dengan rata-rata nasional, terjadi peningkatan agregasi IPM secara tetap. Namun, jumlah kabupaten kota yang setara atau lebih tinggi dari rata-rata nasional hanya 2-3 kabupaten/kota. Sejak tahun 2007 akibat terjadinya pemekaran, kabupaten yang berada di bawah rata-rata nasional telah meningkat dari 18 menjadi 27 kabupaten. Dengan munculnya Derah Otonomi Baru (DOB) menyebabkan alokasi APBD banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur kantor, jalan dan belanja pegawai, sedangkan alokasi APBD untuk sektor yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan rakyat mengecil.

Perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan antar wilayah yang sangat mencolok tampaknya menjadi *triger* terjadinya ketimpangan pembangunan manusia tersebut. Sebagai indikatornya dapat diperhatikan pada kesenjangan yang sangat lebar dalam bidang pendidikan yang diwakili oleh tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Semua kabupaten yang berada di daerah pegunungan dan pedalaman seperti Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Puncak, Lanny Jaya, Dogiyai, Nduga, dan lain-lain, rata-rata memiliki tingkat melek huruf hanya 40 persen dari total penduduk di atas usia 15 tahun, dengan rata-rata lama sekolah sekitar 3,5 tahun. Kondisi yang jauh berbeda dengan daerah-daerah yang terletak di pesisir dan dataran rendah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Supiori, Keerom, Kepulauan Yapen, dan lain-lain, rata-rata memiliki tingkat melek huruf sebesar 90% dan lama sekolah sekitar 7,7 tahun. Jelas hal ini terjadi akibat ketidakmerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun informal diantara kedua

wilayah tersebut, seperti jumlah guru, buku-buku pelajaran, gedung sekolah, perpustakaan, dan sebagainya.

Gambar 2.5 Peta IPM Papua tahun 2011



Gambar 2.6 Peta Angka Melek Huruf Papua tahun 2011

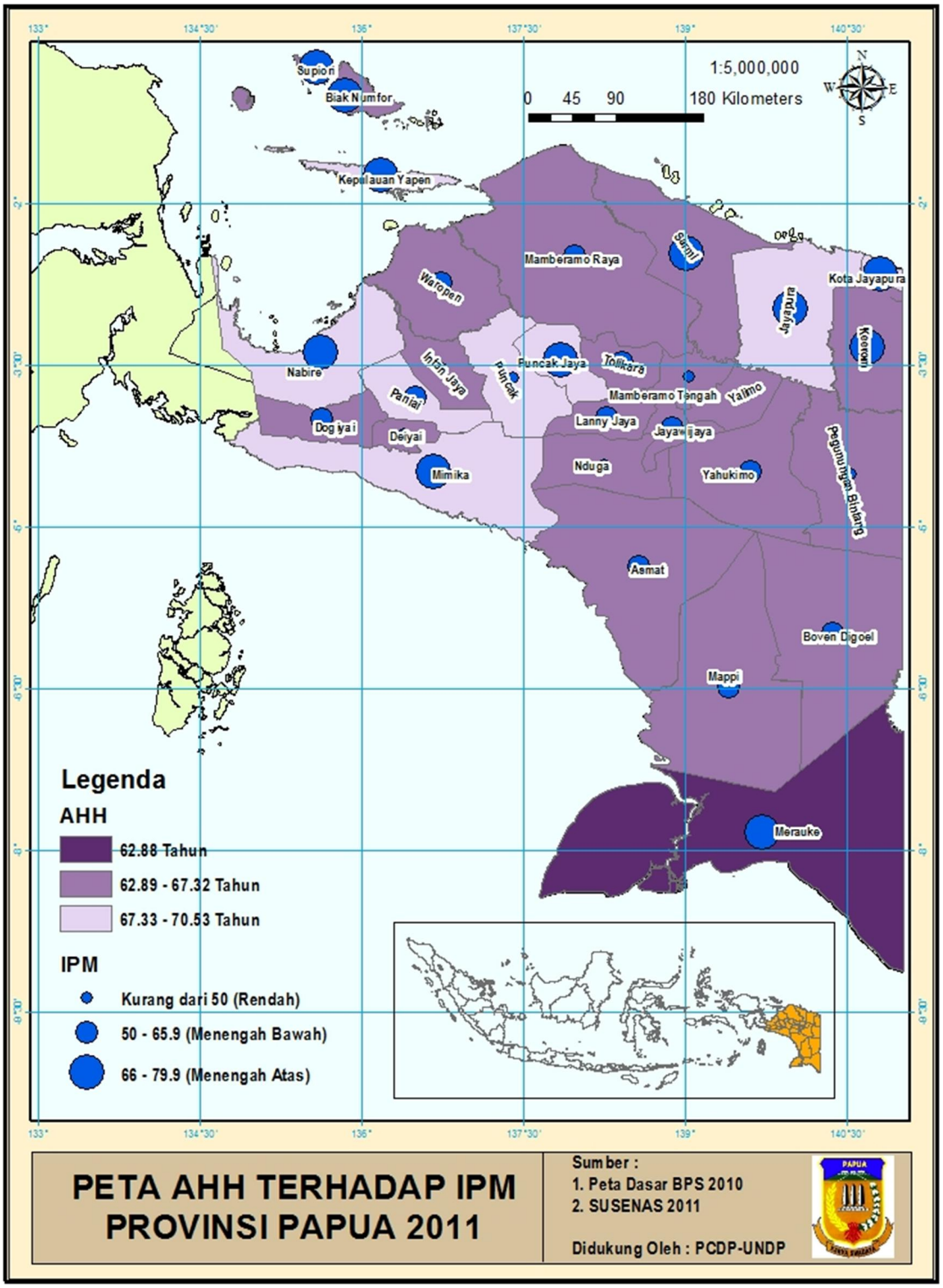


Sumber : BPS 2011

Lain halnya dengan aspek kesehatan yang terpantau pada komponen harapan hidup. Semua daerah kabupaten/kota baik itu di pegunungan dan pedalaman maupun pesisir dan dataran rendah mempunyai harapan hidup yang relatif sama yaitu diantara 62 tahun paling rendah di Merauke dan 69.6 tahun paling tinggi di Mimika.

Begitu juga dengan aspek ekonomi, seperti yang tergambarkan pada komponen pendapatan per kapita, relatif merata. Meski pun di sebagian besar daerah pesisir dan dataran rendah mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi dengan daerah pegunungan dan pedalaman namun perbedaannya tidak begitu jauh, kurang lebih deviasinya hanya 27 ribu rupiah.

Gambar 2.7 IPM dan AHH Provinsi Papua tahun 2011



Sumber : BPS 2011

Meski dari tahun ke tahun terus meningkat, rata-rata IPG Provinsi Papua dengan nilai 61,98, berada jauh dibawah rata-rata nasional, yaitu 67,20 pada tahun 2010. Hal yang sama berlaku pula terhadap IPG kabupaten dan kota. Analisis nilai IPG di setiap kabupaten di Provinsi Papua menunjukkan terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun,dengan sebuah pengecualian yaitu Kabupaten Torikara yang mengalami sedikit penurunan nilai dari 51,50 pada tahun 2007, menjadi 50,84 pada tahun 2008, untuk kemudian meningkat lagi menjadi 51,80 pada tahun 2010.

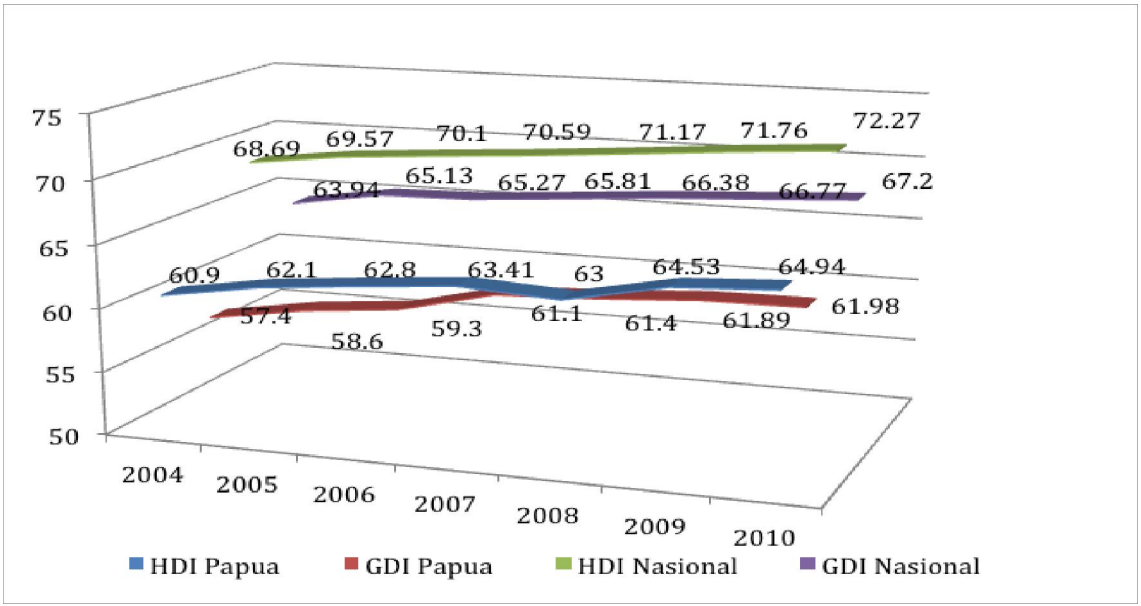
Gambar 2.8 Peta Pengeluaran Perkapita Tahun 2011



Selain IPM, kualitas pembangunan manusia dapat juga diukur dengan menggunakan *Gender Development Index* (GDI). GDI merupakan indikasi dari standar hidup di sebuah negara, yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indikator ini adalah salah satu dari lima indikator yang digunakan oleh UNDP dalam Laporan tahunan

Pembangunan Manusia. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang-bidang tingkat harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Ketimpangan tersebut dapat juga ditelusuri dengan menghitung deviasi antara angka IPM dengan GDI, perhatikan grafik II.5 dibawah ini.

Grafik 2.7 Perbedaan Capaian IPM dan IPG antara Provinsi Papua dan Nasional 2004 – 2010



Sumber : Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012 Provinsi Papua

Tingkat kesenjangan relatif gender di Provinsi Papua lebih kecil dibandingkan kesenjangan relatif gender secara nasional. Seperti yang divisualisasikan pada diatas, kesenjangan relatif gender di Provinsi Papua yang digambarkan melalui deviasi antara IPM dan GDI selama tahun 2004-2007 rata-rata 4,3 poin per tahun, kemudian menurun drastis menjadi 2,6 poin di tahun 2008 dan naik kembali ditahun 2010 menjadi 2,96 poin. Sedangkan secara nasional kesenjangan antara IPM dan GDI rata-rata sebesar 5,3 poin per tahun selama tahun 2004-2011. Berdasarkan kecenderungan kesenjangan gender tersebut, dapat dikatakan bahwa kesetaraan gender di Provinsi Papua masih lebih baik dibandingkan secara nasional, sehingga perbedaan manfaat pembangunan yang diterima antara perempuan dengan laki-laki di Provinsi Papua lebih kecil dibandingkan secara nasional.
Namun yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kenyataan bahwa Papua memiliki 10 kabupaten dengan IPG terendah di Indonesia.

Tabel 2.19 Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Indeks Pembangunan Gender Terendah di Seluruh Indonesia tahun 2009-2010

Tahun 2009 Kabupaten/Kota Terendah	IPG	Tahun 2010 Kabupaten/Kota Terendah	IPG
1	2	3	4
Bangka Selatan	49,46	Mamberamo Tengah	48,01
Yahukimo	49,12	Nduga	47,58
Sampang	48,71	Asmat	47,56
Indramayu	48,51	Sumbawa Barat	47,37
Mappi	48,07	Lombok Utara	46,86
Asmat	47,43	Boven Digoel	46,69
Pegunungan Bintang	47,18	Intan Jaya	46,29
Probolinggo	47,01	Dogiyai	45,63
Boven Digoel	46,46	Puncak	45,17
Sumbawa Barat	46,03	Deiyai	42,7

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012 Provinsi Papua

Tabel di atas mempresentasikan sepuluh (10) kabupaten/kota dengan IPG terendah pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2009, terdapat lima (5) kabupaten di Provinsi Papua dari sepuluh (10) kabupaten/kota dengan IPG terendah. Namun demikian, untuk tahun 2010, terdapat delapan (8) kabupaten di Provinsi Papua yang termasuk dalam daftar sepuluh kabupaten/kota dengan IPG terendah. Dari daftar tersebut, dapat dilihat bahwa tidak hanya Kabupaten pemekaran seperti Deiyai, Mamberamo Tengah, Nduga, Puncak, dan Dogiyai yang masuk dalam daftar tersebut, namun kabupaten lama seperti Asmat, Boven Digoel, dan Intan Jaya juga masuk daftar diatas. Variabel yang berkontribusi pada rendahnya rangking kedelapan kabupaten/kota di Provinsi Papua diatas perlu dianalisis lebih dalam.

PENDIDIKAN

a. Angka Melek Huruf

Sepanjang tahun 2007-2011, tingkat melek huruf di Provinsi Papua tidak mengalami perkembangan yang signifikan dimana tahun 2007 dari 75,41% sampai tahun 2008 dan meningkat menjadi ditahun 2009 75,58 dan menjadi 75,60% di tahun 2010, memasuki tahun 2011 angka melek huruf di Papua menjadi 75,81%. Angka tersebut termasuk yang paling terendah dari seluruh provinsi yang ada diseluruh Indonesia.

Tabel 2.20 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s/d 2011Provinsi Papua

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	NA	NA	NA	NA	NA

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	1.294.494	1.028.023	1.450.851	1.864.589	1.958.892
3	Angka Melek Huruf	75,41	75,41	75,58	75,60	75,81

Kondisi buta aksara terbesar terdapat di daerah sulit akses dan pegunungan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan layanan pendidikan baik untuk jalur formal dan non formal. Selain itu, penyediaan sarana pendidikan di daerah pegunungan dan pedalaman harus menyesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat setempat, sehingga fasilitas harus mengikuti komunitas yang dilayani.

Pada tahun 2010, tercatat penduduk usia 15 tahun ke atas, yang mampu membaca dan menulis hanya sebesar 80,43%. Artinya sekitar satu dari lima pemuda di Provinsi Papua masih buta huruf, baik yang tidak pernah bersekolah maupun yang putus sekolah. Adanya penduduk yang masih buta huruf padahal mereka pernah duduk di bangku sekolah, mengindikasikan kualitas pendidikan di Provinsi Papua juga masih rendah. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian AMH provinsi Papua mengalami peningkatan yang relatif kecil, yaitu sebesar 0,73%, yaitu dari 79,69% pada tahun 2009 menjadi 80,43% pada tahun 2010.

Tabel 2.21 Angka Melek Huruf Tahun 2007 s/d 2011Menurut Kabupaten/KotaProvinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas					Angka melek huruf Tahun 2011
			2007	2008	2009	2010	2011	
1	MERAUKE	NA	98.108	67.209	111.527	83.570	136.499	88,22
2	JAYAWIJAYA	NA	153.329	151.798	73.494	196.085	N/A	52,76
3	JAYAPURA	NA	61.177	37.767	68.968	109.668	N/A	96,89
4	NABIRE	NA	99.799	83.037	63.573	87.257	93.597	83,66
5	KEP. YAPEN	NA	47.708	37.128	55.050	51.507	N/A	89,11
6	BIAK NUMFOR	NA	62.607	38.361	72.947	80.404	81.533	98,67
7	PANIAI	NA	81.725	68.041	89.331	N/A	N/A	62,94
8	PUNJAK JAYA	NA	91.913	82.058	59.383	100.572	79.703	86,82
9	MIMIKA	NA	83.744	46.613	94.592	122.514	125.598	88,19
10	BOVEN DIGOEL	NA	43.159	15.689	27.102	35.240	N/A	33,25
11	MAPPI	NA	43.021	35.388	50.014	46.954	49.091	31,46
12	ASMAT	NA	39.356	36.644	42.272	43.914	N/A	31,13
13	YAHUKIMO	NA	93.483	94.787	103.131	103.792	279.329	32,76

No	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas					Angka melek huruf Tahun 2011
			2007	2008	2009	2010	2011	
14	PEG. BINTANG	NA	57.190	51.744	62.788	68.165	N/A	32,50
15	TOLIKARA	NA	33.737	33.997	38.189	N/A	N/A	33,44
16	SARMI	NA	22.575	19.845	18.000	25.819	22.035	87,67
17	KEEROM	NA	29.400	25.475	35.764	32.276	N/A	92,38
18	WAROPEN	NA	15.240	11.291	11.995	15.456	N/A	77,26
19	SUPIORI	NA	8.641	6.825	9.932	9.184	9.544	96,68
20	MAM. RAYA	NA	N/A	N/A	15.536	N/A	N/A	65,36
21	MAM. TENGAH	NA	N/A	N/A	20.920	N/A	N/A	34,52
22	YALIMO	NA	N/A	N/A	42.017	N/A	N/A	33,51
23	LANI JAYA	NA	N/A	N/A	17.824	N/A	N/A	36,91
24	NDUGA	NA	N/A	N/A	13.727	N/A	N/A	30,54
25	PUNCAK	NA	N/A	N/A	39.476	N/A	N/A	32,13
26	DOGIAYAI	NA	N/A	N/A	43.526	N/A	N/A	34,23
27	DEIYAI	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30,12
28	INTAN JAYA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27,78
29	KOTA JAYAPURA	NA	128.582	84.326	169.773	73.991	191.284	99,83

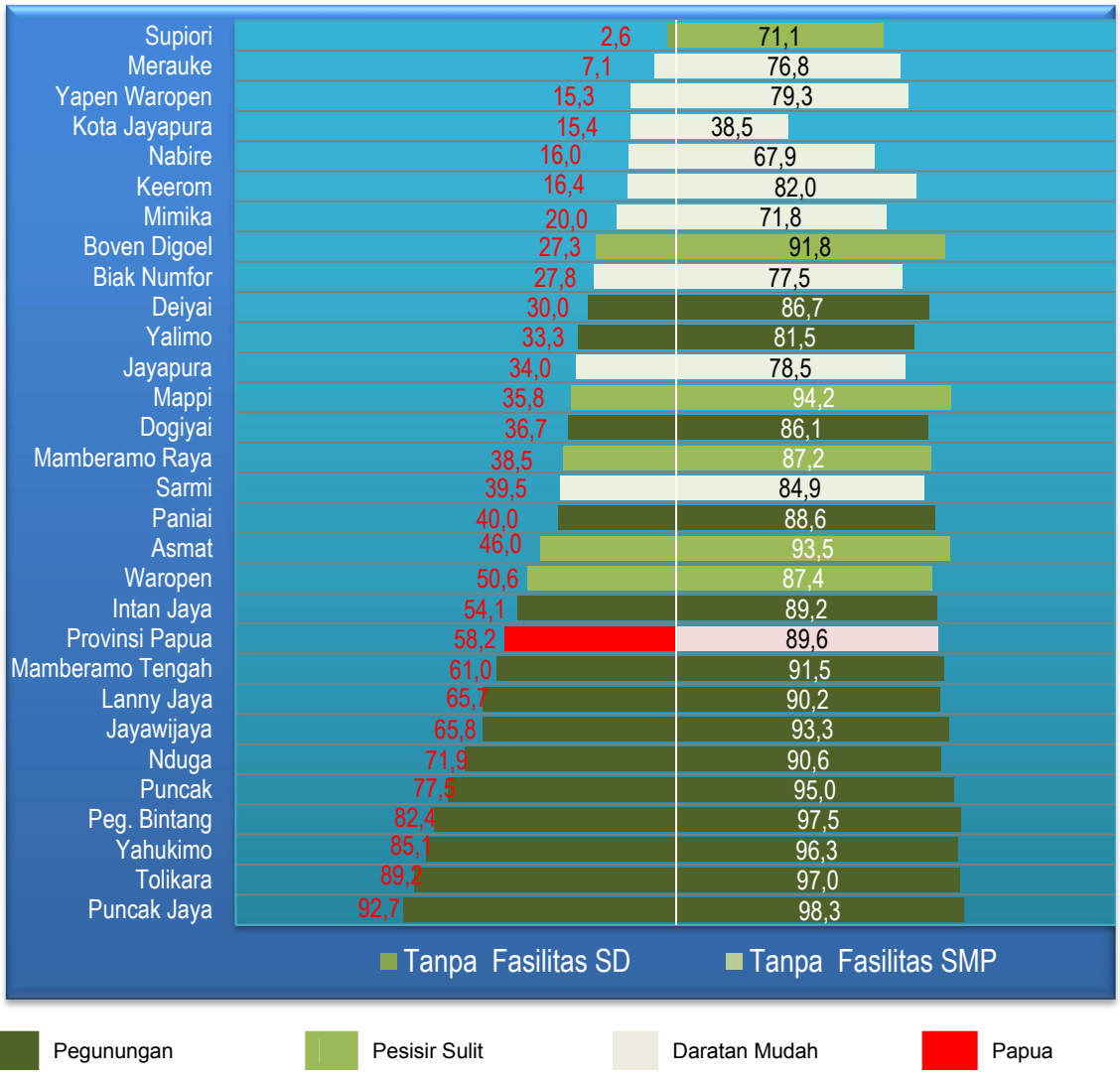
Sumber: BPA Papua (2007-2011)

Bahkan secara umum, perkembangan angka melek huruf antara tahun 2006-2010 kabupaten/kota di Provinsi Papua, cenderung stagnan. Kemajuan yang cukup berarti, hanya terjadi di Jayawijaya, yang meningkat dari 47,21 %pada tahun 2006 menjadi 51,7% untuk tahun 2010, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,17% per tahun. Namun angka melek huruf Jawijaya ini, masih dibawah angka yang diharapkan. Kondisi yang ada menunjukkan tingginya kesenjangan pendidikan antarwilayah di Provinsi Papua.

Dengan menggunakan *range* 0-100, kemudian dikelompokkan kedalam empat kategori, yaitu rendah, menengah bawah, menengah atas dan tinggi, maka kondisi melek huruf di Provinsi Papua secara umum masuk dalam kategori menengah atas. Namun, jika dilihat per kabupaten, maka kabupaten Jayawijaya sampai dengan tahun 2007, begitu pula Kabupaten Boven Digul, Yahukimo, Asmat, Mappi, Pegunungan Bintang dan Tolikara, masuk dalam kategori menengah bawah. Sampai dengan tahun 2010, kemampuan membaca dan menulis ini juga tidak menunjukkan perbaikan, dan berkisar di angka 33%, kecuali untuk Kabupaten Jayawijaya sudah masuk dalam kategori menengah atas dengan angka melek huruf sebesar 52,52%. Kondisi melek huruf yang sama juga terjadi di Kabupaten Paniai yang masuk dalam

kategori menengah atas. Sedangkan kabupaten Merauke, Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Puncak Jaya, Mimika, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, dan Kota Jayapura, telah masuk dalam kategori tinggi walaupun belum mencapai angka maksimal. Untuk melihat hal tersebut dapat digambarakan dalam bentuk grafik dibawah ini

Grafik 2.8 Kampung Tanpa Fasilitas Sekolah (%)



Tabel 2.22 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua

No	Kabupaten/kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Merauke	87,1	87,1	87,1	87,4	87,99	88.22
2	Jayawijaya	47,2	47,2	51,6	51,7	52,52	52.76
3	Jayapura	93,6	96.0	96.0	96,3	96,65	96.89
4	Nabire	83,2	83,2	83,2	83,5	83,59	83.66
5	Kepulauan Yapen	86,6	88,1	88,1	88,3	88,82	89.11
6	Biak Numfor	96,6	97,5	97,5	97,8	98,27	98.67
7	Paniai	62,9	62,9	62,9	62,9	62,93	62.94
8	Puncak Jaya	86,8	86,8	86,8	86,8	86,81	86.82
9	Mimika	86,9	86,9	86,9	87,3	87,96	88.19
10	Boven Digoel	31,7	31,7	31,7	31,8	32,94	33.25
11	Mappi	31,3	31,3	31,3	31,4	31,43	31.46
12	Asmat	31.0	31.0	31.0	31,1	31,10	31.13
13	Yahukimo	31,8	31,8	31,8	31,8	32,52	32.76
14	Peg. Bintang	31,6	31,6	31,6	31,8	32,32	32.50
15	Tolikara	32.0	32,9	32,9	32,9	33,20	33.44
16	Sarmi	87,1	87,1	87,1	87,1	87,55	87.67
17	Keerom	91,1	91,1	91,1	91,1	92,15	92.38
18	Waropen	76,5	76,5	76,5	76,9	77,11	77.26
19	Supiori	94,1	95,4	95,4	95,7	96,19	96.68
20	Mamberamo Raya	-	-	-	64,1	65,04	65.36
21	Nduga	-	-	-	30,5	30,53	30.54
22	Lanny Jaya	-	-	-	32,7	36,72	36.91
23	Mamberamo Tengah	-	-	-	32,1	34,34	34.52
24	Yalimo	-	-	-	32,8	33,30	33.51
25	Puncak Jaya	-	-	-	32,1	32,11	32.13
26	Dogiyai	-	-	-	32,9	34,02	34.23
27	Intan Jaya	-	-	-	27.0	27,39	27.78
28	Deiyai	-	-	-	26,9	28,45	30.12
29	Kota Jayapura	97,9	98,4	99,1	99,1	99,58	99.83
	Papua	**66,8**	**75,4**	**75,4**	**75,6**	**75,60**	**75.81**

Sumber : BPS Papua (2011)

Khusus untuk tahun 2009-2011 Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak Jaya, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai, angka melek hurufnya masih berada di bawah angka 26-35%. Ini mengindikasikan bahwa di kabupaten-kabupaten tersebut kemampuan penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis jumlahnya masih sangat rendah. Kabupaten Deiyai, misalnya, pada tahun 2011 penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis hanya mencapai 30,12%, ini berarti bahwa sekitar 69,88% penduduk usia 15 tahun ke atas masih buta huruf dan belum dapat menikmati pendidikan. Ini berarti juga terjadi ketimpangan angka melek huruf yang sangat mencolok antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua. Kesenjangan antara AMH di

Kota Jayapura yang menduduki peringkat pertama dengan kabupaten Deiyai yang menempati peringkat 29, sangat jauh sehingga perlu mendapat perhatian serius.

b. Rata-rata lama sekolah

Indikator kinerja pembangunan manusia di bidang pendidikan berikutnya adalah rata-rata lama sekolah. Secara keseluruhan untuk tahun 2007-2011, rata-rata lama sekolah di provinsi Papua yang berkisar antara 6,5 sampai 6,7 tahun, menunjukkan bahwa rata-rata penduduk telah menamatkan SD, namun peningkatan ini berjalan lambat dan belum memenuhi standar wajib belajar 9 tahun.

Tabel 2.23 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2007-2011Kabupaten/Kota di Papua

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
1	MERAUKE	87,10	8,48	8,63	9,33	9,35
2	JAYAWIJAYA	47,21	3,77	3,79	4,82	4,84
3	JAYAPURA	96,00	8,75	9,05	9,54	9,56
4	NABIRE	83,20	6,46	6,48	6,55	6,78
5	KEP. YAPEN	88,12	6,50	6,53	6,58	6,63
6	BIAK NUMFOR	97,48	9,25	9,26	9,55	9,58
7	PANIAI	62,90	6,20	6,21	6,21	6,22
8	PUNJAK JAYA	86,80	6,10	6,11	6,11	6,12
9	MIMIKA	86,90	6,70	6,71	6,79	6,87
10	BOVEN DIGOEL	31,70	3,00	3,10	3,37	3,39
11	MAPPI	31,30	3,80	3,89	4,27	4,30
12	ASMAT	31,00	3,86	3,94	4,33	4,35
13	YAHUKIMO	31,80	2,40	2,42	2,47	2,86
14	PEG. BINTANG	31,60	2,20	2,45	2,46	2,54
15	TOLIKARA	32,86	2,40	2,94	3,35	3,38
16	SARMI	87,10	6,40	6,41	6,44	6,55
17	KEEROM	91,10	7,30	7,32	7,36	7,39
18	WAROPEN	76,50	6,27	6,29	6,33	6,37
19	SUPIORI	95,37	7,70	7,97	8,03	8,08
20	MAMBERAMO RAYA	64,10	4,32	4,46	5,17	5,20
21	MAMBERAMO TENGAH	N/A	2,74	2,79	2,79	2,80
22	YALIMO	N/A	3,10	3,33	3,70	3,72
23	LANI JAYA	N/A	2,89	2,90	2,90	2,91
24	NDUGA	N/A	2,71	2,72	2,74	2,75
25	PUNCAK	N/A	2,78	2,79	2,80	2,82
26	DOGIAYAI	N/A	3,04	3,43	3,87	3,89
27	DEIYAI	N/A	N/A	1,81	2,07	2,10
28	INTAN JAYA	N/A	N/A	2,24	2,50	2,79

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
29	KOTA JAYAPURA	98,41	10,86	10,88	11,00	11,03
Papua		**6.5**	**6.5**	**6.57**	**6,7**	**6,7**

Sumber : BPS Provinsi Papua

Kondisi rata-rata lama sekolah di Papua mengalami peningkatan tipis 0,1 (cenderung konstan) 6,6 tahun dari 6,5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Papua menyelesaikan pendidikan kelas 7. Kabupaten/kota yang berada di kawasan pesisir dan dataran cenderung memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pegunungan dan pedalaman. Kondisi rata-rata lama sekolah merupakan dampak dari hasil pembangunan dalam penyediaan layanan fasilitas pendidikan berupa gedung dan ruang kelas, guru kelas dan mata pelajaran, serta subsidi wajib belajar. Rata-rata lama sekolah yang dimandatkan dalam undang-undang otonomi khusus Papua adalah 12 tahun atau setara dengan sekolah menengah. Indikator ini tidak mempertimbangkan lama sekolah akibat terjadinya mengulang kelas yang tinggi serta putus sekolah di jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Dalam periode 1999-2010, misalnya, angka IPM Provinsi Papua hanya meningkat sebesar 0.5582 atau 0.94% per tahun menjadi 64.94.Tahun 2012, IPM Provinsi Papua meningkat menjadi 65.34, meski tetap dalam posisinya sebagai peringkat terakhir dalam seluruh provinsi Indonesia, serta jauh di bawah rata-rata Indonesia sebesar 72.64.Data juga menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di beberapa kabupaten Provinsi Papua.Kabupaten Jayawijaya, Boven Digul, Jayawijaya, Mappi, Asmat, misalnya, rata-rata lama sekolah penduduknya hanya setingkat SD kelas 3. Bahkan di Kabupaten Yahukimo, rata-rata bersekolah penduduknya hanya sampai kelas 2 SD. Hal yang hampir sama juga berlaku diKabupaten Pegunungan Bintang, dan Tolikara. Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Mimika, Sarmi, dan Waropen, rata-rata lama sekolah masyarakatnya sudah lebih baik kondisinya, yaitu telah menamatkan SD. Sedangkan untuk kabupaten Keerom dan Supiori, rata-rata masyarakatnya telah menyelesaikan jenjang kelas 1 SMP. Sementara untuk kabupaten Merauke, Jayapura, rata-rata lama sekolah masyarakatnya sudah diatas 8 tahun, atau sudah mencapai kelas 2 SMP. Dari data yang ada nampak bahwa hanya Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura yang rata-rata lama sekolah masyarakatnya telah mencapai jenjang SLTA. Kondisi ini tentunya memprihatinkan, karena dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kualitas SDM yang terdapat di provinsi Papua, masih termasuk rendah.

Partisipasi Sekolah

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (2010), menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan dasar yang menyangkut anak-anak usia 7-15 tahun belum seperti yang diharapkan. Dalam sumber data tersebut disebutkan bahwa jumlah anak berusia 7-12 tahun adalah sebesar 427 ribu jiwa, dengan capaian APS 7-12 tahun sebesar 76,22%, berarti bahwa masih terdapat sekitar 24,78% (100% -76,22%) atau 100 ribu anak usia sekolah yang tidak tersentuh pendidikan. Hal yang hampir sama dialami oleh anak usia 13-15 tahun; capaian APS masih *stagnant* di sekitar angka 74% dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2010).

Tabel 2.24 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	347.247	350.411	361.681	374.835	393.795
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	247.682	247.440	247.020	408.255	393.795
1.3.	APS SD/MI	84,62	85,44	81,18	84,10	N/A
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	85.916	90.878	92.773	94.466	99.529
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	128.462	125.620	123.120	188.427	330 768
2.3.	APS SMP/MTs	77,86	77,02	76,80	78,69	N/A

Sumber : BPS Provinsi Papua

Adalah sebuah ironi, bahwa meskipun Otsus Provinsi Papua telah dimulai pada tahun 2002, namun ternyata implementasi penyelenggaraan pendidikan murah di Provinsi Papua,baru dijalankan pada awal tahun 2009 melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Bagi Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan Pengurangan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik OAP pada Jenjang Pendidikan Menengah. Artinya, selama 7 tahun masyarakat Papua harus menunggu realisasi dari penjabaran pelaksanaan Otsus pendidikan tersebut.

Akibatnya, pembangunan pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Papua selama masa Otsus berjalan sangat lambat. Sebagai indikatornya dapat diperhatikan pada perkembangan APS (Angka Partisipasi Sekolah) Papua selama tahun 2006-2010 yang menggambarkan bagaimana akses pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Papua selama itu, lihat (Tabel 2.24) berikut ini.

Tabel 2.25 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2006-2010

Usia	Wilayah	2006	2007	2008	2009	2010
7 - 12	Papua	80.38	83.36	83.38	76.09	76.22
	Indonesia	97.39	97.64	97.88	97.95	98.02
13-15	Papua	77.54	78.01	78.22	73.68	74.35
	Indonesia	84.08	84.65	84.89	85.47	86.24
16-18	Papua	53.64	54.72	54.13	47.51	48.28
	Indonesia	53.92	55.49	55.50	55.16	56.01

Sumber : BPS Indonesia (2012)

Selain itu, terlihat jelas bahwa APS Provinsi Papua sepanjang tahun 2006-2010 selalu dibawah APS nasional, baik itu untuk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, maupun 16-18 tahun. Untuk APS dengan usia 7-12 tahun, rata-rata setiap tahun hanya sebesar 79,89%, terpaut jauh dengan APS nasional yang mencapai 97,78% per tahun untuk usia dan periode yang sama. Sedangkan pada usia 13-15 tahun, di Provinsi Papua sebesar 76,36%, sementara nasional sebesar 85,07%. Terakhir untuk APS usia 16-18 tahun, rata-rata per tahun di Papua berkisar 51,66% dan nasional sekitar 55,22%.

Selain permasalahan APS yang masih di bawah rata-rata nasional, kecenderungan APS di Provinsi Papua selama periode tersebut terlihat menurun setiap tahunnya pada semua usia pendidikan, padahal secara nasional terus meningkat. Untuk periode yang sama rata-rata APS Provinsi Papua mengalami penurunan sebesar 1,04% per tahun pada usia 7-12 tahun, sementara APS untuk usia 13-15 tahun menurun sebesar 0,80% per tahun, dan APS usia 16-18 tahun rata-rata menurun 1,34% per tahun.

Hingga tahun 2010, Provinsi Papua belum berhasil menuntaskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun (usia 7-15 tahun) yaitu 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Indikatornya dapat diperhatikan pada rasio APK (Angka Partisipasi Kasar) di tingkat SD dan SMP sebagaimana yang terlihat pada Gambar 3.4. Dalam gambar tersebut terpampang jelas bahwa berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Papua (2010), APK untuk pendidikan SD baru mencapai 93,27%, sedangkan SMP jauh lebih rendah yakni 60,05%. Sementara untuk pendidikan SMA hanya 48,20%. Kondisi yang memperihatinkan bila dilihat pada APM (Angka Partisipasi Murni) untuk semua jenjang pendidikan, dimana APM untuk SD hanya 76,22%, untuk SMP sebesar 49,62%, dan untuk SMA sebesar 36,06%. Dari seluruh keragaman angka partisipasi pendidikan ini dapat dikatakan bahwa pemerataan akses pendidikan di Provinsi Papua hingga tahun 2010 belum berjalan baik. Masih banyak masyarakat yang berada pada usia pendidikan tertentu (khususnya untuk pendidikan 9 tahun) belum menikmati pelayanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

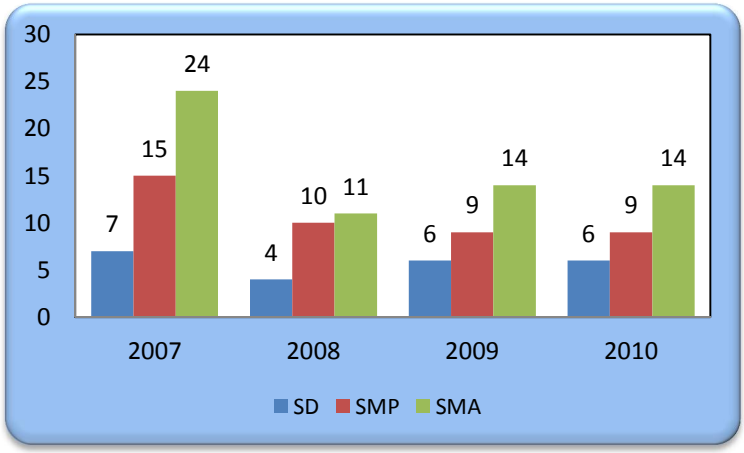
Tabel 2.26 Rasio Murid Sekolah dan Guru Di Provinsi Papua Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua Tahun 2007-2010

PENDIDIKAN	TAHUN	GURU	KELAS	SEKOLAH
SD	2007	23	27	169
	2008	34	35	149
	2009	39	34	222
	2010	30	27	176
SMP	2007	14	34	209
	2008	20	36	190
	2009	22	34	200
	2010	21	30	197
SMA/SMK	2007	11	32	259
	2008	24	27	269
	2009	19	30	262
	2010	19	29	277

Sumber : BPS Papua, 2011(diolah)

Jika perkembangan pendidikan di Provinsi Papua diamati berdasarkan rasio guru terhadap murid, dapat dikatakan bahwa selama ini kondisinya cukup ideal dan mengarah pada perbaikan. Pada Tabel 3.3. di atas, sepanjang tahun 2007-2010 rata-rata rasio guru-murid di tingkat SD adalah 32 murid per guru per tahun, di tingkat SLTP sebesar 19 murid per guru per tahun, dan SLTA sebesar 18 murid per guru per tahun. Adapun untuk rasio kelas terhadap murid, terlihat selama tahun 2007-2010 masih di bawah rasio ideal yaitu jumlah murid 40 orang per kelas pada setiap satuan dan jenjang pendidikan. Rata-rata untuk tingkat SD rasionya adalah 31 murid per kelas, kemudian SMP sebesar 34 murid per kelas, dan SMA sebesar 30 murid per kelas. Rendahnya rasio murid per kelas ini menandakan bahwa jumlah murid per kelas untuk semua tingkat pendidikan di Papua masih mengalami kekurangan. Dengan kata lain, belum sepenuhnya penduduk yang masuk pada usia pendidikan tertentu mengikuti jenjang pendidikan yang sesuai, sebagaimana yang tergambarkan pada rasio-rasio angka partisipasi pendidikan sebelumnya.

Grafik 2.9 Rasio Guru-Sekolah Di Provinsi Papua Tahun 2010



Meskipun kecenderungan rasio guru-murid terlihat cukup ideal, namun kenyataannya masih banyak terdapat kekurangan guru. Indikasi kurangnya jumlah guru dapat ditelusuri dengan melihat perkembangan kebutuhan guru. Misalkan untuk tingkat SD, idealnya satu gedung SD minimal diawasi oleh 9 guru. Namun kecenderungan selama tahun 2007-2010 menunjukkan terjadi kekurangan guru di SD rata-rata 3 orang per tahun, oleh karena ketersediaan guru setiap tahunnya untuk satu sekolah dasar hanya 6 orang per tahun. Kekurangan guru bukan hanya terjadi di SD, namun juga terlihat pada jenjang pendidikan SMP dan yang lebih banyak di SMA. Seperti yang disajikan dalam Gambar 3.5, rata-rata setiap tahun jumlah guru SMP sekitar 11 orang, yang berarti kurang 1 guru dari jumlah yang ideal sesuai kebutuhan minimal mata pelajaran, yaitu sebanyak 12 orang. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA, rata-rata jumlah guru per sekolah hanya 16 orang per tahun, dengan demikian terdapat kekurangan guru sebanyak 4 orang per tahun dari jumlah ideal 20 mata pelajaran.

KESEHATAN

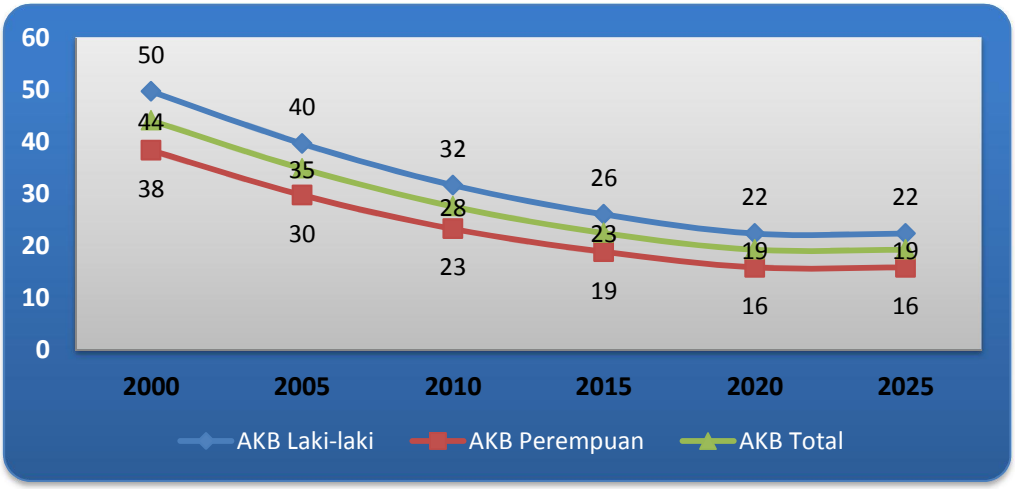
a) Angka Kematian Bayi dan Balita

Kondisi kesehatan di Provinsi Papua, pernah membaik antara kurun waktu 2000 dan 2005. Jumlah kematian bayi di Papua, misalnya, dapat ditekan dari 44 per 10.000 bayi di tahun 2000 menjadi 35 per 10.000 bayi pada tahun 2005. Begitu juga dengan angka harapan hidup (AHH) yang mengalami perbaikan dari 67,90 tahun pada tahun 2007 meningkat menjadi 68,35 tahun pada tahun 2010. Namun demikian, data terbaru mencatat bahwa AHH di Provinsi Papua terbilang masih rendah dan jauh di bawah rata-rata nasional, dengan pertumbuhan di bawah 1.0% per tahun.

Sementara itu, berdasarkan kecenderungan angka kematian bayi (AKB), kondisi kesehatan di Papua terlihat lebih baik dibandingkan NTB (Nusa Tenggara Barat), Malut (Maluku Utara), Kalsel (Kalimantan Selatan), Sulteng (Sulawesi Tengah), Banten, Maluku, NTT (Nusa Tenggara Timur), dan Kalbar (Kalimantan Barat).

Pada tahun 1980, angka kematian bayi di Provinsi Papua sangat tinggi, yaitu sebesar 105, yang artinya ada 105 bayi yang meninggal di antara seribu kelahiran hidup. Namun upaya menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Papua terlihat menunjukkan hasil yang cukup nyata, dengan penurunan hingga mencapai angka 80 per seribu kelahiran hidup pada 1990, kemudian turun lagi hingga 51 per seribu kelahiran hidup pada 2000, dan akhirnya turun tajam hingga mencapai angka 19 per seribu kelahiran hidup pada 2010.[1]

Grafik 2.10 Proyeksi Angka Kematian Bayi di Provinsi Papua 2000-2025



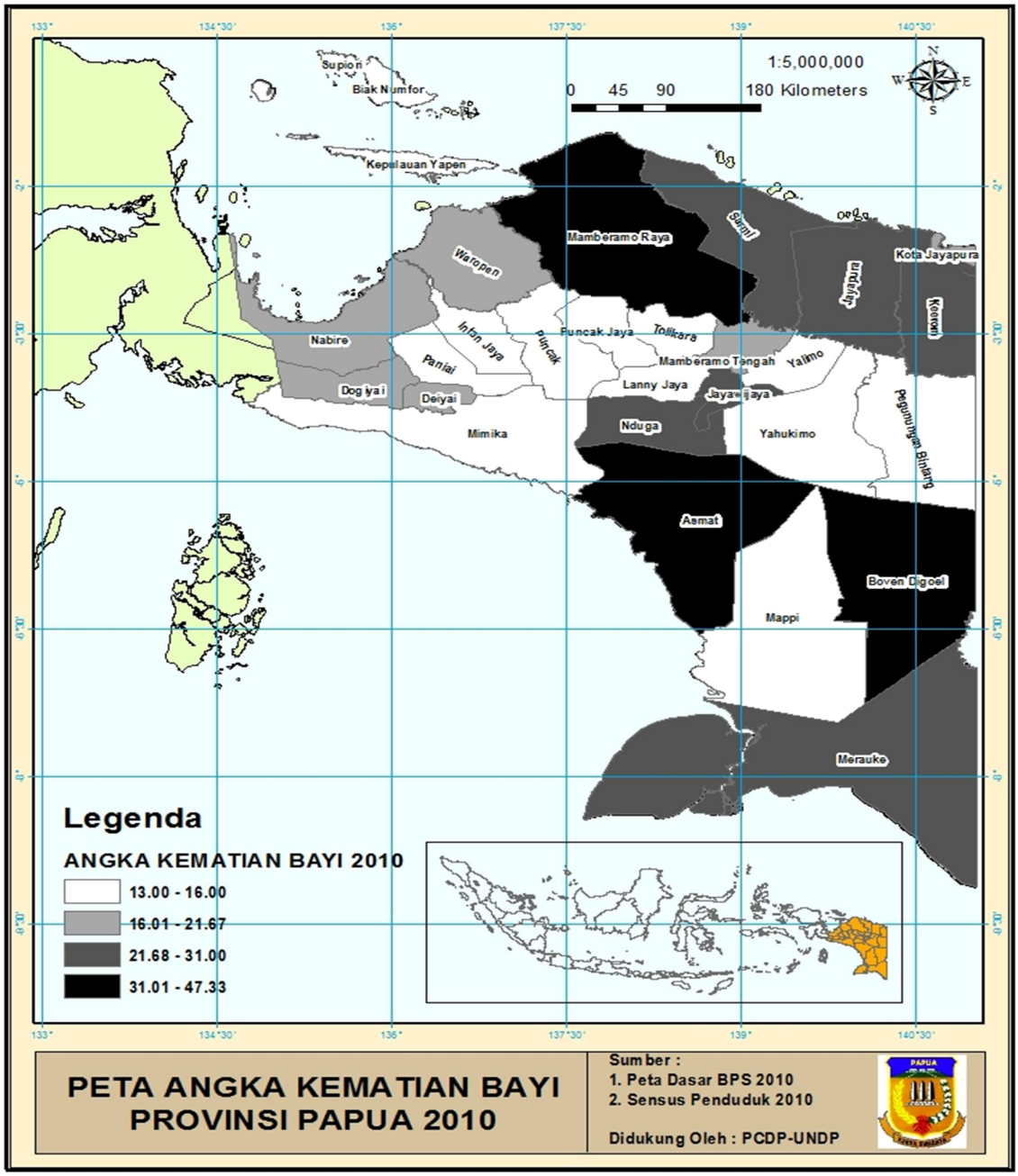
Namun, berdasarkan penurunan yang lamban dari AKBA dari tahun 2000, yakni dari sebesar 56 (per 1000 kelahiran) menjadi 41 pada tahun 2007 dan nilai target yang besarnya 32 pada tahun 2015, bisa disimpulkan bahwa masih perlu adanya upaya khusus agar target tersebut dapat tercapai.

Kondisi lapangan juga menunjukkan perlunya ada upaya khusus untuk meningkatkan angka cakupan imunisasi campak agar target cakupan dapat terus meningkat sampai tahun 2015. Proporsi anak berusia 12-23 bulan yang diimunisasi campak memang meningkat dari 44,5% pada tahun 1991 menjadi 49% pada tahun 2007, namun belum cukup cepat untuk segera mencapai angka yang universal. Bahkan data hasil Susenas (BPS) empat tahun terakhir

[1]Meskipun demikian, data tersebut perlu dicek ulang karena hasil SDKI 2007 memberikan nilai AKB sebesar 41 per 1.000 kelahiran hidup.

(2005-2009) menunjukkan penurunan jumlah anak umur 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak).

Gambar 2.9 Peta Angka Kematian Bayi Provinsi Papua Tahun 2010



Departemen Kesehatan menetapkan bahwa imunisasi yang wajib diberikan adalah BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis B. Waktu pemberiannya sudah ditetapkan secara bertahap. Imunisasi BCG diberikan satu kali pada anak berusia 0-2 bulan. Imunisasi DPT dan polio diberikan secara bersamaan dan berulang pada usia 2, 3, atau 4 bulan dan

pengulangannya 4 bulan kemudian sebanyak 3 kali. Imunisasi campak yang akan memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak diberikan sebanyak 2 kali, yang pertama, pada saat anak berumur 9 bulan atau lebih, dan kedua diberikan pada usia 5-7 tahun. Di Provinsi Papua, persentase balita berumur 1 tahun yang mendapat imunisasi campak menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 sekitar 70,56% anak yang berusia 1 tahun telah mendapatkan imunisasi campak, namun angkanya menurun hingga tahun 2009 hanya sekitar 65,73% anak berusia 1 tahun yang telah mendapatkan imunisasi campak. Banyak hal yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam upaya untuk meningkatkan angka cakupan imunisasi, terutama untuk wilayah terisolasi.Selain itu, disparitas cakupan imunisasi campak untuk anak berusia 1 tahun antar-wilayah di Provinsi Papua masih merupakan masalah yang harus diselesaikan. Terdapat 14 kabupaten yang persentasenya masih di bawah rata-rata provinsi. Persentasi yang tertinggi terdapat di Kabupaten Jayapura yaitu sebesar 96,62%, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Puncak dan Intan Jaya masing-masing nol persen atau tidak ada balita berumur 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak.Berdasarkan topografi wilayahnya, cakupan balita berumur 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak di kabupaten yang terletak di daerah dataran mudah berada diatas rata-rata Provinsi Papua. Sedangkan kabupaten yang terletak di dataran sulit relatif lebih rendah dibanding angka cakupan Provinsi, meskipun beberapa diantaranya seperti: Supiori dan Mappi sudah lebih tinggi cakupannya. Sementara itu, cakupan balita umur 1 tahun di daerah yang terletah di Pegunungan cenderung masih rendah. Hanya beberapa daerah seperti: Nduga, Lanny Jaya, Tolikara dan Mamberamo Tengah memiliki cakupan yang lebih tinggi.

b. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup di Provinsi Papua menunjukkan angka yang terus meningkat, dari 67,60 tahun di tahun 2006 menjadi 68,60 tahun di tahun 2010, atau naik sebanyak satu point. Angka ini dibetuk dari konsistensi rata-rata lama hidup dengan asumsi tidak terjadi perubahan prola mortalitas.

Tabel 2.27 Angka Harapan Hidup (AHH) Papua

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
AHH	67,60	67,90	68,10	68,35	68,60

Sumber: PDA 2012, BPS Papua 2012

Selain itu, AHH juga sebagai proxy atas penyediaan layanan kesehatan yang baik dan terjangkau sehingga memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

c. Proporsi Bayi Gizi Buruk

Salah satu ukuran penting dalam kesehatan adalah proporsi bayi gizi buruk dengan gambaraan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2.28 Kondisi Bayi Lahir di Papua

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Bayi Lahir	19.885	19.468	15.005	13.820	26.230
Berat Bayi Lahir Rendah	443 (2,2%)	77 (0,4%)	514 (3,4%)	31 (0,2%)	700 (2,7%)
Bayi Gizi Buruk	4.420 (22,2%)	4.503 (23,1)	1.689 (11,3)	4.503 (32,6)	1.612 (6,1)

Sumber: PDA 2012, BPS Papua 2012

Jika dilihat dari proprosi berat bayi lahir rendah dan bayi gizi buruk terjadi secara fluktuatif. Meski demikian, jumlah kasus yang terjadi masih sangat tinggi yang mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang masih sangat rendah terkait pengetahuan kesehatan.

a) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa tahun 2009 angka kelangsungan hidup bayi mencapai 7,10 % dengan jumlah kelahiran sebanyak 19.468 jiwa dan jumlah kematian sebanyak 138 jiwa ditahun yang sama.

Tabel 2.29 Perkembangan Angka kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	N/A	N/A	138	415	N/A
2	Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	19.885	19.468	19.448	27.248	N/A
3	Angka kelangsungan hidup bayi	N/A	N/A	7,10	15,23	N/A

Sumber : DDA Papua 2007-2011

b) Persentase Balita Gizi Buruk

Salah satu ukuran penting dalam kesehatan adalah proporsi bayi gizi buruk dengan gambaraan perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2.30 Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

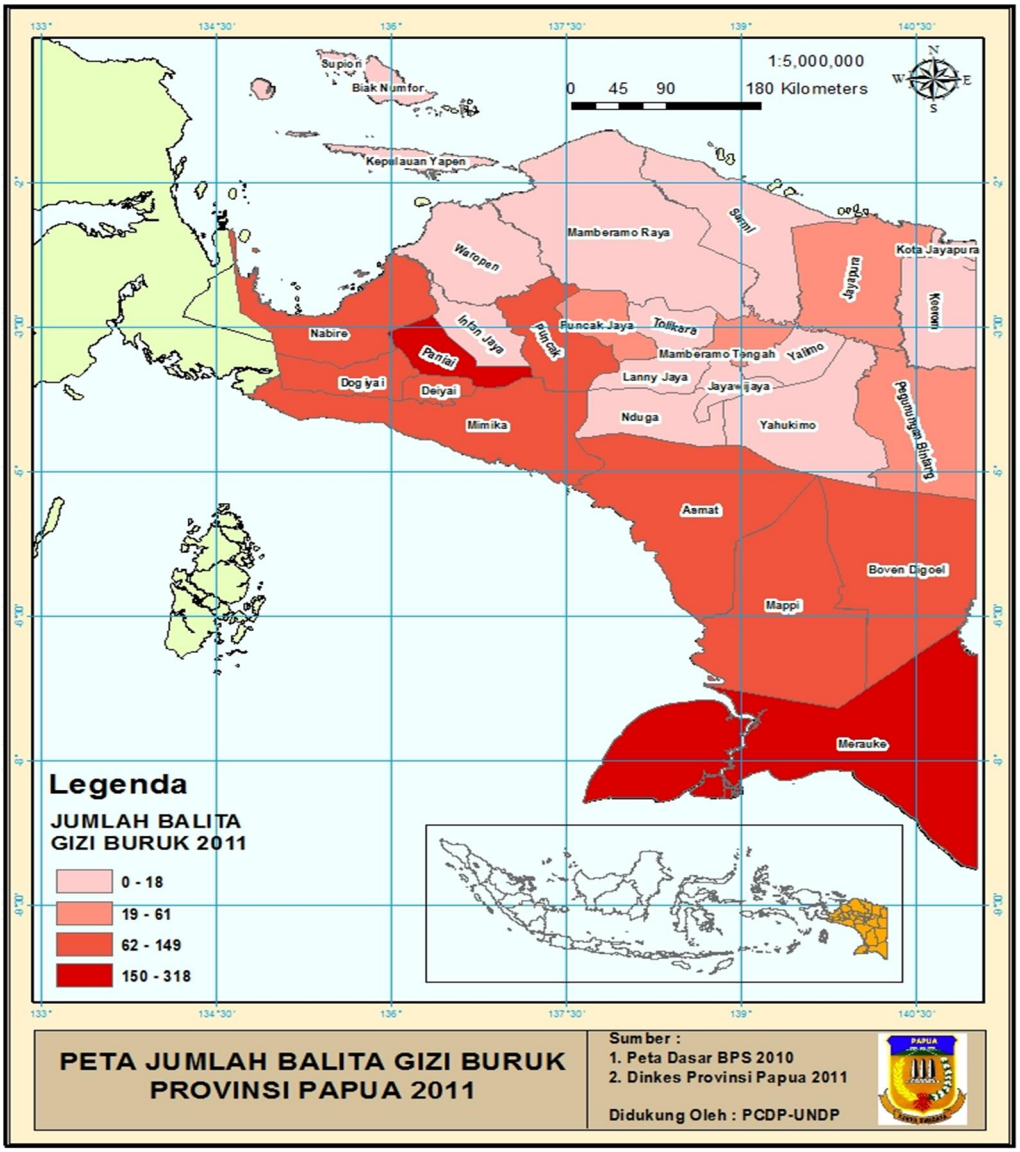
NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	NA	NA	1.172	1.596	NA

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
2	Jumlah Balita	105.240	233.900	236.500	313.395	326.496
3	Presentase Gizi Buruk	NA	NA	0,49	0,50	NA

Sumber : DDA Papua 2007-2011

Pada tabel diatas dapat diperhatikan bahwa ditahun 2009 dan 2010 persentase gizi buruk terlihat mengalami peningkatan. Angka ini meningkat secara rill dan nominal.

Gambar 2.10 Peta Jumlah Balita Gizi Buruk Provinsi Papua Tahun 2011



a. Penyakit Endemik – Malaria

Hingga saat ini, malaria masih menjadi salah satu penyakit endemik di tanah Papua, dengan bukti bahwa kasus penyakit ini terjadi dengan intensitas yang tinggi.

Tabel 2.31 Cakupan Penderita Malaria Di Papua

Metode	2007	2008	2009	2010	2011
Klinis Malaria	371.385	334.122	375.971	407.773	259.634
AMI (0/00)	116	152	170	171	183
SD Diperiksa	230.755	212.002	293.501	406.086	310.728
SD Positif	124.384	122.300	128.164	143.061	51.418

SD: Sediaan Darah, Sumber: PDA 2012, BPS Papua 2012

Jumlah kasus malaria ditemukan dengan jumlah yang tinggi dari berbagai metode pemeriksaan penyakit malaria. Hal ini menunjukkan bahwa malaria masih menjadi penyakit endemis di Papua. Melihat dampak signifikan yang ditimbulkan oleh penyakit malaria, maka perlu kerja keras semua pihak untuk menekan kejadian malaria secara konsisten.

b. Penyakit Berbahaya - HIV dan AIDs

HIV dan AIDS salah satu penyakit yang berbahaya bagi masyarakat dengan tingkat kejadian yang luar biasa per seratus ribu penduduk. Pada tahun 2011, jumlah penduduk Papua penderita HIV sebanyak 5362 orang dan penderita AIDS sebanyak 7914 orang. Kejadian kasus HIV dan AIDS pada kelompok umur di Papua adalah sebagai berikut;

Tabel 2.32 Cakupan Penderita HIV-AIDS Di Papua

KELOMPOK UMUR	HIV	AIDS	JUMLAH
<1	5	48	53
1 – 14	105	193	298
15 – 19	555	752	1.307
20 – 24	1.246	1.765	3.011
25 – 49	3.044	4.721	7.765
>50	137	291	428
Tidak Diketahui	270	144	414
Total	5.362	7.914	13.276

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2012

KETENAGA KERJAAN

Kondisi ketenaga kerjaan di Papua jika dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir bahwa jumlah penduduk yang bekerja semakin bertambah, dimana ditahun 2007 jumlah penduduk yang bekerja hanya mencapai 941 ribu jiwa dan memasuki tahun 2011 jumlah pendiduk yang berkerja mencapai 1,4 juta orang. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang

berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa rasio antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja memiliki nilai diatas 0,90, hal ini dapat dikatakan bahwa penduduk yang tidak bekerja ataupun dalam usaha mencari pekerjaan lebih banyak.

Tabel 2.33 Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Penduduk yang bekerja	941.100	1.028.023	1.082.028	1.456.545	1.476.227
2	Jumlah Angkatan Kerja	990.774	1.075.214	1.127.036	1.510.176	1.536.728
3	Rasio Penduduk yang Bekerja	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96

Rasio penduduk yang mendapatkan pekerjaan di provinsi Papua cukup tinggi dengan rata-rata 0.96% hal ini menunjukkan bahwa pemerinth dan swasta serta masyarakat sendiri telah mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup banyak sehingga dapat menyerap jumlah penduduk angkatan kerja. Demikian pula rasio penduduk yang bekerja di kabupaten kota menunjukkan angka yang menggembirakan, rata-rata 96% penduduk mendaoatkan langan pekerjaan.

Namun jika kita melihat kembali data jumlah kemiskinan yang ada di Papua yang cukup tinggi dapat dikatakan hal ini cukup mengherankan, dimana pada rasio penduduk yang bekerja sudah dapat dikatakan hampir seluruh penduduk usia kerja mendapat pekerjaan akan tetapi kemisikinan masih terdapat di hampir seluruh wilayah yang ada di Papua. Memang dalam menganalisis ketenagakerjaan dalam suatu daerah bahkan dalam suatu negara, hal ini pasti ditemukan.

Rasio tenaga kerja jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota yang ada di Papua dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.34 Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2009 Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Penduduk yang bekerja	Jumlah Angkatan Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja
1	MERAUKE	75.142	79.978	0,94
2	JAYAWIJAYA	69.318	70.188	0,99

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Penduduk yang bekerja	Jumlah Angkatan Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja
3	JAYAPURA	37.074	42.065	0,88
4	NABIRE	45.802	47.581	0,96
5	KEP. YAPEN	38.687	42.544	0,91
6	BIAK NUMFOR	40.796	47.258	0,86
7	PANIAI	77.009	77.700	0,99
8	PUNJAK JAYA	51 .328	51 .382	1,00
9	MIMIKA	52.840	53.673	0,98
10	BOVEN DIGOEL	18.003	19.892	0,91
11	MAPPI	37.959	38.321	0,99
12	ASMAT	35.779	36.112	0,99
13	YAHUKIMO	99.882	101.273	0,99
14	PEG. BINTANG	44.021	44.915	0,98
15	TOLIKARA	36.175	36.368	0,99
16	SARMI	13.150	13.518	0,97
17	KEEROM	25.851	27.331	0,95
18	WAROPEN	6.794	7.383	0,92
19	SUPIORI	6.814	6.919	0,98
20	MAMBERAMO RAYA	12.659	12.812	0,99
21	MAMBERAMO TENGAH	17.543	17.624	1,00
22	YALIMO	13.104	13.161	1,00
23	LANI JAYA	41.318	41.454	1,00
24	NDUGA	20.573	20.643	1,00
25	PUNCAK	35.973	36.120	1,00
26	DOGIAYAI	38.765	39.008	0,99
27	DEIYAI	N/A	N/A	N/A
28	INTAN JAYA	N/A	N/A	N/A
29	KOTA JAYAPURA	89.669	101.813	0,88
	Jumlah	**1.082.028**	**1.127.036**	**0,96**

Berdasarkan data Dinas TenagaKerja dan Kependudukan, jumlah pencarikerja terdaftar pada tahun 2011 mencapai 100.595 orang, turun sekitar 9,44 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 111.077 orang. Mereka terdiri dari 60,06 persen laki-laki dan 39,94 persen perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, 30,67 persen pencari kerja berpendidikan Sarjana dan Diploma, 59,59 persen SMA/sederajat 5,07 persen SMP 4,67 persen tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD. Sedangkan persentase lowongan kerja terdaftar hanya 11,69 persen dari total pencari kerja.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan masyarakat Papua tidak dapat terlepas dari unsur kebudayaan. Berhasil tidaknya pembangunan di Papua sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas dan responsifbilitas budaya orang papua terhadap program-program pembangunan yang dijalankan. Oleh karenanya mengenal lebih jauh budaya Papua merupakan salah satu *key word* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Papua dalam perspektif jangka panjang.

Penduduk asli Papua sebenarnya termasuk dalam rumpun bangsa Papua-Melanesia yang bermukim di daerah Melanesia yakni sekelompok pulau yang berada di sebelah timur laut Australia. Masyarakatnya terdiri atas suku-suku bangsa dan beraneka ragam kebudayaannya. Menurut Tim Peneliti Universitas Cenderawasih di tahun 1991 telah diidentifikasi adanya 44 suku bangsa yang masing-masing merupakan sebuah kesatuan masyarakat, kebudayaan dan bahasa yang berdiri sendiri. Sebagian besar dari 44 suku bangsa itu terpecah lagi menjadi 177 suku (Djoht, 2002).

Van Baal (1951) dalam Djoht (2002) mengatakan bahwa ciri utama kebudayaan Papua adalah tidak adanya integrasi yang kuat dari kebudayaan-kebudayaan mereka. Ciri-ciri kebudayaan tersebut muncul karena kebudayaan orang Papua yang rendah tingkat teknologinya dan yang dihadapkan pada lingkungan hidup yang keras sehingga dengan mudah menerima dan mengambil alih suatu unsur kebudayaan lain yang lebih maju atau lebih cocok. Adapun ciri-ciri yang menonjol dari Papua adalah keanekaragaman kebudayaannya, namun dibalik keanekaragaman tersebut terdapat kesamaan ciri-ciri kebudayaan mereka. Berdasarkan kecirian yang khas tersebut beberapa ahli antropologi telah membuat pengelompokan mengenai kehidupan masyarakat dan budaya Papua sebagai berikut.

Secara garis besarnya budaya asli orang Papua dapat dipetakan berdasarkan mata pencaharian dan atau letak geografi, lihat Tabel 2.32. Umumnya jika dipetakan berdasarkan mata pencaharian, budaya Papua dapat dibagi menjadi budaya orang Papua yang sudah mengenal pasar, dan yang masih subsistens.

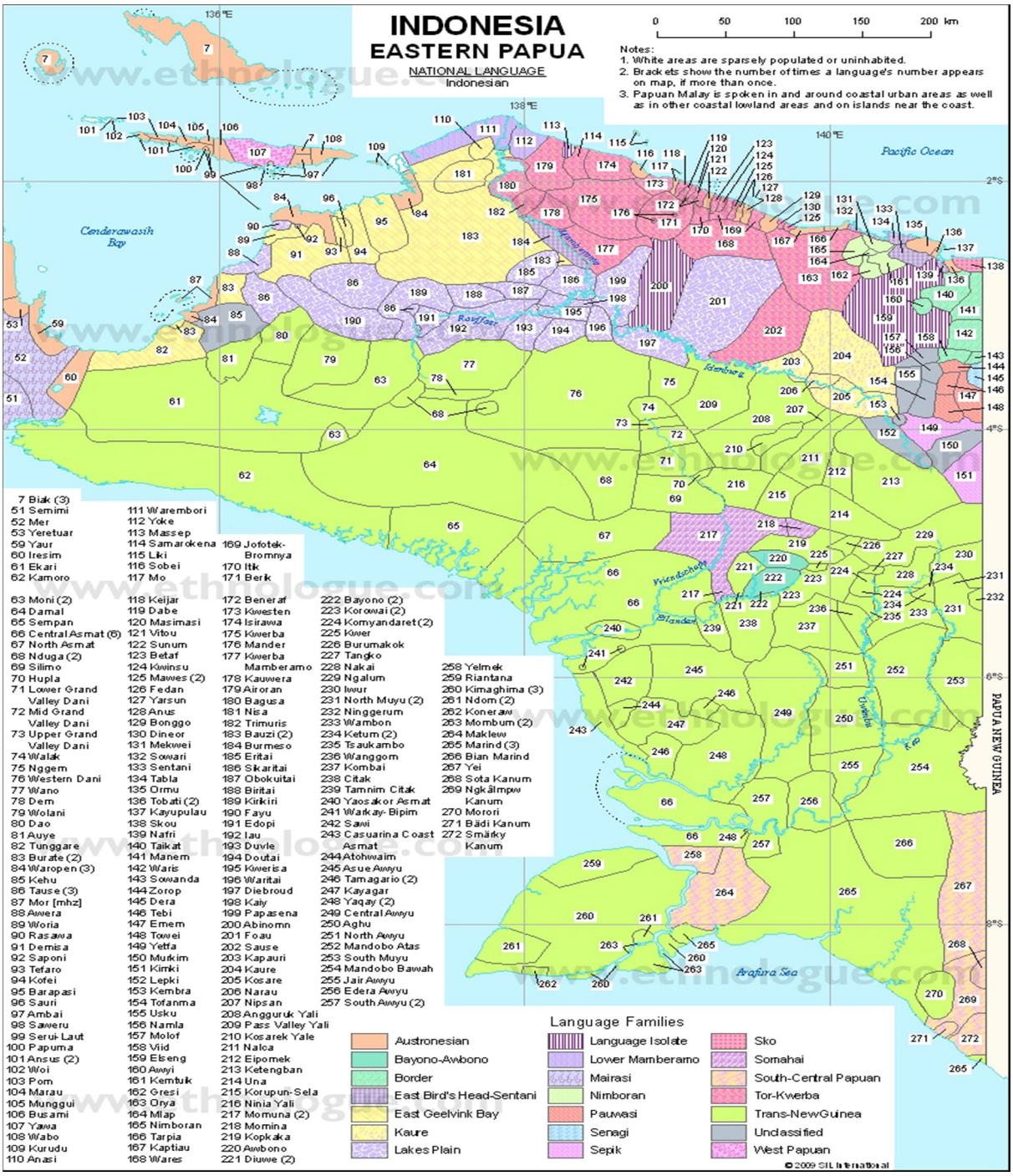
Tabel 2.35 Beberapa Pendapat Ilmuwan Antropologi Mengenai Pengelompokan Masyarakat Dan Budaya Asli Papua

NO	PENULIS/KONSEPTOR	PENGELOMPOKKAN
1.	Petocz (1987)	Kategori masyarakat Papua di dasarkan pada tinggi daratan diatas permukaan laut : • Hutan Bakau, terdapat di rawa-rawa berair asin payau. Vegetasi ini tumbuh di sepanjang cekungan yang landai dan paling berkembang di daerah yang terlindung dari gamparan gelombang air laut. Hutan bakau yang paling luas terdapat di muara teluk Bintuni. • Rawa, disepanjang pantai selatan, dataran rendah daerah Kepala Burung dan pantai utara delta Mamberamo kearah barat sampai muara teluk Cenderawasih. • Hutan basah dataran rendah • Zone pegunungan bawah • Zone pegunungan atas • Zone Alpin
2.	Walker danMansoben (1990)	Menggolongkan masyarakat dan kebudayaan Papua menurut tipe-tipe mata pencaharian yaitu : • Daerah rawa-rawa, pantai dan banyak sungai • Daerah kaki bukit dan lembah-lembah kecil • Daerah dataran tinggi.
3.	ParsudiSuparlan (1994)	Membagi pola-pola kebudayaan Papua dalam spektrum yang lebih umum dan luas • Wilayah pantai dan pulau, yang terdiri atas : (1) Daerah pantai utara, (2) Daerah-daerah pulau-pulau Biak-Numfor, Yapen, Waigeo dan pulau-pulau kecil lainnya, (3) Daerah pantai selatan yang penuh dengan daerah berlumpur dan pasang surut serta perbedaan musim kemarau dan hujan yang tajam. • Wilayah pedalaman yang mencakup : (1) Daerah sungai-sungai dan rawa-rawa (2) Daerah danau dan sekitarnya (3) Daerah kaki bukit dan lembah-lembah kecil. • Wilayah dataran tinggi
4.	Koentjaraningrat (1994)	Pengelompokan budaya Papua berdasarkan letak geografis dan mata pencahariannya yaitu : • Penduduk Pantai dan Hilir. Kelompok ini telah lama mengadakan kontak dengan dunia modern/luar. Mereka sudah mengalami pendidikan formal

		dan kebutuhan hidup tergantung pada pasar dengan sumber alam yang melimpah. • Masyarakat Pedalaman. Kelompok-kelompok kecil yang tinggal di sepanjang sungai, di hutan-hutan rimba. Mereka adalah peramu yang sering berpindah-pindah tempat tinggal, jumlah penduduknya tidak besar. • Masyarakat Pegunungan Tengah. Kelompok masyarakat ini terdiri dari beberapa suku bangsa yang tinggal di lembah-lembah, di pengunungan tengah yang terdiri dari pegunungan Mooke, Sudirman. Pemeliharaan ternak babi dan pembudidayaan Ubi jalar merupakan kegiatan ekonomi yang maha penting

Sedangkan menurut letak geografi dapat dibagi berdasarkan masyarakat yang menetap di pantai, rawa, dataran rendah, pedalaman dan pegunungan. Akan tetapi jika mengikuti bahasa yang digunakan, maka peta budaya orang Papua sesungguhnya dapat di bagi menjadi 272 ragam budaya sesuai dengan banyaknya jumlah bahasa yang digunakan di Tanah Papua, lihat Gambar 2.11.

Gambar 2.11 Peta Budaya Papua Berdasarkan Penyebaran Bahasa



Untuk cabang olah raga Provinsi Papua terkenal dengan gudangnya atlet.Cabang olahraga sepak bola misalnya,banyak pemain-pemain nasional berbakat yang berasal dari Provinsi Papua. Antusiasme masyarakat terhadap cabang olahraga inipun sangat tinggi. Berkaitan dengan bidang pemuda dan olahraga, Provinsi Papua memiliki bakat-bakat yang unggul di berbagai cabang olah raga, sayangnya masih banyak bakat-bakat yang belum

tersalurkan. Oleh karena itu pengembangan cabang olahraga sepak bola sepertinya perlu dilakukan untuk meningkatkan Kualitas pemuda dan juga keolahragaan di Provinsi Papua. Selain itu, agar kegiatan olahraga di Provinsi Papua semakin berkembang, maka perlu diselenggarakan acara-acara olahraga, baik lokal, nasional dan internasional. Dengan banyaknya kegiatan ini maka diharapkan masyarakat Provinsi Papua akan mampu meningkatkan prestasi olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu contoh kegiatan adalah olahraga yang dilakukan di laut atau danau yang juga bisa menarik daya tarik wisatawan.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum berkaitan dengan perkembangan kinerja layanan yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Papua, baik pada urusan wajib maupun pilihan.

2.3.1. Urusan Layanan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pendidikan

a. Angka Partisipasi

Berdasarkan data Susenas tahun 2008, jumlah anak usia dini (3-6 tahun) di Provinsi Papua adalah sebanyak 222.456 anak, dimana sebanyak 18.737 (8,42%) anak telah (2,97%) atau sedang (5,45%) mengikuti pendidikan PAUD baik melalui jalur formal maupun non formal. Angka PAUD pada tahun 2008 terlihat menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, anak yang memperoleh akses PAUD di Papua sebesar 12,64 persen. Kondisi ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan angka partisipasi PAUD di Indonesia sebesar 20 persen dari 20 juta anak yang ada, dan berdasarkan data UNESCO, ini merupakan angka terendah di dunia. Angka Partisipasi disajikan dalam partisipasi sekolah perkelompok usia sekolah dan partisipasi murni dan kasar untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SM.

Tabel 2.36 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Di Papua Tahun 2009-2011

Angka Partisipasi Sekolah APS/tahun	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
7 - 12	76,16	76,22	73,36
13 - 15	73,69	74,35	71,29
16 - 18	47,59	48,28	50,55

Sumber: PDA 2012, BPS Papua 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa 73,36 anak usia 7-12 tahun sedang mendapatkan layanan pendidikan, sehingga masih ada 14,64% anak usia tersebut tidak mendapatkan layanan. Untuk usia 13-15 tahun 71,29% penduduk telah mendapatkan layanan pendidikan sehingga 29% belum mendapatkan layanan. Untuk usia 16-18 tahun menunjukkan bahwa 50,55% telah mendapatkan layanan pendidikan dan separoh lainyya belum mendapatkan layanan.

Tabel 2.37 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	347.247	350.411	361.681	374.835	393.795
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	247.682	247.440	247.020	408.255	393.795
1.3.	**APS SD/MI**	**84,62**	**85,44**	**81,18**	**84,10**	**N/A**
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	85.916	90.878	92.773	94.466	99.529
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	128.462	125.620	123.120	188.427	330 768
2.3.	**APS SMP/MTs**	**77,86**	**77,02**	**76,80**	**78,69**	**N/A**

Sumber: PDA 2007-2012, BPS Papua 2007-2012

Tabel diatas menjelaskan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Dimana dapat dilihat bahwa APS untuk SD ditahun 2010 mencapai 84,10 dan untuk tingkat SMP mencapai 78,86.

Tabel 2.38 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar MenurutJenjang Pendidikan di Papua Tahun 2011

JENJANG PENDIDIKAN	APM (%)	APK (%)
SD	69,64	91,89
SMP	34,98	51,56
SM	28,72	40,83

Sumber: DDA 2012, BPS Papua 2012

Kinerja penyediaan layanan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan menunjukkan kondisi yang nyata dengan terjadi kesenjangan antara angka partisipasi murni dengan partisipasi kasar. Di jenjang SD ditunjukkan bahwa pada tahun 2011, hampir 70% anak yang di SD ada pada usia 7-12 tahun sehingga sekitar 20% anak yang bersekolah di SD tidak pada usia tersebut. Jika dikaitkan dengan APS 7-12 tahun yang mencapai 73,36% maka dapat dinyatakan bahwa anak usia 7-12 tahun hampir seluruhnya sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD. APM jenjang SMP dicapai tahun 2011 sebesar 34,98% sehingga dengan APK 51,56% menggambarkan bahwa 16,58% siswa di SMP ada diluar usia sekolah SMP. Jika dikaitkan dengan APS yang mencapai 71,29 menunjukkan bahwa 36,3% anak usia 13-15 tahun sedang tidak bersekolah di SMP. Dengan memperhatikan kesenjangan antar capaian angka partisipasi, dan dengan rasio ketersediaan sekolah SD dengan kampung 0,6 (setiap SD rata-rata melayani 2 kampung) dan SMP dengan distrik 1,2 (setiap sekolah melayani satu distrik) maka APK ini terjadi karena anak-anak terlambat mendapatkan layanan pendidikan dasar. Dengan demikian, APK di Papua menjadi indikasi baik kualitas layanan pendidikan.

Dengan tipe pemukiman penduduk yang terpencil dan tersebar di daerah pedalaman, maka layanan pendidikan dasar disediakan melalui SD kecil untuk kelas awal disetiap kampung di pedalaman dengan pendekatan guru kunjung dari lulusan Kolase Pendidikan Guru khas Papua (KPG) dan memberikan muatan lebih pada lulusan Sekolah Teologi melalui para ***Vikaris*** melalui kegiatan ***deakonia*** yang sedang praktik lapangan sebagai penguatan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan gereja. Untuk itu, perlu peningkatan intervensi bagi KPG dan STT yang ada untuk meningkatkan kualitas implementasi program. SD-SMP Satu Atap berasrama disediakan untuk menampung lulusan SD kecil, dan dapat juga dikembangkan sampai penyediaan layanan jenjang pendidikan Sekolah menengah.

e. Rasio Ketersediaan Sekolah

Dari sisi jumlah maupun rasio guru murid, terlihat bahwa jumlah guru cukup memadai. Masalahnya, banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah-daerah terpencil, sehingga

terjadi kesenjangan jumlah guru antara daerah yang dekat dengan pusat kota dengan daerah–daerah terpencil seperti di wilayah pegunungan dan pesisir pantai.

Tabel 2.39 Guru dan Murid Tahun 2011

JENJANG	TK	SD	SMP	SMA	SMK
Rasio Guru/Murid	25,12	31,69	21,41	17,61	18,36
Murid/ Sekolah	Na	175,65	197,22	277,21	

Sumber: PDA 2012, BPS Papua 2012

Data rasio guru dengan jumlah siswa kasar yang tersaji pada tabel di atas harus dibandingkan dengan standart pelayanan minimal (SPM) jumlah siswa per rombongan belajar yang ditetapkan. Rasio ini masuk dalam perhitungan kasar karena untuk jenjang pendidikan SMP dan SMTA tidak menggunakan pembagi siswa per rombongan belajar tetapi pada perbandingan lurus jumlah jam mata pelajaran dengan jumlah rombongan belajar dibagi dengan jumlah beban kerja minimal mengajar 24 jam. Rasio di atas, secara kasar menunjukkan bahwa ketersediaan guru TK yang kekurangan, karena setiap guru TK hanya mengampu 10 siswa dengan 2 orang guru per kelas. Untuk SD telah mendekati ideal dengan jumlah siswa per rombongan belajar adalah 32 siswa dengan pendekatan guru kelas. Untuk SMP dan SMTA pemerintah lebih berhadapan dengan masalah distribusi. Untuk itu perlu dilakukan analisasi distribusi guru proporsional untuk kepentingan efisiensi penyediaan layanan.

Rasio siswa per sekolah menunjukkan kondisi untuk jenjang SD mendekati ideal 102 siswa, dan SMP dan SMA dengan asumsi 3 ruang kelas maka kondisinya Papua sangat kekurangan ruang kelas.

Rasio ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah jika diperhatikan pada tabel dibawah dapat dikatakan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 pemerintah telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia sekolah khususnya jenjang pendidikan SD/MI. tahun 2007 jumlah gedung sekolah sebanak 1.221 unit dan ditahun 2011 naik menjadi 2.179. Hal ini perlu di tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya demi memenuhi kebutuhan penduduk usia sekolah untuk merasa bangku pendidikan SD/MI.

Tabel 2.40 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia SekolahTahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	1.221	1.270	1.315	2.134	2.179
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	347.247	343.857	361.681	374.835	400.235
1.3.	Rasio	35,16	36,93	36,36	56,93	54,44
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	277	306	330	479	495
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	128.462	125.620	123.120	188.427	330.768
2.3.	Rasio	21,56	24,36	26,80	25,42	14,97

Sumber: PDA 2012, BPS Papua 2012

Rasio guru dan murid dari tahun 2007 sampai 2011 menunjukkan perkembangan baik untuk SD/MI maupun untuk SMP/MTs. Pada tahun 2007 rasio murid dn guru untuk SD/MI adalah 432,55 sedang pada tahun 2011 menjadi 315,79 hal ini dikarenakan penambahan jumlah guru yang proporsional dengan pertambahan anak usia sekolah . ditingkat Kabupaten Kota gambarannnya lebih baik lagi. Rasio guru dan murid rata-rata 30.02 artinya setiap guru mengajar untuk 30 orang siswa.

Tabel 2.41 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan DasarTahun 2007 s/d 2011Provinsi Papua

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	15.020	10.259	12.223	12.424	12.424
1.2.	Jumlah Murid	347.247	350.411	361.681	374.835	393.795
1.3.	Rasio	432,55	292,77	337,95	331,45	315,49
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	6.098	3.452	4.247	4.429	4.517
2.2.	Jumlah Murid	85.916	90.878	92.773	94.466	99.529
2.3.	Rasio	709,76	379,85	457,78	468,85	453,84

Sumber: PDA 2012, BPS Papua 2012

Tingkat kelulusan sekolah menunjukkan kecenderungan yang baik, dengan kondisi 2010/2011 yang sangat memuaskan, dimana hampir semua peserta pada masing-masing jenjang pendidikan mencapai kelulusan bahkan ada yang mencapai 100 persen kelulusan. SMK memiliki tingkat kelulusa yang paling rendah dibandingkan dengan SMA dimana tingkat kelulusannya hanya 92,9 persen.

Tabel 2.42 Tingkat Kelulusan Siswa di Provinsi Papua

PESERTA UJIAN	TAHUN					
	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
	PERSENTASE KELULUSAN					
SMP	81,90	89,25	90,42	91,15	99,25	99,29
SMA (IPA)	93,09	88,24	85,51	92,41	99,40	98,95
SMA (IPS)	81,89	80,21	75,42	81,62	98,21	97,96
SMA (BAHASA)	95,50	85,96	80,68	76,16	100.00	100.00
SMK	88,98	82,22	90,55	88,90	97.00	92,9

Sumber : Buku Refleksi Pembangunan Provinsi Papua

Tabel 2.43 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010Menurut Kabupaten/KotaProvinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru (2010)	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru (2010)	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Merauke	1.324	31.041	24,58	566	9.734	17,69
2	Jayawijaya	712	18.194	25,71	204	6.318	30,97
3	Jayapura	973	17.923	19	411	7.083	17,91
4	Nabire	737	19.008	26,9	337	5.759	17,57
5	Kep. Yapen	811	15.732	19,94	249	5.011	20,31
6	Biak Numfor	1.290	22.571	17,54	378	7.319	19,43
7	Paniai	224	10.538	47,04	57	2.204	38,67
8	Punjak Jaya	159	5.404	33,99	57	1.273	22,33
9	Mimika	863	30.411	35,24	259	6.442	24,87
10	Boven Digoel	278	9.230	33,2	78	2.222	28,49
11	Mappi	397	17.389	43,3	125	3.185	25,48
12	Asmat	525	13.469	25,65	72	1.713	23,79
13	Yahukimo	459	26.466	57,66	104	2.903	27,91
14	Peg. Bintang	402	8.437	20,98	81	1.083	13,37
15	Tolikara	209	14.546	71,04	67	2.486	37,1
16	Sarmi	168	6.007	35,75	89	1.598	18,24
17	Keerom	473	8.745	20,29	193	2.059	12,53
18	Waropen	309	4.201	13,59	88	1.143	13,11
19	Supiori	144	3.591	24,93	53	1.065	20,09
20	Mam. Raya	148	5.845	39,49	47	551	11,72
21	Mamb. Tengah	72	4.867	137	33	758	22,97
22	Yalimo	23	3.492	44,78	23	719	31,26
23	Lani Jaya	276	12.362	67,59	63	4.217	49,43

No	Kabupaten/Kota	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru (2010)	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru (2010)	Jumlah Murid	Rasio
24	Nduga	15	2.060	151	3	144	48
25	Puncak	101	4.467	44,23	37	820	22,16
26	Dogiayai	165	14.383	87,17	53	1.854	34,98
27	Deiyai	193	8.190	79,03	32	1.272	39,75
28	Intan Jaya	52	4.110	42,43	8	532	66,5
29	Kota Jayapura	1.163	32.156	28,59	662	12.999	20,36

Dari sisi jumlah maupun rasio guru murid, terlihat bahwa jumlah guru cukup memadai. Masalahnya, banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah-daerah terpencil, sehingga terjadi kesenjangan jumlah guru antara daerah yang dekat dengan pusat kota dengan daerah–daerah terpencil seperti di wilayah pegunungan dan pesisir pantai.

Kesehatan

Sementara itu, proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga medis terlatih terus mengalami penurunan dari 59,53 persen pada tahun 2004 menjadi sebesar 46,90 persen pada tahun 2008. Persentase penolong kelahiran dengan tenaga medis terendah terdapat di Kabupaten Yahukimo yaitu 10.71 persen sedangkan yang tertinggi di Kabupaten Mimika sebesar 79.76 persen. Semakin rendahnya peranan tenaga medis terlatih (dokter/bidan/mantri kesehatan) dalam menolong proses kelahiran merupakan salah satu faktor besarnya angka kematian ibu (Capaian MDG's Papua 2008).

Berdasarkan data tahun 2006 – 2010, ketersediaan rumah sakit dan fasilitas lainnya seperti Puskesmas, Posyandu dan lainnya, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 terdapat 18 rumah sakit, baik rumah sakit umum pemerintah maupun swasta dan meningkat menjadi 30 rumah sakit di tahun 2010. Pada tahun 2006, rasio penduduk terhadap jumlah rumah sakit adalah 1: 111.152 orang. Sementara pada tahun 2010, rasio tersebut tersebut adalah 1: 94.446 orang. Meski demikian, penyediaan obat-obatan masih mejadi kendala bagi pelayanan intensif.

Sementara itu, perkembangan ketersediaan fasilitas kesehatan lainnya seperti Puskemas, Pustu dan lainnya, juga mengalami pertumbuhan yang positif seperti yang digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.44 Perkembangan Jumlah Puskesmas, Pustu, Puskesmas Keliling dan Posyandu Provinsi Papua Tahun 2006 – 2010

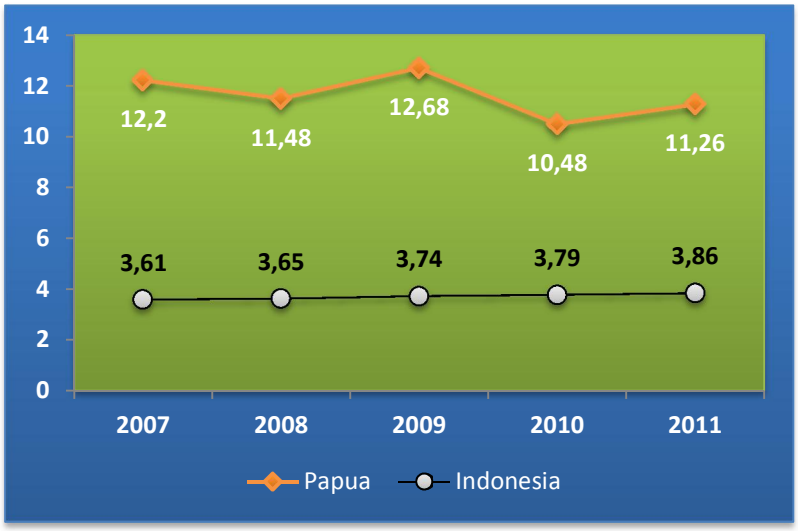
Tahun	Puskesmas	Pustu	Puskesmas Keliling	Posyandu
2006	164	589	281	-
2007	245	735	539	4.512
2008	260	731	783	-
2009	296	731	783	4.165
2010	320	791	857	4.427
2011	313	847	873	3.284

Sumber: Papua Dalam Angka , BPS Provinsi Papua, 2011

Dari segi pelayanan kesehatan dasar, dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan terhadap penduduk, misalnya Puskesmas dan Pustu terhadap jumlah penduduk mengalami peningkatan dua kali lipat, antara tahun 2006 dan 2010. Pada tahun 2006 jumlah Puskesmas adalah 164 unit, sementara pada tahun 2010 terdapat 320 unit. Jarak terjauh komunitas masyarakat ke fasilitas puskesmas terdekat terjadi di Kabupaten Jayawijaya yang mencapai lebih dari 100 km.

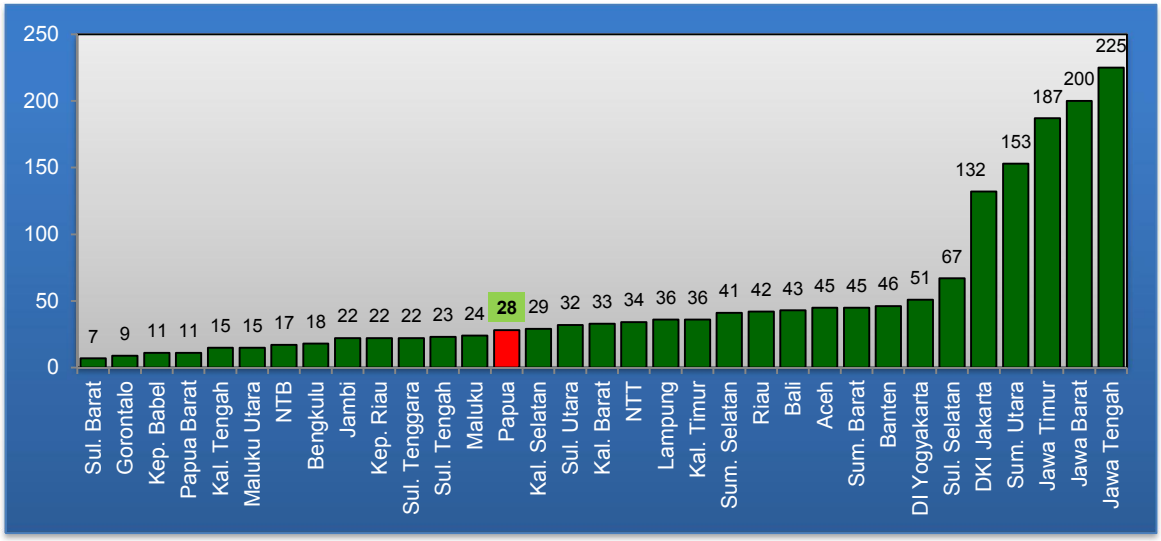
Hal ini terlihat dari jumlah apotek yang ada. Pada tahun 2009, jumlah Apotek paling banyak terdapat di Kota Jayapura yaitu sebanyak 70 buah, diikuti oleh Mimika dan Merauke masing-masing sebanyak 16 buah dan Jayapura sebanyak 15 buah, sedangkan di beberapa wilayah lain bahkan belum tersedia.

Grafik 2.11 Rasio Puskesmas Terhadap Penduduk (Per 100.000 Penduduk) Papua Dan Indonesia 2007-2011



Sumber : BPS Papua tahun 2012

Grafik 2.12 Jumlah Rumah Sakit (Umum+Khusus)Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2011



Sumber : BPS Papua

Tantangan lain di bidang kesehatan adalahantara lain masih terbatasnya tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan di puskesmas, terutama di daerah terpencil. Ini disebabkan oleh sedikit sekali dokter dan bidan yang bersedia untuk ditempatkan di wilayah terpencil. Di sini terlihat bahwa permasalahan tidak saja terbatas pada jumlah tenaga kesehatan, melainkan juga masalah motivasi dan komitmen dari para tenaga kesehatan ini. Selain itu juga dari segi pendidikan dan keterampilan, para tenaga kesehatan yang ada rata –rata belum mengenyam pendidikan sarjana.

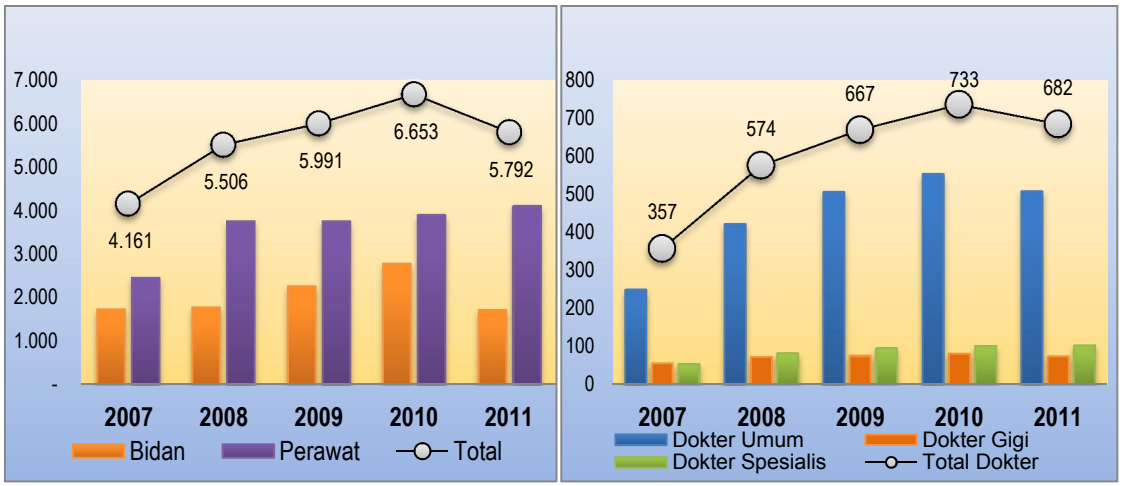
Tabel 2.45 Perkembangan JumlahTenaga Dokter dan Medis Lainnya di Provinsi Papua

Tahun	Jumlah Puskesmas	Dokter	Dokter Gigi	Bidan	Perawat
2007	245	241	42	1.724	2.437
2008	260	294	44	1.571	2.514
2009	296	297	44	1.412	2.396
2010	320	342	47	1.434	2.630
2011	334	346	50	855	2.605

Sumber : BPS Papua

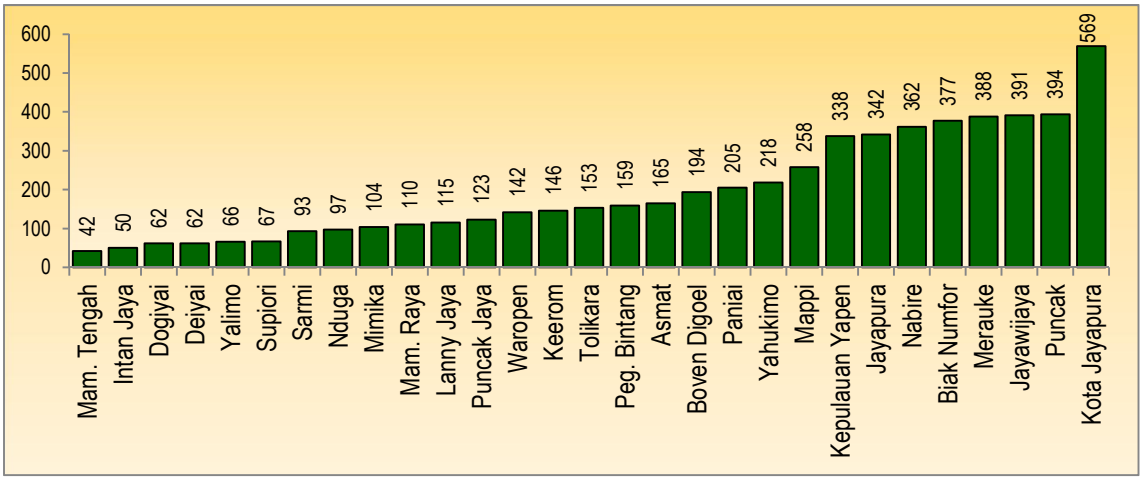
Jika memperhatikan kondisi budaya masyarakat Papua, maka kegiatan promosi kesehatan harus ditingkatkan dengan bekerjasama lembaga gereja, karena banyak penduduk yang lebih percaya kepada dukun daripada dokter atau bidan, khususnya dalam perawatan ibu hamil, melahirkan, dan balita. Akibatnya kasus ibu yang meninggal saat melahirkan dan bayi yang meninggal cukup banyak.

Grafik 2.13 Jumlah Dokter, Bidan dan Perawat Di Papua Tahun 2007-2011



Sumber : BPS Papua

Grafik 2.14 Jumlah Bidan dan Perawat Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2011



Sumber : BPS Papua

Tantangan lain Papua adalah masalah sanitasi, khususnya mereka yang tinggal di pedalaman. Fasilitas air bersih sangat sulit di wilayah tersebut. Ketersediaan akses dan air bersih di Papua baru menjangkau sekitar 34% penduduk. Sumber mata air juga relatif berjarak cukup jauh dengan kampung. Selain itu, arsitektur rumah tradisional sebagian besar belum memperhatikan sistem sirkulasi udara dan saluran pembuangan yang memadai. Dengan kondisi ini, maka orientasi kerja tenaga kesehatan adalah lebih fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan.

Pekerjaan Umum

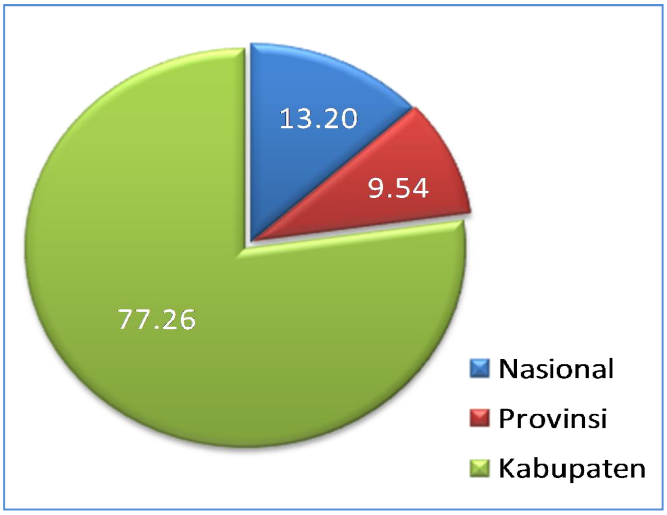
Dengan infrastruktur yang baik, mobilitas masyarakat akan lebih mudah dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk mendorong peningkatan produktifitas bagi faktor-faktor produksi. Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana masih sangat terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kondisi ini diakibatkan oleh : 1) Luasnya jangkauan

pelayanan akibat penyebaran masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil; 2) Kondisi topografi dan morfologi wilayah yang sangat beragam; dan 3) Keterbatasan pendanaan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Setiap tahunnya terdapat peningkatan panjang jalan kurang lebih 2 persen, atau setara 5 km per tahun. Sehingga total panjang jalan di Papua sampai dengan tahun 2009 adalah 15.702,78 km dengan rincian menurut statusnya yakni jalan nasional sekitar 13,20 persen, jalan provinsi sebanyak 9,54 persen, dan jalan kabupaten/kota sebesar 77,26 persen.

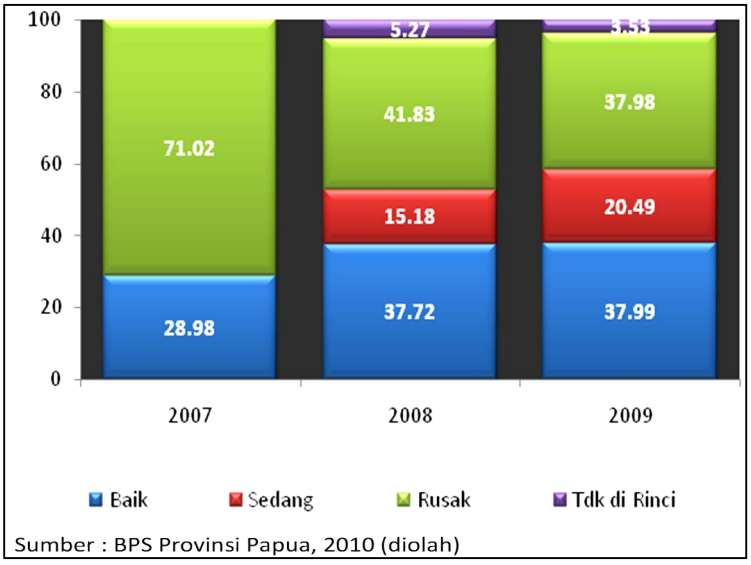
Dengan luas wilayah sebesar 319.036,05 km^2, ini berarti rasio aksebilitas jalan di Provinsi Papua hingga tahun 2009 adalah 0,0492 km/km^2,' yang berarti untuk setiap luas wilayah 1 km^2 hanya terdapat jalan sepanjang 0,0492 km. Sedangkan rasio mobilitasnya mencapai 7,39 km/1000 orang, dengan kata lain untuk per 1000 penduduk tersedia jalan sepanjang 7,39 km. Bandingkan dengan Indonesia yang mempunyai rasio aksesbilitas mencapai 0,20 km/km^2 dan rasio mobilitasnya sekitar 1,65 km/1000 orang. Dengan melihat kondisi seperti ini maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesulitan untuk mengakses jalan di Papua paling tinggi dan tingkat mobilitas yang paling rendah di Indonesia.

Grafik 2.15 Distribusi Panjang Jalan Menurut Statusnya Tahun 2009 (dalam %)



Sebagian besar jalan di Provinsi Papua dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat, terutama antara tahun 2007-2009, laju kerusakan jalan sangat tinggi sekitar 50,28 persen per tahun, sedangkan yang baik hanya 34,90 persen per tahun. Kondisi inilah yang menyebabkan mengapa pembangunan dan peningkatan jalan terlihat lebih lambat dibandingkan dengan pemeliharaan jalan.

Grafik 2.16 Kondisi Jalan Di Provinsi Papua Tahun 2009 (dalam %)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2010 (diolah)

Perkembangan panjang jalan dapat dibagi kedalam 6 kawasan pembangunan, yakni Kawasan Jayapura-Lereh, Kawasan Sarmi - Mamberamo, Kawasan Biak-Teluk Cenderawasih, Kawasan Pegunungan Tengah, Kawasan Pantai Selatan-Timika, dan Kawasan Merauke - Asiki - Mappi. Berdasarkan status jalan, penyebaran jalan kabupaten/kota merupakan yang terbanyak dibandingkan jalan nasional maupun provinsi untuk setiap kawasan pembangunan, yakni sekitar 79,18 persen dari total panjang jalan 12.977,62 km. Sementara berdasarkan kawasan, program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan paling banyak terlihat di Kawasan Biak-Teluk Cenderawasih dan Merauke-Asiki-Mappi masing-masing sepanjang 3.903,77 km dan 3.274,33 km.

Tabel 2.46 Panjang Jalan Di Provinsi Papua Di Rinci Menurut Status Jalan, Kawasan Pembangunan dan Kabupaten/Kota Tahun 2008

No.	Kawasan	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Total
1.	Jayapura-Lereh	519,13	453,63	1 542,59	2 515,35
	Kota Jayapura	-	53,00	385,35	438,35
	Kabupaten Jayapura	519,13	400,63	579,99	1 499,75
	Keerom	-	-	577,25	577,25
2.	Sarmi-Memberamo	-	164,00	144,54	308,54
	Sarmi	-	164,00	144,54	308,54
	Mamberamo	-	-	-	-
3.	Biak-Teluk Cenderawasih	402,21	439,75	3 061,81	3 903,77
	Nabire	314,03	40,00	997,76	1 351,79
	Waropen	-	31,00	-	31,00
	Yapen	53,30	130,50	1 326,25	1 510,05
	Biak Numfor	34,88	200,29	737,80	972,97

No.	Kawasan	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Total
	Supiori	-	37,96	-	37,96
4.	Pegunungan Tengah	-	-	2 612,84	2 612,84
	Paniai	-	-	1 173,46	1 173,46
	Puncak jaya	-	-	1 439,38	1 439,38
	Tolikara	-	-	-	-
	Yahukimo	-	-	-	-
	Pegunungan Bintang	-	-	-	-
5.	Pantai Selatan – Timika	-	38,75	632,58	671,33
	Mimika	-	38,75	632,58	671,33
	Asmat	-	-	-	-
6.	Merauke-Asiki, Mappi	604,91	243,00	2 426,42	3 274,33
	Merauke	604,91	243,00	1 330,18	2 178,09
	Boven Digul	-	-	402,96	402,96
	Mappi	-	-	693,28	693,28
Total		1,526.25	1 175,13	10 276,24	12 977,62

Sumber: RTRW Provinsi Papua, 2009

Perhubungan

Kondisi topografi yang berbukit, jurang, gunung dan kepulauan mengakibatkan sarana dan prasarana transportasi udara menjadi tumpuan utama penduduk Papua selama ini. Ada 5 bandara di Papua yang tersedia untuk melayani rute antar provinsiyaitu Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura, Bandara Mopah di Kabupaten Merauke, Bandara Moses Kilangin di Kabupaten Timika, Bandara Frans Kaisepo di Kabupaten Biak, Bandara Nabire di Kabupaten Nabire, dan terakhir Bandara Wamena di Kabupaten Wamena. Empat bandara yang disebutkan pertama sudah dapat menampung pesawat dengan jenis Boeing 737/400 dan DC 10. Sedangkan kapasitas Bandara Nabire dan Wamena hanya untuk pesawat F-27. Selengkapnya infrastruktur bandara pusat penyebaran di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.47 Bandar Udara Pusat Penyebaran

Nama Bandara/Kabupaten	Runway (m)	Kontruksi	Kapasitas	Apron (m)	Terminal Penumpang (m)
Sentani – Jayapura	2 180 x 45	Aspal Beton	Boeing 737/400	470 x 81	4 292
Mopah – Merauke	1 850 x 30	Aspal Beton	Boeing 737/400	160 x 80	750
Wamena – Wamena	1 650 x 30	AspalKolakan	F-27	180 x 45	660
Nabire – Nabire	1 400 x 30	Aspal Kolakan	F-27	150 x 80	430

Nama Bandara/Kabupaten	Runway (m)	Kontruksi	Kapasitas	Apron (m)	Terminal Penumpang (m)
Frans Kaisiepo – Biak	3 570 x 45	Aspal Beton	DC - 10	170 x 60	2 224
Moses Kilangin – Timika	2 200 x 45	Aspal Beton	Boeing 737/400	70 x 60	Na

Sumber : Dinas Perhubungan Papua (2008)

Selain bandara antar provinsi yang berkapasitas pesawat besar, di Provinsi Papua juga sudah banyak dibangun fasilitas bandara perintis di beberapa kabupaten, yang umumnya mempunyai kapasitas pesawat kecil seperti DHC-6, dan C.208. Jumlah bandara perintis saat ini kurang lebih sebanyak 39 bandara yang sebagian besar memiliki landasan dengan kontruksi aspal kolakan, aspal penetrasi, aspal beton, coil cemen dan rumput atau tanah keras. Khusus untuk Kabupaten Asmat, oleh karena wilayahnya sebagian besar berawa, bandara yang dibangun menggunakan kontruksi plat baja. Selangkapnya kondisi bandara perintis di Papua dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.48 Kondisi Pelabuhan Udara Perintis

Nama Bandara	Runway (m)	Kontruksi	Kapasit-as	Apron (m)	T. Penumpang (m)
Serui – Yapen	650 x 20	Aspal Kolakan	DHC - 6	70 x 40	280
Dabra – Jayapura	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	-
Senggeh – Keerom	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	-
Lereh – Jayapura	600 x 30	Rumput	DHC - 6	-	-
Waris – Keerom	600 x 23	Rumput	DHC - 6	-	-
Molof – Keerom	750 x 23	Rumput	DHC - 6	-	-
Mararena – Sarmi	700 x 20	Aspal Penetrasi	DHC - 6	47 x 13	120
Kepi – Mappi	700 x 23	Aspal Penetrasi	DHC - 6	-	120
Ewer – Asmat	600 x 18	Plat Baja (PSP)	DHC - 6	-	120
Mindiptanah - Boven Digul	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Kimaam – Merauke	650 x 18	Soil Cemen	DHC - 6	-	120
Senggo – Mappi	762 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Bade – Mappi	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Kamur – Mappi	700 x 45	Rumput	DHC - 6	-	-
Muting – Merauke	600 x 23	Rumput	DHC - 6	-	-
Okaba – Merauke	600 x 30	Rumput	DHC - 6	-	-
Tanah Merah - Boven Digul	1,000 x 20	Aspal Penetrasi	DHC - 6	70 x 40	120
Merdey – Manokwari	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Batom - Pegunungan Bintang	850 x 20	Aspal Penetrasi	DHC - 6	-	-
Oksibil - Pegunungan Bintang	700 x 23	Aspal Penetrasi	DHC - 6	60 x 40	120

Nama Bandara	Runway (m)	Kontruksi	Kapasit-as	Apron (m)	T. Penumpang (m)
Tion – Jayawijaya	700 x 30	Rumput	DHC - 6	-	-
Bokondini – Jayawijaya	600 x 23	Rumput	DHC - 6	-	-
Karubaga – Jayawijaya	730 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Mulia - Puncak Jaya	850 x 23	Aspal Penetrasi	DHC - 6	75 x 40	120
Illu - Puncak Jaya	800 x 30	Aspal Penetrasi	DHC - 6	-	-
Ilaga - Puncak Jaya	600 x 25	Rumput	DHC - 6	-	120
Sinak - Puncak Jaya	650 x 18	Rumput	DHC - 6	-	-
Sugapa – Paniai	650 x 24	Rumput	DHC - 6	-	-
Enarotali – Paniai	900 x 20	Aspal Penetrasi	DHC - 6	-	120
Obano – Paniai	730 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Moanamani – Nabire	1,000 x 18	Rumput	DHC - 6	60 x 40	120
Waghete – Paniai	900 x 18	Rumput	DHC - 6	70 x 40	120
Utarom – Kaimana	1,650 x 30	Aspal Kolakan	F - 28	-	270
Yemburwo - Biak Numfor	1,800 x 23	Aspal	DHC - 6	-	-
Kokonau – Mimika	600 x 18	Aspal Penetrasi	DHC - 6	40 x 30	-
Jila – Mimika	500 x 15	Rumput	DHC - 6	40 x 30	-
Agimuga – Mimika	600 x 15	Rumput	DHC - 6	40 x 30	-
Bomakia - Boven Digul	400 x 24	Rumput	DHC - 6	-	-
Manam – Merauke	750 x 25	Aspal Beton	DHC - 6	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan (2008)

Infrastruktur transportasi lainnya yang masih diandalkan oleh penduduk di Papua selama ini adalah angkutan laut, sungai dan penyeberangan. Di sepanjang wilayah pesisir pantai Papua mulai dari Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen, dan seterusnya sampai ke Merauke sudah banyak dibangun pelabuhan-pelabuhan laut dan dermaga. Tiga diantaranya yang paling besar saat ini adalah pelabuhan laut Jayapura, Biak dan Merauke.

Pada Tabel II.42 terlihat bahwa ketiga pelabuhan besar ini sudah dapat menampung kontainer dengan kapasitas lapangan penumpukan kontainer untuk pelabuhan laut Jayapura yaitu8.000 m^2, pelabuhan laut Merauke yaitu 2.450 m^2, dan pelabuhan laut Biak yaitu 3.600 m^2. Saat ini pelabuhan dengan dermaga yang paling panjang di Provinsi Papua adalah pelabuhan laut Jayapura dan Biak, masing-masing memiliki dermaga dengan panjang 132 m dan 142 m. Sedangkan untuk kolam labuh pada setiap pelabuhan antara 12.900 m^2 sampai dengan 19.800 m^2.

Tabel 2.49 Kondisi Pelabuhan Laut Utama Di Provinsi Papua

Fasilitas	Jayapura	Merauke	Biak
Panjang Dermaga (m)	132	74	142
Daya Dukung (ton/m^3)	2.5	2.5	2.5
Kolam Labuh (m^2)	19.800	19.800	12.900
Luas Lantai (m^2)	1.200	240	150
Lapangan Penumpukan Kontainer (m^2)	8.000	2.450	3.600
Gudang Lini I 1(satu) unit (m^2)	2.200	640	800

Sumber : Dinas Perhubungan (2008)

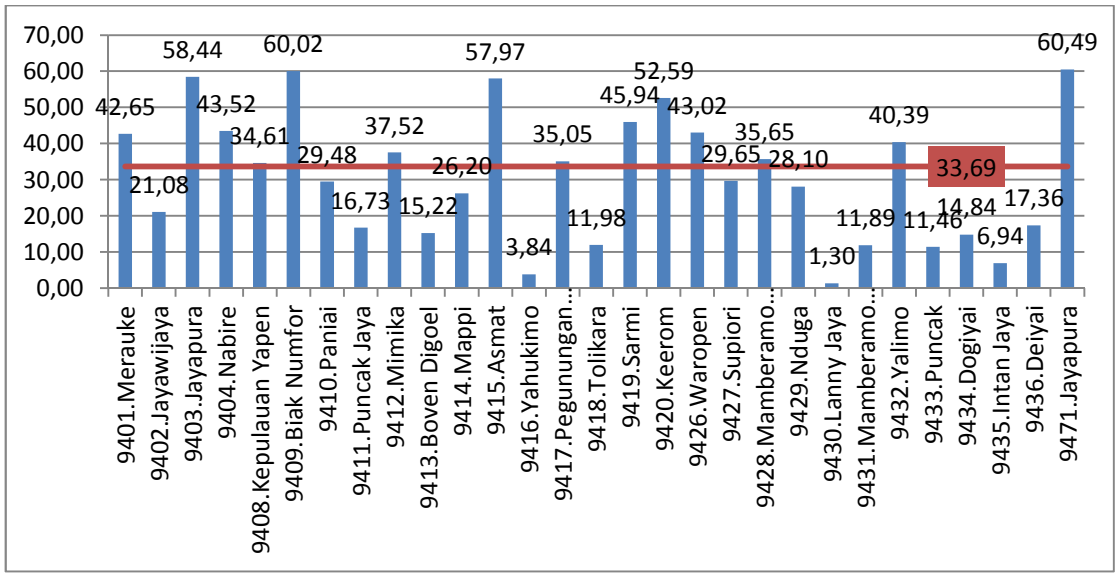
Perumahan

Kondisi perumahan dan permukiman baik di kawasan perkotaan, perdesaan maupun di wilayah pedalaman dan terpencil didominasi oleh rumah dengan kondisi di bawah standar dan belum layak huni. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh: Pola permukiman masyarakat yang terpencar karena memiliki tradisi adat yang kuat, Ketersediaan sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang tidak memadai sehingga terbentuk kawasan kumuh (slum area), Kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah; dan Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang berada pada kawasan lindung.

Sampai tahun 2010 pemerintah telah membangun sekitar 13.429 unit rumah untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat lokal. Selain pembangunan permukiman penduduk juga dilakukan pemberian bantuan bahan non-lokal, pembangunan sarana air bersih dan pembangunan fasilitas pendukung seperti penerangan kampung, jalan desa, rumah ibadah dan pelayanan kesehatan. Meski demikian, pemerintah daerah akan memperhatikan arsitektur rumah rakyat dengan aristektur lokal sehingga akan lebih tepat guna dan sesuai budaya setempat.

Provinsi Papua masih tertinggal dibidang ketersediaan air bersih (air ledeng, pompa dan sumur terlindungi yang berjarak 10 meter atau lebih dari penampungan kotoran/tinja) dan fasilitas sanitasi. Masyarakat yang memiliki akses terhadap air bersih di Papua adalah 35% sedangkan rata-rata nasional adalah 59% dan akses terhadap fasilitas sanitasi adalah 56% sedangkan rata-rata nasional adalah 74% (Peach, 2009).

Grafik 2.17 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009



Lingkungan Hidup

Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang sangat besar harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Perkembangan yang terjadi di Papua justru sebaliknya dengan tingginya tingkat penebangan hutan (35%), pembangunan yang tidak memperhatikan kapsitas daya dukung lingkungan, kerusakan hutan bakau dan adanya pencemaran/kerusakan lingkungan pada daerah pantai/perairan dan kegiatan pertambangan yang merusak ekosistem yang ada. Kondisi ini diakibatkan oleh : Tidak adanya penegakan hukum (*law enforcement)* dan Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tumpang tindih dan cenderung tidak ada koordinasi antar sektor. Saat ini di Papua telah beroperasi 46 HPH dengan luas areal 10.0466.690 Ha, dengan laju penebangan hutan 1000 ha/HPH. Kondisi ini akan mengancam kelestarian alam hayati dan plasma nutfah yang akan sangat berguna bagi masa depan. Pengalihan fungsi lahan telah menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan hidro-orologis, berkurangnya air tanah, erosi dan banjir.

Terdapat 22 kawasan konservasi di Provinsi Papua, yaitu:

- 1 kawasan ditentukan sebagai kawasan strategis nasional, yaitu TN Lorentz
- 11 kawasan ditentukan sebagai kawasan lindung nasional
- 1 kawasan merupakan KKLD
- 9 kawasan lainnya, yang penunjukannya didasarkan pada SK Menteri Pertanian/Kehutanan, ditentukan sebagai kawasan konservasi.

Di samping itu, potensi lestari hutan komersial mencapai 540 juta m3, perairan dengan luas 228.000 km2 mempunyai potensi sebanyak 1.3 juta ton. Dengan seluruh kekayaan alam

yang begitu besar jumlahnya akhirnya menempatkan Propinsi Papua pada deretan lima besar propinsi berpotensi terkaya di negara Indonesia.

Kekayaan sumberdaya alam berupa terumbu karang pada beberapa daerah pesisir seperti Biak, Yapen Waropen, dan Supiori yang memiliki luas wilayah laut dan memiliki terumbu karang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, namun terjadi eksploitasi dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab karena tidak adanya pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Tabel 2.50 Luasan Terumbu Karang di Pesisir

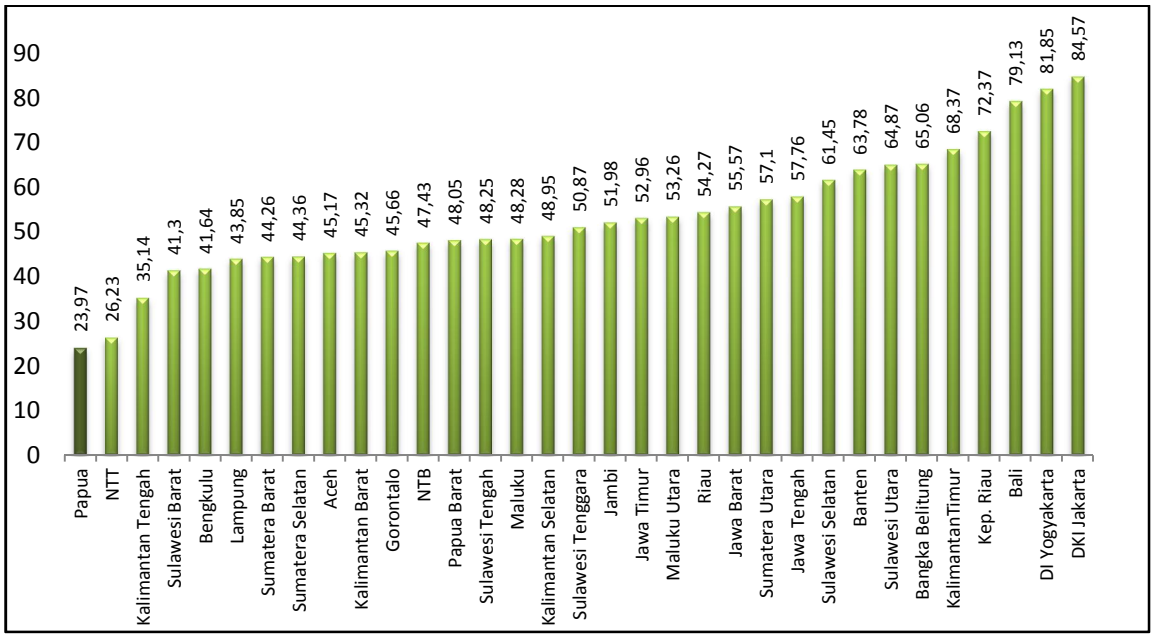
No	Kabupaten/Kota	Satuan	Luas Willayah Laut
1	Supiori	Km^2	175,90
2	Biak Numfor	Km^2	263,31
3	Yapen	Km^2	114,60
4	Waropen	Km^2	19,19
5	Sarmi	Km^2	17,89
6	Nabire	Km^2	126,26
7	Mamberamo Raya	Km^2	0,00
8	Jayapura	Km^2	Na
9	Kota Jayapura	Km^2	1,41
10	Mimika	Km^2	Na
11	Mappi	Km^2	0,00
12	Asmat	Km^2	Na
13	Merauke	Km^2	Na

Sumber : Conservation International, 2003, dan hasil analisis

Lahan gambut yang memiliki fungsi tata air sehingga harus dipahami dengan sungguh-sungguh sebagai salah satu ekosistem penting untuk kehidupan. Total seluruh lahan gambut di Papua adalah 10.618.496 Ha yang ada hampir di seluruh kabupaten/kota di Papua.

Kawasan Mangrove terdapat di 13 kabupaten yang luas dan tersebar di 13 kabupaten dengan total luas mangrove pada tahun 2000 yaitu 1,2 juta Ha. Selama enam tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2006 luas kawasan mangroveberkurang sekitar 6,71% akibat penebangan dan reklamasi kawasan pesisir yang dikonversi untuk kepentingan lain. Secara garis besar, mangrove memiliki fungsi sebagaipenahan ombak, penyaring limbah yang berasal dari daratan (*land base polution*), tempat bertelur, pemijahan, dan pemeliharaan ikan dan udang, penyerap karbon, penahan abrasi, dan berbagai fungsi lainnya yang saling berkaitan.

Grafik 2.18 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010



Berdasarkan Gambar II di atas, kabupaten/kota yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak sebagian besar berada di wilayah pesisir, yaitu Kota Jayapura (78,28 persen), Kabupaten Supiori (72,58 persen), Kabupaten Mimika (67,84 persen), dan Kabupaten Biak Numfor (63,67 persen). Sebaliknya, wilayah pegunungan seperti Kabupaten Nduga (0,10 persen), Yalimo, Puncak dan Deiyai belum memiliki akses yang baik terhadap sanitasi yang layak.

Hal ini sejalan dengan gambaran sebelumnya, dimana daerah perkotaan –pada umumnya berada di daerah pesisir- lebih baik aksesnya terhadap sanitasi layak dibandingkan daerah perdesaan yang pada umumnya berada di daerah pegunungan. Selain terkait dengan fasilitas sanitasi yang tidak tersedia di rumah-rumah pegunungan (honai), kesadaran masyarakat pesisir akan pentingnya sanitasi yang baik lebih tinggi daripada masyarakat yang tinggal di pegunungan.

Kesenjangan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan sangat terlihat dalam hal akses terhadap sanitasi. Untuk daerah perkotaan di Provinsi Papua, selama 5 tahun terakhir dari tahun 2007-2011, akses terhadap sanitasi yang layak mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat. Pada tahun 2011, akses terhadap sanitasi di daerah perkotaan adalah sebesar 73,36 persen, sudah berada di atas rata-rata angka nasional dan sudah mencapai target nasional yang ditetapkan, yaitu 65,5 persen. Namun begitu, hal yang sangat kontras terjadi didaerah perdesaan, di manahanya sebanyak 8,73 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan masih jauh dari target yang harus dicapai.

Jika dilihat dari target yang harus dicapai Provinsi Papua pada tahun 2015, yaitu sebesar 71,7 persen, perlu dilakukan usaha keras melalui pemberdayaan masyarakat agar semua memahami manfaat sanitasi terhadap kesehatan sehingga dengan kesadaran sendiri termotivasi mengelola fasilitas yang sudah ada dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab aktif dalam pengadaan fasilitas baru yang diperlukan.

Penataan Ruang

Pemerintah Papua berkomitmen untuk mempertahankan kawasan hutan seluas 70% dari luas Provinsi Papua atau 90% dari hutan yang ada dalam mewujudkan Tata Ruang Lestari untuk Mendukung Pembangunan berkelanjutan. Hasil penyusunan RTRWP Papua menunjukkan adanya beberapa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan, yaitu Areal Penggunaan Lain (APL) bertambah 401.975 ha (+47,7%), Hutan Lindung bertambah 3.151.028 ha (+43.8%), Hutan Produksi berkurang 4.960.251 ha (-60%), HPK bekurang 2.847.146 ha (43.9%), HPT bertambah 4.338.821 ha (237.7%), KSA/KPA bertambah 312.225 ha (4.4%). (PIK, 2010).

Tabel 2.51 Pusat Kegiatan Pengembangan

SWP	Pusat Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Peran dan Fungsi Pusat Pengembangan	Penduduk Tahun 2030 (Jiwa)
SWP I	Kab/Kota Jayapura	Wilayah Pelayanan Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Seluruh Kabupaten Se Provinsi Papua	Ibukota Provinsi dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat pengembangan utama di bagian wilayah utara	747,898
			Simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang ke kawasan internasional	
			Pusat kegi atan i ndustri dan jasa-jasa berskala nasional Simpul utama transportasi skala nasional	
SWP II	Merauke	Wilayah Pelayanan Kabupaten Boven Digoel, Mappi	Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat pengembangan utama di bagian wilayah selatan	441,632
			Simpul utama kegiatan ekspor-impor dan kawasan perbatasan dengan PNG.	
			Pusat kegiatan industri dan pertanian berskala nasional Simpul utama transportasi skala nasional	

SWP III	Biak	Wilayah Pelayanan Kabupaten Supiori, Kep. Yapen, Waropen	Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat pengembangan utama di kawasan Teluk Cendrawasih. Simpul utama kegiatan ekspor-impor berskala nasional Pusat kegiatan pertanian, industri dan perdagangan Simpul utama transportasi skala Internasional	306,091
SWP IV	Nabire	Wilayah Pelayanan Kabupaten Paniai, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai	Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	493,081
			Pusat kegiatan pertanian dan pertambangan yang melayani beberapa kabupaten Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten Simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Biak	
SWP V	Jayawijaya	Wilayah Pelayanan Kab. Yalimo, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Yahukimo	Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	796,675
			Pusat kegiatan pertanian yang melayani beberapa kabupaten	
			Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah	
SWP VI	Mimika	Wilayah Pelayanan Kabupaten Asmat, Puncak	Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat pengembangan utama di bagian wilayah selatan Simpul utama kegiatan ekspor-impor berskala internasional Pusat kegiatan pertambangan dan industri berskala nasional Simpul utama transportasi skala nasional	399,549
SWP VII	Sarmi	Wilayah Pelayanan Kabupaten Mamberamo Raya	Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	72,21
			Pusat kegiatan pertanian yang melayani beberapa kabupaten	
			Simpul transportasi yang melayani kabupaten Mamberamo Raya, Jayapura Simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Jayapura	

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah, menggambarkan kondisi yang belum maju, dari data yang tersedia rata-rata masih sekitar 10,34% perempuan yang masuk dan terlibat dalam oragnisasi pemerintahan.

Kualitas hidup perempuan dan anak ditentukan dengan mencermati indikasi rasio partisipasi sekolah, kualitas kesehatan perempuan dan anak serta komparasi upah antar gender. Demokratisasi telah mendorong peran perempuan dan peningkatan pemberdayaan perempuan (*gender empowerment*) dalam dunia kerja, partisipasi sosial, dunia politik, ekonomi dan dalam pengambilan keputusan yang tercermin dari indeks pemberdayaan gender pada tahun 2002 sebesar 49%. Namun demikian tradisi dalam hubungan sosial antara laki-laki-perempuan dalam keluarga dan masyarakat belum berpihak pada kepentingan kaum perempuan.

Tabel 2.52 Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah

NO	INDIKATOR	ACUAN DASAR	NILAI INDIKATOR (TAHUN)	TARGET MDGS 2015	STATUS	SUMBER
1.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	18.76 (2004)	25,48 (2010)	36,47 (RAD MDGs)	▶	BPS Prov Papua,Susenas
2.	Proporsi perempuan dalam sektor publik					
	- DPRD Papua	16,07% (2004)	7,14 (2009)	30 (RAD MDGs)	▼	Biro Hukum Pemda Papua
	- Jabatan Pemerintahan Eselon II Eselon III Eselon IV	**n.a**	0% 9,2% 21,7% (2010)	Meningkat	▶	BKD Papua

Sumber : BPS Papua

Penanaman Modal

Jumlah proyek PMDN yang disetujui pemerintah pada tahun 2011 mencapai 61 proyek dengan realisasi nilai investasi mencapai 7.982 trilliun rupiah dan realisasi jumlah tenaga kerja 14.049.021 orang. Jumlah PMDN terbanyak di Kabupaten Jayapura (8 proyek), sedangkan nilai investasi terbanyak di Kota Jayapura (857,5 milyar rupiah). Jumlah proyek PMA yang disetujui pemerintah pada tahun 2011 ada 87 proyek dengan realisasi nilai investasi mencapai 11.859 trilliun rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak

14.049.021 orang. Jumlah PMA terbanyak di Kabupaten Mimika (19 proyek), sedangkan nilai investasi PMA terbesar di sektor pertambangan.

Tabel 2.53 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2007	Jumlah Investor	32	54	86
2008	Jumlah Investor	28	65	93
2009	Jumlah Investor	29	74	103
2010	Jumlah Investor	29	79	108
2011	Jumlah Investor	30	87	117

Sumber : BPS Papua tahun 2012

Tabel 2.54 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2007	86	42.880.897	61	7.982.171
2008	93	62.463.273	64	7.999.698
2009	103	68.181.382	71	8.383.959
2010	108	67.637.075	73	10.652.556
2011	117	67.772.073	117	11.859.878

Sumber : BPS Papua tahun 2012

Tabel 2.55 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	11.917.845	11.605.280	11.745.727	13.580.626	14.049.021
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	86	93	103	108	117
3	Rasio daya serap tenaga kerja	138.580	124.788	114.036	125.747	120.077

Sumber : BPS Papua tahun 2012

Jumlah proyek PMDN yang disetujui pemerintah pada tahun 2011 mencapai 30 proyek dengan realisasi nilai investasi mencapai 3,263 trilliun rupiah dan realisasi jumlah tenaga kerja 12.400 orang. Jumlah PMDN terbanyak di Kabupaten Jayapura (8 proyek), edangkan nilai investasi terbanyak di Kota Jayapura (857,5 milyar rupiah). Jumlah proyek PMA yang disetujui pemerintah pada tahun 2011 ada 87 proyek dengan realisasi nilai nvestasi mencapai 8,596 trilliun rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 20.131 orang.

Jumlah PMA terbanyak di Kabupaten Mimika (19 proyek), sedangkan nilai investasi PMA terbesar di sektor pertambangan.

Sosial

Pada tahun 2011, terdapat 145panti asuhan yang dikelola oleh swasta dan 4 panti asuhan yang dikelola olehpemerintah. Sedangkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tercatat sekitar 21.871 orang, dimana 24,64persen penyandang cacat, 24,58 persen jompo terlantar dan 14,16 persen anakterlantar.

Tabel 2.56 Penyandang PMKS Menurut Jenis Dan Kabupaten/Kota Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Balita Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia/Jompo	Anak Nakal	Anak Korban Tindak Kekerasan	Korban Narkotika	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Wanita Tindak Korban Kekerasan	Tuna Susila	Wanita Tuna Susila	Penyandang Cacat	Bekas Penderita Penyakit Kusta	Gelandangan dan Pengemis	Bekas Narapidana
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Merauke	-	259	504	75	28	-	74	35	26	120	2012	-	-	18
2	Jayawijaya	-	59	9	68	45	-	12	33	7	-	1303	82	-	-
3	Jayapura	21	1027	-	260	39	179	1000	-	596	89	876	-	-	329
4	Nabire	-	60	14	76	25	-	90	-	90	-	133	-	-	-
5	Kepulauan Yapen	-	56	22	84	45	5	11	20	60	19	-	141	-	94
6	Biak Numfor	19	63	18	79	49	-	30	24	60	-	4	-	-	11
7	Paniai	-	454	1357	91	33	-	-	-	-	-	533	-	-	6
8	Puncak Jaya	-	61	-	184	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Mimika	-	75	-	124	65	-	-	-	-	35	-	47	-	-
10	Boven Digoel	-	55	-	99	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Mappi	-	58	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Asmat	-	51	695	45	12	12	55	-	181	-	148	-	-	10
13	Yahukimo	-	-	-	75	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Peg. Bintang	10	55	32	128	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tolikara	-	56	46	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sarmi	-	49	-	56	-	-	-	-	-	-	300	59	-	-
17	Keerom	93	291	577	98	-	-	277	-	-	-	23	-	-	-
18	Waropen	-	62	5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Supiori	-	58	-	45	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Mamberamo Raya	-	61	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Nduga	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lanny Jaya	-	-	6	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Mamberamo Tengah	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Yalimo	-	-	57	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Puncak	-	-	93	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dogiyai	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Deiyai	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Intan Jaya	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kota Jayapura	-	187	-	273	28	165	123	112	19	127	56	204	-	-
	PAPUA	143	3097	5376	2500	502	361	1672	224	1039	309	5388	533		468

Koperasi :

Jumlah koperasi di Papua tahun 2011 mencapai 2.483 unit atau naik 7,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Koperasi terdiri dari 14,13 persen KUD dan 85,86 persen koperasi non KUD. Jumlah unit koperasi terbanyak terdapat di Kota Jayapura (335 unit atau 13,5 persen), Kabupaten Mimika (307 unit atau 12,36 persen) dan Kabupaten Merauke (306 unit atau 12,32 persen). Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) turun 2,22 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 359 unit pada tahun 2010 menjadi 351 unit pada tahun 2011. KUD terbanyak berada di Kabupaten Merauke (62 unit) dan Kabupaten Jayapura (35 unit). Koperasi Non KUD mengalami peningkatan, yaitu dari 1.839 unit pada tahun 2010 menjadi 2.132 unit pada tahun 2011. Koperasi non KUD paling banyak terdapat di Kota Jayapura (330 unit). Anggota koperasi pada tahun 2011 mencapai 127.447 atau turun 17,3 persen dibanding tahun 2011. Jumlah anggota KUD turun dari 45.890 padatahun 2010 menjadi 43.491 pada tahun2011,

hal yang sama juga terjadi padajumlah anggota koperasi non KUD yangturun dari 102.269 pada tahun2010menjadi 84.845 pada tahun 2011.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Pemerintahan Daerah; telah dilaksankaan untuk LPSE tetapi belum diikuti untuk layanan perijinan. Informasi yang disajikan dalam website juga belum dioptimalkan sebagai sarana utama promosi daerah dan pelayanan masyarakat sehingga masih dilihat sebagai kebutuhan memenuhi persyaratan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); sebagai salah satu alat yang disiapkan Oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah belum mendapatkan input konstruktif terkait kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Otonomi Khusus; telah dilaksanakan mulai tahun 2002, dan hingga sekarang telah memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat asli Papua. Meski demikian, hingga saat ini masih terdengar berbagai ketidakpuasan dari masyarakat atas pelaksanaan program otonomi khusus ini yang telah masuk tahun ke 12. Paradigma pelaksanaan pemerintahan era otonomi khusus adalah bertumpu pada kewenangan luas bagi pemerintah provinsi Papua dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan harkat hidup orang asli Papua, sehingga bukan sekedar dana stimulus otonomi khusus.

Belum semua mandat regulasi dalam Undang-Undang 21/2001 diterjemahkan dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), aturan untuk bidang mandat yang belum terintegrasi, kurang sosialisasi untuk perdasus/si yang telah disusun, kurang kapasitas pelaksana dan kelompok pemikir inovatif, belum tersedia panduan umum pembangunan tahunan era otonomi khusus termasuk indikator kinerja sesuai mandat per bidang serta SPM-nya, dan sistem monitoring, evalusi , pengendalian dan pelaporan yang belum baku serta belum didukung oleh data dasar dan pembangunan yang memadai. Master Plann pembangunan era otonomi khusus yang harus ditetapkan dalam bentuk Perdasus sebagai mandat warga Papua belum ditetapkan meski sudah 12 tahun berjalan, terutama untuk memastikan program yang menyangkut hajat hidup orang Papua asli, memiliki daya ungkit kuat dan berkelanjutan dan berdampak pada perubahan mind set dan culture set menuju peradaban baru yang produktif.

2.3.2. Urusan Pilihan

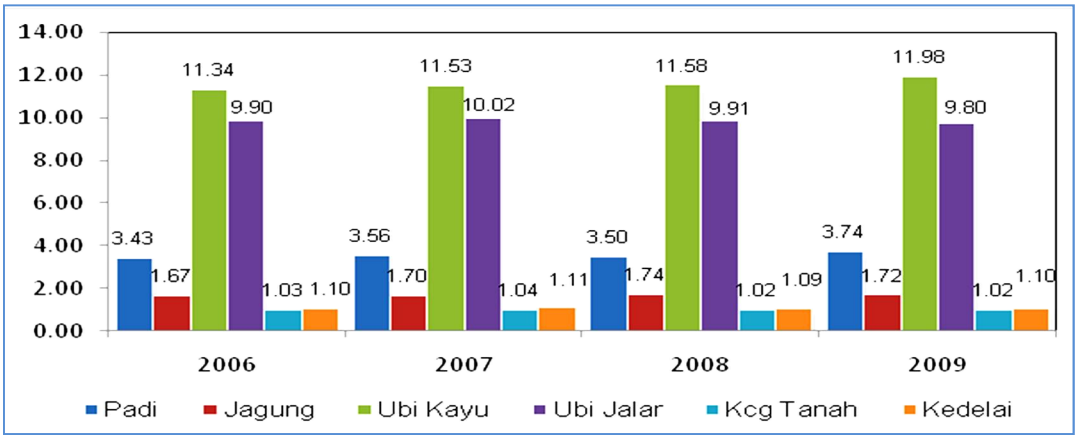
Urusan Pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Provinsi Papua

Pertanian

Sektor pertanian menyumbang 24% PDRB dan merupakan mata pencaharian pokok 70% warga Papua. Sampai saat ini, masyarakt Papua Asli telah memasuki peradaban agraris awal dalam bertani dan berkebun. Kegiatan bertani dilakukan masih dengan kapasitas terbatas dan sebagaian besar untuk memenuhi kubutuhan sendiri (subsisten). Potensi pertanian di Papua telah ditetapkan oleh pemerintah dalam dokumen MP3EI dengan menetapkan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional.

Pemerintah Provinsi Papua mengarahkan pembangunan sektor pertanian kepada peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, perluasan aneka ragam hasil produksi pertanian, peningkatan ketrampilan sumber daya manusia khususnya bagi petani, dan peningkatan produksi ekspor komoditi hasil pertanian melalui fasilitasi pemerintah. Perkembangan produktivitas pertanian tanaman pangan di Papua cenderung lambat. Sebagaimana yang disajikan dalam grafik II.15tingkat produktivitas 6 komoditas tanaman pangan yang strategis setiap tahunnya mengalami kenaikan sangat kecil, bahkan cenderung tetap. Produktifitas lahan untuk tanaman padi sepanjang tahun 2006-2009 rata-rata hanya mengalami peningkatan sekitar 2,59% per tahun, kemudian untuk ubi kayu rata-rata tumbuh 1,88% per tahun, sedangkan kedelai sebesar 0,14% per tahun. Adapun untuk tanaman ubi jalar dan kacang tanah malah terlihat menurun sekitar 0,34% per tahun.

Grafik 2.19 Perkembangan Produktifitas Lahan Tanaman Pangan Di Provinsi Papua



Sumber: BPS Papua, 2010 (diolah)

Perkebunan

Perkebunan di Provinsi Papua dalam pengelolaannya sangat terkait erat dengan tiga pelaku usaha yakni masyarakat adat, swasta,dan pemerintah daerah. Luas areal tanaman perkebunan di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2007 sudahmencapai 127.705 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 108.178 ton, dengan kata lain tingkat produktifitas lahan yang dihasilkan mencapai 0,85 ton per hektar.

Tabel 2.57 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Pengusahaan Tahun 2007

Jenis Pengusaha	Lahan (hektar)	Produksi (ton)	Produktifitas (ton/hektar)
Rakyat	84.155	46.599	0,55
Negara	10.300	29.200	2,83
Swasta	33.250	32.379	0,97
Jumlah	127.705	108.178	0,85

Sumber : BPS Papua, 2010 (data diolah)

Lahan perkebunan di Provinsi Papua lebih banyak diusahakan oleh rakyat yaitu kurang lebih sekitar 65,90% dari total lahan yang tersedia. Demikian juga dengan jumlah produksinya, didominasi oleh hasil perkebunan rakyat sekitar 43,08% dari total pangsa produksi perkebunan. Namun demikian, tingkat produktifitas lahan perkebunan rakyat ternyata jauh lebih rendah dibandingkan perkebunan negara. Sebagaimana yang disajikan pada Tabel II.54 secara rata-rata tingkat produktifitas perkebunan negara bisa mencapai 2,83 ton per hektar, sedangkan perkebunan rakyat hanya 0,55 ton perhektar. Ini berarti tingkat teknologi usaha perkebunan yang dilakukan oleh negara jauh lebih baik dibandingkan perkebunan rakyat.

Tabel 2.58 Potensi Perkebunan Rakyat Tahun 2008

JenisKomoditi	Lahan (ha)	Produksi (ton)	Petani (org)	Produktifitas		Penguasaan Lahan (ha/org)
				Lahan (ton/ha)	Tani (ton/org)	
Karet	4.682	1531	6.881	0.33	0.22	0.68
Kelapa Sawit	9.818	16.135	11234	1.64	1.44	0.87
Kopi	8.492	2.664	18536	0.31	0.14	0.46
Kelapa	314	1.252	36252	3.99	0.03	0.01
Coklat	20.964	11.515	24343	0.55	0.47	0.86
Cengkeh	2.061	69	3280	0.03	0.02	0.63

JenisKomoditi	Lahan (ha)	Produksi (ton)	Petani (org)	Produktifitas		Penguasaan Lahan (ha/org)
				Lahan (ton/ha)	Tani (ton/org)	
Kelapa Hibrida	122	26	278	0.21	0.09	0.44
Jarak	467	4	547	0.01	0.01	0.85
Lada	41	9	154	0.22	0.06	0.27
Kapuk	737	64	5989	0.09	0.01	0.12
Panili	341	1	490	0.00	0.00	0.70
Jambu Mente	3.356	509	7587	0.15	0.07	0.44
Pinang	1.653	350	5407	0.21	0.06	0.31
Sagu	458	106	1360	0.23	0.08	0.34
Total	**53.506**	**34.235**	**122338**	**0.64**	**0.28**	**0.44**

Sumber: BPS Papua, 2010 (diolah)

Jenis komoditas perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh rakyat selama ini adalah kelapa sawit dan coklat. Jumlah produksi kelapa sawit yang diusahakan rakyat sampai dengan tahun 2008 kurang lebih mencapai 16.135 ton atau menguasai pangsa produksi perkebunan rakyatsekitar 47,13%. Sedangkan produksi coklat sebanyak 11.515 ton atau 33,64% dari total produksi perkebunan. Komoditi perkebunan lainnya yang cukup banyak dikelola oleh rakyat adalah karet , kopi , kelapapinang dan sagu.

Kehutanan

Dari tahun ke tahun, luas hutan yang ada di Provinsi Papua semakin berkurang. Pada tahun 2007, luas hutan di Papua sebesar 32.271.799 ha, kemudian pada tahun 2008 turun menjadi 31.690.080 ha (turun 1,80 persen) dan pada tahun 2009 berkurang lagi sebesar 10,83 persen. Luas hutan lindung sebesar 8.277.916 ha atau 29,29 persen dari total keseluruhan. Luas hutan yang digunakan untuk kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam sebesar 5.675.861 ha.

Tabel 2.59 Luas Hutan Menurut Peta Paduserasi (Ha)

Tahun	Hutan Lindung	Kawasan Suaka Alam	Hutan Produksi		
			Terbatas	Tetap	Hutan Produksi Yang Dikonversikan
2007	6.808.711	na	1.817.062	8.189.687	8.189.687
2008	9.190.585	na	1.763.531	8.833.039	8.833.039
2009	8.277.916	5.675.861	1.904.896	8.135.076	8.135.076

Sumber: BPS Papua, 2010 (diolah)

Adapun produksi kehutanan yang dapat dihasilkan oleh Papua selama ini adalah kayu bulat yang meliputi meranti, merbau, sengon, dan lain-lain, diperkirakan ada 150 jenis kayu komersial yang tersedia di hutan Papua. Selain itu ada juga hasil hutan ikutannya berupa kulit masoi, rotan, kayu gaharu, arang, kulit lawang, tali kuning dan gambir.

Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi menjadi salah satu prioritas kebutuhan masyarakat Papua, khususnya listrik. Ketersediaan listrik masih didukung oleh ketersediaan yang sangat terbatas dan cenderung fokus untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kekayaan sumber energi terbarukan yang dimiliki Papua diantaranya danau, sungai besar dan panas bumi sama sekali belum disentuh pemanfaatanya karena terbentur dengan kebutuhan mega investasi. Disisi lain, ketersediaan energi adalah prasyarat dasar pertumbuhan ekonomi khususnya dari sektor manufaktur. Dibutuhkan terobosan besar dari pemerintah daerah dengan menggunakan kewenangan luas otonomi khusus untuk mengembangkan skema pembangunan sumber pembangkit listrik ramah lingkungan melalui sindikasi pendanaan yang ramah. Upaya ini merupakan terobosan jangka panjang dan memiliki daya ungkit yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Potensi bahan galian tambang baik yang strategis maupun dipermukaan seperti tembaga, perak, emas, minyak, gas alam, marmer, pasir kwarsa, kapur dan lain-lain banyak tersedia. Untuk bahan tambang emas dan tembaga diperkirakan proven deposit yang tersedia di kawasan konsesi Freeport saja mencapai sekitar 2.5 milyar ton, belum ditambah dengan 10 titik lainnya yang berada di kawasan Pegunungan Tengah, yang diperkirakan juga mengandung bahan tambang yang berlimpah dengan nilai kurang lebih sama dengan kawasan Freeport.

Struktur perekonomian Papua hingga saat ini didominasi oleh sektor pertambangan, terutama hasil pertambangan PT Freeport dengan rata-rata share 60 persen. Selama tahun 2009, produksi konsentrat tembaga dan emas PT Freeport mencapai 2.468.158 DMT, produksi terbanyak terjadi pada Bulan Mei dengan jumlah produksi 280.555 DMT. Ketergantungan pada satu sektor saja tentu tidak dapat menjamin keberlanjutan sumber pendanaan pembangunan karena suatu saat sumber daya alam sebagai sumber atau modal pembangunan yang terus dikuras tanpa ada penciptaan kembali akan habis. Keberlanjutan sumber pembiayaan pembangunan akan terganggu. Di samping itu, secara nyata bahwa hasil dari sektor pertambangan belum sepenuhnya mampu menjamin peningkatan atau perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah

pertambangan. Untuk saatini tenaga kerja yang bekerja di wilayah tambang masih didominasi oleh tenaga kerja yang berasal dari luar Papua.

Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan dan kelautan, di mana produksi perikanan pada tahun 2009 tercatat 242.969 ton yang terdiri dari 233.165 ton perikanan laut (95,96 persen), 7.515,8 ton dari perairan umum (3,09 persen) dan 2.289,1 ton dari perikanan budidaya (0,94 persen). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi perikanan tahun 2009 naik sebesar 3,64 persen. Adapun nilai produksi perikanan selama tahun 2009 mencapai 4,346 trilliun rupiah atau meningkat 37,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total nilai produksi tersebut, 95,57 persennya merupakan nilai produksi perikanan laut.
sebelumnya. Dari total nilai produksi tersebut, 95,57 persennya merupakan nilai produksi perikanan laut.

Tabel 2.60 Produksi Perikanan (ton)

Tahun	Perikanan Tangkap		Budidaya	Jumlah
	Laut	Umum		
2007	224.190,80	6.926,70	1.587,80	232.705,30
2008	225.054,30	7.311,90	2.072,00	234.438,20
2009	233.165,00	7.515,80	2.289,10	242.969,90
2010	231.543,20	7.519,50	1.052,20	240.115,00
2011	269.257,80	7.624,80	4.350,70	281.233,30

Sumber : PDA Provinsi Papua, BPS Provinsi Papua, 2011

Beberapa jenis komoditi laut yang telah diusahakan oleh nelayan rakyat selama ini dari jenis ikan antara lain ikan kakap, tuna, bawal, merah, kembung, tenggiri, dan lain-lain. Kemudian dari binatang kulit keras yang sangat potensial diantaranya kepting dan udang. Terakhir dari binatang kulit lunak adalah cumi-cumi, sontong dan rumput laut. Potensi perikanan tangkap yang sangat besar dan hingga kini belum sepenuhnya digarap dapat menjadi salah satu prioritas pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kendala jarak terhadap pusat-pusat penangkapan ikan harus diatasi dengan segera dan dikelola dengan manajemen yang terintegrasi dari penangkapan hingga pengolahan hasil termasuk pemasarannya. Sumbangan sektor pertanian ikan tangkap harus mampu menggantikan peran sektor pertambangan yang bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan dan menimbulkan beban pembangunan berupa hilangnya manfaat sosial yang selama ini seluruh biaya perbaikan lingkungan justru dihitung sebagai pos pengeluaran yang mampu memberikan nilai tambah pada perekonomian.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu daerah dengan produksi perikanan tangkap yang paling tinggi di Papua mengingat lokasinya yang berhadapan dengan perairan lepas Laut Arafuru yang terkenal dengan potensi ikan demersal dan pelagisnya. Namun,potensi tersebut dapat dikembangkan dengan kegiatan ekonomi perikanan dan juga pengelolaan lebih lanjut seperti pengolahan ikan, pengalengan dan lain sebagainya. Usaha pengalengan ikan telah berkembang di Kabupaten Merauke meski dengan kondis TPI dan PPI yang tidak termanfaatkan secar optimal, dan sudah didukung oleh adanya Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMP). Negara tujuan ekspor dari wilayah Merauke ini mencapai Hongkong, Spanyol, Vietnam, China, Thailand, Australia, Jepang dan Italia untuk jenis komoditi Udang beku. Sedangkan untuk ikan beku negara tujuan ekspor adalah China dan Thailand serta fillet ikan dengan negara tujuan Australia. Berdasarkan pengalaman Kabupaten Merauke, maka perlu ditetapkan wilayah pengembangan cepat tumbuh untuk perikanan tankap berdasarkan pemetaan RTRWN.

Pariwisata

Provinsi Papuaadalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki banyak sekali obyek wisata antara lain obyek Wisata Alam, Wisata Gunung, Wisata Bahari, Wisata Pantai, Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Minat Khusus, Wisata Kuliner, Wisata Olah Raga, Wisata Belanja, dan lain-lain.

Di Papua terdapat beberapa pegunungan sebagai obyek wisata, diantaranya yang terkenal adalah pegunungan Jayawijaya yang merupakannama untuk deretan pegunungan yang terbentang memanjang di tengah provinsi Papua Barat dan Papua (Indonesia) hingga Papua Newguinea di Pulau Irian. Selain menjadi tempat wisata bagi para pendaki, Pegunungan Jayawijaya juga menjadi wisata bagi para peminat khusus peneliti geologi dunia. Pegunungan Jayawijaya merupakan satu-satunya pegunungan dan gunung di Indonesia yang memiliki puncak yang tertutup oleh salju abadi. Meskipun tidak seluruh puncak dari gugusan Pegunungan Jayawijaya yang memiliki salju.Beberapa puncak pegunungan Jayawijaya yang dikenal seluruh dunia antara lain: Puncak Jaya (dulu namanya puncak Carstenz Pyramide), Puncak Meren, Puncak Northwall, Puncak Ngga Pulu, Puncak Sudirman.dan Puncak Trikora.

Provinsi Papua juga memiliki beberapa taman nasional yang sudah dikenal lama oleh wiswatawan manca negara, yang paling terkenal adalah Taman Nasional Lorentz. Dengan luas wilayah sebesar 25.000 km², Taman Lorentz menjadi taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Taman Nasional Lorentz merupakan perwakilan dari ekosistem terlengkap untuk keanekaragaman hayati di Asia Tenggara dan Pasifik. Kawasan ini juga merupakan salah

satu diantara tiga kawasan di dunia yang mempunyai gletser di daerah tropis. Selain sebagai tempat rekreasi dan wisata alam seperti penjelajahan hutan, pendakian gunung, panorama alam, air terjun, Taman Nasional Lorentz juga dapat ditawarkan sebagai tempat pengamatan berbagai jenis flora dan fauna.

Taman lainnya yang potensial sebagai obyek wisata, khususnya wisata bahari adalah Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang secara administratif berada dalam wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Nabire. Taman Nasional Teluk Cendrawasih merupakan taman nasional perairan laut terluas di Indonesia, terdiri dari daratan dan pesisir pantai (0,9%), daratan pulau-pulau (3,8%), terumbu karang (5,5%), dan perairan lautan (89,8%).

Taman Nasional Wasur yang terletak di Kabupaten Merauke juga merupakan salah satu obyek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Di taman nasional ini ditemukan sekitar 390 jenis burung, dan terdapat 80 jenis mamalia. Salah satu ciri Taman Nasional Wasur adalah rumah rayap (musamus) yang dikenal juga dengan sebutan rumah semut.Keistimewaan dari rumah rayap ini adah rancangan ventilasinya yang berupa lorong-lorong yang membantu melindungi dari air hujan, dan membantu melepas panas ke udara ketika musim panas tiba.Rumah rayap ini bisa mencapai ketinggian sampai 5 meter dengan bahan sarangnya terbuat dari rumput dan lumpur yang disusun oleh rayap. Menggunakan campuran dari rumput kering sebagai bahan utama dan liur sebagai semen untuk merekatkannya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun istana rayap ini.

Di Kabupaten Jayapura ada sebuah danau yang sangat mempesona panoramanya yakni danau Sentani. Dengan luas 3,63 hektar dan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Danau Sentani telah menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Jayapura. Dalam dua tahun terakhir ini Danau Sentani telah berbenah diri, dan menjadi ajang promosi wisata di Provinsi Papua melalui pelaksanaan sebuah festival yang dinamakan Festival Danau Sentani atau FDS. Pada tahun 2010 yang lalu, FDS digelar dengan nuansa unik dan inovatif melalui tiga konsep utama yaitu konsep pagelaran yakni atraksi dan lomba budaya khas Papua, konsep pameran yakni promosi, investasi dan perdagangan dan ketiga adalah konsep wisata yakni tour yang menarik dengan menikmati panorama Danau Sentani yang indah, mengunjungi kampung wisata Tablanusu serta tempat wisata lainnya. Danau ini merupakan tempat yang sangat bagus untuk berenang, bersampan, memancing, bermain ski air dan melakukan beberapa olah raga air lainnya. Selain Danau Sentani, danau lainnya yang juga eksotis dan mempesona adalah Danau Paniai. Danau yang berada di Kabupaten Paniai terletak di daerah pegunungan dan perbukitan yang berhawa sejuk dan menyimpan aneka jenis ikan air tawar dan udang serta nilai-nilai seni budaya Suku Mee dan Suku Moni.

Danau Paniai merupakan salah satu danau terbaik dan terindah di Indonesia karenamenyuguhkan panorama alam yang rancak, air danau yang biru, dan suasana sekitar nan asri. Disamping itu juga terdapat bebatuan dan pasir di tepian danau, serta dikelilingi oleh tebing-tebing yang tinggi.

Perindustrian dan Perdagangan

Nilai ekspor dan impor Papua mempunyai proporsi yang sangatbesar dibandingkan dengan total PDRB. Secara riil nilai ekspor ditambah impor mencapai 62% dari nilai riil PDRB (Sumber BI Jayapura, 2004). Kondisi ini disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat Papua berupa bahan makanan, makanan jadi, kendaraan bermotor, bahan bangunan, produk elektronik dan beberapa barang kebutuhan pokok lainnya, sampai saat ini masih didatangkan dari luar Papua dan bahkan dari luar negeri.

Ekspor non migas Provinsi Papua dengan komoditi konsentrat tembaga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total ekspor Provinsi Papua sekitar 70,38% atau mencapai nilai US$ 538.878.971,28. Sedangkan ekspor non migas lainnya sebesar 23,10% berupa komoditi yang menjadi unggulan Provinsi Papua seperti Plywood, Ikan Beku dan Udang Beku dengan nilai US$ 176.860548,63.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi khusus daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing *(competitiveness)* merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi daerah sendiri guna mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk di dalamnya adalah dana bagi hasil penerimaan sumber daya alam (sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, penambangan gas alam dan penambangan panas bumi), retribusi dan pajak daerah. Pengembangan potensi daerah berkaitan dengan semangat otonomi khusus adalah upaya bagaimana meningkatkan harkat dan martabat masyarakat asli Papua dan ikut terlibat dalam proses pembangunan ekonomi. Untuk mengukur tingkat kemandirian sebagai organisasi

otonom, maka ukuran proporsi pendapatan asli daerah dari keseluruhan pendapatan adalah mutlak diperlukan. Untuk kondisi Papua saat ini, PAD masih sangat rendah (<6,5%) dari total pendapatan diterima, sehingga berbagai upaya strategis dan berdaya ungkit harus dilakukan secara berkelanjuan untuk menyediakan (ekstensifikasi) sumber pendapatan sekaligus sebagai ukuran keberhasilan membangun investasi yang memberi hasil.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga yang mempengaruhi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Di Provinsi Papua, komposisi pengeluaran untuk konsumsi makanan masih lebih dominan dibandingkan konsumsi non makanan, artinya pemenuhan kebutuhan dasar pangan masih menjadi prioritas pengeluaran konsumsi rumah tangga dibandingkan untuk bentuk konsumsi lainnya. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator kemiskinan di daerah. Padatahun 2010, persentase konsumsi makanan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 60,20 persen pada tahun 2009 menjadi 61,10 persen pada tahun 2010. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran pola konsumsi penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk Papua tahun 2010 menurun dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan konsumsi non makanan terbanyak adalah konsumsi untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Tabel 2.61 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2007 s/d 2008 Provinsi Papua

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Total Pengeluaran RT	16.779.623	21.664.172	28.411.502	30.960.683	38.836.000
2.	Jumlah RT	455.907	485.335	494.689	494.689	658.794
3.	Rasio (1./2.)	36,80	44,64	57,43	62,59	58,95

Sumber : Papua dalam angka 2012

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua padatahun 2008 mencapai 106,1 dan selalu berada di atas nilai rata-rata nasional hingga tahun 2010. Pada tahun 2011 terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai 103,02 dan berada di bawah rata-rata nasional yaitu 104,81. Penurunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari indeks yang dibayar petani, baik untuk proses usaha maupun konsumsi rumah tangga.

Perkembangan harga barang/jasa secara umum di Papua di tahun 2004 ditunjukkan oleh laju pergerakan IHK di Kota Jayapura. Laju Pertumbuhan IHK sebesar 4,48% pada tahun 2010 lebih cepat dibandingkan tahun 2009 sebesar 1,91%. Hal ini menunjukkan adanya

kenaikan hanya barang-barang konsumsi bila dibanding tahun 2009. Laju inflasi Kota Jayapura pada Juli 2011 sebesar 3,91%, yang mana berada sedikit di bawah laju inflasi nasional sebesar 4,61%. Berdasarkan data BPD tahun 2008 ketersediaan energi di Provinsi Papua mencapai 2.992 Kkal/kapita/hari, walaupun telah memenuhi standar nasional sebesar 2.550 Kkal/kapita/hari namun kontribusi energi tersebut sebagian besar masih berasal dari pangan nabati.

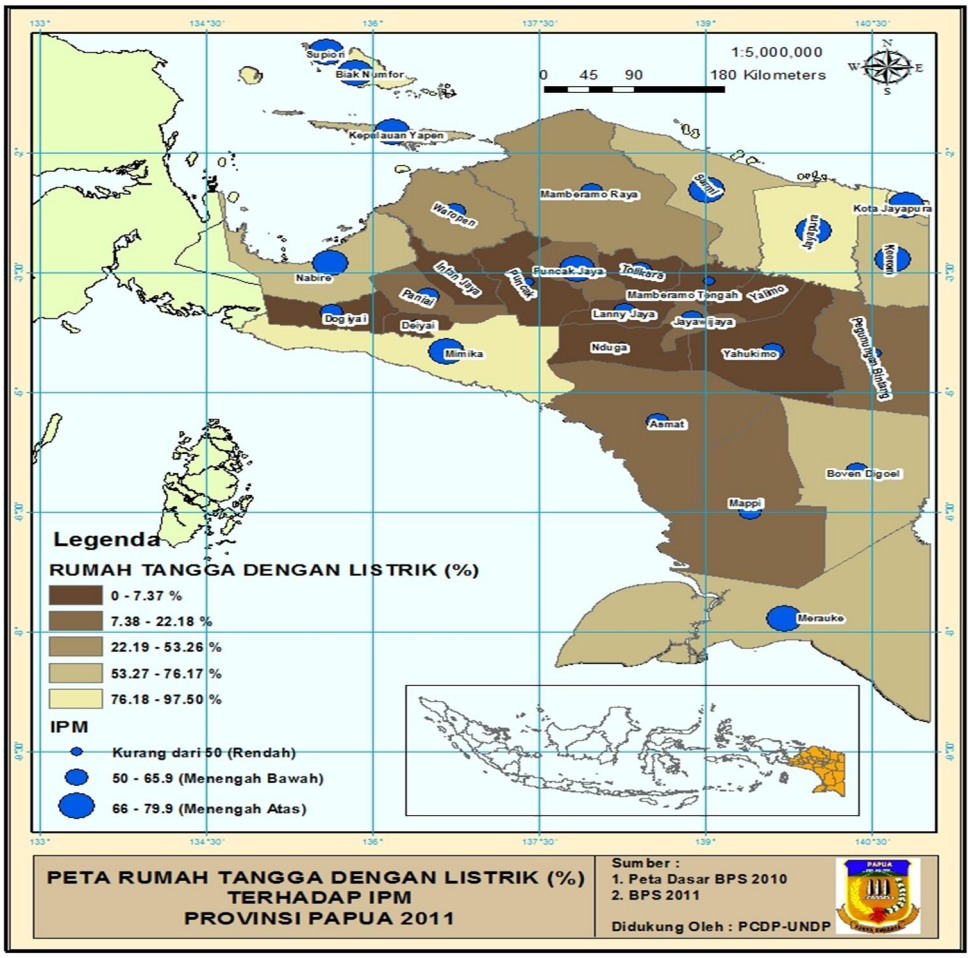
Tingkat konsumsi energi/kalori penduduk Provinsi Papua sebesar 1.826,65 Kkal/kapita/hari atau baru mencapai 83,00 persen dari standar nasional sebesar 2.200 Klal/kapita/hari. Demikian juga tingkat konsumsi protein sebesar 43,27 gram/kapita/hari atau baru mencapai 87,00 persen dari standar nasional yang dibutuhkan sebesar 50,00 gram/kapita/hari.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan sarana dan prasarana ketenagalistrikan di Provinsi Papua masih sangat minim. Kebutuhan listrik di ibukota kabupaten/kota sudah tersedia namun dengan kapasitas pasokan yang terbatas sehingga sering terjadi pemadaman, sedangkan ibukota kabupaten pemekaran dan kawasan perkampungan maupun pedalaman terpencil masih memiliki fasilitas listrik yang sangat terbatas. Pengembangan listrik sebagian besar masih memanfaatkan PLTD sehingga sangat dipengaruhi oleh pasokan BBM. Kekayaan sumberdaya alam yang ada seperti air, laut, angin maupun sinar matahari belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan listrik.

Energi listrik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan sudah menjadi bagian kebutuhan dasar sejajar dengan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Upaya untuk meningkatkan kemajuan daerah di Provinsi Papua melalui pengembangan kapasistas listrik PLN tampaknya sulit direalisasikan. Kondisi ini akibat infrastruktur kelistrikan, khususnya yang dibangun oleh PLN sangat tidak memadai untuk memenuhi permintaan sumber energi listrik dari masyarakat yang selalu meningkat dan lebih besar setiap tahunnya.

Gambar 2.12 Peta Rumah Tangga



Pembangkit listrik yang dibangun PLN di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2010 hanya sejumlah 246 unit, dengan kapasitasterpasang kurang lebih sebesar 185.276 Kwh. Sementara beban puncak pada pemakaian listrik PLN dari masyarakat rata-rata adalah sebesar 104.904 Kwh. Ini berarti PLN sebenarnya mempunyai kapasitas cadangan sebesar 80.372 Kwh.

Selain kurangnya fasilitas listrik PLN yang tersedia, distribusi penyebaran yang tidak merata juga menjadi masalah kelistrikan di Provinsi Papua. Berdasarkan data BPS tahun 2010, distribusi listrik PLN di Provinsi Papua lebih terkonsentrasi kepada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di Kota Jayapura dan Merauke. Kedua daerah ini mendapat sambungan listrik PLN dengan kapasitas terpasang masing-masing sebesar 85.300 kwh (46,04%) untuk Kota Jayapura dan sebesar 21.268 kwh (11,48%) untuk Kabupaten Merauke. Sedangkan di daerah-daerah kecil seperti Kabupaten Mappi, Supiori, Asmat dan Keerom rata-rata kapasitas listrik yang terpasang hanya 538 kwh. Beberapa daerah yang terletak di bagian pedalaman dan pegunungan seperti Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang

dan Asmat, sampai saat ini belum terpasang listrik PLN. Masyarakat dan pemerintah daerah setempat memanfaatkan mesin disel atau genset untuk membangkitkan tenaga listriknya, yang sudah tentu memiliki kapasitas yang sangat terbatas dan hanya dapat dinikmati oleh sedikit rumah tangga.

Tabel 2.62 Kepadatan Jaringan Listrik PLN Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Jaringan Listrik (Km)	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan (Km/Km^2)
Merauke	997.3	43.979	0.02
Jayawijaya	578.25	12.680	0.05
Jayapura	584.33	15.309	0.04
Nabire	298.72	16.312	0.02
Mimika	320.86	20.040	0.02
Kep Yapen	189.68	3.131	0.06
Biak Numfor	695.12	2.360	0.29
Boven Digoel	143.22	28.471	0.01
Sarmi	126.88	25.902	0.00
Keerom	228.17	9.365	0.02
Supiori	21.18	24.628	0.00
Kota Jayapura	48.88	775	0.06
Total Papua	**47.6041**	**317.062**	**0.01**

Sumber : Papua dalam angka 2011 (diolah)

Minimnya pemerataan fasilitas listrik juga ditunjukkan oleh panjang jaringan listrik dan kepadatan jaringan listrik, di mana yang paling panjang jaringannya adalah di Kota Jayapura sepanjang 1,028.44 km diikuti Kabupaten Merauke 997.30 km. Sedangkan yang paling pendek jaringannya adalah di Kabupaten Waropen yakni 21.18 km. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Kepadatan jaringan listrik tertinggi di Kota Jayapura dengan setiap luas wilayah 1 km^2 terdapat jaringan listrik PLN sepanjang 65.47 km disusul Kabupaten Nabire yang mempunyai rasio sebesar 13.29 km/km^2. Untuk kabupaten-kabupaten lainnya mempunyai rasio yang sangat rendah dibawah 5 km/km^2, seperti Kabupaten Yapen Waropen dengan rasionya sebesar 0.65 dan Kabupaten Paniai sebesar 0.03. Ini berarti di Kabupaten Yapen Waropen, dalam satu km^2 hanya terdapat jaringan listrik PLN sepanjang 0.65 km atau 65 meter. Sedangkan di Nabire 3 meter untuk rasio yang sama.

Tabel 2.63 Potensi Sungai di Provinsi Papua Sebagai Pembangkit Tenaga Listrik

No	Nama sungai	Lokasi	Kapasitas daya (MW)
1	Digoel	Boven Digoel	1.522
2	Eilanden	Asmat	2.291

No	Nama sungai	Lokasi	Kapasitas daya (MW)
3	Lorentz	Asmat, Jayawijaya	232
4	Cemara	Mimika	237
5	Otokwa	Mimika	297
6	Mimika	Mimika	154
7	Siriwo	Nabire, Paniai	310
8	Mamberamo	Mamberamo Raya	9.932
9	Urumuka	Mimika	336
Jumlah			**15.631**

Sumber: Kanwil DPE Irja dan Dinas Pertambangan Provinsi Papua Tahun 2009

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi

Kegiatan investasi di Provinsi Papua masih sangat rendah, itupun masih didominasi kegiatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dibandingkan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).Jumlah rencana investasi PMDN yang disetujui pada tahun 2009 adalah 29 perusahaan yang tersebar di 11 kabupaten/kota namun hanya 21 perusahaan yang merealisasikannya. jumlah terbanyak di Kabupaten Jayapura yaitu 8 perusahaan (27%),sedangkan sisanya berkisar antara 1 sampai 4 perusahaan. Dari berbagai jenis usaha yang terealisir sebagian besar bergerak di bidang usaha perkebunan (9 perusahaan) dan industri berbasis kayu (5 perusahaan). Jumlah tenaga kerja Indonesia yang ditargetkan bekerja di bidang investasi PMDN Pada tahun 2009 adaah 63.311 orang namun realisasinya hanya 118 orang (1,8%). Dilihat dari realisasi nilai investasinya,maka tampak bahwa realisasi nilai investasi PMDN masih sangat rendah yaitu hanya sekitar Rp 1,811 trilyun (2,8%) dari Rp 63 trilyun yang ditargetkan. Kondisi ini tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.64 Rencana dan Realisasi PMDN dan PMAdi Provinsi Papua Tahun 2007-2009

Tahun		Jumlah Proyek PMDN (buah)	Jumlah Proyek PMA (buah)	Nilai Investasi PMDN (Rp trilyun)	Nilai Investasi PMA (Rp trilyun)	Jumlah TK PMDN (orang Ind)	Jumlah TK PMA (orang Ind)
2006	Rencana	36	48	18.03	4.81	539,162	33,374
	Realisasi	*)	21	2.81	6.29	11,717	14,317
	%		43.75%	15.59%	130.77%	2.17%	42.90%
2007	Rencana	32	54	37.43	5.38	453,964	92,105
	Realisasi	19	29	1.45	6.52	5,012	17,101
	%	59.38%	53.70%	3.87%	121.19%	1.10%	18.57%
2008	Rencana	28	65	57.39	5.07	459,687	97,446
	Realisasi	21	36	1.47	6.53	4,381	17,871

Tahun		Jumlah Proyek PMDN (buah)	Jumlah Proyek PMA (buah)	Nilai Investasi PMDN (Rp trilyun)	Nilai Investasi PMA (Rp trilyun)	Jumlah TK PMDN (orang Ind)	Jumlah TK PMA (orang Ind)
	%	75.00%	55.38%	2.56%	128.80%	0.95%	18.34%
2009	Rencana	29	74	63.02	5.16	63.311	103.671
	Realisasi	21	42	1.81	6.57	11.45	17.98
	%	72.41%	56.76%	2.87%	127.33%	18.09%	17.34%
2010	Rencana	29	79	62.320	5.310	50,524	106,770
	Realisasi	*)	44	2.401	8.250	12,278	18,892
	%		55.70%	3.85%	155.37%	24.30%	17.69%
2011	Rencana	30	87	62.331	5.316	50.530	114.517
	Realisasi	*)	87	3.263	8.251	12.400	20131
	%		100%	5,23%	155%	24,53%	17,57%

Sumber : BPS Papua (2010)

Dari sisi PMA, jumlah perusahaan yang disetujui untuk melakukan investasi adalah 74 perusahaan yang tersebar di 13 kabupaten/kota di mana yang terbanyak yaitu 24 perusahaan ada di Kabupaten Mimika, khususnya terkait untuk usaha pertambangan.Namun dari rencana tersebut baru 42 PMA yang merealisasikannya. Meskipun nilai investasi yang ditargetkan lebih rendah dibandingkan nilai rencana investasi PMDN, namun dari sisi nilai investasi yang direalisasikan justru melebihi yang ditargetkan yaitu dari Rp 5,1 trilyun terealisasi Rp 6,5 trilyun.

Dari sisi perbankan tampak bahwa perkembangan posisi simpanan dan posisi kredit baik rupiah maupun valuta asing menurut kelompok bank yang ada di Provinsi Papua belum menunjukkan perkembangan yang signifikan karena keberadaan bank khususnya swasta nasional masih terpusat di beberapa kabupaten saja dan kegiatan masyarakat terkait perbankan juga belum maksimal.Kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menyerap dana sebagai modal pinjaman usaha masih relaitf rendah sehingga memungkinkan terjadinya *capital out flow* dari Papua yang sangat tinggi karena ketidakmampuan penyerapan dana tersebut.Secara keseluruhan, kemampuan penyerapan dana pinjaman atas simpanan (*Loan to Deposit Ratio*) masih berkisar antara 29% hingga 42%. Apabila dilihat berdasarkan persentase dari kemampuan penyerapan kredit atas simpanan tampak bahwa Bank Perkreditan Rakyat mampu menyalurkan yang terbaik. Namun apabila dilihat dari nilai nomimalnya, maka Bank Pemerintah mampu menyalurkan pinjaman dengan nilai tertinggi meski secara persentase masih tetap di bawah 50%. Untuk itu, upaya mendorong berbagai jenis kegiatan usaha yang mampu memberikan nilai tambah di dalam Provinsi Papua khususnya, perlu didorong dan ditingkatkan melalui penciptaan usaha-usaha berbasis lokal dan kemudahan akses pada perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 2.65 Posisi Dana Simpanan dan Posisi Kredit Rupiah dan Valuata Asingdi Provinsi PapuaTahun 2007 – 2009 (Rp trilyun)

Kelompok Bank	2006	2007	2008	2009
Pemerintah				
Simpanan	8,87	10,75	11,08	12,68
Pinjaman	3,24	3,11	4,29	5,56
(%)	36,5	28,9	38,7	43,9
Swasta Nasional				
Simpanan	2,88	1,81	2,64	2,99
Pinjaman	0,52	0,52	0,78	0,97
(%)	18,0	28,7	29,5	32,4
Perkreditan Rakyat				
Simpanan	0,11	0,09	0,11	0,15
Pinjaman	0,11	0,08	0,15	0,18
(%)	100	88,8	136	120
TOTAL				
Simpanan	11,86	12,65	13,83	15,82
Pinjaman	3,87	3,71	5,22	6,71
(%)	32,6	29,2	37,7	42,4

Sumber : BPS Provinsi Papua

Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yangtersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tabel 2.66 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Provinsi Papua

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah lulusan S1	1.621	1.607	1.895	2.149	2.149
2.	Jumlah lulusan S2	100	15	250	191	191
3.	Jumlah lulusan S3	NA	NA	NA	NA	NA
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	1.721	1.622	2.145	2.340	2.340
5.	Jumlah penduduk	2.015.616	2.056.517	2.097.482	2.833.381	2.928.750
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3	8,54	7,89	10,23	8,26	7,99

Sumber : Papua dalam angka 2012

Tabel 2.67 Rasio Ketergantungan Tahun 2007–2011 Provinsi Papua

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	644.106	646.300	648.200	993.818	975.783
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	29.600	32.500	35.200	27.190	28.978
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif	673.706	678.800	683.400	1.021.008	1.004.761
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	1.341.910	1.377.700	1.414.100	1.812.372	1.923.989
5.	Rasio ketergantungan	50,21	49,27	48,33	56,34	52,22

Sumber : Papua dalam angka 2012

Semakin banyak penduduk usia produktif yang berpendidikan berarti semakin mampu suatu daerah untuk mengembangkan aktifitas ekonominya. Indikator yang biasa digunakan adalah rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang menggambarkan total rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 56 ke atas) bagi penduduk usia produktif (kelompok umur 15-55 tahun). Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan di suatu daerah. Pembangunan di bidang kependudukan dikatakan berhasil jika nilai rasio ketergantungannya rendah. Semakin rendahnya nilai *dependency ratio* berarti semakin rendah angka beban ketergantungan.

Rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Papua cukup tinggi yaitu mencapai 48,3%, artinya setiap penduduk usia produktif harus menanggung 48 jiwa tidak produktif sehingga pendapatan keluarga lebih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Terkait dengan IPM, besarnya angka ketergantungan akan mengurangi keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap turunnya angka IPM.

2.5 Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik didaerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kementerian

teknis dibawah koordinasi dari Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan penerapan SPM untuk Pemerintah Provinsi meliputi 9 bidang SPM yakni perumahan rakyat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pekerjaan umum, ketahanan pangan, kesenian, dan perhubungan. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pemerintah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh pemerintahan daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah didaerah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada diwilayah kerjanya. Sementara itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Integrasi kedalam dokumen perencanaan dilakukan dengan memberikan pemahaman bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Hal yang pertama perlu dilakukan adalah menyusun rencana pencapaian SPM dengan menghitung kondisi awal tingkat pencapaian SPM setelah itu menghitung target pelayanan dasar yang akan dicapai kemudian disesuaikan dengan target-target sasaran didalam dokumen perencanaan. Dikarenakan kegiatan ini merupakan satu kesatuan, yang dimulai dari penyusunan data dasar dan setting target maka kegiatan tersebut dilakukan setelah kegiatan penyusunan data dasar dan penentuan target dilaksanakan.

Millenium Development Goals (MDGs)

MDGs merupakan komitmen nasional dan global dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi

kebijakan perencanaan ditingkat nasional dan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagaimana telah diketahui, Pemerintah Indonesia bersama-sama 188 negara lainnya telah berpartisipasi dan menandatangani Deklarasi Milenium pada KTT Milenium PBB yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2000. Deklarasi ini kemudian menyepakati tujuan-tujuan pembangunan global yang tertuang dalam *MDGs.* Sebagai salah satu penandatangan deklarasi *millennium*, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk merealisasikan dan memantau perkembangan pencapaian *MDGs* tersebut.

Dengan adanya *MDGs,* kondisi Indonesia dapat diperbandingkan dengan negara-negara lain secara lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan agar pelaksanaan kerjasama pembangunan antara Negara miskin dan berkembang dengan Negara maju menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Secara nasional, *MDGs* mempunyai peranan sebagai salah satu alat ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan terkait bidang-bidang yang tercakup dalam *MDGs.* Oleh karena itu, MDGs menjadi masukan yang penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional diIndonesia.

Saat ini target-target *MDGs* telah diarusutamakan dalam berbagai dokumen perencanaan Provinsi Papua (RPJPD, RPJMD, RKPD), perencanaan SKPD (Renstra, RenjaSKPD) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (DPA). Dalam konteks inilah maka Provinsi Papua sebagai salah satu daerah otonom diwilayah NKRI, secara bersama-sama dengan daerah lainnya mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan dan mensukseskan pencapaian *MDGs* tersebut dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

MDGs terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Delapan tujuan utama tersebut adalah :

1. Memberantas kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem;
2. Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua;
3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Menurunkan Angka Kematian Anak;
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil;
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya;
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan; dan
8. Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN





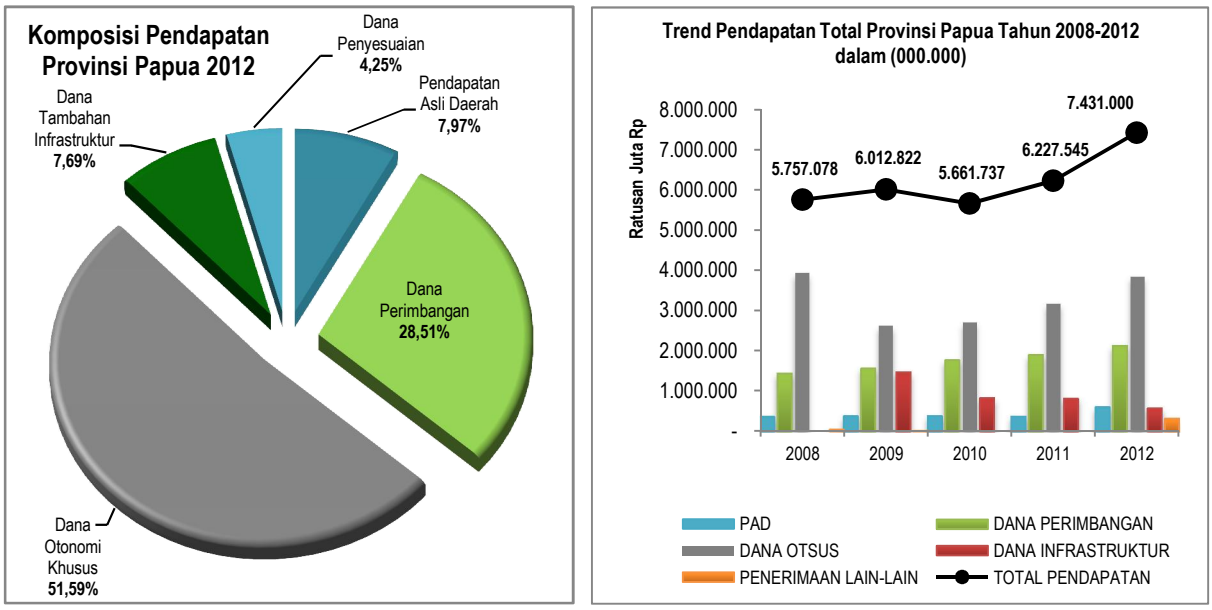
BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Untuk memperoleh gambaran pendanaan keuangan selama 5 (lima) tahun mendatang maka dibutuhkan pemahaman yang baik bagaimana dinamika dan karakteristik kinerja keuangan daerah di 5 (lima) tahunan terakhir dalam beberapa segi. Melihat dari beberapa data historis yang disajikan pada Grafik 3.1 dibawah dapat dilihat pertama adalah pendapatan total Provinsi Papua yang tiap tahun mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,59 persen dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Jika dilihat pada komposisi pendapatan di Provinsi Papua dapat dilihat bahwa Dana Otonomi Khusus selama kurun waktu 4 (empat) tahun terkahir mengalami kenaikan. Komposisi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.1 Komposisi dan Trend Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2008 s/d 2012



Sumber : Sumber : BPKAD Provinsi Papua *(diolah)*

Jika dilihat dari Grafik 3.1 bahwa trend Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan hanya 19,62 persen pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menorong tumbuhnya PAD belum maksimal dilakukan. Sementara itu dana perimbangan juga tidak menunjukkan pertumbuhan yang memadai hanya naik 9,84 persen pertahun dari tahun 2007 sampai dengan 2012. Namun gambaran ini memang tidak dapat digunakan untuk mengukur kinerja daerah, karena dialokasikan oleh pusat sesuai dengan indeks yang dimiliki daerah. Sedangkan dana Otsus mengalami pertumbuhan hanya 1,06 persen pertahun, selain itu jika kita memperhatikan pertumbuhan dana infrastruktur mengalami pertumbuhan yang negativ yakni -25,00 persen pertahun, hal ini dapat dilihat pada grafik 3.1 bahwa dana infrastuktur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 cenderung menurun, di tahun 2009 dana infrastruktur mencapai Rp. 1,4 trilyun dan ditahun 2012 turun menjadi Rp. 571 milliar.

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 s/d Tahun 2012

No	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**						
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	***357.741.754.696***	***369.727.113.036***	***380.025.633.524***	***363.100.749.954***	***592.117.234.714***	***19,62***
1.1.1.	Pajak Daerah	259.185.991.678	242.788.565.711	252.434.826.256	275.091.605.790	401.691.933.696	16,68
1.1.2.	Retribusi Daerah	19.710.392.088	20.576.682.593	21.171.950.088	18.889.330.977	15.773.346.925	-4,79
1.1.3.	Hasil Pengelolaann Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	26.418.177.843	28.926.619.817	30.340.833.072	19.887.905.137	22.598.925.557	1,97
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	52.427.193.087	77.435.244.915	76.078.024.108	49.231.908.050	152.053.028.536	63,03
1.2	**Pendapatan Transfer**	***5.357.136.380.541***	***5.643.095.225.403***	***5.257.399.077.896***	***5.864.444.394.580***	***6.838.882.326.170***	***5,28***
1.2.1	**Dana Perimbangan**	**1.436.993.483.541**	**1.563.054.900.403**	**1.762.534.289.896**	***1.893.484.847.030***	***2.118.450.110.170***	***9,84***
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	198.461.591.855	203.582.806.979	252.799.169.554	269.335.254.508	311.768.070.269	9,53
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	201.897.066.686	219.971.329.424	286.182.154.342	275.748.034.522	130.708.425.901	-7,18
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.002.431.825.000	1.058.227.764.000	1.148.497.966.000	1.276.285.908.000	1.569.782.444.000	12,52
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	34.203.000.000	81.273.000.000	75.055.000.000	72.115.650.000	106.191.170.000	43,33
1.2.2	**Lainnya**	**3.920.142.897.000**	**4.080.283.250.000**	**3.519.176.625.500**	**3.970.959.547.550**	**4.720.432.216.000**	**3,79**
1.2.2	Dana Otonomi Khusus	3.920.142.897.000	2.610.040.325.000	2.695.001.625.500	3.157.459.547.550	3.833.402.135.000	1,06
1.2.3	Dana Penyesuaian	-	242.925.000	-	-	315.601.510.000	100,00
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur	-	1.470.000.000.000	824.175.000.000	813.500.000.000	571.428.571.000	-25,00
1.3	**Lain-2 Pendapatan Daerah Yang Sah**	**42.200.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62,31**
1.3.5	Pendapatan Hibah	7.700.000.000	-	-	-	-	
1.3.6	Pendapatan Dana Darurat	34.500.000.000	-	-	-	-	32,69
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.757.078.135.237**	**6.012.822.338.439**	**5.661.736.548.920**	**6.227.545.144.534**	**7.430.999.560.884**	**5,95**

Sumber : APBD Provinsi Papua 2008-2012

Dari tabel diatas dapat diperhatikan bahwa total pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Papua secara total mengalami kenaikan 5,28 persen pertahun dari tahun 2008-2012. Pendapatan transfer untuk DAU (Dana Alokasi Umum) mengalami kenaikan 12,52 persen pertahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pemerintah untuk melakukan pelayanan publik tiap tahun meningkat, selain itu pendapatan transfer lain yang diterima adalah berupa Dana Otsus, Dana Penyesuaian, dan Dana Tambahan Infrastuktur.

3.1.1 Ketergantungan/Kemandirian Fiskal

Ketergantungan fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah otonom dalam memenuhi kebutuhan finansial untuk pembangunan. Ketergantungan fiskal ini dinyatakan dalam *Derajat Otonomi Fiskal Daerah* (DOFD) yang merupakan hasil dari proporsi/perbandingan total PAD dengan Total Pendapatan pada tahun yang sama. Selama kurun waktu 2007-2011, secara rata-rata DOFD Provinsi Papua 5,93 persen sehingga masuk dalam kateori rendah. Angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua hanya mampu membiayai 5,93 persen kebutuhan pembangunannya dari pendapatan sendiri, sedang sisanya masih harus dipenuhi dengan Dana Transfer dari Pemerintah pusat. Rata-rata DOFD provinsi secara nasional dalam periode yang sama adalah 41,76 persen. PAD Provinsi Papua hanya 3,10 persen terhadap penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta (tertinggi), dan 26,81 persen dari rata-rata PAD provinsi lain.

Tabel 3.2 Derajat Otonomi Fiskal dan Rata-Rata Provinsi

Tahun	Provinsi Papua			DOFD Provinsi
	PAD	Total Pendapatan	DOFD	
2008	357.741.754.696	5.757.078.135.237	6,21%	41,81%
2009	369.727.113.036	6.012.822.338.439	6,15%	44,32%
2010	380.025.633.524	5.661.736.548.920	6,71%	37,63%
2011	363.100.749.954	6.227.545.144.534	5,83%	41,31%
2012	592.117.294.741	7.430.999.620.884	7,97%	40,21%
Rata-rata			5,93%	41,76%

Sumber: diolah dari APBD Provinsi Papua 2008-2012

Dengan menggunakan *moving average method,* pertumbuhan angka DOFD dapat diprediksi untuk 5 tahun ke depan. Prediksi ini menggunakan data normal selama lima tahun terakhir (2008-2012). Dua tahun sebelumnya (2007 dan 2008) merupakan tahap awal kebijakan pemerintah daerah yang dampaknya baru dirasakan dalam bentuk peningkatan PAD tahun 2009-2012. Dalam enam tahun ke depan DOFD Provinsi Papua diperkirakan pada angka rata-rata 6,86 persen pertahun, dengan pertumbuhan setiap tahunnya seperti pada Tabel

3.3. Prediksi menunjukkan pada tahun 2014 jumlah dana yang terserap sebesar Rp 8.205.789.371.812, dengan DOFD sebesar 6,86%.

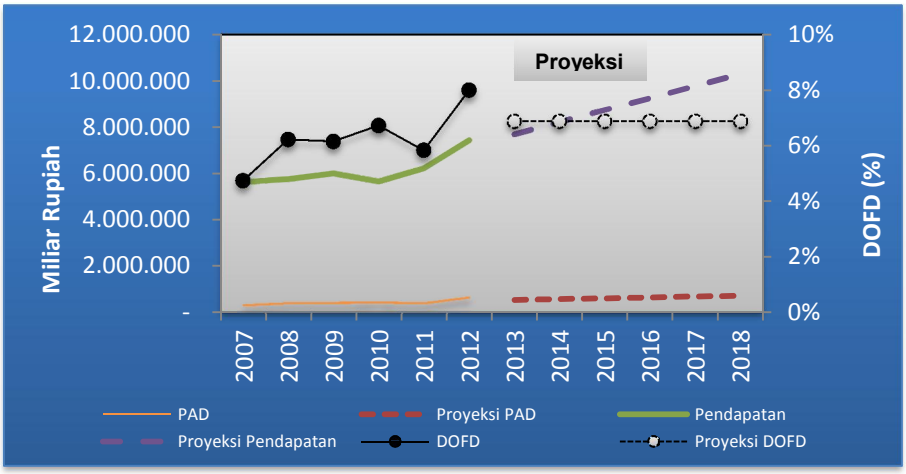
Tabel 3.3 Prediksi Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Pemerintah Provinsi Papua (Periode 2013-2018)

Tahun	Provinsi Papua		
	PAD	Total Pendapatan	DOFD
2013	527.341.720.823	7.680.714.783.097	6,87%
2014	563.337.819.608	8.205.789.371.812	6,87%
2015	599.333.918.393	8.730.863.960.527	6,86%
2016	635.330.017.178	9.255.938.549.242	6,86%
2017	671.326.115.963	9.781.013.137.957	6,86%
2018	707.322.214.749	10.306.087.726.672	6,86%
Jumlah	**3.703.991.806.714**	**53.960.407.529.308**	**6,86%**

Sumber: diolah dari APBD Provinsi Papua 2008-2012

Jika dituangkan dalam bentuk Grafik seperti Tabel 3.2 dibawah dapat dilihat bahwa proyeksi PAD Provinsi Papua nampaknya tidak mengalami kenaikan yang begitu signifikan pada tahun 2018 nanti. Hal ini dikarenakan melihat kecenderungan pertumbuhan PAD dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar. Melihat hal tersebut ternyata sangat berdampak pada DOFD Provinsi Papua diperiode 2013-2018 mendatang yang mempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar 6,86 persen per tahun.

Grafik 3.2 Proyeksi PAD, Total Pendapatan dan DOFD Provinsi Papua Tahun 2013 s/d 2018



Sumber: diolah dari APBD Provinsi Papua 2008-2012

3.1.2 Kinerja Pelaksanaan APBD

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperlihatkan rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah selama 5 tahun terakhir (2007-2011) sebesar Rp. 5,86 trilyun per tahun. Angka pendapatan ini meningkat rata-rata Rp. 143 miliyar per tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada penerimaan Dana Transfer naik Rp. 123 miliyar/tahun dan PAD naik Rp. 23 miliyar/tahun. Dengan metode *moving average,* ditemukan pertumbuhan pendapatan pada angka 3,98 persen. Dalam periode yang sama pertumbuhan Dana Transfer 2,61 persen dan PAD yang mencapai 8,76 persen.

Dengan menggunakan data yang sama dalam khususnya pada bagian belanja daerah, terdapat angka Realisasi Belanja Daerah secara rata-rata sebesar Rp. 5,75 trilyun per tahun. Kenaikan nilai Belanja Daerah sebesar Rp. 130 miliyar per tahun (bandingkan dengan kenaikan Pendapatan Daerah Rp.143 miliyar per tahun). Peningkatan per tahun terutama terjadi pada BelanjaOperasi Rp.165 miliyar, Belanja Modal Rp. 124 miliyar, dan Belanja Transfer ke Kabupaten/Kota Rp. 7,60 miliyar. Satu-satunya belanja yang menurun dalam periode ini (TA 2007 - 2011) adalah Belanja Tak Terduga. Dengan metode *moving average,* di dapatkan pertumbuhan Belanja Daerah 2,45 persen. Dalam periode ini pertumbuhan Belanja Operasi 4,39 persen, Belanja Modal dalam 4 tahun terakhir sebesar 10,8 persen, dan Belanja Transfer Rp. 9,61 persen.

Untuk sisi pembiayaan ditemukan masalah konsistensi dalam pengungkapan pos-pos pembiayaan. Akibatnya, data yang disampaikan BPK maupuan BPKAD Provinsi Papua belum dapat digunakan secara baik untuk tujuan analisis pada bagian ini. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sebagai sumber informasi keuangan penting ternyata belum dapat mengungkapkan nilai Penerimaan Pembiayaan. Kelemahan ini dengan mudah ditemukan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Nilai SiLPA yang dipastikan ada pada setiap akhir tahun anggaran ternyata tidak diungkapkan dalam 3 tahun pemeriksaan (Realisasi LRA 2008, dan 2009).

Pengeluaran pembiayaan setiap tahun dilakukan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, dan Pembayaran Pokok Utang. Nilai Pengeluaran Pembiayaan mencapai rata-rata Rp. 120 miliyar lebih per tahun. Pengeluaran pembiayaan yang terbesar adalah Dana Cadangan, yang mencapai nilai Rp. 100 miliyar per tahun – kecuali tahun 2009 yang mencapai jumlah Rp. 200 miliyar.

Tabel 3.4 Realisasi APBD Provinsi Papua Periode Tahun Anggaran 2008-2012

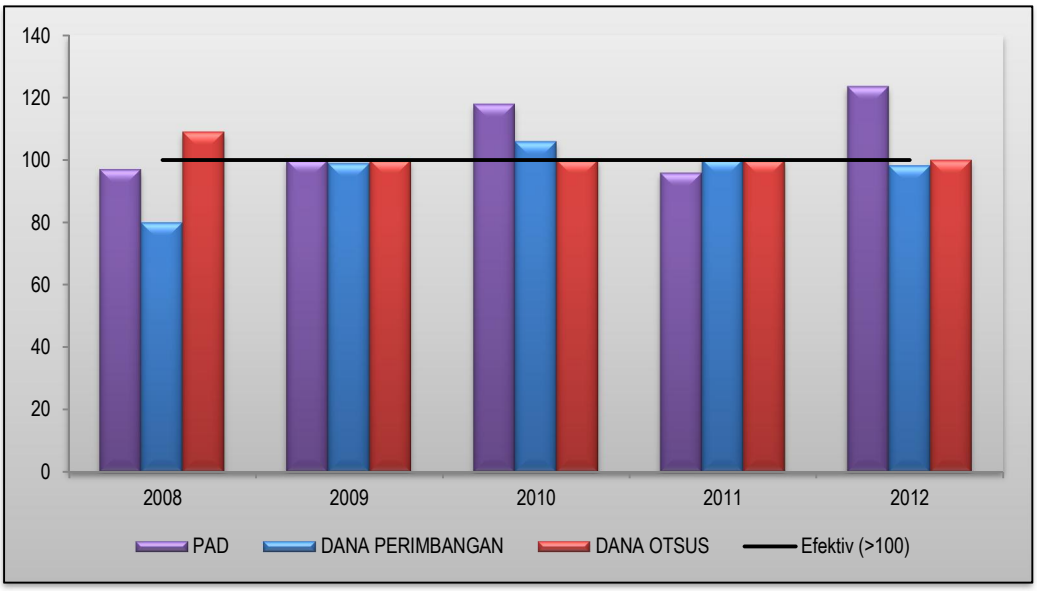
URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
PENDAPATAN						
Pendapatan Asli Daerah	***357.741.754.696***	***369.727.113.036***	***380.025.633.524***	***363.100.749.954***	***623.162.647.628***	***347.766.759.171***
Pajak Daerah	259.185.991.678	242.788.565.711	252.434.826.256	275.091.605.790	401.691.993.969	*245.539.661.344*
Retribusi Daerah	19.710.392.088	20.576.682.593	21.171.950.088	18.889.330.977	15.773.346.925	*20.174.922.888*
Hasil Pengelolaann Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	26.418.177.843	28.926.619.817	30.340.833.072	19.887.905.137	22.598.925.557	*25.657.904.804*
Lain-lain PAD yang Sah	52.427.193.087	77.435.244.915	76.078.024.108	49.231.908.050	183.098.381.177	*56.394.270.135*
Pendapatan Transfer	***5.357.136.380.541***	***5.643.095.225.403***	***5.257.399.077.896***	***5.850.944.394.580***	***6.838.882.326.170***	***5.496.057.839.336***
Dana Perimbangan	**1.436.993.483.541**	**1.563.054.900.403**	**1.762.534.289.896**	**1.893.484.847.030**	**2.118.450.110.170**	***1.596.406.727.826***
Dana Bagi Hasil Pajak	198.461.591.855	203.582.806.979	252.799.169.554	269.335.254.508	311.768.070.269	*225.094.834.304*
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	201.897.066.686	219.971.329.424	286.182.154.342	275.748.034.522	130.708.425.901	*246.434.871.723*
Dana Alokasi Umum	1.002.431.825.000	1.058.227.764.000	1.148.497.966.000	1.276.285.908.000	1.569.782.444.000	***1.072.347.691.800***
Dana Alokasi Khusus	34.203.000.000	81.273.000.000	75.055.000.000	72.115.650.000	106.191.170.000	*65.661.662.500*
Lainnya	**3.920.142.897.000**	**4.080.040.325.000**	**3.494.864.788.000**	**3.957.459.547.550**	**4.720.432.216.000**	***3.899.651.111.510***
Dana Otonomi Khusus	3.920.142.897.000	4.079.797.400.000	3.494.864.788.000	3.957.459.547.550	3.833.402.135.000	*3.899.602.526.510*
Dana Penyesuaian		242.925.000	-		315.601.510.000	*121.462.500*
Dana Tambahan Infrastruktur					571.428.571.000	
Lain-2 Pendapatan Daerah Yang Sah	**42.200.000.000**	**-**	**24.311.837.500**	**13.500.000.000**	**-**	***23.252.959.375***
Pendapatan Hibah	7.700.000.000	-	24.311.837.500	13.500.000.000		*15.170.612.500*
Pendapatan Dana Darurat	34.500.000.000	-	-	-	-	*23.750.000.000*
JUMLAH PENDAPATAN	**5.757.078.135.237**	**6.012.822.338.439**	**5.661.736.548.920**	**6.227.545.144.534**	**7.462.044.973.798**	***5.862.426.966.007***
BELANJA						
Balanja Operasi	***4.528.528.347.023***	***3.942.202.805.669***	***4.130.885.061.529***	***4.762.070.057.903***	***5.816.088.037.742***	***4.292.866.171.204***
Balanja Pegawai	769.500.402.932	826.156.299.567	777.065.779.301	866.786.394.314	806.432.183.247	*785.006.461.498*
Belanja Barang	682.075.010.164	891.988.194.602	1.260.514.916.732	1.351.970.752.489	1.540.796.547.967	*952.450.867.512*
Belanja Hibah	5.630.000.000	442.780.000	61.440.129.856	133.847.556.000	693.635.742.128	*50.340.116.464*
Belanja Bantuan Sosial	534.314.519.702	500.127.970.500	391.137.476.640	283.208.629.100	110.610.955.800	*459.298.659.758*
Belanja Bantuan Keuangan	2.537.008.414.225	1.723.487.561.000	1.640.726.759.000	2.126.256.726.000	2.664.612.608.600	*2.055.838.089.265*
Belanja Modal	***1.049.192.740.138***	***1.199.489.101.030***	***1.404.550.459.868***	***1.421.658.223.557***	***1.309.177.867.378***	***1.319.943.065.013***
Belanja Tanah	15.562.338.513	7.354.953.000	11.010.089.000	19.551.612.500	18.300.000.000	*15.293.089.489*
Belanja Peralatan dan Mesin	198.002.457.736	189.080.656.700	187.558.882.800	244.432.223.134	164.534.880.570	*198.209.985.937*
Belanja Bangunan dan Gedung	237.007.648.297	266.196.166.377	261.532.240.878	326.245.046.100	466.058.024.300	*252.019.382.744*
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	538.642.980.007	636.345.986.323	851.726.147.790	797.825.286.403	627.801.352.836	*789.901.012.698*
Belanja Aset Tetap Lainnya	59.977.315.585	100.511.338.630	92.723.099.400	33.604.055.420	32.483.609.672	*64.519.594.145*
Belanja Tak Terduga	***82.818.210.300***	***48.187.817.418***	***5.710.600.000***	***2.978.368.924***	***-***	***42.037.103.694***
Belanja Tak Terduga	82.818.210.300	48.187.817.418	5.710.600.000	2.978.368.924		*42.037.103.694*
Transfer	***90.127.829.000***	***104.319.213.863***	***109.328.770.345***	***103.669.062.498***	***114.401.215.080***	***96.137.383.545***
Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota	90.127.829.000	104.319.213.863	109.328.770.345	103.669.062.498	114.401.215.080	*96.137.383.545*
JUMLAH BELANJA	**5.750.667.126.461**	**5.294.198.937.980**	**5.650.474.891.742**	**6.290.375.712.882**	**7.239.667.120.200**	***5.750.983.723.457***
SURPLUS (DEFISIT)	**6.411.008.776**	**718.623.400.459**	**11.261.657.178**	**(62.830.568.348)**	**222.377.853.598**	***111.443.242.551***
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	-	**-**	**1.105.583.875.984**	**955.938.778.571**	**779.591.449.131**	***671.682.950.968***
Penggunaan SiLPA	-	-	1.105.583.875.984	955.938.778.571	779.591.449.131	*403.009.770.581*
Pengeluaran Pembiayaan		**225.000.000.000**	**153.364.209.500**	**111.212.398.291**	**233.497.298.585**	***170.283.445.030***
Pembentukan Dana Cadangan		200.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	131.045.352.641	*141.000.000.000*
Penyertaan Modal		25.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	100.000.000.000	*12.500.000.000*
Pembayaran Pokok Utang			43.364.209.500	1.212.398.291	2.451.945.944	*22.377.926.707*
Pembiayaan Netto	-	**(225.000.000.000)**	**(11.261.657.178)**	**844.726.380.280**	**546.094.150.546**	***333.478.768.196***
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**6.411.008.776**	**493.623.400.459**	**963.481.323.662**	**781.895.811.932**	**768.472.004.144**	***472.782.821.384***

Sumber : BPKAD Provinsi Papua

Kinerja keuangan daerah juga dapat dinilai berdasarkan efektivitas pendapatan, yang merupakan perbandingan realisasi terhadap target (anggaran). Angka ini ditampilkan Tabel 3.4 dan Grafik 3.2. Efektivitas pendapatan terjadi bila nilai realisasi lebih tinggi daripada anggaran sehingga rasio pendapatan terhadap anggaran di atas 100 (seratus) persen. Dalam kondisi itu pemerintah daerah dinilai berhasil (efektif) meningkatkan pendapatan. Dalam kurun 2007-2011, kelompok Pendapatan terbilang hampir cukup mendekati efektif yakni 98 persen. Jika melihat per komponen, maka yang bisa dikatakan efektif adalah

komponen Dana Otsus yang dimana dalam periode 2007-2011 mempunyai rasio mencapai 100 persen bahkan lebih, sedangkan pada komponen PAD di tahun 2010 sudah menunjukkan rasio yang sangat efektif dengan angka 118 persen akan tetapi di tahun 2011 turun menjadi 96 (sembilan puluh enam) persen.

Grafik 3.3 Rasio Efektivitas Komponen Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2007-2011



Sumber : BPKAD Provinsi Papua

Pendapatan dari Dana Transfer khusunya Dana Perimbangan dari tahun 2007-2010 mengalami trend yang positif dimana tahun 2007 rasio efektivitas hanya mencapai 68 persen dan di tahun 2011 mencapai nilai 106 (seratus enam) persen dan ditahun 2011 mempunyai nilai rasio sebesar 100 (seratus) persen. Jika melihat secara keseluruhan komponen yang memiliki rasio yang paling efektif adalah Dana tahun 2007-2008, PAD dan Dana Perimbangan di tahun 2010. Sedangkan jika dilihat komponen yang memiliki rasio paling terendah adalah Dana Perimbangan di tahun 2007-2008.

Pengukuran menggunakan rasio efektivtas diatas dinilai cukup baik untuk menilai kinerja keuangan pemerintah Provinsi Papua dari tahun 2007-2011. Dari gambaran 5 (lima) tahun sebelumnya maka bisa memberikan suatu arah kebijakan yang kiranya bisa mendorong agar pendapatan pemerintah Provinsi Papua bisa lebih efektif terutama pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana merupakan komponen yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai belanja dengan pendapatan daerah sendiri bukan dari transfer pemerintah pusat.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi APBD Provinsi Papua Periode TA 2008– 2012

URAIAN	2008			2009			2010			2011			2012		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN															
Pendapatan Asli Daerah	***369.750.000.000***	***357.741.754.696***	***97***	***371.221.122.750***	***369.727.113.036***	***100***	***322.176.000.000***	***380.025.633.524***	***118***	***378.700.598.000***	***363.100.749.954***	96	***478.850.976.850***	***592.117.234.714***	124
Pajak Daerah	243.750.000.000	259.185.991.678	106	290.250.000.000	242.788.565.711	84	248.500.000.000	252.434.826.256	102	259.000.000.000	275.091.605.790	106	307.842.142.854	401.691.933.696	130
Retribusi Daerah	20.000.000.000	19.710.392.088	99	22.500.000.000	20.576.682.593	91	20.500.000.000	21.171.950.088	103	21.671.950.000	18.889.330.977	87	13.040.573.678	15.773.346.925	121
Hasil Pengelolaann Kekay aan Daerah y g Dipisahk	26.000.000.000	26.418.177.843	102	29.176.000.000	28.926.619.817	99	29.176.000.000	30.340.833.072	104	32.340.832.000	19.887.905.137	61	22.598.925.557	22.598.925.557	100
Lain-lain PAD yang Sah	80.000.000.000	52.427.193.087	66	29.295.122.750	77.435.244.915	264	24.000.000.000	76.078.024.108	317	65.687.816.000	49.231.908.050	75	135.369.334.761	152.053.028.536	112
Pendapatan Transfer	***5.375.574.722.000***	***5.357.136.380.541***	***100***	***5.653.296.858.000***	***5.643.095.225.403***	***100***	***5.152.661.679.000***	***5.257.399.077.896***	***102***	***5.847.585.990.550***	***5.850.944.394.580***	100	***6.907.302.806.000***	***6.838.882.326.170***	99
Dana Perimbangan	**1.785.431.825.000**	**1.436.993.483.541**	***80***	**1.573.500.760.000**	**1.563.054.900.403**	***99***	**1.657.796.891.000**	**1.762.534.289.896**	***106***	***1.890.126.443.000***	***1.893.484.847.030***	100	***2.155.377.790.000***	***2.118.450.110.170***	98
Dana Bagi Hasil Pajak	171.500.000.000	198.461.591.855	116	177.500.000.000	203.582.806.979	115	177.500.000.000	252.799.169.554	142	265.968.459.000	269.335.254.508	101	316.816.909.000	311.768.070.269	98
Dana Bagi Hasil Sumber Day a Alam	247.500.000.000	201.897.066.686	82	256.500.000.000	219.971.329.424	86	256.500.000.000	286.182.154.342	112	251.717.876.000	275.748.034.522	110	162.587.267.000	130.708.425.901	80
Dana Alokasi Umum	1.002.431.825.000	1.002.431.825.000	100	1.058.227.760.000	1.058.227.764.000	100	1.148.740.891.000	1.148.497.966.000	100	1.276.285.908.000	1.276.285.908.000	100	1.569.782.444.000	1.569.782.444.000	100
Dana Alokasi Khusus	364.000.000.000	34.203.000.000	9	81.273.000.000	81.273.000.000	100	75.056.000.000	75.055.000.000	100	96.154.200.000	72.115.650.000	75	106.191.170.000	106.191.170.000	100
Lainnya	**3.590.142.897.000**	**3.920.142.897.000**	***109***	**4.079.796.098.000**	**4.080.040.325.000**	***100***	**3.494.864.788.000**	**3.494.864.788.000**	***100***	***3.957.459.547.550***	***3.957.459.547.550***	**100**	***4.751.925.016.000***	**4.720.432.216.000**	**99**
Dana Otonomi Khusus	3.590.142.897.000	3.920.142.897.000	109	4.079.796.098.000	4.079.797.400.000	100	3.494.864.788.000	3.494.864.788.000	100	3.957.459.547.550	3.957.459.547.550	100	3.833.402.135.000	3.833.402.135.000	100
Dana Penyesuaian				-	242.925.000	100				-	-		347.094.310.000	315.601.510.000	
Dana Tambahan Infrastruktur													571.428.571.000	571.428.571.000	
Lain-2 Pendapatan Daerah Yang Sah	**25.200.000.000**	**42.200.000.000**		**38.546.111.250**	**-**		**24.175.000.000**	**24.311.837.500**	***101***	***13.500.000.000***	***13.500.000.000***	**100**		**-**	
Pendapatan Hibah	7.700.000.000	7.700.000.000		21.546.111.250	-		24.175.000.000	24.311.837.500	101	13.500.000.000	13.500.000.000	100		-	
Pendapatan Dana Darurat	17.500.000.000	34.500.000.000		17.000.000.000	-						-			-	
JUMLAH PENDAPATAN	5.770.524.722.000	5.757.078.135.237	***100***	6.063.064.092.000	6.012.822.338.439	***99***	5.499.012.679.000	5.661.736.548.920	***103***	***6.239.786.588.550***	***6.227.545.144.534***	**100**	***7.386.153.782.850***	***7.430.999.560.884***	**101**
BELANJA															
Balanja Operasi	***4.853.783.683.667***	***4.528.528.347.023***	***93***	***4.616.256.240.940***	***3.942.202.805.669***	***85***	***4.682.059.062.280***	***4.130.885.061.529***	***88***	***5.315.613.931.636***	***4.762.070.057.903***	**90**	***6.334.673.338.828***	***5.816.088.037.742***	**92**
Balanja Pegaw ai	868.298.244.626	769.500.402.932	89	892.987.919.465	826.156.299.567	93	897.806.806.363	777.065.779.301	87	929.597.579.740	866.786.394.314	93	904.087.678.096	806.432.183.247	89
Belanja Barang	775.226.180.053	682.075.010.164	88	1.059.507.874.475	891.988.194.602	84	1.421.517.880.625	1.260.514.916.732	89	1.492.182.780.896	1.351.970.752.489	91	1.673.026.790.458	1.540.796.547.967	92
Belanja Hibah	5.645.000.000	5.630.000.000		7.707.000.000	442.780.000		93.233.500.000	61.440.129.856		359.594.355.000	133.847.556.000	37	860.496.394.274	693.635.742.128	81
Belanja Bantuan Sosial	596.404.601.096	534.314.519.702	90	546.021.633.000	500.127.970.500	92	496.710.497.292	391.137.476.640	79	347.926.947.000	283.208.629.100	81	220.531.522.000	110.610.955.800	50
Belanja Bantuan Keuangan	2.608.209.657.892	2.537.008.414.225	97	2.110.031.814.000	1.723.487.561.000	82	1.772.790.378.000	1.640.726.759.000	93	2.186.312.269.000	2.126.256.726.000	97	2.676.530.954.000	2.664.612.608.600	100
Belanja Modal	***1.186.322.030.240***	***1.049.192.740.138***	***88***	***1.613.766.558.079***	***1.199.489.101.030***	***74***	***1.624.457.673.058***	***1.404.550.459.868***	***86***	***1.567.314.748.064***	***1.421.658.223.557***	**91**	***1.456.845.870.942***	***1.309.277.867.378***	**90**
Belanja Tanah	19.787.571.000	15.562.338.513	79	68.957.350.000	7.354.953.000	11	18.848.000.000	11.010.089.000	58	32.438.430.000	19.551.612.500	60	19.091.000.000	18.300.000.000	96
Belanja Peralatan dan Mesin	230.920.556.022	198.002.457.736	86	290.866.165.654	189.080.656.700	65	269.456.986.330	187.558.882.800	70	251.685.311.675	244.432.223.134	97	187.077.550.404	164.534.880.570	88
Belanja Bangunan dan Gedung	258.789.793.565	237.007.648.297	92	279.619.721.700	266.196.166.377	95	283.746.683.042	261.532.240.878	92	370.494.359.550	326.245.046.100	88	528.489.929.800	466.058.024.300	88
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	597.617.514.962	538.642.980.007	90	833.515.693.475	636.345.986.323	76	938.674.780.986	851.726.147.790	91	854.113.019.339	797.825.286.403	93	687.372.177.538	627.801.352.836	91
Belanja Aset Tetap Lainny a	79.206.594.691	59.977.315.585	76	140.807.627.250	100.511.338.630	71	113.731.222.700	92.723.099.400	82	58.583.627.500	33.604.055.420	57	34.815.213.200	32.583.609.672	94
Belanja Tak Terduga	***82.875.303.000***	***82.818.210.300***	***100***	***49.415.946.981***	***48.187.817.418***	***98***	***33.918.088.317***	***5.710.600.000***	***17***	***21.098.817.850***	***2.978.368.924***	**14**	***40.125.370.000***		**0**
Belanja Tak Terduga	82.875.303.000	82.818.210.300	100	49.415.946.981	48.187.817.418	98	33.918.088.317	5.710.600.000	17	21.098.817.850	2.978.368.924	14	40.125.370.000	-	0
Transfer	***97.627.829.000***	***90.127.829.000***	***92***	***104.343.346.000***	***104.319.213.863***	***100***	***109.328.770.345***	***109.328.770.345***	***100***	***104.663.000.000***	***103.669.062.498***	**99**	***114.401.215.080***	***114.401.215.080***	**100**
Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota	97.627.829.000	90.127.829.000	***92***	104.343.346.000	104.319.213.863	***100***	109.328.770.345	109.328.770.345	100	104.663.000.000	103.669.062.498	99	114.401.215.080	114.401.215.080	100
JUMLAH BELANJA	6.220.608.845.907	5.750.667.126.461	***92***	6.383.782.092.000	5.294.198.937.980	***83***	6.449.763.594.000	5.650.474.891.742	***88***	***7.008.690.497.550***	***6.290.375.712.882***	**90**	***7.946.045.794.850***	7.239.767.120.200	**91**
SURPLUS (DEFISIT)	(450.084.123.907)	6.411.008.776		(320.718.000.000)	718.623.400.459		(950.750.915.000)	11.261.657.178		(768.903.909.000)	(62.830.568.348)	8	(559.892.012.000)	191.232.440.684	-34
PEMBIAYAAN															
Penerimaan Pembiayaan	560.084.123.907			600.718.000.000			1.104.750.915.000	142.102.552.322	13	955.734.000.000	955.938.778.571	100	762.860.500.000	779.591.449.131	102
Penggunaan SiLPA	560.084.123.907			600.718.000.000			1.104.750.915.000	1.105.583.875.984	13	955.734.000.000	955.938.778.571	100	762.860.500.000	779.591.449.131	102
Pengeluaran Pembiayaan	**110.000.000.000**			**280.000.000.000**	**225.000.000.000**	***80***	**154.000.000.000**	**153.364.209.500**	***100***	***186.830.191.000***	***111.212.398.291***	**60**	***202.968.488.000***	**202.451.945.944**	**100**
Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000			200.000.000.000	200.000.000.000	100	100.000.000.000	100.000.000.000	100	100.000.000.000	100.000.000.000	100	100.000.000.000	100.000.000.000	100
Penyertaan Modal	10.000.000.000			80.000.000.000	25.000.000.000	*31*	10.000.000.000	10.000.000.000	100	85.000.000.000	10.000.000.000	12	100.000.000.000	100.000.000.000	100
Pembayaran Pokok Utang							44.000.000.000	43.364.209.500	99	1.830.191.000	1.212.398.291	66	2.968.488.000	2.451.945.944	83
Pembiayaan Netto	**450.084.123.907**			**320.718.000.000**	**(225.000.000.000)**		**950.750.915.000**	**(11.261.657.178)**		**768.903.809.000**	**844.726.380.280**	**110**	**559.892.012.000**	**577.139.503.187**	**103**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	6.411.008.776		-	493.623.400.459		-	963.481.323.662		-	781.895.811.932		-	768.371.943.871	

Sumber : APBD Provinsi Papua (2007-2011)

3.1.3 Neraca Daerah

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dijabarakan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menetapkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD memuat 4 jenis laporan yaitu Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dari tahun 2007 sampai dengan 2011 didapatkan gambaran sebagai berikut:

a. Aset pemerintah daerah telah meningkat 3,6 kalilipat, darinilaiRp.3,8 triyun pada tahun 2006 menjadi Rp.14 trilyun pada tahun 2010. Nilai Aset Tetap meningkat paling besar (5 kali), yaitu dari nilai Rp.2,5 triyun menjadi Rp12,1 triyun dan potensial meningkat lebih agresif ke depan karena komitmen yang tinggi dalam penyediaan asset. Komponen terbesar dalam Aset Tetap ini adalah Jalan, Irigasi dan Jaringan.
b. Akun Kas yang terdapat dalam Aset Lancar cenderung naik sejak tahun 2006 sampai 2009, sebelum turun kembali di tahun 2010. Akun Kas ini meningkat sangat tinggi dari tahun 2008 ke tahun 2009 (83%) dari nilai Rp 616 miliyar menjadi Rp1.126 miliyar. Kondisi ini menjelaskan ada dana yang sangat besar tersimpan dalam Kas Daerah di akhir tahun (sekitar 7-9 persen dari Total Aset). Kondisi ini juga mengindikasikan belum optimalnya penyerapan anggaran. Data SiLPA dalam pos Penerimaan Pembiayaan juga mendukung fakta ini. Rata-rata penyerapan anggaran 87,74 persen. Penyerapan terendah terjadi dalam Belanja Tanah (36 persen), Belanja Dana Hibah (63 persen), dan Belanja Peralatan dan Mesin (77 persen).
c. Akun Investasi Permanen yang merupakan wujud penyertaan modal pada perusahaan daerah rata-rata mencapai nilai Rp 150 miliyar. Bila Investasi ini dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (rata-rata Rp 24 miliyar) maka didapatkan persentase pengembalian Pemda sebesar 16 (enam belas) persen. Tingkat pengembalian (*return*) ini merupakan prestasi yang baik bila dibandingkan tingkat pengembalian perusahaan swasta pada umumnya.

Kelompok Aset Tetap yang bertambah 3,6 kali lipat menjelaskan adanya penambahan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Jadi untuk kurun waktu 2006-2010 kapasitas itu telah meningkat dengan pesat (hampir 100 persen per tahun). Kapasitas itu terutama meningkat di prasarana jalan dan jembatan yang masih sangat dirasakan minim di Provinsi Papua.

d. Dana Cadangan yang dibentuk Pemerintah Provinsi Papua setiap tahun meningkat Rp 100 miliyar. Sangat disayangkan bahwa pembentukan Dana Cadangan ini belum diatur

peruntukannya. Ketentuan pembentukan Dana Cadangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengharuskan ada ketetapan peruntukan. Bila tidak, Dana Cadangan ini tidak dapat dicairkan setiap tahun anggaran. Dengan demikian ketentuan tentang pembentukannya Dana Cadangan ini belum memenuhi peraturan.

Rasio keuangan daerah ditampilkan dalam tabel 3.6. Beberapa informasi yang diperoleh dari rasio keuangan tersebut antara lain:

a. Pemerintah Provinsi Papua memiliki kemampuan riil yang tinggi dalam menyelesaikan utang-utang jangka pendek yang timbul sebagai dampak transaksi masa lalu (rasio lancar).
b. Pemerintah Provinsi Papua mempunyai Aset dan Ekuitas yang menjamin pembayaran kewajiban (Total Kewajiban Terhadap Ekuitas dan Total Kewajiban Terhadap Aset).
c. Tingkat pengembalian Investasi Permanen Daerah cukup baik (di atas 16 persen). Fakta ini menjelaskan bahwa penanaman modal dalam di perusahaan daerah cukup menjajikan bagi penerimaan PAD di masa yang akan datang (Tingkat Pengembalian Investasi Permanen Daerah).
d. Total Belanja berkontribusi terhadap PAD (di atas 5 persen). Hal ini berarti setiap kenaikan Belanja Rp 100 dapat meningkatkan PAD Rp 5 (Total Belanja Terhadap PAD). Kenaikan Aset diikuti kenaikan PAD (sekitar 3 persen). Hal ini berarti setiap kenaikan Aset Rp 100 dapat meningkatkan PAD Rp 3 (Total Aset Terhadap PAD). Kedua rasio ini menjelaskan bahwa tidak semua aset daerah berkontribusi pada peningkatan PAD.
e. Selama 3 tahun pertama ada tendensi kebijakan untuk meningkatkan belanja pegawai yang sejalan dengan meningkatnya belanja daerah. Dalam TA 2006, 2008, dan 2009 porsi belanja pegawai terus meningkat yaitu 12 persen, 13 persen dan 16 persen (Total Belanja Pegawai terhadap Total Belanja).
f. Dalam 4 tahun terakhir ada tendensi kebijakan untuk meningkatkan belanja barang dan jasa yang sejalan dengan meningkatnya belanja daerah. Dalam TA 2007, 2008, 2009 dan 2010 porsi belanja barang dan jasa terus meningkat yaitu 10 persen, 12 persen, 17 persen dan 22 persen (Total Belanja Barang dan Jasa terhadap Total Belanja).

Tabel 3.6 Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Papua Per-Akhir TA 2007 – 2011

URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	609.941.303.559	616.175.995.319	1.125.865.901.581	963.546.093.300	762.860.537.251	840.903.414.346
Investasi Jangka Pendek						
Piutang	1.414.162.475	732.293.950	721.182.000	221.757.004	1.605.035.430	853.626.022
Piutang Lain-lain	17.920.082.759	9.706.718.582	11.906.111.751	12.490.955.994	13.883.338.171	23.064.200.948
Persediaan	14.646.940.467	17.477.000.624	27.164.480.668	43.111.353.680	123.566.020.810	40.524.523.003
Jumlah Aset Lancar	**643.922.489.260**	**644.092.008.475**	**1.165.657.676.000**	**1.019.370.159.978**	**921.376.906.578**	**908.589.426.805**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen	21.199.093.976	18.415.427.000	17.505.742.483	16.016.672.837	14.802.115.337	18.603.687.385
Investasi Permanen	145.283.579.100	145.283.579.100	174.841.411.705	193.575.201.202	207.356.475.215	167.132.325.563
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**166.482.673.076**	**163.699.006.100**	**192.347.154.188**	**209.591.874.039**	**222.158.590.552**	**185.736.012.947**
ASET TETAP						
Tanah	1.196.029.216.434	1.203.743.171.434	1.217.714.124.434	1.249.596.018.264	1.269.198.940.764	1.063.438.898.222
Peralata n dan Mesin	293.467.363.958	508.817.524.886	700.625.041.216	968.026.417.421	1.221.074.806.266	689.985.244.544
Gedung dan Bangunan	695.851.571.256	885.015.058.769	1.139.520.273.615	1.365.590.801.425	1.570.194.075.364	1.076.880.773.486
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.048.960.947.656	6.740.125.481.882	7.276.734.135.759	8.047.714.771.800	8.893.293.696.394	6.332.321.013.729
Aset Tetap Lainnya	35.782.161.690	95.736.677.275	280.719.753.775	368.243.187.969	399.231.933.789	199.191.573.200
Konstruksi dalam Pengerjaan	181.246.624.599	63.928.348.844	64.181.069.821	182.748.379.482	250.477.187.866	136.218.786.865
Akumulasi Penyusutan				0	0	
Jumlah Aset Tetap	**8.451.337.885.593**	**9.497.366.263.090**	**10.679.494.398.620**	**12.181.919.576.361**	**13.603.470.640.443**	**9.498.036.290.045**
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	201.177.214.913	204.324.727.543	416.901.717.871	548.548.566.654	679.859.423.711	347.801.941.782
Jumlah Dana Cadangan	**201.177.214.913**	**204.324.727.543**	**416.901.717.871**	**548.548.566.654**	**679.859.423.711**	**347.801.941.782**
ASET LAIN NYA						
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran						
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian						
Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
Aset Tidak Berwujud						
Aset Lain-Lain	57.713.561.828	58.254.152.049	59.061.138.050	61.822.861.050	61.822.861.050	59.734.914.805
Jumlah Aset Lainnya	**57.713.561.828**	**58.254.152.049**	**59.061.138.050**	**61.822.861.050**	**61.822.861.050**	**59.734.914.805**
TOTAL ASET	**9.520.633.824.670**	**10.567.736.157.257**	**12.513.462.084.729**	**14.021.253.038.082**	**15.488.688.422.334**	**10.989.942.767.250**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang PFK	740.241.191	1.354.843.925	18.387.567.897	64.769.638	189.927.431	3.579.598.546
Utang Bunga				11.250.000	11.250.000	11.250.000
Utang Pajak						
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
Pendapatan Diterima di Muka						
Utang Jangka Pendek Lainnya				90.000.000	90.000.000	90.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**740.241.191**	**1.354.843.925**	**18.387.567.897**	**166.019.638**	**291.177.431**	**3.613.348.546**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri						
Utang Luar Negeri						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang						
JUMLAH KEWAJIBAN	**740.241.191**	**1.354.843.925**	**18.387.567.897**	**166.019.638**	**291.177.431**	**3.613.348.546**
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR						
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	609.201.062.368	614.821.151.394	1.107.478.333.684	963.481.323.662	781.895.811.931	725.576.338.945
Cadangan Piutang	19.334.245.234	10.439.012.532	12.627.293.751	12.712.712.998	15.488.373.601	28.340.530.001
Cadangan Persediaan	14.646.940.467	17.477.000.624	27.164.180.688	43.111.353.680	123.566.020.810	23.289.058.829
Dana yg Harus Disediakan untuk	-	-	-	-101.250.000	-101.250.000	-16.875.000
Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-	-		236.772.803	-
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**643.182.248.069**	**642.737.164.550**	**1.147.269.808.123**	**1.019.204.140.340**	**921.085.729.145**	**777.189.052.774**
EKUITAS DANA INVESTASI						
Diinvestasikan dlm Investasi Jangka	166.482.248.069	163.699.006.100	192.347.154.188	209.591.874.039	222.158.590.552	166.132.187.539
Diinvestasikan dlm Aset Tetap	8.451.337.885.593	9.497.366.263.090	10.679.494.398.620	12.181.919.576.361	13.603.470.640.443	7.674.930.165.282
Diinvestasikan dlm Aset Lainnya	57.713.561.828	58.254.152.049	59.061.136.050	61.822.861.050	61.822.861.050	39.475.285.163
Dana yg Harus Disediakan untuk						-
Pembayaran Utang Jangka Panjang						-
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	**8.675.533.695.490**	**9.719.319.421.239**	**10.930.902.688.858**	**12.453.334.311.450**	**13.887.452.092.045**	**7.880.537.637.984**
EKUITAS DANA CADANGAN						
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	201.177.214.913	204.324.727.543	416.901.717.871	548.548.566.654	679.859.423.711	235.445.396.307
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	**201.177.214.913**	**204.324.727.543**	**416.901.717.871**	**548.548.566.654**	**679.859.423.711**	**235.445.396.307**
JUMLAH EKUITAS DANA	**9.519.893.158.472**	**10.566.381.313.332**	**12.495.074.214.852**	**14.021.087.018.444**	**15.488.397.244.901**	**8.893.172.087.065**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**9.520.633.399.663**	**10.567.736.157.257**	**12.513.461.782.749**	**14.021.253.038.082**	**15.488.688.422.332**	**8.896.945.304.877**

Sumber : BPKAD Provinsi Papua

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Proporsi Penggunaan Anggaran

Pemenuhan kebutuhan aparatur di Provinsi Papua jika dilihat pada Tabel 3.7 dibawah dari tahun 2010-2012 mengalami fluktuasi dimana di tahun 2010 total belanja untuk pemenuhan kebutahan aparatur mencapai 2,4 trilyun rupiah kemudian naik menjadi 2,6 trilyun rupiah ditahun 2011 dan dtahun 2011 mengalami penurunan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menjadi 2,5 trilyun rupiah.

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tahun 2010-2012

No	Uraian	2010	2011	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	**Belanja Tidak Langsung**			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	299.236.307.529	337.631.919.787	363.539.704.010
2	Belanja Tambahan Penghasilan	228.096.472.980	260.335.641.625	265.261.143.964
3	Belanja Penerimaan Lainnya	9.079.785.000	8.452.810.000	7.722.360.000
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	12.840.201.500	12.717.500.000	5.000.000.000
5	Belanja Pelaksanaan Otonomi Khusus	30.220.000.000	24.705.000.000	1.860.000.000
6	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	7.618.251.300
B	**Belanja Langsung**			
1	Belanja Honorarium PNS	64.359.090.670	75.982.520.358	61.204.086.553
2	Belanja Honorarium PNS	78.577.847.444	92.146.483.840	81.414.180.420
3	Belanja Uang Lembur	4.347.869.616	5.017.495.670	3.168.570.000
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	16.968.953.500	18.698.860.100	18.546.500.000
5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	33.339.251.062	31.098.162.934	24.318.265.750
6	Belanja premi asuransi kesehatan	3.623.682.000	4.617.708.208	2.769.800.000
7	Belanja makanan dan minuman pegawai	84.424.241.641	109.106.012.327	119.813.053.946
8	Belanja pakaian dinas dan atributnya	6.335.091.665	8.592.541.000	8.176.143.325
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.633.729.500	2.535.335.800	4.001.302.280
10	Belanja perjalanan dinas	215.722.836.303	248.217.026.777	261.585.611.301
11	Belanja perjalanan pindah tugas	86.670.000	207.858.000	447.013.000
12	Belanja Pemulangan Pegawai	958.000.000	315.000.000	865.000.000
13	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	1.404.550.459.868	1.421.658.223.557	1.309.177.867.378
TOTAL		**2.494.400.490.278**	**2.662.036.099.983**	**2.546.488.853.227**

Sumber : BPKAD Provinsi Papua

Jika dilihat pada belanja modal yang nilainya mencapai 1 trilyun rupiah, hal ini dapat mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan aparatur paling banyak menyerap anggaran belanja terutama untuk kebutuhan fisik seperti tanah dan gedung, kendaraan dan lain sebagainya.

Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tahun 2009-2012

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	2009	2.287.611.633.327	5.519.198.937.980	41,45
2	2010	2.494.400.490.278	5.803.839.101.242	42,98
3	2011	2.662.036.099.983	6.401.588.111.173	41,58
4	2012	2.546.488.853.227	7.442.219.066.144	34,22

Sumber : BPKAD Provinsi Papua

Pemenuhan kebutuhan aparatur jika bandingkan dengan total pengeluaran rill dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 mempunyai rata-rata belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari total pengeluaran sebesar 40 persen pertahun, hal ini dapat dikatakan bahwa belanja yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cukup besar.

Tabel 3.9 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Papua Tahun 2008-2011 (%)

Uraian Belanja	2008	2009	2010	2011	2012
Belanja Tidak Langsung	**65,47**	**55,96**	**49,34**	**52,32**	**58,51**
Belanja Pegawai	9,53	11,08	10,26	10,15	9,01
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Hibah/ subsidi	0,10	0,01	1,09	2,13	9,58
Bantuan Sosial	9,20	9,45	6,92	4,51	1,53
Bagi Hasil ke Daerah Bawahan	1,55	1,97	1,93	1,65	1,58
Bantuan ke Daerah Bawahan	43,67	32,55	29,04	33,83	36,81
Tidak Terduga	1,43	0,91	0,10	0,05	-
Bantuan kepada Lembaga Vertikal	-	-	-	-	-
Belanja Langsung	**34,53**	**44,04**	**50,66**	**47,68**	**41,49**
Belanja Pegawai	4,37	4,54	3,50	3,55	2,13
Belanja Barang dan Jasa	11,98	16,85	22,31	21,51	21,28
Belanja Modal	18,18	22,65	24,86	22,62	18,08

Sumber : BPKAD Provinsi Papua

Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran

pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-kurangnya dilakukan melalui:

a) Analisis sumber penutup defisit riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah

Data menunjukkan bahwa dana penutup defisit rill anggaran berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya seperti terlibat selama tahun 2010 defisit rill yang terjadi adalah sebesar Rp. (142.102.552.322,-) tertutupi oleh SiLPA sebesar Rp. 1.105.583.875.984,-

Berdasarkan tabel analisis diatas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut.

b) Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SILPA Pemerintah Daerah, penyumbang SilPA terbesar adalah pelampuan penerimaan lain-lain yang sah sebesar 335.26% selanjutnya disusul oleh pelampauan penerimaan PAD dengan pertumnuhan 165,15%. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA di provinsi Papua bukanlah karena lemahnya daya serap anggaran atau budgetary slack yang dilakkan oleh SKPD.

Tabel 3.10 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Papua Tahun 2009-2012

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	**Realisasi Pendapatan Daerah**	**5.757.078.135.237**	**6.012.822.338.440**	**5.661.736.548.920**	**6.227.545.144.534**
	Dikurangi realisasi:				
2.	Belanja Daerah	5.294.198.937.980	5.650.474.891.742	6.290.375.712.882	7.239.767.120.200
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	225.000.000.000	153.364.209.500	111.212.398.291	202.451.945.944
A	**Defisit riil**	**462.879.197.257**	**362.347.446.698**	**-628.639.163.962**	**-1.012.221.975.666**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:				
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-	1.105.583.875.984	955.938.778.571	779.591.449.131
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**1.105.583.875.984**	**955.938.778.571**	**779.591.449.131**
A-B	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)**	**493.623.400.459**	**963.481.323.662**	**781.895.811.932**	**768.371.943.871**

Sumber : BPKAD Provinsi Papua

Tabel 3.11 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Papua

No.	Uraian	2011		2012		Rata-rata pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1.	Jumlah SiLPA	955.938.778.571	100%	779.591.449.131	100%	-13.54%
2.	Pelampauan penerimaan PAD	0	0%	269.941.234.714	35%	165.15%
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	3.358.404.030	43%	0		31.66%
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	476.094.759.550	61%	0		335.26%
5.	Pelampauan Penerimaan Dana Otsus	0	-	0	-	
6.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya					
7.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan					
8.	Kegiatan lanjutan					

Sumber : APBD Provinsi Papua 2010-2011

c) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sisa rill pembiayaan anggaran tahun berkenan menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi Papua mempunyai kapasitas pendanaan daerah yang cukup untuk membiayai proses pembangunan.

Namun perlu di analisis lebih lanjut bahwa SiLPA tahun 2011 Rp. 955.938.778.571,- dan tahun 2012 sebesar Rp 779.591.449.131,- masih terlalu besar dibandingkan dengan total anggaran pendapatan di tahun yang sama. Hal ini dapat indikasikan bahwa SiLPA secara terstruktur terjadi. yang mungkin disebabkan oleh proyeksi perencanaan pendapatan yang terkalu kecil atau proyeksi belanja yang teralu besar. sehingga kesan yang muncul adalah penghematan atau prestasi karena pendapatan telah melampui target.

Tabel 3.12 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi Papua

No.	Uraian	2010	2011	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	963.546.093.300	762.860.537.251	768.371.943.871
	Dikurangi:			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	166.019.638		
3	Kegiatan lanjutan			
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**963.380.073.662**	**762.860.537.251**	**768.371.943.871**

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (di olah)

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan memuat penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Dalam kerangka pendanaan ini dibuat perkiraan belanja wajib yang mengikat (fix cost). dan sumber-sumber penerimaan yang mendukung kapasitas fiskal untuk membiayai kebutuhan belanja.

3.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu

Pengeluaran yang wajib dilakukan Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari beberapa jenis Belanja Operasional yaitu, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Keuangan (porsi dana Otsus untuk kabupaten/kota). Ini bagian belanja yang harus dikeluarkan setiap tahun anggaran. Selain itu terdapat Transfer Wajib yang wajib diserahkan Provinsi Papua dari penerimaan pajak daerah (pajak kendaraan bermotor dan pajak-pajak lain). Besaran Belanja Operasional Wajib dan Transfer Wajib tahun 2008-2012 dihitung pertumbuhan seperti terlihat dalam Tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3.13 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Tahun 2008-2012

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
Belanja Operasiona Wajib					
Balanja Pegawai	769.500.402.932	826.156.299.567	777.065.779.301	866.786.394.314	806.432.183.247
Belanja Barang dan Jasa	682.075.010.164	891.988.194.602	1.260.514.916.732	1.351.970.752.489	1.540.796.547.967
Belanja Bantuan Keuangan	2.537.008.414.225	1.723.487.561.000	1.640.726.759.000	2.126.256.726.000	1.309.277.867.378
Transfer Wajib					
Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota	90.127.829.000	104.319.213.863	109.328.770.345	103.669.062.498	114.401.215.080

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (di olah)

Dengan menggunakan data realisasi APBD 5 tahun lalu (2006-2011) disusun proyeksi untuk 5 tahun ke depan (2013–2018). Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa berbagai peraturan perundangan.perkembangan perekonomian nasional/daerah serta kebijakan fiskal dan transfer dana perimbangan yang terjadi dan dijalankan pada masa lalu akan berlaku dan terjadi di masa datang secara konsiten. Dengan demikian proyeksi disikapi sebagai kondisi minimal yang akan dimiliki. Dengan menggunakan pola pertumbuhan pendapatan dan belanja di atas diproyeksikan APBD seperti dalam tabel di atas.

Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018 (dalam miliar rupiah)

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	**PENDAPATAN**						
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**553.069**	**600.091**	**647.113**	**694.135**	**741.157**	**788.179**
1.1.1.	Pajak Daerah	379.049	409.758	440.468	471.177	501.887	532.597
1.1.2.	Retribusi Daerah	16.878	16.146	15.413	14.681	13.949	13.216
1.1.3.	Hasil Pengelolaann Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	23.272	22.736	22.200	21.664	21.128	20.592
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	133.870	151.451	169.032	186.612	204.193	221.774
1.2	**Pendapatan Transfer**	**7.680.641**	**10.247.782**	**11.452.514**	**13.603.564**	**15.754.615**	**17.905.666**
1.2.1	**Dana Perimbangan**	2.111.231	2.365.241	2.518.520	2.671.799	2.825.078	2.978.357
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	320.960	344.223	367.486	390.749	414.012	437.275
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	197.090	188.502	179.914	171.326	162.739	154.151
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.593.180	1.718.302	1.843.424	1.968.546	2.093.668	2.218.790
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0	114.213	127.695	141.177	154.659	168.141
1.2.2	**Lainnya**	5.569.410	7.882.541	8.933.994	10.931.765	12.929.537	14.927.309
1.2.2	Dana Otonomi Khusus	4.367.022	4.936.222	5.505.422	6.074.622	6.643.823	7.213.023
1.2.3	Dana Penyesuaian	630.960	946.319	1.261.677	1.577.036	1.892.394	2.207.753
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur	571.429	2.000.000	3.428.571	4.857.143	6.285.714	7.714.286
1.3	**Lain-2 Pendapatan Daerah Yang Sah**						
1.3.5	Pendapatan Hibah						
1.3.6	Pendapatan Dana Darurat						
JUMLAH PENDAPATAN		**8.233.710**	**10.847.872**	**12.099.626**	**14.297.699**	**16.495.772**	**18.693.844**

Sumber : di olah

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Ruang Fiskal Daerah pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari (*fix cost*). seperti gaji PNS. dan berbagai jenis pendapatan yang bersifat ditentukan penggunaannya *(earmarked)*. Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar.

Tabel 3.15 Ruang Fiskal (Kapasitas riil fiskal) Provinsi Papua Periode 2007 – 2011

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Total Pendapatan	5.757.078.135.237	6.012.822.338.439	5.661.736.548.920	6.227.545.144.534	7.430.999.560.884
DAK	34.203.000.000	81.273.000.000	75.055.000.000	72.115.650.000	106.191.170.000
Pendapatan Hibah	7.700.000.000	-	24.311.837.500	13.500.000.000	
Dana Darurat	34.500.000.000	-	-	-	
Dana Penyesuaian dan Otsus	3.920.142.897.000	4.080.040.325.000	3.494.864.788.000	3.957.459.547.550	4.720.432.216.000
Belanja Pegawai Tidak Langsung	769.500.402.932	826.156.299.567	777.065.779.301	637.779.464.886	652.577.094.974
Ruang Fiskal	991.031.835.305	1.025.352.713.872	1.290.439.144.119	1.546.690.482.098	1.951.799.079.910
Rasio RF Terhadap Pendapatan	**17.21%**	**17.05%**	**22.79%**	**24,83%**	**26,26%**

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (di olah)

Tabel data di atas menampilkan RF yang terus meningkat dalam periode tahun 2007 – 2011. Ruang Fiskal (RF) sebesar Rp. 908 miliyar pada tahun 2007, menjadi Rp1.546 miliyar pada tahun 2011. Rasio RF terhadap Pendapatan juga makin baik, yaitu dari 16.07 persen di tahun 2007 menjadi 24.83 persen pada tahun 2011. Rasio ini secara rata-rata 18,47 persen. Ruang Fiskal ini meningkat 9 persen per tahun. Suatu kondisi keuangan yang baik.

Kapasitas rill Provinsi Papua tahun 2013 menjacapai Rp. 5.605.439 triliyun sedang pada tahun 2017 akan meningkat menjadi Rp. 7.055.829 triliyun jumlah ini cukup besar untuk melakukan akselerasi pembangunan di Propinsi Papua.

Catatan bahwa belanja bantuan keuangan besarannya tergantung proporsi pembagian dana otsus untuk kabupaten dan provinsi. Berdasarkan berbagai asumsi yang ditetapkan, dapat dihitung kapasitas riil keuangan daerah Provinsi Papua, yang disajikan pada tabel 3.16 di bawah ini:

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan daerah di Provinsi Papua naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 20013 akan terjadi surplus sebesar

Rp2.539.046.405.090,- pada tahun 2011 akan menjadi Rp.2.286.624.720.641,- Gambaran ini menunjukkan bahwa pada dasarnya provinsi Papua dapat melakukan akselerasi yang lebih baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tahun-tahun terakhir ini.

Tabel 3.16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No.	Uraian	Proyeksi (000.000)				
		2014	2015	2016	2017	2018
		(RP)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	10.847.872	12.099.626	14.297.699	16.495.772	18.693.844
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	782.233	807.555	832.876	858.198	883.519
	Total penerimaan	**11.630.105**	**12.907.181**	**15.130.575**	**17.353.969**	**19.577.364**
	Dikurangi:	0	0	0	0	0
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	2.684.639	2.914.074	3.143.509	3.372.944	3.602.379
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**8.945.466**	**9.185.552**	**11.987.066**	**13.981.025**	**15.974.985**

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (di olah)

Dari kapasitas keuangan riil tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunnaan dana, dimana ada 3 (tiga) prioritas penggunaan dana yaitu:

1. Prioritas I, teridiri dari program *dedicated* dan mandat undang-undang;
   - Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dari perhitungan 80% total dana otonomi khusus sesuai dengan Panduan Umum Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Papua
   - Belanja hibah pembebasan biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun
   - Belanja hibah pembebasan biaya kesehatan bagi keluarga miskin
2. Prioritas II, terdiri dari:
   - Penyediaan layanan akses dan mutu pendidikan semua jenjang dan jenis (formal dan non formal) serta beasiswa S-2 dan S-3 bagi orang Papua (ORPA)
   - Penyediaan layanan akses kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan gizi masyarakat, dan pencegahan penyakit menular dan endemik
   - Penyediaan insentif bagi pengembangan investasi daerah dan produk unggulan daerah non tambang untuk kesejahteraan berkelanjutan
   - Penyediaan perumahan rakyat yang layak huni dan terjangkau
   - Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan *public utilitas* untuk menunjang pertumbuhan ekonomi lokal
   - Pembangunan tenaga listrik dan penyediaan jaringan tingkat kampung

- Peningkatan mutu sanitasi lingkungan dan air bersih termasuk persampahan

3. Prioritas III, terdiri dari:
   - Beasiswa S-2 dan S-3 untuk aparatur pemerintah
   - Penyediaan sistem penghargaan dan hukuman berbasis kinerja
   - Dukungan bagi lembaga keagamaan
   - Peningkatan mutu pendidikan tinggi di Papua
   - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Setelah prioritas I dan II ditetapkan, maka untuk penetapan prioritas III untuk belanja tidak langsung yang kemampuan pendanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dijabarkan lagi tiap tahunnya selama 5 (lima) tahun perencanaan RPJMD. Sehingga pengalokasian pada prioritas III untuk belanja tidak langsung tersebut lebih jelas, transparan, akuntabel dan pengelokasiannya sesuai dengan perencanaan.

3.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 2013-2018

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi - potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengelolah pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke Daerah yang semakin besar kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir menjadi Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas - luasnya, nyata dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut , penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, struktur APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada komponen Pendapatan terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Otsus serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kebijakan anggaran mendasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Papua dititik beratkan pada:

1. Kebijakan pendapatan keuangan daerah Provinsi Papua diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.
2. Kebijakan belanja keuangan daerah Provinsi Papua diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added).
3. Arah pembiayaan Provinsi Papua diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut diatas (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

3.4.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Papua, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi rata-rata dibawah 4,376% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber–sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lain-Lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU dan Dana Otsus secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber–sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan–kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah.

Gambaran umum pendapatan daerah tahun 2013–2018 adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah di Provinsi Papua berasal dari berbagai komponen yaitu:

a. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan serta Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dimaksudkan untuk menampung penerimaan-penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah di Luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito.
c. Penerimaan dari dana perimbangan yang meliputi: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK dan penerimaan lain-lain.
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Sumbangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan dari Pendapatan Lain-lain.

Terkait dengan arah pengelolaan keuangan peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Provinsi Papua perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD yaitu dengan:

a) Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur. Perbaikan manajemen ini baik pada internal Pemerintah Provinsi Papua maupun pada BUMD.
b) Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi.

2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik–baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program–program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Sementara itu

dana Otonomi Khusus dikelola dengan melibatkan pemerintah kabuaten / kota, dengan pembangian 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah propinsi dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah kabupaten/kota.

3.4.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

   Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Tolok ukur dan target kinerja

   Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Transparan dan akuntabel

   Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

3.4.3 Kebijakan Pembiayaan

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hadiah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah dengan ketentuan besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur pembiayaan seperti mengatur defisit anggaran dan pinjaman daerah (*sub national deficit, borrowing and debt*) dan mengatur surplus anggaran dan penyertaan modal (*investment*).

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS







BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat stretagis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung-jawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnyaakan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akanmenimulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk untuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran

pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan visi dan misi kepala daerah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum kondisi daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari pemangku kepentingan, maka permasalahan pembangunan jangka menengah Provinsi Papua dibagi ke dalam 4 permasalahan utama, yaitu permasalahan bidang birokrasi/pemerintahan daerah, aksesibilitas/infrastruktur daerah, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta permasalahan dari segi sosial dan budaya. Permasalahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Masalah Infrastruktur

Berbagai kebutuhkan infrastruktur dasar masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan penyediaan yang harus memperhatikan pola sebaran pemukiman penduduk dalam kelompok-kelompok kecil dan tersebar dengan kondisi geografis yang berat.

Perumahan Rakyat

- Sebagian besar penduduk wilayah pedalaman dan pegunungan belum memilikiperumahan layak huni;
- Sebagian besar warga belum terjangkau dengan fasilitas listrik;
- Kebutuhan air bersih belum terjangkau oleh sebagian besar penduduk;
- Sanitasi lingkungan masih jauh dari rata-rata nasional.

Media Telekomunikasi dan Komunikasi

- Masih minimnya penggunaan media komunikasi seperti internet denganberbagai fasilitasnya (web, email dll) dalam menunjang efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- Telekomunikasi danpenyiaran untuk kebutuhan komunikasi dan penyebaran informasi kepada warga masih belum menjangkau banyak wilayah kampung;
- Belum optimalnya komunikasi dan informasi pelaksanaan pembangunan serta publikasi hasil-hasilnya secara baik dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

Perhubungan

- Jaringan jalan dan jembatan belum menjangkau banyak wilayah pemukiman penduduk sehingga pelayanan dasar belum dirasakan oleh sebagian besar penduduk;
- Sarana transportasi laut, sungai dan penyeberangan yang dibutuhkan untuk mendorong pergerakan ekonomi warga dan pelayanan dasar masih sangat terbatas;
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas bandara termasuk bandara perintis dalam mendukung pelayanan transportasi udara yang merupakan alat transportasi dominan di Papua.

b. Masalah Perekonomian

Upaya pembangunan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat.

Perekonomian Rakyat

- Belum efektifnya pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menunjang pendapatan keluarga berbasis hak masyarakat adat;
- Belum efektifnya pelaksanaan RESPEK dalam memicu pertumbuhan produktivitas kampong;
- Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi pasar yang luas baik dalam skala nasional maupun internasional;
- Belum terhubungnya pengembangan industri pariwisata daerahdengan berbagai potensi alam danbudaya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat adat dan penduduk lokal;
- Masih minimnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas kebudayaan dan hasil-hasilnya, yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan penduduk lokal;
- Belum optimalnya peran masyarakat adat dan lembaga keagamaan dalam mengembangkan ekonomi dan pendapatan penduduk;
- Belum adanya konsep/Rencana Aksi pengembangan ekonomi rakyat yang lebih kompehensif dan teritegrasi mulai dari tahap produksi sampai tahap pemasaran yang mengarah pada kesesuaian dengan kebutuhan pasar.

Perekonomian Daerah

- Pendapatan penduduk yang bekerja di sektor pertanian sangat rendah dibanding sektor ekstraktif pertambangan;

- Belum berkembangnya penelitian dan teknologi budidaya untuk meningkatkan hasil produksi dan kualitas pertanian guna menjaga ketahanan pangan;
- Kurangnya regulasi yang dapat melindungi kepentingan ekonomi daerah karena hampir semua nilai tambah produksi dari bahan baku yang dihasilkan Papua terjadi di luar Papua;
- Ancaman berkurangnya sumber daya keuangan pemerintah daerah pasca berakhirnya penerimaan dana Otsus Papua (8 tahun lagi);
- Kurangnya sumbangan dan keterkaitan sektor pertambahan terhadap pertumbuhan sektor-sektor pertanian dan jasa;
- Kurangnya kelembagaan dan infrastruktur ekonomi yang berpihak pada penduduk lokal, terutama dalam pembinaan usaha dan perkreditan.

Investasi dan Kemitraan Usaha

- Kemitraan antara penanam modal dengan warga local sebagai pemilik hak ulayat atas tanah belum efektif dilaksanakan sesuai Perdasus dan tuntutan Otonomi Khusus Papua;
- Kurangnya pemberdayaan dan pendampingan warga lokal dan masyarakat adat dalam menghadapi berbagai isu dan permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian kerjasama dengan investor;
- Masih minimnya proses produksi lanjutan yang dikerjakan oleh investor untuk meningkatkan nilai tambah dan penyediaan tenaga kerja di Provinsi Papua;
- Masih kurang efektifnya promosi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
- Meluasnya pemberitaan dan wacana media tentang masalah keamanan dan masalah tanah ulayat yang kurang ditanggapi Pemerintah Daerah.

Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Minimnya SDM (tenaga penyuluh), sarana dan prasarana penyuluhan;
- Kurangnya produktifitas dan kualitas hasil produksi pertanian rakyat, terutama di daerah pedalaman dan pegunungan;
- Rendahnya harga produksi di tingkat petani;
- Kuantitas dan kualitas produksi sangat terbatas (rendahnya Produktivitaspetani);
- Tingginya kerawanan pangan di wilayah pegunungan, pedalaman dan terpencil;
- Rendahnya Gizi masyarakat dan keragaman pangan;
- Bergesernya bahan konsumsi penduduk asli Papua terhadap bahanmakanan dari luar Papua (beras telah mengantikan sagu, ubi-ubian dan pisang); dan
- Belum efektifnya pemanfaatan lahan pertanian.

Perindustrian dan Perdagangan

- Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal, baik SDA maupun budaya, dalam pengembangan industri kecil, menengah dan kerajinan rumah tangga;
- Kurangnya pembinaan pelaku usaha industri dan perdagangan dalam aspek produksi, pemasaran, keuangan serta kewirausahaan;
- Belum optimalnya rintisan pengembangan komoditas unggulan untuk tujuan ekspor;

c. Masalah Sosial Budaya

Pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat (sosial budaya) mencakupi berbagai pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga. Sejumlah masalah sosial budaya yang teridentifikasi sampai saat ini dikelompokkan dalam : pendidikan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, kepemudaan dan olahraga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pendidikan

- Terbatasnya akses PAUD Formal;
- Akses terhadap pelayanan pendidikan dasar 9 tahun masih terbatas;
- Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif;
- Rendahnya kesiapan anak untuk bersekolah SD menyebabkan tingginya angka mengulang kelas awal SD;
- Distribusi guru yang belum merata secara proporsional;
- Tingginya angka ketidakhadiran guru melaksanakan tugas masih tinggi;
- Kurangnya data dan informasi pendidikan;
- Belum terlaksananya akuntabilitas pendidikan - regulasi, pelaporan, pengawasan dan sanksi;
- Tingginya angka buta aksara dewasa, terutama di wilayah pegunungan;
- Kurangnya kapasitas SDM dalam menyusun perencanaan, pelaporan, pengendalian dan pengawasan pendidikan;
- Pembukaan program keahlian SMK tidak didasarkan pada analisis kebutuhan pasar kerja dan kecenderungan pembangunan daerah.

Kesehatan

- Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah;
- Masih tingginya angka kasus malaria sebagai penyakit endemik;
- Masih tingginya angka penyakit HIV/AIDS dan TB;

- Status gizi ibu dan anak terutama dari keluarga miskin sangat rendah;
- Terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan;
- Status kesehatan ibu dan anak masih rendah serta Status gizi masyarakat masih rendah;
- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kesehatan (dokter, mantri, dan bidan);
- Masih kurangnya pendekatan promotif dan preventif kesehatan bagi masyarakat danUKBM seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Kampung (Poskeskam).

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

- Tingginya arus migrasi penduduk dari luar Provinsi Papuayang berdampak pada tingginya persaingan pencari kerja, rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, danmeningkatnya masalah sosial kemasyarakatan;
- Tingginya arus urbanisasi dari wilayah pedesaan (kampung)ke wilayah perkotaaan;
- Kurangnya pertumbuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia kerja;
- Rendahnya pendidikan, kompetensi dan ketrampilan pencari kerja penduduk asli Papua;
- Tingginya tingkat partisipasi kerja orang asli papua;
- Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka dari angkatan kerja berpendidikan SMA dan Pendidikan tinggi.

Kepemudaan dan Olahraga

- Kurang tersedianya data kepemudaan dan peta pembinaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
- Terbatasnya fasilitas pengembangan kepemudaan;
- Masih rendahnya pengembangan potensi olahraga unggulan daerah termasuk pembibitan;
- Terbatasnya jumlah dan kapasitas pembina dan pelatih olahraga serta rendahnya dukungan prasarana olahraga rekreasi dan olahraga masyarakat.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Rendahnya Indeks Pembangunan Gender sebagai akibat tinginya buta aksara kaum perempuan; demikian juga dengan partisipasi sekolah, proposi upah gender dan proposi perempuan bekerja tanpa upah;
- Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga;

- Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender dalam berbagai aspek kehidupan sosial seperti peran rendahnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan, dalam politik, dalam pemerintahan, dalam kehidupan kemasyarakatan;
- Masih rendahnya pemahaman hak-hak dasar kaum perempuan dan perlindungan anak;
- Belum adanya pelayanan terhadap anak-anak yang menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Masih rendahnya pengakuan pada hak-hak dasar anak dalam keluarga dan masyarakat.

d. Masalah Lingkungan Hidup

Kualitas kehidupan manusia ikut dipengaruhi oleh kondisi dan kualitas lingkungan hidup sekitarnya.Lingkungan berdampak langsung pada ketersediaan sumber daya yang sangat dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup, seperti ketersediaan air, prasarana jalan dan jembatan. Lingkungan yang tidak terpelihara dapat dipastikan berdampak pada menurunnya kapasitas dan daya dukung lingkungan terhadap pembangunan keberlanjutandan ketersediaan sumber daya yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan keseharian.

- Masih rendahnya pemahaman pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai sebuah fungsi ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia;
- Belum tumbuhnya paradigma pembangunan berkelanjutan;
- Pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah terlebih dalam era otonomi daerah yang semakin memicu cepatnya eksploitasi sumber daya alam;
- Marginalisasi masyarakat asli papua yang masih peramu karena hilangnya akses pada aset kehidupannya;
- Adanya perbedaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kota/Kabupaten;
- Perencanaan pembangunan yang disusun selama ini cenderung berwawasan jangka pendek dan belum berpihak pada keberlanjutan pemanfaatn sumber daya alam dan lingkungan yang lestari;
- Tingginya ancaman tingkat eksploitasi di kawasan hutan baik untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, permukiman, pemekaran wilayah dan pembukaan lahan untuk kebutuhan investasi lainnya;
- Belum dilakukan penilaian kekayaan sumber daya hayati dan plasma nutfah Papua sebagai kekayaan leluhur Papua yang memberi dampak kesejahteraan;

- Belum dilaksanakannya skema kompensasi bagi masyarakat Papua dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui penjagaan hutan hujan, bakau dan terumbu karang.

e. Masalah Tata Pemerintahan dan Politik

Pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan DPRP dan MRP dalam menyelenggarakan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Masalah Tata Pemerintahan dan Politik ini dikelomppok dalam: adminstrasi umum pemerintahan, pemberdayaan aparatur dan otonomi daerah dan keuangan daerah.

Adminstrasi Umum Pemerintahan, Pemberdayaan Aparatur dan Otonomi Daerah

- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana belanja bantuan keuangan alokasi dana otonomi khusus dalam sektor pendidikan, kesehatan dan beberapa program yang disepakati;
- Belum optimalnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota yang dibiayai baik dari APBD Provinsi mapun APBN;
- Belum optimalnya Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan serta Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah;
- Struktur organisasi belum mencerminkan kebutuhan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai amanat UU No. 21/2001 dan potensi serta tantangan daerah.

Kepegawaian Daerah

- Belum optimalnya pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai dan analisis jabatan sebagai dasar pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, produktifitas pegawai;
- Masih rendahnya kualitas aparatur Pemerintah Daerah baik kompetensi maupun spesialisasi sesuai potensi dan tantangan daerah;
- Konfigurasi struktur organisasi pemerintah belum merefleksikan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan fungi-fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien (MRP, legislatif dan eksekutif);
- Budaya komunikasi pemerintahan belum mampu mengatasi berbagai kebuntuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- Restrukturisasi organisasi pemerintahan Provinsi Papua belum didukung dengan acuan standar kinerja/SPM, *Standart operating and procedure* dan belum mempertimbang semangat pembangunan di era Otsus.

Keuangan Daerah

- Rendahnya indeks kemandirian fiskal karena Kurangnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang pendapatan daerah di akhir periode Otsus;
- Belum efektifnya transparansi keuangan, terutama pengelolaan dana yang bersumber dari Otsus;
- Masih banyaknya temuan BPK yang mengindikasikan adanya masalah keuangan, yang berpotensi merugikan keuangan daerah;
- Minimnya kapasitas pengelola keuangan yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas keuangan;
- Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi pedoman untuk mencegah berbagai masalah pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah;
- Belum ditetapkannya sebagian besar regulasi bidang keuangan yang diharuskan perundang-undangan seperti perdasi pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, kebijakan akuntansi dan perdasus pembagian dana Otonomi Khusus Papua;
- Belum dilibatkannya MRP dalam memberikan pertimbangan alokasi dan penggunaan dana Otomi Khusus Papua;
- Belum optimalnya implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Budgeting*).

Pengawasan Daerah

- Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
- Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, dan banyaknya praktek KKN pada semua tingkatan pemerintahan;
- Belum optimalnya tindak lanjut hasil temuan pemerikasaan;
- Belum optimalnya pelaksanaan tugasdan fungsi lembaga-lembaga pengawas dan lembaga-lembaga penegak hukum;
- Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik;

f. Masalah Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan

- Belum adanya konsistensi arah dan kebijakan dalam dokumen pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan pembangunan tahunan;
- Masih kurangnya kesadaran aparat pemda dalam menyusun dan menggunakan dokumen perencanaan untuk kebutuhan pembangunan daerah;

- Belum tersedianya Perdasi tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana;
- Belumterciptanya keselarasan penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilakukan dengan pendekatan Politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah *(top down)*dan bawah-atas *(bottom up) termasuk pendekatan budaya khas papua;*
- Belum terciptanya keselarasan Perencanaan Pembangunan dengan amanat OTSUS mendorong Perlindungan,Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua;
- Belum optimalnya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif pada setiap tahapan dan jenjang pemerintahan daerah di Provinsi Papua;
- Belum konsistennya kaitan antara penganggaranprogram/kegiatan tahunan dengan perencanaanlima tahun (RPJMD) dan tahunan (RKPD);
- Belum terciptanya Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah maupun SKPD yang berbasis kinerja;
- Belum terbangun dan berfungsinya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Terbatasnya kapasitasdan kompetensi staf perencana, termasuk MONEV dan pengendalian Pembangunan;
- Belum memadaninya data dasar pembangunan dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Belum optimalnya Sinergi Perencanaan Pembangunan di Daerah baik secara vertical maupun horizontal, termasuk antara Pemerintah dengan Mitra Pembangunan.

Penataan Ruang

- Masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan penataan;
- Masih banyaknya dampak negatif yang diakibatkan berbagai aktivitas pemanfaatan ruang;
- Belum adanya kesesuaian perencanaan ruang (RTRW) antara provinsi danKabupaten/Kota.

g. Masalah Data dan Statistik Daerah

- Belum terbangunnya sistem database pembangunan daerah provinsi;
- Keterbatasan data baik kuantitas maupun kualitas;
- Belum terkoordinasi dan terkonsolidasinya data pembangunan daerah.

h. Masalah Pemberdayaan Masyarakat Kampung

- Belum adanya regulasi yang dapat menjamin konsistensi program pemberdayaan kampong;
- Belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayan kampung: minimnya jumlah pendamping, kurangnya kualitas pendamping, kualitas dan ketepatan waktu pelaporan, masalah transparansi dan akuntabilitas keuangan;
- Masih rendahnya tingkat kemandirian warga dalam pelaksanaan program pemberdayaan;
- Kurangnya perhatian program pemberdayaan terhadap kegiatan ekonomi rakyat.

i. Masalah Ketentraman dan Ketertiban

- Tingginya kegiatan pelintas batas di wilayah perbatasan dengan PNG;
- Masih tingginya kesenjangan pendapatan yang mengakibatkan kecemburuan dan konflik;
- Belum optimalnya Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan PERDA;
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sistem hukum nasional dan hukum adat;
- Belum optimalnya koordinasi untuk penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (antara Pemda, TNI dan POLRI);
- Masih adanya konflik sosial kemasyarakatan secara horizontal;
- Masih adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan;
- Perang suku antar suku dan kelompok masyarakat masih sering terjadi;
- Kurangnya pelembagaan budaya perang antar suku untuk memajukan pariwisata yang inovatif;
- Kurangya pemberdayaan warga, masyarakat adat dan lembaga keagamaan untuk mendukung terciptanya ketertiban di tengah-tengah masyarakat;
- Masih kurangnya sosialisasi dan pendekatan yang dapat menarik simpati warga dalam memelihara ketertiban;
- Masih tingginya potensi terjadinya perselisihan antara warga dan penanam modal, dan antar warga lokal dan penduduk pendatang;
- Masalah pertanahan memunculkan konflik antar warga, dan warga dengan pemerintah dan investor terkait jaminan kepastian berusaha;

- Rendahnya penerimaan penduduk terhadap peraturan perundang-undangan pertanahan nasional.

j. Masalah Penegakan Hukum dan HAM

- Belum optimalnya pemberian Bantuan Hukum kepada warga masyarakat;
- Masih kurangnya penelitian dan pengkajian produk hukum daerah;
- Belum ditetapkannya sejumlah Perdasus dan Perdasi yang mengatur hak-hak dasar orang asli Papua: berperspektif gender dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual orang asli papua;
- Belum optimalnya implementasi Perdasi/Perdasus tentang Masyarakat Adat dan Peradilan Adat;
- Belum tuntasnya penyelesaian kasus Pelanggaran HAM di Papua;
- Masih rendahnya kapasitas aparat penegak hukum yang profesional, jujur, dan berwibawa;
- Belum dibentuknya Pengadilan HAM di Papua;
- Belum adanya penanganan dan pemulihan oleh Negara terhadap korban pelanggaran HAM di Papua;
- Belum tersedianya peradilan, rumah tahanan anak dan penjara khusus anak;
- Belum tersedianyapenjara khusus perempuan;
- Masih terdapatnya gerakan beberapa kelompok warga membuat gerakan untuk pemisahan Papua dari NKRI.

k. MasalahKesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

- Belum optimalnya peran lembaga–lembaga politik dalam pembinaan demokrasi.
- Belum terbangunnya budaya politik yang sehat, dewasa bermutu, dan bertanggungjawab;
- Belum berperannya lembaga-lembaga adat dalam pembinaan dan perlindungan masyarakat;
- Masih adanya konflik sosial kemasyarakatan secara horizontal;
- Kurangnya wawasan dan kesadaran sebagian warga dalam berbangsa dan bernegara dalam NKRI;
- Kurang optimalnya implementasi Otsus dalam bidang politik, seperti belum terbentuknya partai politik lokal, belum dirangkulnya kelompok warga untuk menyatukan kepentingan mereka dalam partai politik lokal dalam kerangka NKRI;

- Masih kurangnya kesadaran sebagian warga untuk mengambil peran dalam pesta politik – pemilukada, pemilihan umum, dan pemilihan anggota legislatif.

Kurang efektifnya pesta demokrasi sebagai wujud pelembagaan suara rakyat dalam pemilu dan pemilukada.

4.2. Isu Strategis

Isu stratgis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa depan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebalikya, jika tidak dimanfatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan; gambaran umum kondisi daerah; isu internasional; isu nasional dan isu regional.

a. Isu Internasional

Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, adalah komitmen *MilleniumDevelepment Goals* (MDGs) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Indonesia, merupakan keharusan bagi Provinsi Papua untuk mencermati indikator dan target yang harus dicapai. Selain MDG's, isu internasional yang saat ini sedang berkembang dan akan memberikan efek bagi masa depan pembangunan dunia dan Indonesia secara umum dan Provinsi Papua secara khusus, antara lain : penerapan *green economic* global (ekonomi ramah lingkungan), krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, perdagangan bebas WTO, APEC dan AFTA yang cenderung mengarah kepada perdagangan bebas dunia global dan regional, penerapan sumber alternative mengantisipasi semakin menipisnya cadangan mineral dunia mengantisi semakin menipisnya cadangan mineral dunia, mengantisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), serta kamajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat dan mengantisipasi hambatan jarak antar waktu.

b. Isu atau Kebijakan Nasional

Selain memerhatikanisu skala internasional dan regional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah 11 prioritas pembangunan nasional, yaitu:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastuktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik; dan
11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

Sejalan dengan 11 prioritas tersebut, kebijakan Propinsi Papua juga memerhatikan dokumen RPJMN, sesuai dengan perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Berdasarkan arahan pembangunan wilayah Papua, sasaran pembangunan wilayah Papua dalam dokumen RPJMN dalam kurun waktu 2010-2014 adalah untuk:

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat Papua ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan pendapatan per kapita;
2. Meningkatnya standar layanan jasa pendidikan;
3. Meningkatnya standar layanan jasa kesehatan;
4. Tercapainya tingkat produksi pangan dengan tingkat ketersediaan minimal 90% dari tingkat kebutuhan domestik untuk pengamanan kemandirian pangan;
5. Meningkatnya peran sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata dalam perekonomomian wilayah Papua; dan
6. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya tambang dan hutan.

Melengkapi perencanaan pembangunan nasional, baru-baru ini pemerintah pusat menerbitkan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Indonesia mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu disusun MP3EI yang mengedepankan pedekatan *not bussiness as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur.

Dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi tersebut, wilayah pengembangan dibagi menjadi beberapa koridor, salah satunya adalah Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.Koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Tema pembangunan koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku adalah sebagai **Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional**. Strategi pembangunan ekonomi koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku difokuskan pada 5 kegiatan ekonomi utama, yaitu Pertanian pangan-MIFEE *(Merauke Integrated Food & Energy Estate)*, Tembaga, Nikel, Migas, dan Perikanan.

c. Isu Pembangunan Daerah (Regional/Provinsi)

1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua sebagai yang terendah di Indonesia
2. Masih rendahnya akses masyarakat asli Papua pada pendidikan dasar dan menengah termasuk non-formal akibat rendahnya ketersediaan layanan pendidikan untuk masyarakat di daerah terpencil, pendekatan yang tidak sesuai dengan kondisi geografis dan pola permukiman serta budaya masyarakat setempat
3. Belum tersedianya sistem jaminan pemenuhan biaya pendidikan gratis (operasional dan personal) dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah khususnya bagi Orang Papua Asli sesuai mandat UU Otsus, menyebabkan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat.
4. Masih rendahnya akses masyarakat asli papua pada pemenuhan kesehatan dasar akibat rendahnya ketersediaan sarana kesehatan, rendahnya distribusi tenaga kesehatan dan non kesehatan, ketersediaan obat-obatan secara merata, serta tingginya biaya kesehatan akibat belum meratanya distribusi jaminan kesehatan masyarakat
5. Masih tingginya angka kematian ibu, kematian bayi baru lahir dan balita, angka balita kurang Gizi, serta penyakit endemis malaria dan menular berbahaya
6. Masih rendahnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau dengan sanitasi lingkungan dan air bersih yang bermutu dan ketersediaan listrik yang merata
7. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat perkotaan dan pedesaan karena pemberdayaan ekonomi yang belum sepenuhnya bertumpu pada kekuatan ekonomi kerakyatan dalam memastikan adanya mata pencaharian (*livelihood*) yang menyebabkan rendahnya nilai tambah dan produktivitas di wilayah pedesaan,
8. Masih rendahnya angka kemandirian fiskal akibat belum optimalnya pemanfaatan sumber pendapatan asli daerah dari produk unggulan daerah non migas diantaranya

pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta sumber pendapatan *un-conventional* lainnya diantaranya skema kompensasi penuruan emisi gas rumah kaca

9. Belanja pemerintah cederung tidak efisien sehingga menciptakan kesenjangan sosial dan politik ekonomi yang menempatkan masyarakat pada posisi absolute konsumtif
10. *Dis-harmony* hubungan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota akibat miss-management dalam penetapan orientasi dan strategi pembangunan sehingga meninggalkan peran kabupaten/kota sebagai jenjang pemerintahan dengan kewenangan tersendiri
11. Terabaikannya peran masyarakat Adat termasuk perempuan Papua yang secera keterwilan oleh MRP (Majelis Rakyat Papua) selaku mitra utama pemerintah sehingga proses pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan banyak yang bertentangan dengan prinsip dasar dan hak dasar masyarakat adat.
12. Tidak Konsistennya penyelenggaraan pembangunan Papua karena belum tersedia masterplan pembangunan (RPJP) sebagai kesepakatan warga menuju peradaban baru yang dicita-citakan bersama
13. Pembangunan infrastruktur strategis yang tidak berkesinambungan sehingga koneksitas antar daerah masih terhambat
14. Masih adanya tuntutan dari kelompok masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI karena tidak terlaksananya rekonsiliasi akibat perbedaan pemahaman sejarah bangsa dan ketidak puasan pada kebijakan publik yang belum menjawab permasalahan mendasar pembangunan
15. Pengendalian dan pengurangan aksi korupsi, kolusi dan nepotisme belum berjalan dengan baik
16. Tidak jelasnya *mind set* dan *culture-set* birokrasi pemerintah daerah yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas pelayanan publik dalam pencapaian prioritas pembangunan
17. Penataan dan pemanfaatan ruang bagi pembangunan tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten / Kota maupun *stakeholder* lainnya.
18. Distribusi pembiayaan pembangunan era otonomi khusus yang belum proporsional antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan yang lebih kontekstual
19. Belum optimalnya pengembangan potensi olahraga prestasi dan perlindungan nyata atas kekayaan intelektual serta kebudayaan luhur asli Papua termasuk penilaian atas

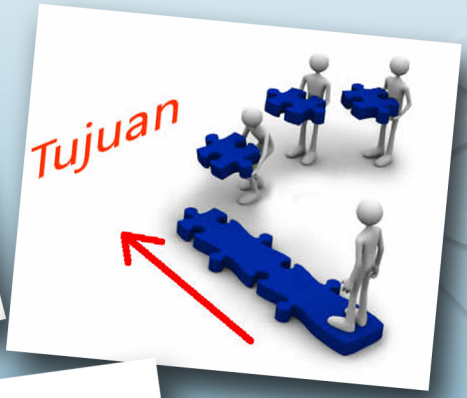
sumberdaya hayati dan plasma nutfah asli Papua berdasarkan penelitian dan pengembangan secara berkelanjutan dan memastikan penguatan akar budaya Papua dalam menghadapi gempuran modernisasi

20. Rendahnya kepercayaan investor karena belum adanya upaya konstruktif dalam penegakan hukum, pengembangan sistem informasi pembangunan daerah yang mendukung pertumbuhan investasi daerah yang berorientasi pada pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN











BAB V

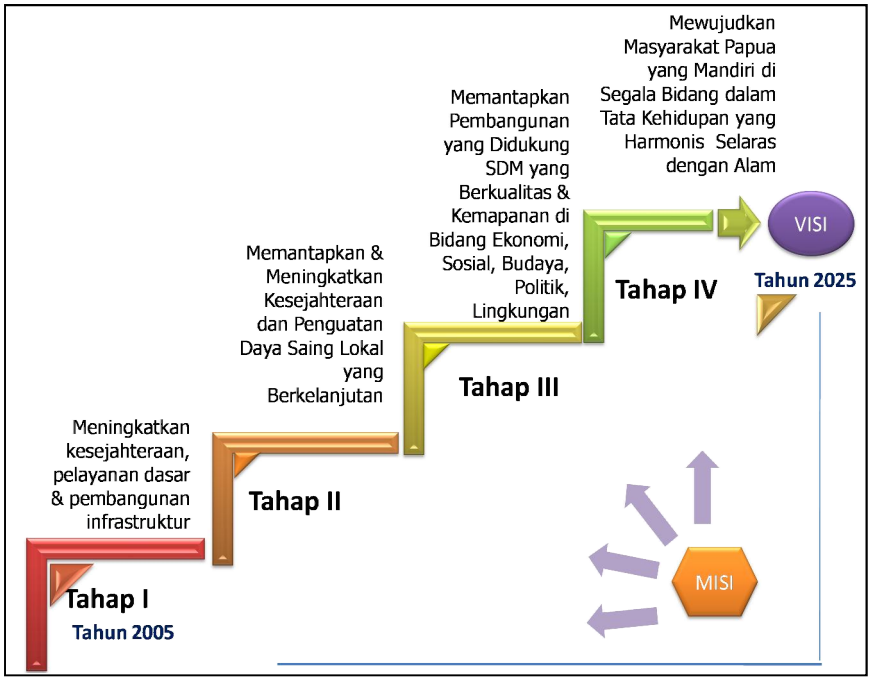
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Periode 2013-2018 merupakan tahap kedua dalam proses pencapaian Visi jangka panjang Provinsi Papua. Visi Jangka panjang yang harus diwujudkan seperti yang telah dituangkan dalam dokumen RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 adalah **PAPUA YANG MANDIRI SECARA, SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN POLITIK**.

Strategi untuk melaksanakan Visi jangka panjang tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Gambar 5.1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang



RPJMD periode II tahun 2013-2018 ditujukan untuk memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing lokal yang berkelanjutan serta pemenuhan infrastruktur daerah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua tetap difokuskan, dengan meningkatkan pencapaian IPM; menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran; pertumbuhan ekonomi riil yang berkualitas; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang sesuai dengan kondisi lokal; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; kesejahteraan dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan antardaerah; percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter masyarakat asli Papua.

Kualitas SDM Masyarakat Papua menjadi dasar untuk mampu meningkatkan daya saing perekonomian lokal yang dilakukan melalui penguatan di bidang pertanian, tanaman pangan, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemanfaatan potensi perikanan, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai sumber alternatif pembangunan. Potensi ini dapat dikembangkan apabila disertai dengan peningkatan kemampuan dan pengetahuan untuk memanfaatkannya dan didukung oleh kemampuan pemerintah daerah untuk memfasilitasinya melalui pengembangan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur; peningkatan kualitas lembaga maupun sekolah kejuruan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mampu mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Percepatan peningkatan tujuan diatas harus didukung dengan pengembangan dan pemantapan jaringan infrastruktur transportasi yang telah ada, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta peningkatan ketersediaan air bersih untuk mendukung kegiatan usaha maupun kegiatan rumah tangga dan fasiltas umum lainnya.

Untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal yang berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup harus didasarkan pada kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif semua pihak termasuk semua fungsi kelembagaan dan peran pemerintah daerah dalam mendorong dan melaksanakan proses rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sehingga, sumberdaya alam sebagai modal penguatan kegiatan ekonomi local dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing masyarakat asli Papua, serta modal pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, perencanaan tataruang Provinsi Papua yang telah dihasilkan dan diselaraskan dengan pemanfaatanl ahan dan polaruang dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan harus secara konsisten dilaksanakan dan dipatuhi.Tujuan dan arahan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di Papua harus diselaraskan dengan

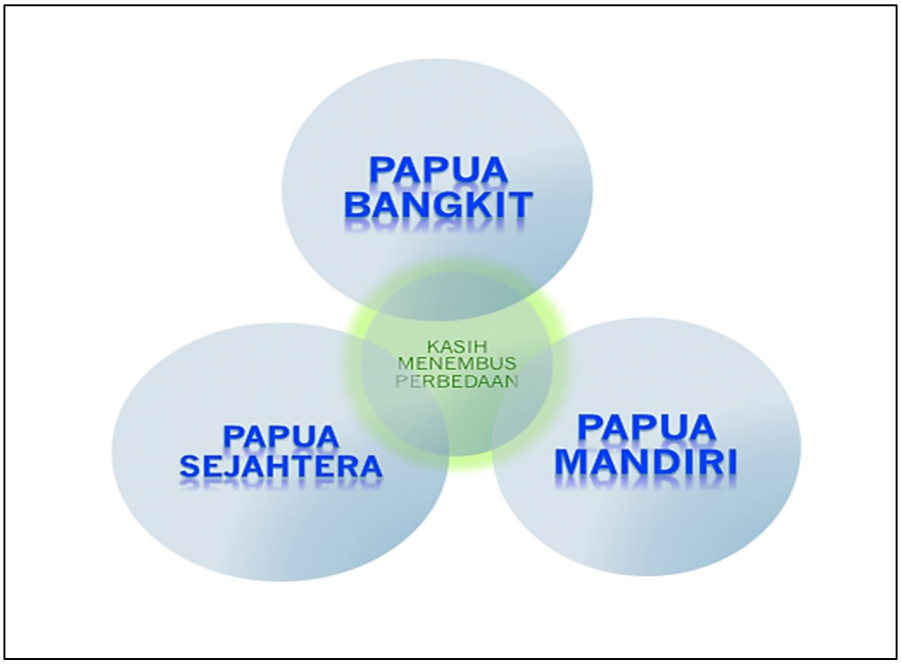
perencanaan daerah yang telah disusun dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan daerah.

Sejalan dengan prioritas pembangunan tahap kedua RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 dan visi dan misi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018, serta permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Papua maka visi atau kondisi masa depan yang diharapkan terwujud periode 5 (lima) tahun kedepan adalah:

PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA

Jika memperhatikan pernyataan visi diatas, maka kesejahteraan yang hakiki multidimensional dalam tatanan peradaban baru sebagai cita-cita bersama akan dapat terwujud jika prasyarat kemandirian masyarakat Papua dalam berbagai aspek kehidupan dapat terpenuhi setelah berhasil bangkit dari keterpurukan multidimenasional. Korelasi antara Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera sebagai visi pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5.1 Visi Papua 2013-2018



Dari gambar diatas tampak jelas bahwa PAPUA BANGKIT merupakan landasan utama untuk mewujudkan PAPUA MANDIRI DAN SEJAHTERA, selanjutnya untuk mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera diselimuti dengan prinsip **Kasih**

Menembus Perbedaan, karena dengan kasih yang akan menembus segala sekat-sekat perbedaan yang ada, inilah yang disebut **Papua Yang Baru Dalam Bingkai Peradaban Baru Papua**.

Penjelasan masing-masing elemen visi diatas adalah sebagai berikut:

PAPUA BANGKIT

Terwujudnya Masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi dilevel individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dimana Orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran di berbagai bidang pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik.

PAPUA MANDIRI

Terwujudnya kondisi Masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan didukung Generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (*Entrepreneurship*) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya berbagai sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sektor kehutanan dan pariwisata harus dikembangkan sehingga memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja,serta didukung pengembangan Industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.

PAPUA SEJAHTERA

Terwujudnya semua Masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Secara sederhana, sejahtera dipahami

sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat dikaitkan dengan terbebasnya masyarakat dari "rasa lapar" dan "rasa takut". Di sini, kesejahteraan dikaitkan tidak saja pada konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia.

5.2. Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga kepada segenap *Stakeholders*. Berdasarkan Visi Gubenur dan Wakil Gubenur maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan Nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan NKRI.**
2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus**
3. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia.**
4. **Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal**
5. **Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.**

Penjelasan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Suasana Aman,Tentram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana aman, tentram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua. Terwujudnya suasana dan kepastian keadilan melalui

penegakan hukum (*law enforcement*) dan terjaganya ketertiban umum. Kondisi dan suasana aman, tenteram dan nyaman merupakan potensi dan modal dasar pembangunan di Provinsi Papua. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan iklim kondusif bagi terciptanya kenyaman bagi seluruh Masyarakat Papua dan investasi ke Papua untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penciptaan tata kehidupan masyarakat Papua yang religius dan berbudaya melalui optimalisasi peran lembaga keagamaan dan lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka aktualisasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya asli Papua. Pijakan pada nilai-nilai agama dan adat diperlukan agar upaya penciptaan keamanan dan ketertiban itu dilembagakan sendiri oleh masyarakat. Selain itu meningkatkan rasa aman, tenteram dan nyaman diupayakan melalui penegakan hukum dan revitalisasi peran masyarakat, dengan mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta penguatan Otsus

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta penguatan Otonomi Khusus Papua dalam Implementasinya sesuai dengan amanat UU No. 21 tahun 2001. Dinamika dan tuntutan masyarakat saat ini, menuntut setiap aparatur pemerintahan profesional dan akuntabel, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upayanya, adalah dengan melakukan reformasi birokasi. Reformasi birokasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktek-praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain memberantasan praktek KKN, reformasi birokrasi harus kita jalankan dengan meningkatkan budaya kerja, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip *good governance.* Aparatur harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif efisien dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Oleh karena itu perubahan *mind-set, culture-set* dan pengembangan budaya kerja harus dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantas korupsi

secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN harus diinisiatifi dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Reformasi Birokrasi ini juga akan mendorong hubungan kelembagaan yang harmonis antara Provinsi dan kabupaten/kota serta penguatan implementasi Otonomi Khusus Papua. Penguatan Otonomi khusus Papua dilakukan dengan mewujudkan hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, MRP dan DPRP dalam memperluas dan memperkuat kewenangan daerah dalam kerangka Otsus demi terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, hak politik dan hak budaya.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia

Maksud dari misi ini adalah Meningkatnya Kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika dengan mengembangkan sistem nilai yang positif sesuai kearifan lokal budaya asli masyarakat Papua. Sebaliknya, kebiasaan masyarakat yang tidak baik perlu untuk terus diminimalisir. Sumberdaya manusia adalah kekuatan yang bersumber dari manusia yang dapat disebut sebagai tenaga atau kekuatan (energi atau *power*). Daya yang bersumber dari manusia ini sering dipadankan dengan istilah ***man power.*** Membangun manusia berkualitas berarti membentuk manusia yang utuh dan bernilai positif dengan indikator-indikator kualitas antara lain adalah: sehat, sehingga mampu bekerja keras, tangguh dan ulet dalam menghadapi persoalan, cerdas berpikir dan bertindak, terampil dan memiliki kompetensi, mandiri, memiliki tanggung jawab, produktif, kreatif, inovatif, beorientasike masa depan, disiplin dan berbudi. Pengembangan sumberdaya manusia (SDM), yang juga merupakan subjek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hidup. Pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas, kuantitas dan persebaran penduduk. Kualitas SDM suatu daerah dikatakan membaik antara lain ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat dengan ukuran penilaian berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4. Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal

Maksud dari tujuan Misi ini adalah Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis ekonomi lokal yang ditandai dengan terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi,

meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari yang mendukung peningkatan pekenomian masyarakat khususnya di kampung-kampung. Perekonomian daerah dapat bergerak apabila sektor riil dapat bergerak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Sektor riil dapat bergerak hanya apabila investasi dapat masuk ke wilayah Papua yang tentunya didukung oleh iklim investasi yang kondusif mengingat potensi sumberdaya alam yang besar berupa pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan serta pariwisata. Perekonomian masyarakat dapat tangguh dan mencapai tingkat kesejahteraan yang merata berawal dari optimalisasi potensi unggulan yang berdaya saing serta didukung oleh sarana prasarana perekonomian yang memadai baik berupa jaringan irigasi, jaringan jalan, jaringan jembatan dan lapangan terbang. Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera menuntut pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas hingga ke perkampungan, serta berdaya saing tinggi didukung oleh pengusahaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan. Hal ini memberi pengertian antara lain bahwa pembangunan struktur perekonomian harus diperkuat dengan mendudukkan sektor industri berbasis potensi kampung sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisiensi, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Mencapai ketahanan ekonomi yang tangguh membutuhkan dukungan elemen masyarakat dimulai dari tingkatan paling bawah, sehingga dengan demikian faktor peningkatan pelayanan dasar pembangunan perkampungan harus menjadi faktor penting dan prioritas dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian daerah.

5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Maksud dari misi ini adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah diwujudkan dengan meningkatkan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah, meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni, meningkatkan ketersediaan air bersih, meningkatnya ketersediaan energi listrik dan ramah lingkungan. Selain itu terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten. Penyediaan dan percepatan infrastruktur yang lebih merata dan

terpadu yang ditujukan untuk mendukung perekonomian daerah dengan prinsip *Community dan Commodity Based Infrastructure, Integration dan Sustainability.* Ketiga Prinsip dan konsep dasar ini dimaksudkan bahwa pembangunan Infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diseluruh wilayah, pemacu pertumbuhan dan pengembangan wilayah, pembentukan struktur ruang dan Interaksi antar wilayah. Percepatan pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Pengembangan ekonomi tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Hingga saat ini, walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, namun kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di di wilayah ibukota kabupaten dan kota maupun di perkampungan kawasan cepat tumbuh. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas dalam pembangunan dalam lima tahun kedepan karena menjadi faktor pendorong utama untuk pencapaian keempat misi lainnya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan kriteria dan indikator-indikator makro sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi Provinsi Papua tahun 2013-2018. Penjabaran indikator makro keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Indikator Makro Pembangunan Tahun 2013-2018

No	Indikator	Kondisi Awal (2011)	Target Tahun 2018
1.	IPM	65,36	70.00
2.	Persentase penduduk Miskin	31,98%	25%
3	Laju pertumbuhan ekonomi riil	9,27%	> 7%
4	PDRB Perkapita	24,54 Jt	>30 Jt
5	Tingkat Konektivitas Antar Daerah	-	Meningkat

5.3. Tujuan danSasaran

Penetapan Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

- *Tujuan ditetapkan* dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.
- *Sasaran adalah* penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Papua dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta target. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaranadalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).
-

Tujuan dan Sasaran Misi 1

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius dan Berbudaya

Pembinaan dan pengamalan nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat penting dilaksanakan agar tercipta kehidupan yang aman, damai dan kondusif.

Terdapat 2 sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius.

Sasaran 2 : Meningkatnya Masyarakat Papua yang Berbudaya

Tujuan 2 : Meningkatkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua

Terciptanya rasa aman, tentram dan nyaman - baik terhadap gejolak sosial dan bencana alam -bagi seluruh masyarakat Papua merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Dengan rasa aman dan nyaman maka aktivitas pembangunan dapat berjalan dengan baik serta perekonomian daerah akan berkembang.

Terdapat 2 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua

Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua

Tujuan dan Sasaran Misi 2

Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel

Di era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima, serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

5 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi

Sasaran 4 : Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN

Sasaran 5 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik

Tujuan 2 : Mewujudkan Hubungan Kerja antara Provinsi dan Kabupaten/kota yang harmonis

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kontribusi hasil pembangunan 29 Kabupaten dan Kota merupakan agregat dalam pencapaian target-terget pembangunan di Provinsi oleh karena itu kerjasama yang harmoni harus diwujudnyatakan dalam bentuk sinkronisasi dan harminisasi pembangunan daerah secara integratif.

Terdapat 3 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota

Sasaran 2 : Terbentuknya Badan Koordinasi wilayah Pembangunan berdasarkan 5 wilayah Adat

Sasaran 3 : Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku)

Tujuan 3 : Mewujudkan Hubungan Kerja sama Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Hubungan yang harmoni antar lembaga yaitu Pemerintah Daerah, DPRP dan MRP merupakan salah satu syarat utama dalam Pelaksanaan Otsus di Papua sehingga Penerapan pelaksanaan Otsus untuk kesejahteraan masyarakat orang asli Papua dapat berjalan dengan konsisten.

1 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

Sasaran 1 : Terwujudnya Hubungan Kerjasama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Tujuan 4 : Mewujudkan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Secara Konsekuen

Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua harus dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan amanat UU 21 tahun 2001 dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ini diperlukan revitalisasi dan penguatan kewenangan daerah sehingga pembangunan di Papua berjalan sesuai dengan amanat dari UU Otsus itu sendiri.

Ada 2 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

Sasaran 1 : Rekonstruksi Undang-undang No. 21 Tahun 2001 menjadi Undang-undang Otonomi Khusus Plus (UU Pemerintahan Papua)

Sasaran 2 : Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.

Tujuan 5 : **Penataan Sistem Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang mencerminkan Kebutuhan Fungsi-fungsi Pemerintahan**

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan yang mencerminkan kebutuhan fungsi-fungsi pemerintahan.

Ada 3 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

Sasaran 1 : Tertatanya Sistem dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan

Sasaran 2 : Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan

Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya PolaPikir (*Mind set*) Aparatur Pemerintah Daerah

Tujuan dan Sasaran Misi 3

Sesuai dengan misi ketiga pembangunan daerah, yaitu; "**Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia**" maka terdapat 2 tujuan pokok yang akan dicapai oleh daerah, masing-masing adalah;

Tujuan 1 : **Meningkatkan Layanan Sosial Budaya dan Keagamaan**

Salah satu hal yang utama dalam mewujudkan kualitas SDM Papua adalah peningkatan Layanan Sosial Budaya dan Keagamaan berupa pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan peran lembaga keagamaan dan permpuan dalam pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan sosial, dan pengembangan nilai-nilai budaya.

Terdapat 5 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

Sasaran 1 : Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan

Sasaran 2 : Terwujudnya masyarakat religius

Sasaran 3 : Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas

Sasaran 4 : Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Sasaran 5 : Lestarinya budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua

Tujuan 2 : **Meningkatkan Kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika**

Peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Provinsi Papua dalam kurun waktu 5 tahun

kedepan yang didasarkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan.

Ada 4 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya prestasi olahraga
Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
Sasaran 3 : Terwujudnya masyarakat yang sehat
Sasaran 4 : Terwujudnya masyarakat yang Cerdas dan terampil

Tujuan dan Sasaran Misi 4

Sesuai dengan misi keempat pembangunan daerah, yaitu; "**Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal**" maka terdapat 2 tujuan pokok yang akan dicapai oleh daerah, masing-masing adalah :

Tujuan 1 : Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh Papua berbasis ekonomi lokal yang mandiri

Pengembangan perekonomian rakyat dengan komoditas-komoditas yang berorientasi pasar dengan nilai jual tinggi dengan Fokus perhatian pada pembangunan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat yang mencakup : pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, perdagangan dan jasa, koperasi dan UKM, industri, penanaman modal serta pertambangan dan energi. Basis kebijakan diarahkan pada pemberdayaan rakyat melalui peningkatan kapasitas dalam mengelola usaha yang pada akhirnya akan dapat mewujudkan Masyarakat Papua yang adil dan sejahtera.

Terdapat 7 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

Sasaran 1 : Terwujudnya iklim investasi yang kondusif
Sasaran 2 : Tercapainya stabilitas makro ekonomi
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah
Sasaran 5 : Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakatdan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah
Sasaran 6 : Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja
Sasaran 7 : Terselenggaranya promosi potensi kepariwisataan daerah

Tujuan 2 : Menciptakan pengelolaan SDA secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan

Pengelolaan SDA secara terpadu dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah serta tetap memperhatikan kelestarian serta kesinam bungan sehingga pengelolaannya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat Orang Asli Papua secara mandiri dan berkelanjutan.

Terdapat 2 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah ::

Sasaran 1 : Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat

Tujuan dan Sasaran Misi 5

Sesuai dengan misi kelima pembangunan daerah, yaitu; "**Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**" maka terdapat 2 tujuan pokok yang akan dicapai oleh daerah, masing-masing adalah :

Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah

Pembangunan Infrastruktur meliputi transportasi, air bersih, listrik dan telekomunikasi dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan kemandirian kampung. Untuk pengembangan transportasi meliputi jalan dan jembatan, prasarana dan sarana perhubungan darat, laut, udara dan ASDP. Pembangunan jaringan transportasi terpadu tersebut untuk membuka akses untuk menerobos isolasi wilayah, maupun membuka akses keluar untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi, permukiman penduduk dan perdagangan di dalam dan di luar negeri.

Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan baru secara otomatis telah mendorong terbukanya daerah-daerah terisolir yang dilakukan oleh kabupaten-kabupaten untuk membuka wilayah-wilayah distrik. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara tidak langsung juga telah mengakibatkan terbukanya akses secara kewilayahan di Provinsi Papua. Selain itu Pengembangan jaringan transportasi mendukung pembangunan kawasan tumbuh cepat yang memiliki potensi dan komoditas unggulan masing-masing.

Ada 6 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah

Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah

Sasaran 3 : Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antar wilayah

Sasaran 4 : Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni

Sasaran 5 : Meningkatnya pemenuhan air bersih

Sasaran 6 : Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan

Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan berkelanjutan

Pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua dalam proses pembangunan ke depan. Pelaksanaan pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan yang seimbang dan lestari mutlak diperlukan guna menjaga sumber daya alam sehingga tidak rusak dan terpelihara secara sistematis, dengan mempertahankan kawasanhutan minimal 90 persen dan kawasan lindung 60 persen.

Terdapat 4 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

Sasaran 1 : Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten

Sasaran 2 : Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia

Sasaran 3 : Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan

Sasaran 4 : Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan

Gambaran keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Papua

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
Misi 1 : MewujudkanSuasana Aman,Tentram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI						
1	Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius dan Berbudaya	1 Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius.	1 Konflik SARA	Kasus	Masih Ada	Tidak Ada
			2 Penanganan Napza	%	40	95
		2 Meningkatnya masyarakat Papua yang berbudaya	1 Tingkat aktualisasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	Kondisi	Rendah	Meningkat
			2 Frekwensi Dialog Lintas Budaya	Pertemuan	Tidak Rutin	Rutin
2	Meningkatkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua	3 Meningkatnya rasa aman, tentram, dan nyamandanketa atan hukumseluruh masyarakat Papua	1 Rasio Kriminalitas	%		
			2 Tingkat Konflik Horisontal (antar suku)	Kasus	Masih Ada	Menurun
			3 Pelanggaran Hukum & HAM	Kasus	Masih Ada	Tidak Ada
			4 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Kasus	Tinggi	Menurun
			5 Bencana alam	**Kasus**	**Masih ada**	**Menurun**
		4 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua	1 Tingkat partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan	Kondisi	-	Meningkat
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus						
1	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesionalismed anAkuntabel	1 Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1 Temuan Pelanggaran Aparatur	Kasus	-	Menurun
		2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase SKPD yang memiliki Renstra	%	85%	100%
			2 Persentase penyampaian dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu (RPJMD,RKPD,KUA dan PPAs)	Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
				Kualitas	-	Tersedia dan Akurat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
		3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1 Tingkat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	-	60
			2 Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	-	100
			3 Jumlah SKPD yang memberikan informasi melalui Teknologi Informasi	%	-	90%
			4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	-	Meningkat
		4 Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1 Persentase temuan (kasus) keuangan hasil audit yang dapat ditindaklanjuti	%	-	100
			2 Persentase nilai temuan keuangan hasil audit yang dapat ditindaklanjuti	%	100	100
		5 Terwujudnya PengelolaanKeuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik	1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
			2 Persentase Penyampaian Laporan Keuangan dari SKPD tepat waktu	%	-	Proporsi Belanja Publik Lebih Besar
2	Mewujudkan Hubungan Kerja antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang harmonis	1 Meningkatnya Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota	1 Tingkat Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/Kota	MOU	-	Meningkat
			2 Tingkat Kerjasama antar Kabupaten/Kota	MOU	-	Meningkat
		Meningkatnya Koordinasi Wilayah 2 Pembangunan berdasarkan 5 wilayah Adat	1 Pembangunan Berdasarkan 5(lima) Wilayah Adat	Kualitas	-	Pembagian Wilayah Pembangunan berdasarkan 5 (wilayah)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
3	Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Secara Konsekuen Penataan Sistem Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang mencerminkan Kebutuhan Fungsi-fungsi Pemerintahan	1 Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku)	1 Frekwensi Kerjasama tiga tungku	%	-	Meningkat
			2 Pembangunan Berdasarkan 5(lima) Wilayah Adat	%	-	Pembagian Wialayah Pembangunan berdasarkan 5 (wilayah)
		2 Terwujudnya Hubungan Kerjasama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.	1 Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan	%	50	90
			2 Ditetapkan seluruh Perdasus dan Perdasi sesuai Amanat Undang-undangOtsus	Dokumen	-	Tersedianya Perdasus dan Perdasi
			3 Mengawal Implementasi Kebijakan Otsus secara Konsisten	Kualitas	-	Konsisten
		3 Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.	1 Tersususnnya Undang-Undang Otonomi Khusus yang telah rekonstruksi	Rancangan	-	RUU
			2 Tingkat Pendidikan Orang Asli Papua	%	-	Meningkat
			3 Angka Harapan hidup Orang Asli Papua	%	-	Meningkat
			4 Proporsi Keluarga Orang Asli Papua yang memiliki Rumah Layak Huni	%	-	Meningkat
			5 Proporsi KAT berdaya Sosial	%	-	Meningkat
			6 Jumlah Penduduk Miskin Orang Asli Papua	%	-	Menurun
		4 Terwujudnya Hubungan Kerjasama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah, DPRP dan MRP	1 Perdasus dan Perdasi yang Ditetapkan	Perda	54 Perdasi & Perdasus	Menyelesaikan semua Perdasi dan Perdasus

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
4		1 Tertatanya Sistem dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan	1 Tingkat Efisiensi dan efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kualitas	-	Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Proporsional
		2 Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan	1 Kelembagaan Pemerintahan Daerah yang miskin Struktur kaya Fungsi	Perda	-	Perdasi Tentang Susunan organisasi dan Kelembagaan Daerah (Ditetapkan)
		3 Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya PolaPikir (Mind set) Aparatur Pemerintah Daerah	1 Persentase pegawai yang sudah mengikuti diklat struktural dari seluruh pejabat struktural	%	-	100
			2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal sarjana	%	-	75
Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia						
1	Meningkatkan Layanan Sosial Budaya dan Keagamaan	1 Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan	1 Laju pertumbuhan penduduk	%	5,39	Dibawah 3,00
			2 Persentase Kab/kota yang telah menerapkan Sistem Kependudukan secara Nasional	%	-	100
		2 Terwujudnya masyarakat yang religius	1 Penggunaaan Narkotika dan pemakaian Zat Adiktif	Kasus	394	< 500
			2 Jumlah Konflik akibat SARA	Kasus	-	Tidak Ada
			3 Tingkat Kriminalitas	%	-	Rendah
		3 Terwujudnya layanan sosial yang berkualitas	1 Cakupan KAT	%	60	80
			2 Jumlah Kelompok PMKS yang dibina	Klp	-	300
		4 Terwujudnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1 Indeks Pembangunan Gender	%	61,98	> 63
			2 Indeks Pemberdayaan Gender	%	55,42	> 60
		5 Lestarinya budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua	1 Apresiasi dan aktualisasi terhadap seni dan budaya	%	Menurun	Meningkat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
2	Meningkatkan Kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika	1 Meningkatnya prestasi olahraga	1 Prestasi Papua pada perhelatan olahraga tingkat Nasional (PON)	Prestasi	Posisi dalam PON urutan 15 dari 33 Provinsi	Posisi dalam PON masuk 10 besar
			2 Jumlah Cabang Olah Raga yang diikuti dalam PON	Cabang		
			3 Partisipasi Atlit Papua di Iven Nasional dan Internasional	Atlit/cabang olah raga		Meningkat
			4 Jumlah pelatih yang bersertifikasi Nasional	Orang		
		2 Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan	1 Jumlah Pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	Orang	-	5.000 orang
			2 Jumlah wirausaha muda asli Papua	Orang	-	1.000 wirausaha
		3 Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1 Usia Harapan Hidup	Tahun	68,85	70,00
			2 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	/100.000 KH	344	250
			3 Proporsi Kelahiran yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih	%	35	> 85
			4 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	/1.000 KH	35	21
			5 Prevalensi Kekurangan Gizi pada anak balita (%)	%	16,2	15
			6 Kasus Malaria (API per 1.000 penduduk	/1000	58	45
			7 Cakupan Imunisasi dasar (persen)	%	21,3	80
			8 Penanganan Penderita HIV/AIDS yang DITEMUKAN mendapatkan ARV	%	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
		4 Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1 Angka Melek Huruf	%	68,85	90
			2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,7 Tahun	9 Tahun
			3 Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)	%		
			- SD		84,59	> 100
			- SMP		68,69	> 80
			- SMA		47,69	> 60
			4 Angka Partisipasi Murni (APM) (%)	%		
			- SD		70,13	> 80
			- SMP		46,03	> 55
			- SMA		32,45	> 45
			5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)	%		
			- 7 - 12 Tahun		73, 36	> 85
			- 13 - 15 Tahun		71,29	> 80
			- 16 - 18 Tahun		50,55	> 60
			6 Kemampuan Baca-Tulis-Berhitung SD kelas 3	%	-	100
			7 Penemuan dan Pemanfaatan TTG	Temuan	-	50
Misi 4 : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal						
1	Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh Papua berbasis ekonomi lokal yang mandiri	1 Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1 Jumlah Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp/thn	19,47 Trilyun	35 Trilyun
			2 Jumlah investor (PMA dan PMDN)	Proyek	137	200

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
		2 Tercapainya stabilitas makroekonomi	1 Pertumbuhan ekonomi	%	9,27	> 7
			2 PDRB Perkapita	Rp/thn	24,54 Juta	>30 juta
			3 Indeks Gini	%	0,42	0,3
		3 Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK	1 Persentase jumlah UMKM yang berdaya saing	%	-	70
		4 Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah	1 Persentase jumlah Koperasi yang berdaya saing	%	-	75
			2 Cakupan jumlah UMKM yang di bina oleh Pemerintah	%		
		5 Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1 Persentase Angka Penganguran Terbuka	%	3,9	3,0
			2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	78,45	80
		6 Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah	1 Jumlah PDRB dari sektor Pariwisata	Rp/thn		
			2 Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	%		
2	Menciptakan pengelolaan SDA secaraterpadudgnmemperhatikan penataanruang dan kelestarian lingkungan	1 Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat	1 Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton/thn	512.475	700 ribu
			2 Jumlah Produksi tanamanperkebunan dan holtikultura	Ton/thn		
			3 Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	%	1,36	3,00
			4 Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	1,53	5,00
			5 Persentase pengendalian penyakit menular	%	-	
			6 Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton/thn	269,257	500 ribu
			7 Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton/thn	4,350	10 ribu
			8 Kontribusi sub sektor pertambangan terhadap PDRB	%	32,3	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
		2 Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat	1 Paritas daya beli	Juta/tahun		
Misi 5 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan						
1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah	1 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1 Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap(baik dan sedang)	%	Jalan Prov : Mantap 43 %,	Jalan Prov. Mantap 60%
				%	Jalan Nasional : Mantap 68 %	Jalan Nasional Manta 85%
				%	Jalan Kabupaten : Mantap 29 %	Jalan Kab.Mantap 55%
			2 Terbangunnya jaringan jalan PKN-PKW, antar PKW serta PKW-PKL	Kondisi	Jayapura-Sarmi 365 Km kondisi Mantap	Terpelihara dan fungsional
				Kondisi	Jayapura-Arso 53 Km Mantap	Terpelihara dan fungsional
				Kondisi	Jayapura-Wamena 533 Km	Terhubungkan
				Kondisi	Merauke-Keppi	Terhubungkan
				Kondisi	Merauke-Tanah merah-Mindiptana-Oksibil	Terhubungkan dari tanah merah ke Oksibil
				Kondisi	Nabire-Dogiyai-Deiyai-Paniai 262 KM	Terhubungkan
				Kondisi	Wamena-Karubaga-Tayeve-Sarmi	Terhubungkan
				Kondisi	Wamena-Habema-Kenyam-Nduga 100 Km	Terhubungkan
				Kondisi	Wamena-Tiom-Mulia	Wamena-Tiom-Mulia-Enarotali-Nabire

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
			3 Tingkat ketersediaan dan fungsional bandara	Fungsional	Bandara Sentani : Pelayanan Regional, Domestik	Pelayanan Regional, Domestik & Internasional
				Fungsional	Bandara Moppa Merauke : Pelayanan Regional, Domestik	Pelayanan Regional & Domestik
				Fungsional	Bandara Moses Kilangi : Pelayanan Regional, Domestik	Pelayanan Regional, Domestik & Internasional
				Fungsional	Bandara Frans Kaisepo : Pelayanan Regional, Domestik	Pelayanan Regional, Domestik & Internasional
			4 Tingkat ketersediaan dan fungsional pelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)	Fungsional	Pelabuhan jayapura : Pelayanan Penumpang& Barang	Pelayanan Penumpang
				%	Pelabuhan Depapre : Tahap Pembangunan	50
				Fungsional	Pelabuhan Kelapa Dua Merauke : Pelayanan Penumpang & Barang	Pelayanan Penumpang & Barang
				Fungsional	Pelabuhan Pomako : Pelayanan Penumpang& Barang	Pelayanan Penumpang , Barang, Eksport & Import Barang
				Fungsional	Pelabuhan Biak : Pelayanan Penumpang & Barang	Pelayanan Penumpang , Barang, Eksport & Import Barang
				Fungsional	Pelabuhan Serui : PelayananPenumpang & Barang	Pelayanan Penumpang & Barang
				Fungsional	Pelabuhan Sarmi : PelayananPenumpang & Barang	Pelayanan Penumpang & Barang
				Fungsional	Pelabuhan Nabire : Pelayanan Penumpang& Barang	Pelayanan Penumpang & Barang
				Fungsional	Pelabuhan Waropen : Pelayanan Penumpang& Barang	Pelayanan Penumpang & Barang
		2 Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1 Prosentase cakupan sistem jaringan sumberdaya air terhadap irigasi	%	-	100%
			2 Prosentase cakupan sistem Pengendalian banjir dan abrasi	%	-	100%
			3 Tingkat ketersediaan air tanah	M3/thn	18.075 Jt M³/Thn	?

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
		3 Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	1 Prosentase ibu kota distrik yang terlayani Sistem Komunikasi dan informasi	%	-	60
		4 Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan	1 Rasio elektrifikasi	%		
			2 Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif		-	1.000
			3 Daya terpasang		142.723 Kw	
		5 Meningkatnya ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni	1 Tingkat ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni	Rumah	-	13.000 rumah layak huni tersebar di seluruhkab/kota
		6 Meningkatnya ketersediaan air bersih	1 cakupan pelayanan air bersih	%	sebagian besar masyarakat belum terlayani air bersih	Semakin Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih
2	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan	1 Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	1 Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	< 50 %	> 75 %
		2 Papua sebagai paru-paru dunia	1 Emisi GRK	tCO2eq	640.737.952 tCO_2eq (Tahun 2010)	640.737.952 tCO2eq
			2 Serapan GRK	tCO_2eq	894.359.816 tCO_2eq (Tahun 2010)	> 894.359.816 tCO2eq
			3 Luas tutupan hutan primer dan sekunder	Ha	25.131.606 Ha (79,52%) Tutupan 2009	≤ 25.131.606 Ha (79,52%
		3 Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan	1 Prosentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan.	%	-	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
		4 Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan	1 Prosentase pemangku kepentingan yang memahami pembangunan berkelanjutan	%	-	100%
			2 Dokumen perencanaan yang mengakomodir pembangunan berkelanjutan	%	-	100%

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI









BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua. Sumber daya alam Tanah Papua yang berlimpah harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Sumber daya yang dapat diperbaharui dikelola dengan memperhatikan kelangsungan fungsi-fungsi ekologis sehingga tetap lestari dan produktif, sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Sehubungan dengan itu maka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mencapai suatu masyarakat dan wilayah Papua yang damai, sejahtera dan aman serta didukung oleh sarana dan prasarana fisik kewilayahan yang mampu membuka akses ekonomi dan menerobos keterisolasian sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua maka akan diterapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

6.1.1 Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan

5 (Lima) Prinsip dasar pembangunan adalah :

1. Perlindungan (*Protection*), sesuai amanat Undang-undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa kebijakan pembangunan Provinsi Papua diarahkan pada perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.

2. Keberpihakan (*Affirmative*), Afirmatif bagi orang asli Papua adalah kebijakan diskriminasi positif yang diambil dengan tujuan agar Orang Asli Papua memperoleh kesempatan mendapatkan layanan yang lebih dengan alasan perbedaan kondisi awal sehingga dapat memperoleh peluang yang setara untuk bersaing dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.
3. Pemberdayaan (*Empowerment*), bahwa arah kebijakan pembangunan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan.
4. Keberlanjutan (*sustainibility*), Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
5. Keterpaduan (*Integrated*), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua tahun 2013-2018 harus mampu memperkuat sinergi antar bidang, antar ruang dan waktu**.** Setiap SKPD pelaksana pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta pengendalian, monitoring, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.
6. Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), bahwa pelaksanaan pembangunan wajib mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun nilai-nilai dasar pembangunan 5(lima) tahun kedepan adalah :

1. **Kecukupan (sustenance)** : pembangunan diarahkan agar masyarakat merasa tercukupi semua kebutuhan dasar (basic need) seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. **Jati diri (Self Esteem)** : pembangunan membentuk motivasi seluruh masyarakat untuk berkeinginan untuk maju atau *need achivement*, menghargai diri sendiri & memiiki rasa percaya diri yg tinggi.
3. **Kebebasan (Freedom)** : pembangunan dilaksanakan dengan mendorong nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sehingga masyarakat bebas dalam bersikap dan berprilaku, rasa takut, perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan stigmasasi.

6.1.2 Orientasi Pembangunan

Orientasi pembangunan adalah pandangan yang menjiwai seluruh arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, yaitu :

1. **Pembangunan yang bertumpu pada rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat (People Centered Development).**

   Seluruh kebijakan pembangunan sebesar-besarnya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Untuk itu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan adat masyarakat lokal. Sehingga pelayanan kepada masyarakat hendaklah merupakan Harapan Seluruh Rakyat (**HASRAT**) Papua khususnya Rakyat yang berada di kampung-kampung. Oleh karena itu HASRAT PAPUA seperti Pendidikan yang bermutu dan terjangkau, pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah, kemandirian perekonomian masyarakat, peningkatan pelayanan sosial, dan pemenuhan infrastruktur dasar akan menjadi prioritas utama pembangunan dalam lima tahun kedepan dan Pembangunan manusia merupakan indikator utama mengukur akselerasi perkembangan pembangunan selama lima tahun ini.

2. **Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (*Growth*), Pemerataan (*Equity*) dan Berkelanjutan (*Sustainable*)**

   Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata sehingga dampak pertumbuhan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Kebijakan pembangunan ekonomi tidak semata-mata mengejar pertumbuhan tapi yang paling esensial adalah dampak dari pertumbuhan itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Prinsip pembangunan ekonomi dilakukan melalui: Perubahan Pola Pikir, Pengwilayahan Komoditas, dan Petik Olah Jual. **Perubahan pola pikir** dimaksudkan bahwa masyarakat khususnya Orang Asli Papua akan ditingkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola Sumber Daya lokal yang ada disekitarnya sehingga menjadi dapat bernilai ekonomi sekaligus dapat memenuhi kebutuhannya. **Pengwilayahan Komoditas** diartikan bahwa prioritas pengembangan perekonomian daerah didasarkan pada komoditas unggulan setiap wilayah atau daerah. **Petik, Olah dan Jual** dimaksudkan bahwa menyiapkan sistem pemasaran yang terintegrasi dari saat panen, pasca panen dan pemasaran atau penjualan. Oleh karena itu Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan lima tahun ke depan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan pembangunan yang terjadi, merupakan suatu indikator antara bukan hasil akhir yang akan dicapai.

   Selain itu pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan menghormati hak-hak adat masyarakat setempat. Pelaksanaan pembangunan harus dengan pendekatan **KASIH**, menjadikan pembangunan yang

dilaksanakan dapat menghilangkan perasaan masyarakat Papua terhadap bentuk *ketidakadilan*, *marginalisasi, ketimpangan dan diskriminasi*. Sehingga dengan pendekatan Kasih ini akan menghilangkan konflik dalam masyarakat dan pembangunan dapat terus terjaga dan terpelihara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sejalan dengan itu pembangunan juga harus memperlihatkan perencanaan dan pentahapan yang jelas serta sistematis, sehingga dapat berkesinambungan.

3. **Kewilayahan Dinamis Terpadu (*Spasial Dinamic Integrated*)**

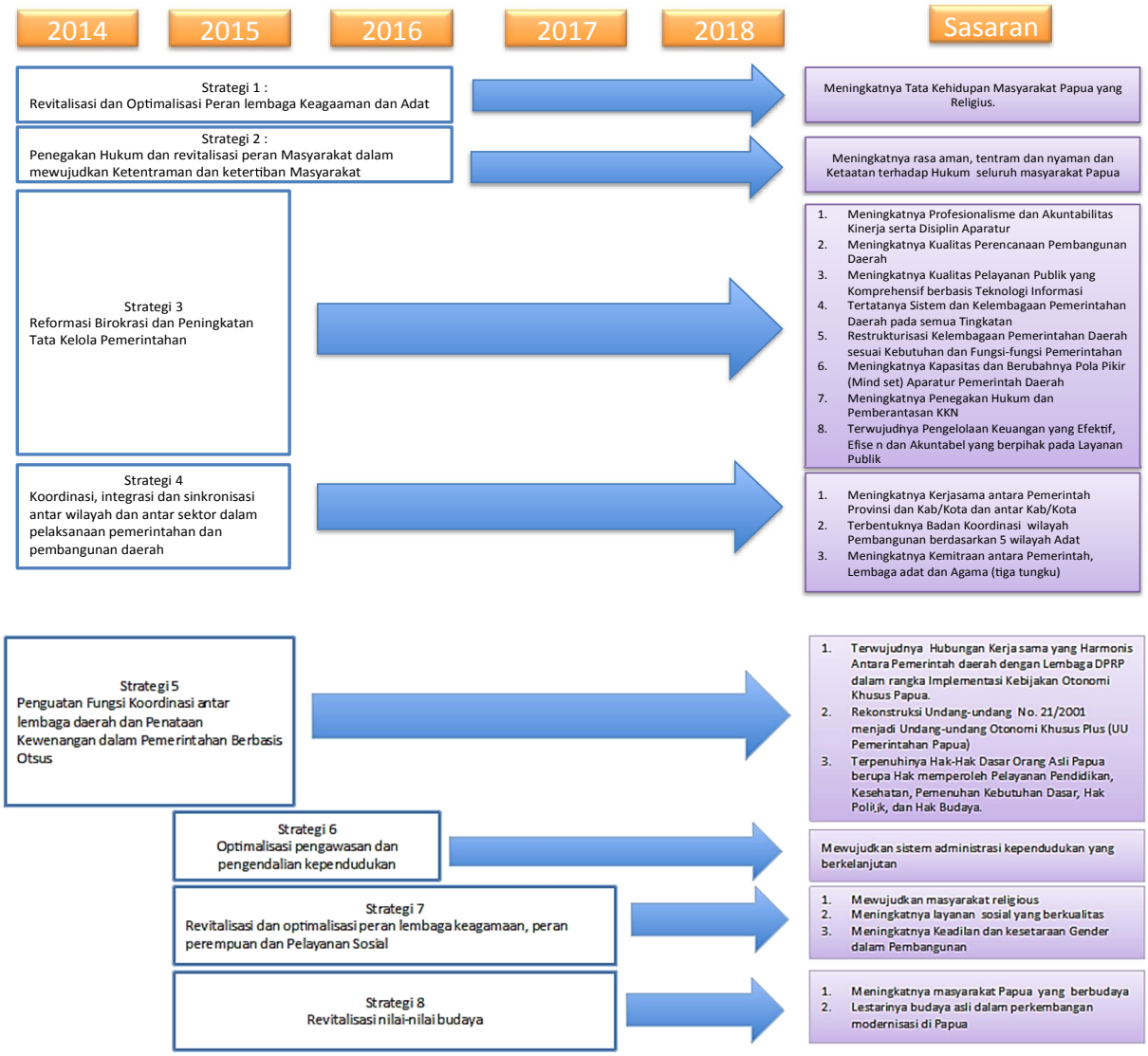
   Pembangunan berorientasi pada pengembangan wilayah dan integrasi seluruh wilayah. Penyediaan Infrastruktur wilayah diarahkan pada menghilangkan ketimpangan antar wilayah dengan menerapkan prinsip keadilan pembangunan antar wilayah. Pengembangan wilayah dan penyediaan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan kemandirian kampung, dan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang.Selanjutnya pembangunan kewilayahan ini akan difokuskan pada beberapa wilayah prioritas berdasarkan 5 (lima) wilayah satuan adat.

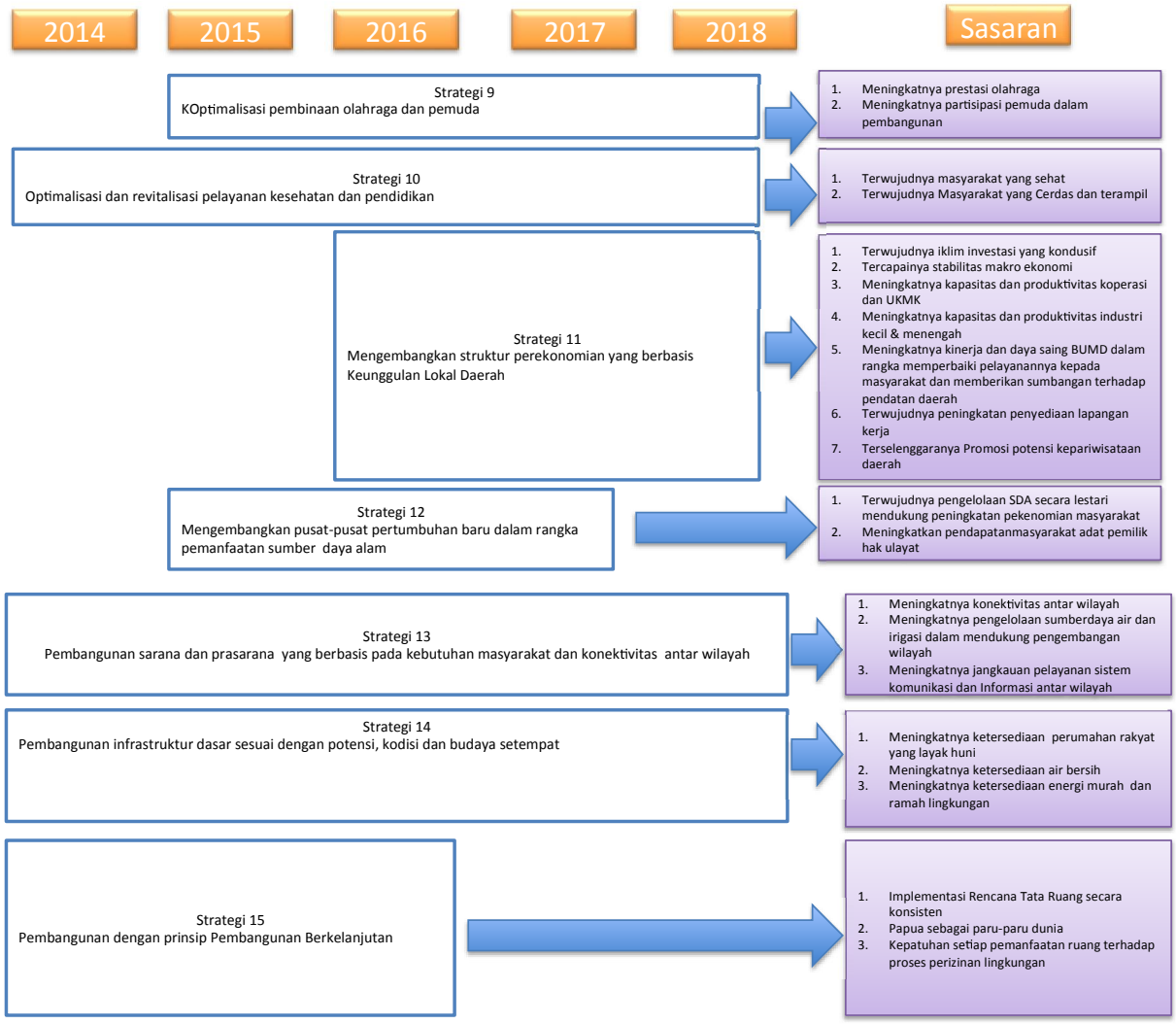
6.1.3 Strategi Pencapaian Sasaran

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangun.

Strategi Pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 6.1 Strategi dan Jangka Waktu Pencapaiannya





Dari tabel 6.1, dapat dijelaskan maksud dari masing-masing strategi diatas, sebagai berikut :

a. Strategi 1: Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat

Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat dalam rangka mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius dan meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua.

Strategi Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat diprioritaskan dari tahun 2014-2015, diharapkan dengan dijalankannya strategi Revitalisasi dan opltimalisasi peran lembaga keagamaan dan adat pada 2(dua) tahun pertama agar tercipta suasana yang kondusif dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga stabilitas dan kontinuitas pembangunan dapat terjaga dan berjalan dengan baik.

b. Strategi 2: Penegakan Hukum dan revitalisasi peran Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat

Strategi Penegakan Hukum dan revitalisasi peran Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat diprioritaskan tahun 2014-2015, diarahkan pada meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua, dengan mendorong Komunikasi yang Intensif antara Aparat Penegak Hukum, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan dengan dijalankannya strategi ini, maka akan tercipta suasana yang kondisif untuk mendukung berlangsungnya pembangunan dan akan mendorong pertumbuhan perekonomian Papua khususnya laju Investasi masuk ke Papua.

c. Strategi 3: Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Strategi Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur, meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi, Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan,, Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi, meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya Pola Pikir (Mind set) Aparatur Pemerintah Daerah, Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN dan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik.

Strategi reformasi birokrasi diprioritaskan dilaksanakan pada tahun 2014-2015. Diharapkan dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi pada 2 (dua) tahun pertama agaraparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya sehingga dapat memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik tersebut harus memenuhi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas.

d. Strategi 4 : Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar wilayah dan antar sektor dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah

Strategi Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar wilayah dan antar sektor dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah diprioritaskan pada tahun 2014, diarahkan pada membangun Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota, pembentukan Badan Koordinasi wilayah Pembangunan berdasarkan 5(lima) wilayah adat, dan Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku). Dengan berjalnya strategi ini pelaksanaan pembangunan

daerah akan terintegrasi dan bersinergi antara Provinsi dan Kab/kota atau antara Kabupaten dan Kota serta sinergi dan kemitraan antara pemerintah, lembaga adat dan agama. Dengan dilaksanakannya strategi ini pada awal pelaksanaan RPJMD merupakan pondasi atau dasar pelaksanaan pembangunan daerah karena pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah (Provinsi dan seluruh kabupaten/kota), agama dan adat saling bergandengan tangan mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

e. Strategi 5 : Penguatan Fungsi Koordinasi antar lembaga daerah dan Penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Berbasis Otsus

Strategi Penguatan Fungsi Koordinasi antar lembaga daerah dan Penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Berbasis Otsus, dalam rangka mewujudkan Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua, Rekonstruksi Undang-undang No. 21/2001 menjadi Undang-undang Otonomi Khusus Plus (UU Pemerintahan Papua) dan pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya. Strategi ini diprioritaskan pada tahun 2014, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai arah dan amanah dari UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua untuk pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.

f. Strategi 6 : Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian kependudukan

Strategi Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian kependudukan, diarahkan pada terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkenjutan, melalui Penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, penyediaan data kependudukan yang akurat khususnya Orang Asli Papua yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan, penyediaan hasil kajian kependudukan. Dengan pelaksanaan strategi ini yang diprioritaskan pada tahun 2015-2016 diharapkan layanan sosial akan terlaksanan dengan baik dan tepat sasaran khususnya bagi Orang Asli Papua.

g. Strategi 7 : Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial

Strategi Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial, akan diprioritaskan pada tahun 2015-2017 dalam rangka mewujudkan layanan sosial yang berkualitas dan Keadilan dan kesetaraan Gender dalam

Pembangunan dengan Mendorong kemandirian peran lembaga keagamaan, Pembinaan dan pemberdayaan PMKS dan KAT, Memfasiltasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

h. Strategi 8 : Revitalisasi nilai-nilai budaya

Strategi Revitalisasi nilai-nilai budaya diarahkan dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua, dengan diprioritaskan pada Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; Pengembangan kesenian yang berbasis budaya; Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; Pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal; Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (seni dan budaya) melalui pelatihan dan pendampingan pada pelaku ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya serta pengembangan kampung wisata yang berbasis seni dan budaya dengan berdasarkan 5 wilayah adat. Strategi Revitalisasi nilai-nilai budaya diprioritaskan pelaksanaannya pada tahun 2015-2017.

i. Strategi 9 : Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda

Strategi Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda, diarahkan pada Mendorong pembinaan Olahraga berprestasi dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan internasional melalui Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga berstandar Nasional dan Internasional dalam rangka persiapan pencalonan Papua sebagai Tuan Rumah PON 2020, Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini. Selain itu strategi ini juga diarahkan pada Mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan melalui Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkan pemuda yang unggul dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan. Strategi Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda akan diprioritaskan pada tahun 2015-2018.

j. Strategi 10 : Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan

Strategi Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas, melalui Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan Kesehatan dengan mengoptimalkan peran lembaga-

lembaga agama dan sosial lainnya, Mendekatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas secara merata diseluruh wilayah, Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga agama serta Mendekatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Strategi Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan prioitas utama pembangunan selama 5 (lima) tahun yang merupakan program Harapan Seluruh Rakyat Papua (HASRAT Papua).

k. Strategi 11 : Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis Keunggulan Lokal Daerah

Strategi mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis Keunggulan Lokal Daerah, akan diprioritaskan pada tahun 2016-2018 diharapkan dengan berjalannya strategi ini akan mewujudkan iklim investasi yang kondusif, Tercapainya stabilitas makro ekonomi, Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah, Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, serta Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah.

l. Strategi 12 : Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam

Strategi Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam akan diprioritaskan pada tahun 2015-2017, diharapkan akan mewujudkan Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat melalui Mendorong pertumbuhan wilayah2 strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah shg dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yg dapat menggerakan wilayah tertinggal. Selain itu juga akan mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi hasil hutan dan SDA lainnya.

m. Strategi 13 : Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah

Strategi Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah, merupakan strategi yang mendukung

pelaksanaan seluruh strategi yang ada dengan demikian strategi ini merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan RPJMD ini. Strategi ini diarahkan untuk mewujudkan Meningkatnya konektivitas antar wilayah, Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah serta Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah. Prioritas pembangunan pada strategi ini diarahkan pada Pengembangan wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan sarana dan prasarana untuk mengurangi kesenjangan inter dan antar wilayah. Strategi Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah akan diprioritas selama 5 (lima) tahun dari 2014-2018.

n. Strategi 14 : Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kodisi dan budaya setempat.

Strategi Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kodisi dan budaya setempat, akan diprioritaskan pelaksanaannya dari tahun 2014-2018. Diharapkan dengan pelaksanaan strategi ini akan:

1. Meningkatkan pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni;
2. Meningkatnya ketersediaan layanan air bersih, serta
3. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan.

Prioritas strategi Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kodisi dan budaya setempat yaitu :

1. Mempercepat Pembangunan Pemanfaatan energi murah dan ramah lingkungan;
2. Rumah layak huni;
3. Sarana Prasarana air bersih.

o. Strategi 15 : Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

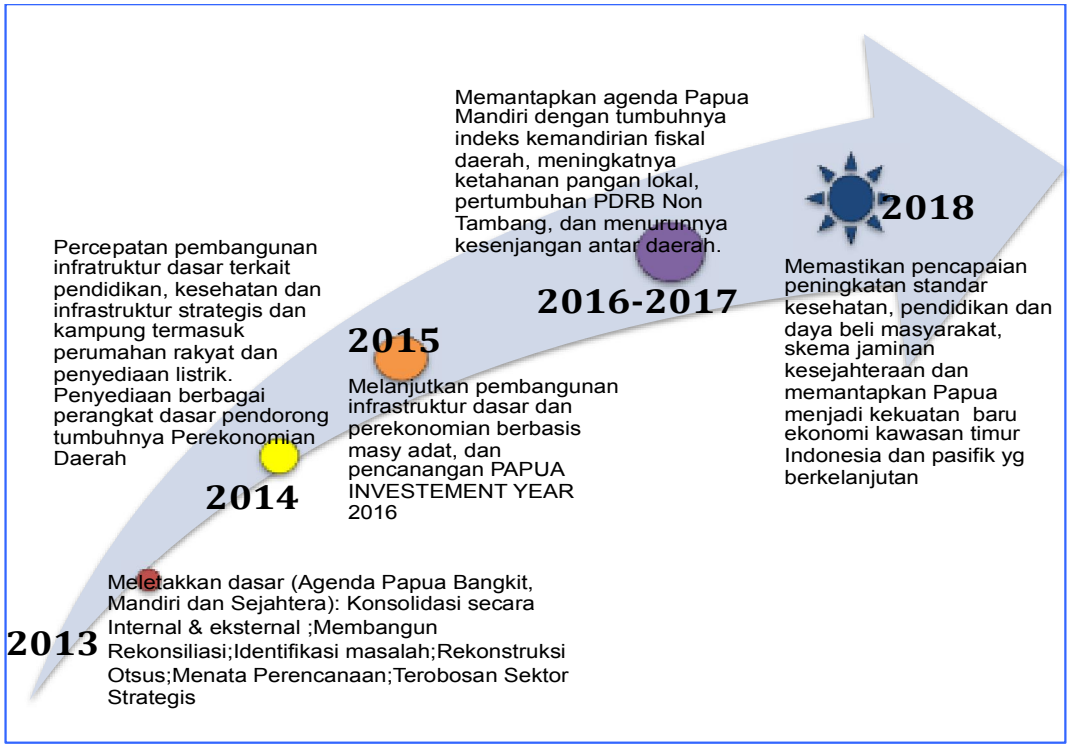
Strategi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan akan diprioritaskan pada tahun 2014-2015, diharapkan dengan pelaksanaannya akan mewujudkan Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten, Papua sebagai paru-paru dunia, serta Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan. Prioritas strategi ini diarahkan pada Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan, Peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap rencana tata ruang, Memperkuat implementasikan RAD GRK, Membangun *Green Investment,* Peningkatan kualitas lingkungan, Peningkatan kapasitas sistem perizinan lingkungan, serta Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.

6.2. Arah Kebijakan

6.2.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan

Arah kebijakan Provinsi Papua merupakan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Pentahapan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar 6.1 sebagai berikut:

Gambar 6.2 Fokus Pembangunan Provinsi Papua 2013-2018

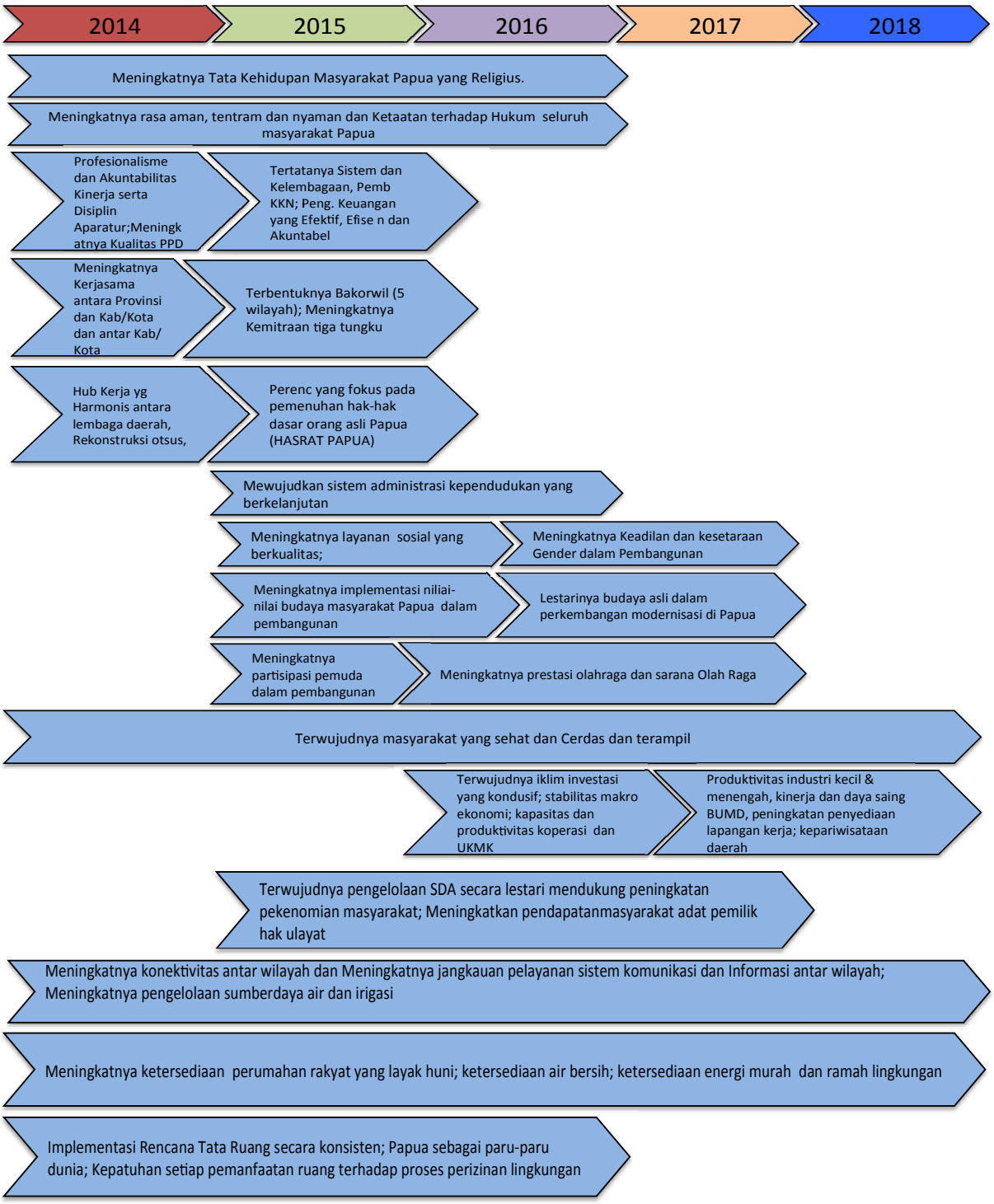


Fokuspembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun, akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan fokus pembangunan tiap tahunnya disusunlah arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan pembangunan Papua selama lima tahun ditetapkan seperti pada gambar sebagai berikut:

Gambar 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua



Tahun 2013 merupakan tahun untuk meletakkan dasar (Agenda Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera) dengan kelengkapan dokumen perencanaan strategis,Proporsi dana Otsus, Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi .

Arah Kebijakan Tahun 2014

Pembangunan Provinsi Papua tahun 2014 diarahkan pada: 1)Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius; 2)Terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hukum; 3)Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; 4)Terwujudnya kerjasama antara pemerintah provinsi dan Kab/kota serta antar kab/kota; 5)Terwujudnya kemitraan pemerintah, agama dan adat, 6)Terwujudnya hubungan harmonis antara lembaga daerah, rekonstruksi otsus, peningkatan pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua;7)Pelestarian budaya asli Papua;8)Terwujudnya masyarakat sehat; 9)Terwujudnya masyarakat cerdas dan terampil; 10)Meningkatnya konektivitas antar wilayah; 11)Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik;dan 12)Implementasi tata Ruang secara konsisten.

1. **Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius**, merupakan langkah awal pembangunan tahun 2014 yang diarahkan pada :
   a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan;
   b. Menjamin kebebasan setiap Umat Beragama dalam menjalankan ajaran Agamanya;
   c. Memfasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan, Bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan Yayasan Pengelola Pendidikan Keagamaan;
   d. Memfasilitasi terciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial Lainnya;
   e. Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Adat dalam Hal Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Pemantapan Keterwakilan Etnik Orang Asli Papua dalam lembaga MRP, Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga MRP.
2. **Terciptanya terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hukum**, merupakan prioritas tahap tahun 2014 yang diarahkan pada:
   a. Peningkatan Peran Aparatur Penegak Hukum dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan;
   b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan.
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**, merupakan langkah awal dalam pembangunan tahun 2014, yang diarahkan pada:
   a. Penataan Sistem Kepegawaian dan Penyelenggaraan Pendidikan Formal /Non Formal bagi Aparatur;
   b. Penerapan Standar Oprasional dan Standar Pelayanan minimum (SOP & SPM);

c. Pengembangan sisten Reward dan Punishmen serta jenjang karier yang jelas dalam peningkatan kualifikasi SDM Aparatur;
d. Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal;
e. Penerapan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) dalam mendukung konsistensi perencanaan dan penganggaran;
f. Penerapan Perencanaan Pembangunan berbasis Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
g. Mengoptimalkan Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah;
h. Menerapkan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan serta Pemanfaatan IPTEK untuk Peningkatan Daya Saing Daerah;
i. Peningkatan Kapasitas Aparat penegak Hukum, peningkatan Keasadaran Masyarakat terhadap Hukum dan Paeraturan Perundang-undangan yang berlaku;
j. Memantapkan Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Pengintegrasian Perencanaan, Penganggaran serta Pengawasan

Diharapkan dengan arah kebijakan ini akan terbentuk aparatur daerah yang profesional dan peka terhadap permasalahan masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dengan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah maka akan mendukung peningkatan perekonomian daerah khususnya pertumbuhan Investasi daerah.

4. **Terwujudnya kerjasama antara pemerintah provinsi dan Kab/kota serta antar kab/kota**, merupakan dasar dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan sinergitas pembangunan daerah, yang diarahkan pada:
   a. Inisiasi pembentukan Badan Koordinasi Wilayah Pembangunan berdasarkan 5 wilayah adat.
   b. Terwujudnya kemitraan pemerintah, agama dan adat menjadi dasar untuk menjaga dan memelihara stabilitas pembangunan (*Development Stability*) dan kesinambungan pembangunan (*Development continuity*).
5. **Terwujudnya kemitraan pemerintah, agama dan adat**, diarahkan pada peningkatan keberdayaan masyarakat kampung.
6. **Terwujudnya hubungan harmonis antara lembaga daerah, rekonstruksi otsus, peningkatan pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua**. Diarahkan pada:
   a. Peningkatan Kerjasama, Kemitraan dan Penguatan Kapasitas Lembaga DPRP

b. Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga DPRP dalam rangka Penyusunan Perdasus dan Perdasi.
c. Implentasi Kebijakan Otsus secara Konsisten.

7. **Pelestarian Budaya Papua**, diarahkan pada :
   a. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya;
   b. Pengembangan kesenian yang berbasis budaya;
   c. Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
   d. Pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal; Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (seni dan budaya) melalui pelatihan dan pendampingan pada pelaku ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya serta pengembangan kampung wisata yang berbasis seni dan budaya dengan berdasarkan 5 wilayah adat.
8. **Terwujudnya masyarakat sehat**, diarahkan pada :
   a. Upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat berbasis kearifan lokal;
   b. Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat;
   c. Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung;
   d. Kemitraan kesehatan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat;
   e. **Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita** melalui : Penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONED dan PONEK; Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; Perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil; Peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak; Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader serta); Perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita; Peningkatan kemitraan bidan dan dukun**;**
   f. **Pengendalian penyakit Endemik, menular serta penyakit tidak menular** melalui : Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, termasuk imunisasi; Peningkatan

jumlah dan kualitas tenaga survailans; Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); Penguatan penemuan penderita dan tata laksana kasus; Kesehatan lingkungan dengan menekankan pada akses terhadap air minum dan sanitasi dasar serta perubahan perilaku hygiene dan sanitasi; Survailans penyakit tidak menular; Promosi dan pemberdayaan masyarakat; serta Koordinasi dan kerjasama pengendalian HIV dan AIDS antara lain mencakup : kesehatan, pendidikan, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, pemuda, kependudukan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi, agama, dan budaya;

g. **Perbaikan status gizi masyarakat,** melalui : Peningkatan asupan zat gizi makro dan mikro; Survailans pangan dan gizi; Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang; Pemberian Makanan tambahan bagi bayi dan anak-anak Peningkatan pemenuhan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi; Peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi. Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi, dari mulai proses produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dan lintas program terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan pangan dan budaya sangat penting dalam rangka sinkronisasi dan integrasi kebijakan perbaikan status gizi masyarakat;

h. **Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan masyarakat,** melalui Pemberlakuan jaminan kesehatan Papua dalam bentuk Kartu Papua Sehat (KPS) yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan lainnya (Jamkesmas, Jampersal) yang menjamin akses dan kualitas pelayanan serta tata kelola administrasi yang akuntabel dan transparan bagi masyarakat asli Papua; Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat dan peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua di seluruh puskesmas dan jaringannya (khususnya bayi, balita, ibu hamil dan lansia);

i. **Revitalisasi fungsi Posyandu dalam pelayanan kesehatan masyarakat,** melalui : Mengutamakan pemberdayaan masyarakat termasuk mengaktifkan kembali praktik pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, Mengintergrasikan kegiatan pelayanan gizi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Mengembangkan kegiatan gizi masyarakat dengan memberdayakan lembaga

masyarakat setempat seperti lembaga gereja, kelompok pengajian, PKK dan organisasi perempuan lainnya;

j. **Ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya,** melalui Peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan; Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan; Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan; Peningkatan kompetensi SDM kesehatan; Kerjasama antara institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dalam rangka penyediaan tenaga kesehatan yang dapat bertugas sesuai dengan kondisi lokal Papua dan organisasi profesi;

k. **Peningkatan pelayanan kesehatan, primer, sekunder dan tersier,** melalui: Pembangunan Rumah Sakit rujukan berstandar nasional di 4 (empat) wilayah (Kab. Nabire, Jayawijaya, Biak dan Merauke); Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit Jayapura berstandar Internasional; Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; Pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua (pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak, puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service); Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Puskesmas bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas; Peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

9. Terwujudnya masyarakat cerdas dan terampil diarahkan pada :
   a. Kemitraan pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya;
   b. Mendorong kemandirian lembaga-lembaga/ yayasan-yayasan keagamaan dalam pengelolaan pendidikan (YPK, YPPK, YAPIS, lain-lain);
   c. Peningkatan manajemen pendidikan; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
   d. **Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang**

asli Papua melalui : ***Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA***; Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang; ***Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (pendidikan berpola asrama, SD kecil dan guru kunjung***); Peningkatan mutu proses pembelajaran;

e. Peningkatan kesempatan lulusan SD untuk melanjutkan ke SMP, serta Penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan memasukan kurikulum berbasis kearifan lokal Papua yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, kerjasama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (soft skills), jiwa kewirausahaan, serta memperkuat pendidikan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan pendidikan multikultural serta toleransi beragama guna mewujudkan peserta didik yang bermoral, beretika, berbudaya, beradab, toleran, dan memahami keberagaman. Peningkatan kualitas dilakukan juga melalui pendidikan anak yang berprestasi dan pemberian beasiswa;
f. **Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua** melalui : Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal; Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung SMA/SMK; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki jiwa kewirausahaan; Peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri Peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan Peningkatan ketersediaan guru SMK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal;
g. **Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat,** melalui: (a) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (b) revitalisasi perpustakaan; (c) peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; (d) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; (e) peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan; dan (f) pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan;

h. **Akselarasi dan afirmasi kualitas pendidikan** melalui : pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua dari jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi; Pendidikan 1000 Doktor (PhD); Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal; Peningkatan pendidikan kecakapan hidup untuk masyarakat usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; Peningkatan keaksaraan dan peningkatan minat baca; Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, pelatihan, pendidikan dan penyediaan berbagai tunjangan guru; Penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah Peningkatan profesionalisme guru sehingga mempunyai mental dan jiwa melayani pada daerah-daerah terpencil; Peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan Penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal; Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui penataan kelembagaan Iptek, penguatan Sumber Daya Iptek dan penataan jaringan Iptek; Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, teknologi kesehatan dan obat tradisional serta pelaksanaan Prospek; Penelitian tentang sosial budaya dan biodiversity Papua.

10. **Meningkatnya konektivitas antar wilayah** diarahkan pada :

a. Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MAMTA (Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Keerom, Kab. Mamberamo Raya) : Pembangunan Jalan Ring Road Jayapura-Sentani; Pembangunan Jembatan Holtekamp; Peningkatan Jalan Waena-Arso V; Lintas Mamta-Lapago : Pembangunan jalan Jayapura-elelim-wamena-mulia; Pembangunan Jembatan tersebar di wilayah mamta; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH SAERERI (Kab. Biak Numfor, Kab Supiori, Kab Waropen, Kab. Kepualauan Yapen : Peningkatan Jalan Biak-Supiori; Pembangunan Jalan Serui-Ansus; Pembangunan Jalan Koweda-Botawa; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH HA ANIM (Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat) : Peningkatan Jalan Merauke- Keppi; Pembangunan Jalan Tanah Merah-Mindiptana-Oksibil; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH LAPAGO (Kab. Jayawijaya, Kab. Lany Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Pegunungan Bintang,

Kab. Nduga) : Peningkatan Jalan Wamena-Habema-Kenyan-Nduga; Peningkatan Jalan Wamena- Tiom; Peningkatan Jalan Wamena- Tolikara- Mulia; Pembangunan Jalan Wamena-Tolikara-Dekai; Pembangunan Jalan Mulia-Wewoluk-Sinak; Pembangunan Jalan Pasvaley-Kobakma; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MEEPAGO (Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Mimika) : Pembangunan Jalan Maatadi (Deiyai) - Digikebo (Dogiyai); Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali; Pembangunan Jalan Duntek (Dogiyai) - Munayepa/Iyei (Paniai); Pembangunan Jalan Sugapa - Hitadipa - Ilaga; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;

b. Pembangunan Jaringan Irigasi; Pembangunan Jaringan Air Bersih tersebar di 5 Wilayah Adat; Pembangunan Pengaman Pantai,
c. Pembangunan Bandara WILAYAH MAMTA (Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Keerom, Kab Mamberamo Raya) : Peningkatan Bandara Sentani; Pembangunan Bandara Mamberamo Raya; Pembangunan Bandara Sarmi; Pembangunan Bandara Senggi, Pembangunan Bandara WILAYAH SAERERI (Kab. Biak Numfor, Kab Supiori, Kab Waropen, Kab. Kepualauan Yapen : Peningkatan Bandara Frans Kaisepo Biak Numfor; Pembangunan Bandara Kamanap Serui; Pembangunan Bandara Botawa Waropen, Pembangunan Bandara WILAYAH HA ANIM (Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat) : Peningkatan Bandara Moppah Merauke; Pembangunan Lapter Tanah Merah; Peningkatan Lapter Keppi, Pembangunan Bandara WILAYAH LAPAGO (Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika Kab. Lany Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Nduga) : Peningkatan Bandara Wamena; Peningkatan Bandara Dekai; Pembangunan Bandara Elelim; Peningkatan Bandara Oksibil; Peningkatan Bandara Mulia; Pembangunan Bandara Sinak Puncak; Peningkatan Lapter Tiom; Peningkatan Lapter Tolikara; Peningkatan Lapter Kobakma; Peningkatan Lapter Nduga, Pembangunan Bandara WILAYAH MEEPAGO (Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Mimika) :v Peningkatan Bandara Moses Kilangi Timika; Pembangunan Bandara Wanggara Nabire; Pembangunan Bandara Wagheta Deiyai; Pembangunan Bandara Sugapa Intan Jaya; Pembangunan terminal Type B; Pengadaan Sarana Angkutan; Pembangunan Fasilitas Transportasi Darat Tersebar di Seluruh Wilayah Papua, Pembangunan Pelabuhan

WILAYAH MAMTA (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya) : Pembangunan Pelabuhan Depapre; Pembangunan Pelabuhan Sarmi, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH SAERERI (Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepualauan Yapen) : Peningkatan Pelabuhan Biak Numfor; Peningkatan Pelabuhan Serui; Pembangunan Pelabuhan Waropen, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH HA ANIM (Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat) : Pembangunan Pelabuhan Kelapa dua Merauke; Pembangunan Pelabuhan Tanah Merah; Pembangunan Pelabuhan Keppi; Pembangunan Pelabuhan WILAYAH LAPAGO (Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga) : Pembangunan Pelabuhan Kenyam; Pembangunan Pelabuhan Dekai, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH MEEPAGO (Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika) : Peningkatan Pelabuhan Pomako; Peningkatan Pelabuhan Nabire; Peningkatan pelabuhan Napan, serta Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 (lima) wilayah pembangunan

11. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, diarahkan pada :
    a. Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di lima Wilayah Adat;
    b. Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di 5 (lima) wilayah adat, Pembangunan PLTA Urumuka, Pembangunan PLTA Mamberamo, Pembangunan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan PLTA Supiori.
12. Implementasi tata Ruang secara konsisten, diarahkan pada :
    a. Sosialisasi rencana tata ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat dan pemetaan WPR;
    b. Penegakan hukum terhadap rencana tata ruang,
    c. Implementasi RAD GRK dan *Green Investment*
    d. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Sosialisasi dan *Pilot Project* Pembangunan Berkelanjutan di Kampung, Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

Arah Kebijakan Tahun 2015

Arah Pembangunan Provinsi Papua tahun 2015 diarahkan pada 1) Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius; 2) Terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hokum; 3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; 4) Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan; 5) Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas;6) Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan;7) Pelestarian budaya asli Papua; 8) Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan; 9) Terwujudnya masyarakat yang sehat; 10) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil; 11) Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat;12) Meningkatnya konektivitas antar wilayah; 13) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik; 14) Implementasi tata Ruang secara konsisten.

1. Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014, pada tahun 2015 diarahkan pada :
   a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan;
   b. Menjamin kebebasan setiap Umat Beragama dalam menjalankan ajaran Agamanya;
   c. Memfasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan, Bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan Yayasan Pengelola Pendidikan Keagamaan;
   d. Menfasilitasi terciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial Lainnya.
2. Terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hukum, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014, yang diarahkan pada :
   a. Peningkatan Peran Aparatur Penegak Hukum dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan;
   b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014. Tahun 2015 diarahkan pada :
   a. Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal;
   b. Penerapan Perencanaan Pembangunan berbasis Data;
   c. Mengoptimalkan Sinergi antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah;

d. Melakukan Perubahan Pola Pikir Aparatur melalui Pendidikan dan Pembinaan Kepribadian Aparatur;
e. Menyempurnakan Struktur Jabatan Struktural dan Mekanisme Jabatan Fungsional;
f. Menata Kembali Hubungan Kerja antar SKPD di Propinsi dan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota;
g. Mengembangkan Budaya Kerja Aparatur dalam rangka peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Diharapkan dengan akan terbentuk aparatur daerah yang profesional dan peka terhadap permasalahan masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dengan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah maka akan mendukung peningkatan perekonomian daerah khususnya pertumbuhan Investasi daerah.

4. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan, pada tahun 2015 diarahkan pada
   a. Penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, penyediaan data kependudukan yang akurat khususnya Orang Asli Papua yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan;
   b. Penyediaan hasil kajian kependudukan;
   c. Kebijakan pertumbuhan penduduk asli Papua yang berkualitas;
   d. Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;
   e. Penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB;
   f. Kesehatan reproduksi;
   g. Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah.
5. Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014. Tahun 2015 diarahkan pada :
   a. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi social;
   b. Peningkatan bantuan sosial, serta
   c. Pemberdayaan komunitas adat terpencil dan layanan pendidikan khusus bagi KAT.
6. Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, diarahkan pada :
   a. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD.
   b. Mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan dan kesehatan reproduksi.

7. Pelestarian budaya asli Papua, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014. Tahun 2015 diarahkan pada :
   a. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya;
   b. Pengembangan kesenian yang berbasis budaya;
   c. Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
   d. Pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal;
   e. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (seni dan budaya) melalui pelatihan dan pendampingan pada pelaku ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya; serta
   f. Pengembangan kampung wisata yang berbasis seni dan budaya dengan berdasarkan 5 (lima) wilayah adat.
8. Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, diarahkan pada:
   a. Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga berstandar Nasional dan Internasional dalam rangka persiapan pencalonan Papua sebagai Tuan Rumah PON 2020, Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini;
   b. Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkan pemuda yang unggul dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan.
9. Terwujudnya masyarakat yang sehat, diarahkan pada :
   a. Upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat berbasis kearifan lokal;
   b. Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat;
   c. Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung;
   d. Kemitraan kesehatan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat;
   e. **Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita** melalui : Penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONED dan PONEK; Peningkatan

pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; Perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil; Peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak; Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader serta); Perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita; Peningkatan kemitraan bidan dan dukun**;**

f. **Pengendalian penyakit Endemik, menular serta penyakit tidak menular** melalui : Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, termasuk imunisasi; Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga survailans; Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); Penguatan penemuan penderita dan tata laksana kasus; Kesehatan lingkungan dengan menekankan pada akses terhadap air minum dan sanitasi dasar serta perubahan perilaku hygiene dan sanitasi; Survailans penyakit tidak menular; Promosi dan pemberdayaan masyarakat; serta Koordinasi dan kerjasama pengendalian HIV dan AIDS antara lain mencakup : kesehatan, pendidikan, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, pemuda, kependudukan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi, agama, dan budaya;

g. **Perbaikan status gizi masyarakat,** melalui : Peningkatan asupan zat gizi makro dan mikro; Survailans pangan dan gizi; Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang; Pemberian Makanan tambahan bagi bayi dan anak-anak Peningkatan pemenuhan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi; Peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi. Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi, dari mulai proses produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dan lintas program terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan pangan dan budaya sangat penting dalam rangka sinkronisasi dan integrasi kebijakan perbaikan status gizi masyarakat;

h. **Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan masyarakat,** melalui Pemberlakuan jaminan kesehatan Papua dalam bentuk Kartu Papua Sehat (KPS) yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan lainnya (Jamkesmas, Jampersal) yang menjamin akses dan kualitas pelayanan serta tata kelola administrasi yang akuntabel dan transparan bagi masyarakat asli Papua; Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat

dan peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua di seluruh puskesmas dan jaringannya (khususnya bayi, balita, ibu hamil dan lansia);

i. **Revitalisasi fungsi Posyandu dalam pelayanan kesehatan masyarakat,** melalui : Mengutamakan pemberdayaan masyarakat termasuk mengaktifkan kembali praktik pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, Mengintergrasikan kegiatan pelayanan gizi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Mengembangkan kegiatan gizi masyarakat dengan memberdayakan lembaga masyarakat setempat seperti lembaga gereja, kelompok pengajian, PKK dan organisasi perempuan lainnya;

j. **Ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya,** melalui Peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan; Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan; Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan; Peningkatan kompetensi SDM kesehatan; Kerjasama antara institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dalam rangka penyediaan tenaga kesehatan yang dapat bertugas sesuai dengan kondisi lokal Papua dan organisasi profesi;

k. **Peningkatan pelayanan kesehatan, primer, sekunder dan tersier,** melalui: Pembangunan Rumah Sakit rujukan berstandar nasional di 4 (empat) wilayah (Kab. Nabire, Jayawijaya, Biak dan Merauke); Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit Jayapura berstandar Internasional; Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; Pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua (pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak, puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service); Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Puskesmas bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas; Peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

10. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil, diarahkan pada :
    a. Kemitraan pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya;
    b. Mendorong kemandirian lembaga-lembaga/ yayasan-yayasan keagamaan dalam pengelolaan pendidikan (YPK, YPPK, YAPIS, lain-lain);

c. Peningkatan manajemen pendidikan; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;

d. **Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua** melalui : Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dan BOSDA; Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang; Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (pendidikan berpola asrama, SD kecil dan guru kunjung); Peningkatan mutu proses pembelajaran; Peningkatan kesempatan lulusan SD untuk melanjutkan ke SMP, serta Penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan memasukan kurikulum berbasis kearifan lokal Papua yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, kerjasama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (soft skills), jiwa kewirausahaan, serta memperkuat pendidikan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan pendidikan multikultural serta toleransi beragama guna mewujudkan peserta didik yang bermoral, beretika, berbudaya, beradab, toleran, dan memahami keberagaman. Peningkatan kualitas dilakukan juga melalui pendidikan anak yang berprestasi dan pemberian beasiswa;

e. **Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua** melalui : Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal; Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung SMA/SMK; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki jiwa kewirausahaan; Peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri Peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan Peningkatan ketersediaan guru SMK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal;

f. **Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat,** melalui: (a) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (b) revitalisasi perpustakaan; (c) peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; (d) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; (e) peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan; dan (f) pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan;

g. **Akselarasi dan afirmasi kualitas pendidikan** melalui : pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua dari jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi; Pendidikan 1000 Doktor (PhD); Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal; Peningkatan pendidikan kecakapan hidup untuk masyarakat usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; Peningkatan keaksaraan dan peningkatan minat baca; Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, pelatihan, pendidikan dan penyediaan berbagai tunjangan guru; Penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah Peningkatan profesionalisme guru sehingga mempunyai mental dan jiwa melayani pada daerah-daerah terpencil; Peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan Penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal; Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui penataan kelembagaan Iptek, penguatan Sumber Daya Iptek dan penataan jaringan Iptek; Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, teknologi kesehatan dan obat tradisional serta pelaksanaan Prospek; Penelitian tentang sosial budaya dan biodiversity Papua.

11. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, diarahkan pada:
    a. Optimalisasi lahan produksi pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan / kehutanan;
    b. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah,
    c. Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat serta mendorong ketersediaan cadangan pangan;
    d. Meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani;
    e. Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat;
    f. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;

g. Implementasi Prospek di seluruh Kabupaten/Kota se Papua.

12. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014. Tahun 2015 diarahkan pada :
    a. Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO.
    b. Pembangunan Jaringan Air Bersih tersebar di 5 Wilayah Adat; Pembangunan Pengaman Pantai,
    c. Pembangunan Bandara WILAYAH WILAYAH SAERERI ; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO; Pembangunan terminal Type B; Pengadaan Sarana Angkutan; Pembangunan Fasilitas Transportasi Darat Tersebar di Seluruh Wilayah Papua, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO;
    d. Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 wilayah adat.
13. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, diarahkan pada:
    a. Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di lima Wilayah Adat;
    b. Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di lima wilayah adat;
    c. Pembangunan PLTA Urumuka, Pembangunan PLTA Mamberamo, Pembangunan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan PLTA Supiori.
14. Implementasi tata Ruang secara konsisten, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014. Tahun 2015 diarahkan pada :
    a. Sosialisai rencana tata ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat dan pemetaan WPR;
    b. Penegakan hukum terhadap rencana tata ruang, Implementasi RAD GRK, *Green Investment,* Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    c. Sosialisasi dan *Pilot Project* Pembangunan Berkelanjutan di Kampung, Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

Arah Kebijakan Tahun 2016

Arah Pembangunan Provinsi Papua tahun 2016 tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, dengan diarahkan pada : 1) Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas;2) Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan;3)

Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan; 4) Terwujudnya masyarakat yang sehat; 5) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil; 6) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif; 7) Tercapainya stabilitas makro ekonomi; 8) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK; 9) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah; 10) Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah; 11) Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah; 12) Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat; 13) Meningkatnya konektivitas antar wilayah; 14) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik.

1. Terwujudnya masyarakat Papua yang berbudaya dan Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua, diarahkan pada :
   a. Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Adat dalam Hal Aktualisasi Nilai-nilai Budaya;
   b. Memfasilitasi Tumbuh Kembangnya Peran Lembaga Adat.
2. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 diarahkan pada :
   a. Penyediaan data kependudukan yang akurat khususnya Orang Asli Papua yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan,
   b. Kebijakan pertumbuhan penduduk asli Papua yang berkualitas;
   c. Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;
   d. Penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB;
   e. Kesehatan reproduksi;
   f. Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah.
3. Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 diarahkan pada :
   a. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi social;
   b. Peningkatan bantuan sosial, serta
   c. Pemberdayaan komunitas adat terpencil dan layanan pendidikan khusus bagi KAT.
4. Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 diarahkan pada :

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD.
b. Mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta
c. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan dan kesehatan reproduksi.

5. Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 diarahkan pada:
   a. Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga berstandar Nasional dan Internasional dalam rangka persiapan pencalonan Papua sebagai Tuan Rumah PON 2020;
   b. Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini;
   c. Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkan pemuda yang unggul dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan.
6. Terwujudnya masyarakat yang sehat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 diarahkan pada :
   a. Upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat berbasis kearifan lokal;
   b. Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat;
   c. Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung;
   d. Kemitraan kesehatan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya;
   e. Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat;
   f. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;
   g. Pengendalian penyakit Endemik, menular serta penyakit tidak menular; Perbaikan status gizi masyarakat;
   h. Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan masyarakat;
   i. Revitalisasi fungsi Posyandu dalam pelayanan kesehatan masyarakat;

j. Ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya;
k. Pembangunan Rumah Sakit rujukan berstandar nasional di 4 (empat) wilayah (Kab. Nabire, Jayawijaya, Biak dan Merauke);
l. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit Jayapura berstandar Internasional;
m. Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah;
n. Pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua (pelayanan kesehatan pro aktif/ bergerak, puskesmas keliling, *flying health care*, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service);
o. Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
p. Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Puskesmas bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas;
q. Peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

7. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 diarahkan pada :
   a. Kemitraan pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Mendorong kemandirian lembaga-lembaga/ yayasan-yayasan keagamaan dalam pengelolaan pendidikan (YPK, YPPK, YAPIS, lain-lain);
   b. Peningkatan manajemen pendidikan;
   c. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
   d. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua melalui : *Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA*; Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang; *Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (pendidikan berpola asrama, SD kecil dan guru kunjung*);
   e. Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua;

f. Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat; Akselarasi dan afirmasi kualitas;
g. Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui penataan kelembagaan Iptek, penguatan Sumber Daya Iptek dan penataan jaringan Iptek;
h. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, teknologi kesehatan dan obat tradisional serta pelaksanaan Prospek; Penelitian tentang sosial budaya dan biodiversity Papua.

8. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, diarahkan pada :
   a. Reformasi prosedur peijinan investasi;
   b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah;
   c. Membangun sarana dan prasarana investasi, dan
   d. Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi.
9. Tercapainya stabilitas makro ekonomi, diarahkan pada
   a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;
   b. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri, Pengendalian laju inflasi.
10. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, diarahkan pada :
   a. Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah;
   b. Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah;
   c. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis;
   d. Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
   e. Pengembangan sarana promosi hasil produksi;
   f. Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah,
   g. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung.
11. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, diarahkan pada :
   a. Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
   b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industry;
   c. Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah, Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah, Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta, Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir, Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industri.

12. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah.
13. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, diarahkan pada :
    a. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja;
    b. Penyiapan tenaga kerja siap pakai dan
    c. Penyedian peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.
14. Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah, diarahkan pada
    a. Promosi dan pemasaran obyek pariwisata;
    b. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
    c. Promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
    d. Pengembangan obyek pariwisata unggulan, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, dan pengembangan jenis dan paket wisata.
15. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 diarahkan pada:
    a. Optimalisasi lahan produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan/ perikanan/ kehutanan;
    b. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah;
    c. Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat serta mendorong ketersediaan cadangan pangan;
    d. Meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani,
    e. Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat,
    f. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian,
    g. Implementasi Prospek di seluruh Kabupaten/Kota se Papua.
16. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, diarahkan pada :
    a. Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
    b. Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat;
    c. Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat;
    d. Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu;
    e. Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat;
    f. Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat;
    g. Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan

h. Mengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan.

17. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 diarahkan pada :
    a. Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO. Pembangunan Jaringan Air Bersih tersebar di 5 Wilayah Adat; Pembangunan Pengaman Pantai;
    b. Pembangunan Bandara WILAYAH WILAYAH SAERERI ; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO; Pembangunan terminal Type B; Pengadaan Sarana Angkutan; Pembangunan Fasilitas Transportasi Darat Tersebar di Seluruh Wilayah Papua, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO;
    c. Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 wilayah adat.
18. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, diarahkan pada :
    a. Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di lima Wilayah Adat;
    b. Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di lima wilayah adat;
    c. Pembangunan PLTA Urumuka, Pembangunan PLTA Mamberamo, Pembangunan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan PLTA Supiori.
19. Implementasi Tata Ruang secara konsisten, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 diarahkan pada:
    a. Sosialisai rencana tata ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat dan pemetaan WPR,
    b. Penegakan hukum terhadap rencana tata ruang, Implementasi RAD GRK, *Green Investment,*
    c. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Sosialisasi dan *Pilot Project* Pembangunan Berkelanjutan di Kampung,
    d. Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

Arah Kebijakan Tahun 2017

Arah Pembangunan Provinsi Papua tahun 2017 tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, dengan diarahkan pada terwujudnya1) Layanan sosial

yang berkualitas;2) Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan; 3) Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, Terwujudnya masyarakat yang sehat; 4) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil; 5) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif; 6) Tercapainya stabilitas makro ekonomi; 7) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK; 8) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah;9) Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah;10) Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja; 11) Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah; 12) Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat13) Meningkatnya konektivitas antar wilayah; 14) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik.

1. Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 diarahkan pada :
   a. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi social;
   b. Peningkatan bantuan sosial, serta
   c. Pemberdayaan komunitas adat terpencil dan layanan pendidikan khusus bagi KAT.
2. Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 diarahkan pada :
   a. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD.
   b. Mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta
   c. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan dan kesehatan reproduksi.
3. Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 diarahkan pada:
   a. Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga berstandar Nasional dan Internasional dalam rangka persiapan pencalonan Papua sebagai Tuan Rumah PON 2020;
   b. Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini;
   c. Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkan pemuda yang unggul

dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan.

4. Terwujudnya masyarakat yang sehat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 diarahkan pada:
   a. Upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat berbasis kearifan lokal;
   b. Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat;
   c. Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung;
   d. Kemitraan kesehatan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya;
   e. Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat;
   f. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;
   g. Pengendalian penyakit Endemik, menular serta penyakit tidak menular;
   h. Perbaikan status gizi masyarakat;
   i. Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan masyarakat;
   j. Revitalisasi fungsi Posyandu dalam pelayanan kesehatan masyarakat;
   k. Ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya;
   l. Pembangunan Rumah Sakit rujukan berstandar nasional di 4 (empat) wilayah (Kab. Nabire, Jayawijaya, Biak dan Merauke);
   m. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit Jayapura berstandar Internasional;
   n. Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah;
   o. Pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua (pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak, puskesmas keliling, *flying health care*, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service);
   p. Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
   q. Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Puskesmas bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas; Peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

5. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 diarahkan pada:
   a. Kemitraan pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Mendorong kemandirian lembaga-lembaga/ yayasan-yayasan keagamaan dalam pengelolaan pendidikan (YPK, YPPK, YAPIS, lain-lain);
   b. Peningkatan manajemen pendidikan;
   c. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
   d. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua melalui : *Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dan BOSDA*;Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang; *Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (pendidikan berpola asrama, SD kecil dan guru kunjung*);
   e. Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua;
   f. Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat;
   g. Akselarasi dan afirmasi kualitas;
   h. Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui penataan kelembagaan Iptek, penguatan Sumber Daya Iptek dan penataan jaringan Iptek;
   i. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, teknologi kesehatan dan obat tradisional serta pelaksanaan Prospek;
   j. Penelitian tentang sosial budaya dan biodiversity Papua.
6. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, diarahkan pada :
   a. Reformasi prosedur peijinan investasi,
   b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah,
   c. Membangun sarana dan prasarana investasi, dan Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi.
7. Tercapainya stabilitas makro ekonomi, diarahkan pada
   a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa,
   b. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri, Pengendalian laju inflasi.

8. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 diarahkan pada
   a. Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah;
   b. Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah;
   c. Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah;
   d. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis;
   e. Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
   f. Pengembangan sarana promosi hasil produksi;
   g. Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah;
   h. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi;
   i. Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung.
9. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 diarahkan pada :
   a. Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
   b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry;
   c. Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah;
   d. Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah;
   e. Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta;
   f. Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir;
   g. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industri.
   h. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah.
10. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 diarahkan pada
    a. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja;
    b. Penyiapan tenaga kerja siap pakai dan Penyedian peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.
11. Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 diarahkan pada :
    a. Promosi dan pemasaran obyek pariwisata;
    b. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, promosi pariwisata dalam dan luar negeri;

c. Pengembangan obyek pariwisata unggulan, pembangunan saran dan prasarana pariwisata, dan pengembangan jenis dan paket wisata.

12. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 diarahkan pada:
    a. Optimalisasi lahan produksi pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan/ kehutanan;
    b. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah;
    c. Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat;
    d. Meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya local
    e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani;
    f. Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
    g. Implementasi Prospek di seluruh Kabupaten/Kota se-Papua.
13. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 diarahkan pada :
    a. Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
    b. Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat;
    c. Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat;
    d. Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu;
    e. Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat;
    f. Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat;
    g. Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan
    h. Mengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan.
14. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 diarahkan pada:
    a. Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
    b. Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO. Pembangunan Jaringan Air Bersih tersebar di 5 Wilayah Adat; Pembangunan Pengaman Pantai,
    c. Pembangunan Bandara WILAYAH WILAYAH SAERERI ; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO; Pembangunan terminal Type B;

Pengadaan Sarana Angkutan; Pembangunan Fasilitas Transportasi Darat Tersebar di Seluruh Wilayah Papua, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO;

d. Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 wilayah adat,

15. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, diarahkan pada :
    a. Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di lima Wilayah Adat;
    b. Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di lima wilayah adat;
    c. Pembangunan PLTA Urumuka, Pembangunan PLTA Mamberamo, Pembangunan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan PLTA Supiori.

Arah Kebijakan Tahun 2018

Arah kebijakan pada tahun 2018 ini merupakan tahap terakhir dari periode RPJMD 2013-2018, pada tahap ini juga melaksanakan pencapaian-pencapaian pada tahap-tahap berikutnya dari sasaran yang masih belum tercapai, sehingga pada tahap ini diharapkan keseluruhan sasaran dan indikatornya yang telah ditetapkan dapat tercapai keseluruhannya dan apa yang diamanatkan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penjabaran visi dan misi yang ada didalam dokumen RPJMD dapat tercapai sehingga dapat mewujudkan visi **Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera**

Arah Pembangunan Provinsi Papua tahun 2018 tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan diarahkan pada terwujudnya1) prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan; 2) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif; 3) Tercapainya stabilitas makro ekonomi; 4) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK; 5) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah; 6) Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah; 7) Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah; 8) Meningkatnya konektivitas antar wilayah; 9) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik.

1. Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 diarahkan pada:

a. Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga berstandar Nasional dan Internasional dalam rangka persiapan pencalonan Papua sebagai Tuan Rumah PON 2020;
b. Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini;
c. Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkan pemuda yang unggul dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan.

2. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, diarahkan pada :
   a. Reformasi prosedur peijinan investasi;
   b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah, Membangun sarana dan prasarana investasi, dan
   c. Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi.
3. Tercapainya stabilitas makro ekonomi, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 diarahkan pada :
   a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;
   b. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri;
   c. Pengendalian laju inflasi.
4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 diarahkan pada :
   a. Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah;
   b. Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah;
   c. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis;
   d. Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
   e. Pengembangan sarana promosi hasil produksi;
   f. Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah;
   g. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung.
5. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 diarahkan pada
   a. Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
   b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry;

c. Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah;
d. Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah;
e. Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta;
f. Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir;
g. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industri.
h. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah.

6. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 diarahkan pada Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, Penyiapan tenaga kerja siap pakai dan Penyedian peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.
7. Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 diarahkan pada
   a. Promosi dan pemasaran obyek pariwisata;
   b. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
   c. Promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
   d. Pengembangan obyek pariwisata unggulan;
   e. Pembangunan saran dan prasarana pariwisata, dan pengembangan jenis dan paket wisata.
8. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 diarahkan pada
   a. Optimalisasi lahan produksi pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan/ kehutanan;
   b. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah;
   c. Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat;
   d. Meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani;
   e. Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat;
   f. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
   g. Implementasi Prospek di seluruh Kabupaten/Kota se Papua.
9. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 diarahkan pada:

a. Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
b. Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat;
c. Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu;
d. Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat;
e. Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat;
f. Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan
g. Mengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan.

10. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 diarahkan pada:
    a. Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO. Pembangunan Jaringan Air Bersih tersebar di 5 Wilayah Adat; Pembangunan Pengaman Pantai;
    b. Pembangunan Bandara WILAYAH WILAYAH SAERERI ; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO; Pembangunan terminal Type B; Pengadaan Sarana Angkutan; Pembangunan Fasilitas Transportasi Darat Tersebar di Seluruh Wilayah Papua, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO;
    c. Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 wilayah adat.
11. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 diarahkan pada:
    a. Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di lima Wilayah Adat;
    b. Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di lima wilayah adat, Pembangunan PLTA Urumuka, Pembangunan PLTA Mamberamo, Pembangunan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan PLTA Supiori.

Tabel 6. 1 Strategi dan Arah Kebijakan

Misi I : Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius dan Berbudaya	1. Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius.	1. Revitalisasi dan Optimalisasi Peran lembaga Keagamaan	1. Peningkatan Peran Lembaga Keagamaan 2. Peningkatan Kerjasama Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Rangka Aktualisasi dan Penghormatan terhadap Nilai-nilai Budaya Asli Papua.
		2. Meningkatnya Masyarakat Papua yang Berbudaya		
2.	Meningkatkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua	3. Meningkatnya Rasa Aman, Tentram dan Nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum Seluruh Masyarakat Papua	2. Penegakan Hukum dan Revitalisasi peran Masyarakat dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Mendorong Komunikasi yang Intensif antara Aparat Penegak Hukum, Masyarakat dan Pemerintah Daerah
		4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam Mewujudkan Rasa Aman, Tentram dan Nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua		Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat Adat
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus				
1.	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel	1. Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	3. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	1. Peningkatan Kapasitas aparatur dan Kelembagaan Pemerintah daerah 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penerapan melalui Standar-Standar Pelayanan Publik
		2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran
		3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi		Mendorong Penerapan Teknologi Informasi Pendukung Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan
		4. Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN		Menegakkan Hukum dan Pemberantasan KKN secara Konsisten, Transparan dan Adil
		5. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan		Meningkatkan Kinerja Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Publik		
		6. Tertatanya Sistem dan Kelembanggaan Pemerintahan Daerah pada semua tingkatan		Melakukan Perubahan Pola Pikir Aparatu menjadi Pelayanan Masyarakat dan Penataan struktur Organisasi Pemerintahan yang Mencerminkan Fungsi-fungsi Pemerintahan
		7. Restrukturisasi Kelembanggaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan		
		8. Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya Pola Pikir (Mind set) Aparatur Pemerintah Daerah		
2.	Penataan Sistem Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang mencerminkan Kebutuhan Fungsi-fungsi Pemerintahan	1. Meningkatnya Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota	4. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi antar Wilayah dan antar Sektor dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Peningkatan Harmonisasi antara Pemerintah, Provinsi dan Daerah
		2. Terbentuknya Badan Koordinasi wilayah Pembangunan berdasarkan 5 wilayah Adat		
		3. Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku)		
3	Mewujudkan Hubungan Kerja sama Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga	1. Terwujudnya Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga	5. Penguatan Fungsi Koordinasi antar Lembaga Daerah dan Penataan Kewenangan dalam Pemerintahan	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan serta Penguatan Kapasitas DPRP dalam Rangka Implementasi Kebijakan Otsus Papua
	DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.	DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.	Otsus	Secara Murni dan Konsekwen
4.	Mewujudkan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Secara Konsekuen	2. Rekonstruksi Undang-undang No. 21/2001 menjadi Undang-undang Otonomi Khusus Plus (UU Pemerintahan Papua)		Peningkatan Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Rancangan UU Otsus Plus (UU Pemerintah Papua)
		3. Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak, Politik dan Hak Budaya		Mendorong terpenuhuinya Seluruh Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua
Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat,Berprestasi dan Berahlak Mulia				
1	Meningkatkan Layanan Sosial Budaya dan	Terwujudnyaadministrasi kependudukan yang berkelanjutan	6. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian kependudukan	Peningkatan administrasi kependudukan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Keagamaan			
		Terwujudnya yang masyarakat religius	7. Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial	Peningkatan peran lembaga-lembaga keagamaan
		Meningkatnya jangkauan/cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan social serta jaminan sosial
		Terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan serta perencanaan yang responsive gender
		Lestarinya budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua	8. Revitalisasi nilai-nilai budaya	Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah
2.	Meningkatkan Kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika	Meningkatnya prestasi olahraga	9. Optimalisasi Pembinaan Olah raga dan Pemuda	Peningkatan pembinaan prestasi olah raga dan penyediaan sarana pendukung
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan		Peningkatan pembinaan pemuda dan pramuka
		Terwujudnya masyarakat yang sehat	10. Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta pemenuhan gizi
		Terwujudnya Masyarakat yang cerdas dan terampil		Peningkatan Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas
				Peningkatan dan pengembangan IPTEK
Misi 4 : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal				
1.	Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh Papua berbasis ekonomi	1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	11. Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis Keunggulan Lokal Daerah	1. Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus B/J dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar domestic 2. Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan daya dukung dan karateristik daerah dan pengusaha serta potensi usaha di setiap Kab/Kota di Provinsi Papua
		2. Tercapainya stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan		1. Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi 2. Menjaga stabilitas perekonomian daerah berlandaskan oleh capaian indicator ekonomi 3. Menciptakan inovasi baru untuk memperkuat struktur perekonomian daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				dengan berbasis industry dan bisnis pertanian menerapkan IPTEK
		3. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendataan daerah		Memantapkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN
		4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin		1. Penyempurnaan system penyedian dan distribusi pangan secara merata dan harga terjangkau 2. Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatn hutan untuk diversifikasi produksi pangan 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat 4. Peningkatan system kewasapadaan dini dalam gizi dan rawan pangan
		5. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK		1. Meningkatnya keterpaduan antara tenaga kerja terdidik dan trampil dengan adopsi penerapan teknologi 2. Mengembangkan UKMUK melalui pendekatan kelompok pada sector industry dan bisnis pertanian didukung pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha 3. Mengembangkan UKMK untuk berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industry, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM 4. Meningkatkan system dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru (lokal) berbasis IPTEK 5. Mendorong perkuatan struktur industry pada sub sector yang memiliki potensi keuntungan kompetitif 6. Memperluas akses

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				masyarakat terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha 7. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk pertanian dikampung melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas ketersediaan berbasis sumberdaya lokal
		6. Perbaikan iklim ketenagaan kerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran		1. Meningkatkan kesempatan kerja melalui investasi 2. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki regulasi ketenagakerjaan yang terkait rekrutmen, TK, out sourcing, pengupahan, PHK dan jaminan keselamatan kerja 3. Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan awasan kerja
		7. Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan kepariwisataan daerah		1. Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata (dalam dan luar daerah) 2. Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata secara terpadu
				3. Peningkatan pengembangan dan pelestarian obyek wisata daerah dng peran pelakuusaha masyarakat
		8. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Papua dan berkurangnya kesenjangan ekonomi antar wilayah		1. Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang dapat menggerakan wilayah tertinggal 2. Meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terisolasi
2.	Menciptakan pengelolaan SDA secara terpadu dgn memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan	1. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari	12. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam	1. Menyelenggarakan revitalisasi pertanian untuk diversifikasi usaha mendukung produksi pangan 2. Pengamanan ketahanan pangan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				3. Peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing pertanian dan perikanan
Misi 5 :	**Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**			
1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah	1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	13. Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah	Peningkatam aksesibilitas, konektivitas dan komunikasi antar wilayah
		2. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah		
		3. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah		
		4. Meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni	14. Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kondisi dan budaya setempat	Peningkatan pemenuhan dan ketersediaan infrastruktur dasar
		5. Meningkatnya ketersediaan air bersih		
		6. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan		
2	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan	1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	15. Pengarusutamaaan Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan tertib tata ruang
		2. Papua sebagai paru-paru dunia		Meminimalkan emisi GRK dan memaksimalkan serapan GRK dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi
		3. Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan		Peningkatan kepatuhan terhadap proses perizinan lingkungan
		4. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan		Peningkatan pemahaman dan penerapan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua tahun 2005 – 2025 adalah terwujudnya kemandirian ekonomi dan Pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan yangditandai oleh peningkatan dan pemerataan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara simultan dan berkelanjutan

dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan melalui pembangunan yang tersebar dan setara serta keterpaduan antar sektor pembangunan dan investasi berbasis kampung dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Untuk itu, strategi pembangunan kewilayahan Provinsi Papua tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :

(1) Mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan membagi wilayah pembangunan berdasarkan 5 (lima) wilayah adat yaitu 1). Wilayah Adat Mamberamo-Tabi (Mamta); 2) Wilayah Adat Saereri; 3) Wilayah Adat Ha Anim; 4) Wilayah Adat La Pago; dan Wilayah Adat Mee Pago.

(2) Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial diluar wilayah Mamberamo Tabi dan Saereri dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Mamta dan Saereri.

(3) Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarkawasan dan antar daerah untuk mendukung perekonomian domestik.

(4) Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan komoditas unggulan di tiap wilayah.

(5) Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana.

Tabel 6.2 Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Papua

NO	WILAYAH	PUSAT PELAYANAN	PENDUDUK (2010)	AKSES	IPM	AHH	AMH	RLS
I	**WILAYAH MAMTA**		**552,662**	**RERATA MUDAH**	**69.14**	**67.22**	**88.43**	**6.6**
1	Kota Jayapura	PKN/PKSN	256,705	MUDAH AKSES	76.29	68.61	99.83	11.0
2	Kabupaten Jayapura	PKN	196,085	MUDAH AKSES	72.75	67.53	96.89	9.6
3	Kabupaten Keerom	PKW/PKSN	48,536	MUDAH AKSES	69.64	67.31	92.38	7.4
4	Kabupaten Mamberamo Raya	PKL	18,365	SULIT AKSES	59.86	66.20	65.36	5.2
5	Kabupaten Sarmi	PKW	32,971	MUDAH AKSES	67.15	66.46	87.67	6.6
II	**WILAYAH SAERERI**		**250,262**	**AKSES SEDANG**	**68.29**	**66.85**	**90.43**	**7.7**
1	Kabupaten Biak Numfor	PKN/KSN	126,798	MUDAH AKSES	70.33	66.75	98.67	9.6
2	Kabupaten Supiori	PKL	15,874	SULIT AKSES	68.92	66.23	96.68	8.1
3	Kabupaten Kepulauan Yapen	PKL	82,951	MUDAH AKSES	70.19	68.55	89.11	6.6
4	Kabupaten Waropen	PKL	24,639	SULIT AKSES	63.71	65.86	77.26	6.4
III	**WILAYAH HA ANIM**		**409,735**	**SULIT AKSES**	**54.90**	**65.90**	**46.02**	**5.4**
1	Kabupaten Merauke	PKN/PKSN	195,716	MUDAH AKSES	66.19	62.88	88.22	9.3
2	Kabupaten Mappi	PKW	81,658	SULIT AKSES	50.83	66.28	31.46	4.3
3	Kabupaten Boven Digoel	PKL/PKSN	55,784	SULIT AKSES	50.64	67.13	33.25	3.4
4	Kabupaten Asmat	PKL	76,577	SULIT AKSES	51.92	67.32	31.13	4.4
IV	**WILAYAH LA PAGO**		**1,052,699**	**SULIT AKSES**	**52.33**	**66.65**	**40.59**	**3.5**
1	Kabupaten Jayawijaya	PKN	196,085	SULIT AKSES	56.60	66.63	52.76	4.8
2	Kabupaten Lanny Jaya	PKL	148,522	SULIT AKSES	50.20	66.49	36.91	3.7
3	Kabupaten Tolikara	PKL	114,427	SULIT AKSES	52.43	66.09	33.44	3.4
4	Kabupaten Yahukimo	PKL	164,512	SULIT AKSES	50.30	67.09	32.76	2.9
5	Kabupaten Yalimo	PKL	50,763	SULIT AKSES	48.90	66.56	33.51	2.8
6	Kabupaten Mamberamo Tengah	PKL	39,537	SULIT AKSES	49.32	66.44	34.52	2.9
7	Kabupaten Puncak Jaya	PKL	101,148	SULIT AKSES	68.34	67.70	86.82	6.1
8	Kabupaten Puncak	PKL	93,218	SULIT AKSES	49.35	67.64	32.13	2.8
9	Kabupaten Pegunungan Bintang	PKL/PKSN	65,434	SULIT AKSES	49.45	66.00	32.5	2.5
10	Kabupaten Nduga	PKW	79,053	SULIT AKSES	48.43	65.83	30.54	2.8
V	**WILAYAH MEE PAGO**		**652,165**	**SULIT AKSES**	**57.63**	**67.84**	**54.49**	**4.8**
1	Kabupaten Nabire	PKW	129,893	MUDAH AKSES	67.33	67.80	83.66	6.8
2	Kabupaten Dogiay	PKL	84,230	SULIT AKSES	50.49	67.27	34.23	3.9
3	Kabupaten Intan Jaya	PKL	40,490	SULIT AKSES	48.74	66.83	27.78	2.1
4	Kabupaten Paniai	PKW	153,432	SULIT AKSES	60.22	68.00	62.94	6.2
5	Kabupaten Mimika	PKN	182,001	SULIT AKSES	69.68	70.53	88.19	6.9
6	Kabupaten Deiyai	PKL	62,119	SULIT AKSES	49.31	66.62	30.12	2.8
	PAPUA		**2,917,523**		**65,36**	**68.85**	**75.81**	**6.7**

Dari rata-rata IPM untuk 5 wilayah pengembangan, IPM di Wilayah Mamta rata-rata mencapai 69,14 dan di Wilayah Saireri rata-rata 68,29 yang melampaui rata-rata IPM Papua yang mencapai 65,36. Sedangkan 3 wilayah lainnya yaitu Wilayah Ha Anim rata-rata 54,90, untuk wilayah La Pago rata-rata 52,33 dan Mee Pago sebesar 57,63 masih dibawah rata-rata IPM Provinsi.

Strategi pengembangan wilayah dilaksanakan dalam kerangka sinergi Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota dan antar kabupaten/kota dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat-provinsi dan kabupaten/kota adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga setiap kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan dan menampung aspirasi kabupaten dan kota, serta mengutamakan

penyelesaian permasalahan secara nyata di kabupaten/kota. Selain itu, sinergi kebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah kabupaten dan kota mampu memahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah provinsi dengan efisien dan efektif, serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai sumber daya yang tersedia.

Sinergi dalam perencana kebijakan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkat pemerintahan (kampung/kelurahan, distrik, kabupaten/ kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipastif semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transaparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.

Sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sinergi tersebut dilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota melalui pembagian dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk menjaga harmonisasi provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, dalam upaya menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus untuk mencapai prioritas pembangunan Provinsi, memperkuat kapasitas pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan meningkatkan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten/Kota, langkah yang akan ditempuh dalam lima tahun mendatang adalah (1) sinkronisasi perencanaan program antara kementerian/lembaga, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota; dan (2) penentuan sasaran fungsional program secara bersama.

Sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang pemerintahan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah akan dilakukan upaya percepatan reformasi organisasi perangkat daerah agar mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan mutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, melaksanakan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik; serta meningkatkan daya saing daerah. Sementara itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah diarahkan untuk menjadi aparatur yang lebih handal, kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam mempercepat pengembangan wilayah akan dilakukan upaya untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Provinsi Papua dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah serta menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan Provinsi Papua tahun 2013-2018, arah dan kebijakan pengembangan kewilayahan ditujukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan daerah sejalan dengan isu strategis yang ada di setiap wilayah.

Kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Ha Anim, La Pago, dan Mee Pago dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Mamta dan Saereri. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH







BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

7.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum Provinsi Papuadalam menerjemahkan strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan, yaitu :

a. Strategi 1 : Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu :

1. Mengintensifkan Komunikasi antara lembaga Keagamaan dengan pemerintah daerah dan antar umat beragama. **Difokuskan pada** Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan dan Menjamin kebebasan setiap Umat Beragama dalam menjalankan ajaran Agamanya.
2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam aktivitas keagamaan. **Difokuskan pada** Memfasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan dan Bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan Yayasan Pengelola Pendidikan Keagamaan.
3. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial. **Difokuskan pada** Menfasilitasi terciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial Lainnya.
4. Penguatan Kapasitas Lembaga Adat dalam Pembangunan. **Difokuskan pada** Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Adat dalam Hal Aktualisasi Nilai-nilai Budaya dan Pemantapan Representasi Kultural Orang Asli Papua dalam Lembaga MRP.

b. Strategi 2 : Penegakan Hukum dan revitalisasi peran Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu :

1. Mendorong Komunikasi yang Intensif antara Aparat Penegak Hukum, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. **Difokuskan pada** Peningkatan Peran Aparatur Penegak Hukum dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

c. Strategi 3 : Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu :

1. Menyempurnakan system kepegawaian daerah, rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, mutasi dan peningkatan disiplin serta sistem Kinerja Aparatur. **Difokuskan pada** Penataan Sistem Kepegawaian dan Penyelenggaraan Pendidikan Formal /Non Formal bagi Aparatur.
2. Mengembangkan dan menerapkan Standar Operasional prosedur dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) secara konsisten. **Difokuskan pada** Penerapan Standar Oprasional dan Standar Pelayanan minimum (SOP & SPM)
3. Meningkatkan pengelolaan keuangan Daerah. **Difokuskan pada** Pengembangan sisten Reward dan Punishmen serta jenjang karier yang jelas dalam peningkatan kualifikasi SDM Aparatur.
4. Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan. **Difokuskan pada** Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal.
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. **Difokuskan pada** Penerapan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) dalam mendukung konsistensi perencanaan dan penganggaran, Penerapan Perencanaan Pembangunan berbasis Data, Pengendalian dan Evaluyasi Pembangunan Daerah.
6. Peningkatan Sinergitas antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah. **Difokuskan pada** Mengoptimalkan Sinergi antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah.
7. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan serta Pemanfaatan IPTEK untuk Peningkatan Daya Saing Daerah. **Difokuskan pada** Menerapkan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan serta Pemanfaatan IPTEK untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.

8. Mendorong Peningkatan Kesadaran dan Ketaatan terhadap Hukum dan Peraturan yang berlaku. **Difokuskan pada** Peningkatan Kapasitas Aparat penegak Hukum, peningkatan Keasadaran Masyarakat terhadap Hukum dan Paraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Memantapkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengintegrasian Perencanaan, Penganggaran serta Pengawasan melalui Sistem Informasi Manajemen. **Difokuskan pada** Memantapkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengintegrasian Perencanaan, Penganggaran serta Pengawasan melalui Sistem Informasi Manajemen.
10. Melakukan Perubahan Pola Pikir Aparatur melalui Pendidikan dan Pembinaan Kepribadian Aparatur. **Difokuskan pada** Pendidikan dan Pembinaan Kepribadian Aparatur.
11. Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan. **Difokuskan pada** Menyempurnakan Struktur Jabatan Struktural dan Mekanisme Jabatan Fungsional, Menata Kembali Hubungan Kerja antar SKPD di Propinsi dan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota, Mengembangkan Budaya Kerja Aparatur dalam rangka peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

d. Strategi 4 : Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar wilayah dan antar sektor dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah

   Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:

   1. Pembentukan dan berjalannya badan Koordinasi Wilayah Pembangunan berdasarkan 5 Wilayah Adat
   2. Peningkatan Kerjasama, Kemitraan dan Penguatan Kapasitas Lembaga DPRP serta Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga DPRP dalam rangka Penyusunan Perdasus dan Perdasi serta mengawal Implentasi Kebijakan Otsus secara Konsisten.
   3. Penyusunan Rancangan UU Otsus Plus (UU Pemerintah Papua)
   4. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya. **Difokuskan pada** Perumusan Perdasus dan Kebijakan Pemenuhan seluruh Hak-hak Dasar Orang Asli Papua, Koordinasi dan Imlementasi Perdasus dan Kebijakan Pemenuhan seluruh Hak-hak Dasar Orang Asli Papua.

e. Strategi 5 : Penguatan Fungsi Koordinasi antar lembaga daerah dan Penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Berbasis Otsus

   Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu :

1. Peningkatan Kerjasama, Kemitraan dan Penguatan Kapasitas Lembaga DPRP serta Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga DPRP dalam rangka Penyusunan Perdasus dan Perdasi serta mengawal Implentasi Kebijakan Otsus secara Konsisten. **Difokuskan pada** Peningkatan Kerjasama, Kemitraan dan Penguatan Kapasitas Lembaga DPRP, Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga DPRP dalam rangka Penyusunan Perdasus dan Perdasi serta mengawal Implentasi Kebijakan Otsus secara Konsisten.

f. Strategi 6 : Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian kependudukan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:

1. Penyerasian Pengendalian Penduduk. **Difokuskan pada** enyusunan kebijakan pengendalian penduduk, penyediaan data kependudukan yang akurat khususnya Orang Asli Papua yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan, penyediaan hasil kajian kependudukan.
2. Revitalisasi Program KB. **Difokuskan pada** Kebijakan pertumbuhan penduduk asli Papua yang berkualitas; Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; Penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; Kesehatan reproduksi; Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah.

g. Strategi 7 : Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:

1. Mendorong kemandirian peran lembaga keagamaan. **Difokuskan pada** Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keagamaan, mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keagamaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Pembinaan dan pemberdayaan PMKS dan KAT. **Difokuskan pada** Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, peningkatan bantuan sosial, serta pemberdayaan komunitas adat terpencil dan layanan pendidikan khusus bagi KAT.
3. Memfasiltasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan mendorong keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. **Difokuskan pada** Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD. Mendukung peningkatan kualitas

hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan dan kesehatan reproduksi.

h. Strategi 8 : Revitalisasi nilai-nilai budaya

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:

1. Mempertahankan dan mengembangkan Budaya dan Seni Papua. **Difokuskan pada** Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; Pengembangan kesenian yang berbasis budaya; Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; Pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal; Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (seni dan budaya) melalui pelatihan dan pendampingan pada pelaku ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya serta pengembangan kampung wisata yang berbasis seni dan budaya dengan berdasarkan 5 wilayah adat.

i. Strategi 9 : Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:

1. Mendorong pembinaan Olahraga berprestasi dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan internasional. **Difokuskan pada** Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga berstandar Nasional dan Internasional dalam rangka persiapan pencalonan Papua sebagai Tuan Rumah PON 2020, Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini.
2. Mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. **Difokuskan pada** Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkan pemuda yang unggul dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan.

j. Strategi 10 : Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu :

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan Kesehatan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga agama dan sosial lainnya. **Difokuskan pada** Upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat berbasis kearifan lokal; Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam

rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat; Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung; Kemitraan kesehatan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

2. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas secara merata diseluruh wilayah. **Difokuskan pada Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita** melalui : Penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONED dan PONEK; Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; Perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil; Peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak; Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader); Perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita; Peningkatan kemitraan bidan dan dukun, **Pengendalian penyakit Endemik, menular serta penyakit tidak menular,** melalui : Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, termasuk imunisasi; Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga survailans; Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); Penguatan penemuan penderita dan tata laksana kasus; Kesehatan lingkungan dengan menekankan pada akses terhadap air minum dan sanitasi dasar serta perubahan perilaku hygiene dan sanitasi; Survailans penyakit tidak menular; Promosi dan pemberdayaan masyarakat; serta Koordinasi dan kerjasama pengendalian HIV dan AIDS antara lain mencakup : kesehatan, pendidikan, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, pemuda, kependudukan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi, agama, dan budaya. **Perbaikan status gizi masyarakat,** melalui : Peningkatan asupan zat gizi makro dan mikro; Survailans pangan dan gizi; Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang; Pemberian Makanan tambahan bagi bayi dan anak-anak Peningkatan pemenuhan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi; Peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi. Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi, dari mulai proses produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dan lintas program terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan pangan dan budaya sangat

penting dalam rangka sinkronisasi dan integrasi kebijakan perbaikan status gizi masyarakat. **Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan masyarakat,** melalui Pemberlakuan jaminan kesehatan Papua dalam bentuk Kartu Papua Sehat (KPS) yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan lainnya (Jamkesmas, Jampersal) yang menjamin akses dan kualitas pelayanan serta tata kelola administrasi yang akuntabel dan transparan bagi masyarakat asli Papua; Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat dan peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua di seluruh puskesmas dan jaringannya (khususnya bayi, balita, ibu hamil dan lansia). **Revitalisasi fungsi Posyandu dalam pelayanan kesehatan masyarakat,** melalui : Mengutamakan pemberdayaan masyarakat termasuk mengaktifkan kembali praktik pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, Mengintergrasikan kegiatan pelayanan gizi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Mengembangkan kegiatan gizi masyarakat dengan memberdayakan lembaga masyarakat setempat seperti lembaga gereja, kelompok pengajian, PKK dan organisasi perempuan lainnya. **Ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya,** melalui Peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan; Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan; Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan; Peningkatan kompetensi SDM kesehatan; Kerjasama antara institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dalam rangka penyediaan tenaga kesehatan yang dapat bertugas sesuai dengan kondisi lokal Papua dan organisasi profesi. **Peningkatan pelayanan kesehatan, primer, sekunder dan tersier,** melalui : Pembangunan Rumah Sakit rujukan berstandar nasional di 4 (empat) wilayah (Kab. Nabire, Jayawijaya, Biak dan Merauke); Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit Jayapura berstandar Internasional; Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; Pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua (pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak, puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service); Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Puskesmas bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas;

Peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga agama. **Difokuskan pada** Kemitraan pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Mendorong kemandirian lembaga-lembaga/yayasan-yayasan keagamaan dalam pengelolaan pendidikan (YPK, YPPK, YAPIS, lain-lain); Peningkatan manajemen pendidikan.
4. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang berkualitas. **Difokuskan pada** Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. **Peningkatan Akses dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua** melalui : ***Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dan BOSDA***; Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang; ***Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (pendidikan berpola asrama, SD kecil dan guru kunjung***); Peningkatan mutu proses pembelajaran; Peningkatan kesempatan lulusan SD untuk melanjutkan ke SMP, serta Penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan memasukan kurikulum berbasis kearifan lokal Papua yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, kerjasama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (*soft skills*), jiwa kewirausahaan, serta memperkuat pendidikan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan pendidikan multikultural serta toleransi beragama guna mewujudkan peserta didik yang bermoral, beretika, berbudaya, beradab, toleran, dan memahami keberagaman. Peningkatan kualitas dilakukan juga melalui pendidikan anak yang berprestasi dan pemberian beasiswa. **Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua** melalui : Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal; Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung SMA/SMK; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan

yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki jiwa kewirausahaan; Peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri Peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan Peningkatan ketersediaan guru SMK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal. **Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat,** melalui : (a) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (b) revitalisasi perpustakaan; (c) peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; (d) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; (e) peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan; dan (f) pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan. **Akselarasi dan afirmasi kualitas pendidikan** melalui : pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua dari jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi; Pendidikan 1000 Doktor (PhD).

5. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal khususnya pemberantasan Buta Huruf. **Difokuskan pada** Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal; Peningkatan pendidikan kecakapan hidup untuk masyarakat usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; Peningkatan keaksaraan dan peningkatan minat baca.
6. Meningkatkan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. **Difokuskan pada** Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, pelatihan, pendidikan dan penyediaan berbagai tunjangan guru; Penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah Peningkatan profesionalisme guru sehingga mempunyai mental dan jiwa melayani pada daerah-daerah terpencil; Peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan Penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
7. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan IPTEK. **Difokuskan pada** Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui penataan kelembagaan Iptek, penguatan Sumber Daya Iptek dan penataan jaringan Iptek; Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, teknologi kesehatan dan obat tradisional serta pelaksanaan Prospek; Penelitian tentang sosial budaya dan biodiversity Papua.

k. Strategi 11 : Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis Keunggulan Lokal Daerah

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu :

1. Menyiapkan prosedur, perijinan investasi. **Difokuskan pada** reformasi prosedur peijinan investasi.
2. Mengembangkan sistem promosi dan peluang investasi daerah. **Difokuskan pada** mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung investasi. **Difokuskan pada** Membangun sarana dan prasarana investasi.
4. Menyediakan Regulasi pendukung investasi. **Difokuskan pada** Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi.
5. Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. **Difokuskan pada** Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri, dan Pengendalian laju inflasi.
6. Mendorong tumbuh dan berkembangnya produktivitas koperasi dan UKMK. **Difokuskan pada** Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah, Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah, Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah, Pengembangan sarana promosi hasil produksi, Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, dan Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung.
7. Mendorong produktivitas industri kecil dan menengah. **Difokuskan pada** Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry, Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah, Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah, Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta, Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir, Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industry.
8. Pembukaan dan perluasan Lapangan Kerja. Difokuskan pada Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, Penyiapan tenaga kerja siap pakai dan Penyedian peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.
9. Revitalisasi fungsi lembaga promosi pariwisata. Difokuskan pada promosi dan pemasaran obyek pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata,

promosi pariwisata dalam dan luar negeri, pengembangan obyek pariwisata unggulan, pembangunan saran dan prasarana pariwisata dan pengembangan jenis dan paket wisata.

l. Strategi 12 : Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu :

1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yg dapat menggerakan wilayah tertinggal. **Difokuskan pada** Optimalisasi lahan produksi pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan / kehutanan, Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah, Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat, mendorong ketersediaan cadangan pangan ditingkat pemerintah dan masyarakat, dan meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya local, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, Penyediaan tenaga penyuluh/pendamping ditingkat masyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, dan Implementasi Prospek di seluruh Kabupaten/Kota se Papua.
2. Mengembangkan usaha pemanfaatan kayu, pengembangan industri kayu rakyat, pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. **Difokuskan pada** Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan, Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu, Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat, Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat, dan Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat.
3. Mengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan. Difokuskan pada menyiapkan kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan, pengembangan SDM pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan, pengembangan kelompok bisnis mandiri masyarakat mitra KPH.
4. mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi hasil hutan. Difokuskan pada peningkatan usaha industri perkayuan terpadu, pengembangan hutan tanaman rakyat, pembinanaan produksi dan peredaran hasil hutan.

m. Strategi 13 : Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu :

1. Pengembangan wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan sarana dan prasarana untuk mengurangi kesenjangan inter dan antar wilayah. Difokuskan pada Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MAMTA (Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Keerom, Kab. Mamberamo Raya) : Pembangunan Jalan Ring Road Jayapura-Sentani; Pembangunan Jembatan Holtekamp; Peningkatan Jalan Waena-Arso V; Lintas Mamta-Lapago : Pembangunan jalan jayapura-elelim-wamena-mulia; Pembangunan Jembatan tersebar di wilayah mamta; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan. Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH SAERERI (Kab. Biak Numfor, Kab Supiori, Kab Waropen, Kab. Kepualauan Yapen : Peningkatan Jalan Biak-Supiori; Pembangunan Jalan Serui-Ansus; Pembangunan Jalan Koweda-Botawa; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan. Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH HA ANIM (Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat) : Peningkatan Jalan Merauke- Keppi; Pembangunan Jalan Tanah Merah-Mindiptana-Oksibil; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan. Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH LAPAGO (Kab. Jayawijaya, Kab. Lany Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Nduga) : Peningkatan Jalan Wamena-Habema-Kenyan-Nduga; Peningkatan Jalan Wamena- Tiom; Peningkatan Jalan Wamena- Tolikara- Mulia; Pembangunan Jalan Wamena-Tolikara- Dekai; Pembangunan Jalan Mulia-Wewoluk-Sinak; Pembangunan Jalan Pasvaley-Kobakma; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan. Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MEEPAGO (Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Mimika) : Pembangunan Jalan Maatadi (Deiyai) - Digikebo (Dogiyai); Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali; Pembangunan Jalan Duntek (Dogiyai) - Munayepa/Iyei (Paniai); Pembangunan Jalan Sugapa - Hitadipa - Ilaga; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan; Pembangunan Jaringan Irigasi; Pembangunan Jaringan Air Bersih tersebar di 5 Wilayah Adat; Pembangunan Pengaman Pantai. Pembangunan Bandara WILAYAH MAMTA (Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Keerom, Kab Mamberamo Raya) : Peningkatan Bandara Sentani; Pembangunan Bandara Mamberamo Raya;

Pembangunan Bandara Sarmi; Pembangunan Bandara Senggi. Pembangunan Bandara WILAYAH SAERERI (Kab. Biak Numfor, Kab Supiori, Kab Waropen, Kab. Kepualauan Yapen : Peningkatan Bandara Frans Kaisepo Biak Numfor; Pembangunan Bandara Kamanap Serui; Pembangunan Bandara Botawa Waropen. Pembangunan Bandara WILAYAH HA ANIM (Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat) : Peningkatan Bandara Moppah Merauke; Pembangunan Lapter Tanah Merah; Peningkatan Lapter Keppi. Pembangunan Bandara WILAYAH LAPAGO (Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika Kab. Lany Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Nduga) : Peningkatan Bandara Wamena; Peningkatan Bandara Dekai; Pembangunan Bandara Elelim; Peningkatan Bandara Oksibil; Peningkatan Bandara Mulia; Pembangunan Bandara Sinak Puncak; Peningkatan Lapter Tiom; Peningkatan Lapter Tolikara; Peningkatan Lapter Kobakma; Peningkatan Lapter Nduga. Pembangunan Bandara WILAYAH MEEPAGO (Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Mimika) :v Peningkatan Bandara Moses Kilangi Timika; Pembangunan Bandara Wanggara Nabire; Pembangunan Bandara Wagheta Deiyai; Pembangunan Bandara Sugapa Intan Jaya; Pembangunan terminal Type B; Pengadaan Sarana Angkutan; Pembangunan Fasilitas Transportasi Darat Tersebar di Seluruh Wilayah Papua. Pembangunan Pelabuhan WILAYAH MAMTA (Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Keerom, Kab Peg Mamberamo Raya) : Pembangunan Pelabuhan Depapre; Pembangunan Pelabuhan Sarmi. Pembangunan Pelabuhan WILAYAH SAERERI (Kab. Biak Numfor, Kab Supiori, Kab Waropen, Kab. Kepualauan Yapen : Peningkatan Pelabuhan Biak Numfor; Peningkatan Pelabuhan Serui; Pembangunan Pelabuhan Waropen. Pembangunan Pelabuhan WILAYAH HA ANIM (Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat) : Pembangunan Pelabuhan Kelapa dua Merauke; Pembangunan Pelabuhan Tanah Merah; Pembangunan Pelabuhan Keppi; Pembangunan pelabuhan Mindiptana. Pembangunan Pelabuhan WILAYAH LAPAGO (Kab. Jayawijaya, Kab. Lany Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Nduga) : Pembangunan Pelabuhan Kenyam; Pembangunan Pelabuhan Dekai. Pembangunan Pelabuhan WILAYAH MEEPAGO (Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Mimika) : Peingkatan Pelabuhan Pomako; Peningkatan Pelabuhan Nabire; Peningkatan pelabuhan Napan. Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 wilayah adat.

n. Strategi 14 : Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kodisi dan budaya setempat

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu :

1. Mempercepat Pembangunan Pemanfaatan energi murah dan ramah lingkungan, Rumah layak huni serta Sarana Prasarana air bersih. Difokuskan pada Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di lima Wilayah Adat, Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di lima wilayah adat, pembangunan PLTA.

o. Strategi 15 : Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:

1. Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan. Difokuskan pada Sosialisasi rencana tata ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat dan pemetaan WPR dan Penegakan hukum terhadap rencana tata ruang.
2. Memperkuat implementasikan RAD GRK. Difokuskan pada Implementasi RAD GRK.
3. Membangun *Green Investment*
4. Peningkatan kualitas lingkungan
5. Peningkatan kapasitas sistem perizinan lingkungan
6. Peningkatan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
7. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.

7.2 Program Pembangunan Daerah

Rincian kebijakan umum dan program pembangunan daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
	Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius.	**Revitalisasi dan Optimalisasi Peran lembaga Keagaaman dan Adat.**	**Mengintensifkan Komunikasi antara lembaga Keagamaan dengan pemerintah daerah dan antar umat beragama.**						
				Urusan Tenaga Kerja					
1.14 - 17				Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tersusunnya Perencanaan Kerja makro Mikro		1	5	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		12	60	Biro Hukum
1.20 - 64				Program Pembinaan Lembaga Keagamaan	Tercapainya satu kesepakatan dalam evaluasi dana bantuan oleh pemerintah dan lembaga keagamaan		94	680	Biro Bina Mental Spiritual
	Meningkatnya masyarakat Papua yang berbudaya.	**Revitalisasi dan Optimalisasi Peran lembaga Keagaaman dan Adat.**	**Penguatan Kapasitas Lembaga Adat dalam Pembangunan.**						
				Urusan Kebudayaan dan Pariwisata					
1.17 - 15				Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah masyarakat yang memahami dan melestarikan nilai budaya		100	750	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.17 - 18				Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah masyarakat yang ikut mengembangkan pengelolaan kekayaan budaya		100	500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
1.19 - 18				Program Kemitraan pengembangan w aw asan kebangsaan	Tersosialisasinya pemahaman masyarakat tentang 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI)		3300	6500	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 74				Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Peraturan Daerah	Meningkatnya Nilai Budaya Papua		90	450	Kantor Penghubung Daerah
	Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua.	**Penegakan Hukum dan revitalisasi peran Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat.**	**Mendorong Komunikasi yang Intensif antara Aparat Penegak Hukum, Masyarakat dan Pemerintah Daerah.**						
				Urusan Perumahan Rakyat					
1.04 - 17				Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Tersusunnya Perencanaan Permukiman		1	5	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
				Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
1.19 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan adminstrasi perkantoran		75	450	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
1.19 - 16				Porgram Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tersosialisasinya pemahaman masyarakat tentang kantrantibmas di daerah		400	2000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
1.19 - 19				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ketertiban dan keamanan di daerah		1000	2000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
1.19 - 20				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemberantasan penyakit masyarakat		500	10000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
1.19 - 21				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang Politik		2400	5000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
1.19 - 23				Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Undang-undang Ormas/LSM		1100	3000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
				Urusan Pemerintahan Umum					

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat Prestasi Kerja dan Disiplin Aparatur		100	100	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan SDM Aparatur Inspektorat yang mengikuti Diklat PIM II, PIM III dan PIM IV		32	160	Inspektorat Provinsi
1.20 - 20				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkan keamanan dan kenyamanan lingkungan		24	60	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.20 - 26				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pembentukan produk hukum daerah dan peningkatan SDM perancang produk hukum		250	1250	Biro Hukum
1.20 - 26				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pembentukan produk hukum daerah dan peningkatan SDM perancang produk hukum		250	1250	Biro Hukum
1.20 - 38				Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Admnistrasi Kepegawaian PNS di Lingkungan Provinsi Papua		2351	13251	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
1.20 - 41				Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Penanganan Perkara, Perdata, TUN, Uji Materiil		23	115	Biro Hukum
1.20 - 59				Program Pengembangan dan Pengamanan Negara	Jumlah Batas dan Pos Pengamanan Perbatasan yang Berfungsi Baik		2	10	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
1.20 - 66				Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Terlaksananya Penataan dan Pemutahiran Arsip /Dokumen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua		100	100	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
1.20 - 77				Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Meningkatnya pengembangan pembinaan kemasyarakatan dan kemahasiswaan		90	450	Kantor Penghubung Daerah

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Kepegawaian					
1.21 - 18				Program Pengembangan Data dan informasi	Tervalidasinya data dan Informasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua		100	100	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua.	**Revitalisasi dan Optimalisasi Peran lembaga Keagaaman dan Adat.**	**Mendorong Tumbuh Kembangnya Peran Lembaga Adat.**						
				Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
1.19 - 17				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Tersosialisasinya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan di daerah		400	2000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Prosentase Pelayanan Manajemen Administrasi yang Prima yang mendukung tercapainya Aparatur Profesional		100	500	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Adanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 4 untuk digunakan oleh PNS Biro Tata Pemerintahan		32	12	Biro Tata Pemerintahan
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase jumlah sarana dan Prasarana lebih memadai dan tepat fungsi		100	500	Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Sarana Prasarana yang mendukung tercapainya Pelaksanaan Tupoksi Aparatur		100	100	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Tugas Rutin Kantor		**44**	220	Inspektorat Provinsi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana penunjang w aw asan aparatur		100	500	Inspektorat Provinsi
1.20 - 26				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Pedoman Kepegaw aian Pemerintah Provinsi Papua		100	500	Badan Kepegaw aian dan DIKLAT Aparatur
1.20 - 32				Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		65	375	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.20 - 39				Program penerapan kepemerintahan yang baik	Meningkatnya Prosentase Efisiensi dan Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Baik		50	250	Badan Kepegaw aian dan DIKLAT Aparatur
1.20 - 41				Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Terlaksananya proses penanganan perkara di lembaga peradilan		40	220	Badan Kepegaw aian dan DIKLAT Aparatur
1.20 - 73				Program Pembinaan Adat	Teridentifikasi dan Tertatanya Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua		0	5	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 73				Program Pembinaan Adat	Tersusunnya Produk Hukum Adat di Provinsi Papua		0	10	Biro Pemerintahan Kampung
	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur.	**Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.**	**Menyempurnakan system kepegawaian daerah, rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, mutasi dan peningkatan disiplin serta sistem Kinerja Aparatur.**						
				Urusan Pendidikan					
1.01 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran		45	500	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran		45	500	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
1.01 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase capaian program		75	400	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
1.01 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase capaian program		75	400	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.01 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase capaian program		75	400	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
1.01 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase capaian program		75	400	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
				Urusan Kesehatan					
1.02 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		80	490	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Dalam Menunjang Kinerja Aparatur		80	475	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Tenaga Medis, Paramedis Dan Non Medis		80	490	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Building Aparatur		20	100	Dinas Kesehatan
1.02 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Building Aparatur		20	100	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah petugas RSJD yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis		14	150	Rumah Sakit Jiw a Abepura
1.02 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya bahan informasi keuangan		5	100	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02 - 16				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya angka gizi buruk, jumlah kematian masyarakat orang asli papua		1000	20000	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02 - 23				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanan		100	500	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02 - 23				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Masih rendahnya tingtkat pengetahuan tenaga kesehatan papua sesuia bidang profesi pelayanan		20	175	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.02 - 26				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiw a/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terbangunnya prasarana kesehatan yang baik		0	0	Dinas Pekerjaan Umum
1.02 - 26				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiw a/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan		90	500	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02 - 26				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiw a/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah kunjungan penderita meningkat serta kurangnya sarana penunjang pelayanan		3	50	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
1.02 - 27				Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiw a/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Yang Berfungsi Baik		80	475	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02 - 27				Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiw a/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah polik, kendaraan operasional yang laik pakai berkurang		3	60	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
				Urusan Pekerjaan Umum					
1.03 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Surat		2000	10000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyedia jasa dalam 1 tahun		12	60	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah orang jasa pengamanan		8	40	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah set perlengkapan		0	3	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah set peralatan		0	4	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung pemeliharaan		0	4	Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.03 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan		0	113	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan pemeliharaan gedung		0	5	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung yg direhabilitasi		0	5	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung direhabilitasi		0	1	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung yang ditata		0	1	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung yang ditata		0	1	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung yang dibangun		0	2	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung yang dipelihara		0	2	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pakaian pegaw ai		0	2623	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal		0	20	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Akutansi Manajemen Keuangan Bidang Ke-Pu-An		0	120	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pengaw asan Pekerjaan Konstruksi (Construction Audit) Bidang Ke-Pu-An		0	180	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kualifikasi Jabatan Fungsional Bidang Ke-Pu-An		0	180	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Manajemen Aset Bidang Ke-Pu-An		0	240	Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan monitoring & evaluasi program pemberdayaan kampung		0	2	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Fasilitasi Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Bidang Ke-PU-an		0	240	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen data klasifikasi aset		0	3	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Pembuatan Data Klasifikasi Aset Bidang Ke-Pu-An		0	60	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Teknis Sistem Perpajakan Bidang Ke-Pu-An		0	60	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Manajemen Kepegaw aian Tentang Hak Dan Kew ajiban Serta Disiplin Pegaw ai Bidang Ke-Pu-An		0	120	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Tata Persuratan dan Arsip Bidang Ke-Pu-An		0	240	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan penyiapan evaluasi		0	5	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimtek Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Ke-Pu-An		0	60	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Budaya Kerja Prestatif Bidang Ke-Pu-An		0	120	Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Administrasi Kontrak Konstruksi Bidang Ke-Pu-An		0	120	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Perencanaan Air Minum Bidang Ke-Pu-an		0	120	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan Koordinasi, Advisory dan Pemantauan		0	1	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Akutansi Keuangan Bidang Ke-Pu-an		0	300	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimtek Teknis Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bidang Ke-Pu-an		0	120	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan yang dimonitor dan dievaluasi		0	40	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimtek Penanggulangan Abrasi Pantai		0	120	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimtek Pemeliharaan Rutin Jalan		0	120	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Sosialisasi Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Ke-Pu-An		0	180	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan kegiatan penyelesaian temuan		0	5	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Kabupaten yang dimonitor melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM)		0	116	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan		0	180	Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengaw asan Pekerjaan Jalan dan Jembatan		0	60	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Mind Setting		0	60	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana Banjir		0	120	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis OP Jaringan Irigasi		0	120	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung		0	60	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi		0	60	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		0	5	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan keuangan semesteran		0	5	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan keuangan akhir tahun		0	5	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Renja, RKA dan Perubahan APBD		0	15	Dinas Pekerjaan Umum
				Urusan Perencanaan Pembangunan					

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.06 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	■Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran		12	60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianyan Sarana dan Prasarana kantor		12	60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur		0	500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 - 15				Program Pengembangan data/informasi	Persentase capaian program		75	400	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
1.06 - 16				Program Kerjasama Pembangunan	Persentase capaian program		75	400	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
1.06 - 21				Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian program		75	400	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
				Urusan Lingkungan Hidup					
1.08 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	lancarnya urusan administrasi Perkantoran		87	478	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		95	465	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
				Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil					
1.10 - 15				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase capaian program		75	400	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
				Urusan Sosial					
1.13 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		100	500	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
1.13 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia		100	500	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
1.13 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur yang meningkat		100	500	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
1.13 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase meningkatnya SDM Pegawai yang terlatih		100	500	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
1.13 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan		100	500	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
				Urusan Kebudayaan dan Pariwisata					

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.17 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		300	500	Dinas Kebudayaan dan Pariw isata
1.17 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur		100	500	Dinas Kebudayaan dan Pariw isata
1.17 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang displin		180	900	Dinas Kebudayaan dan Pariw isata
1.17 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang berkompetensi		100	500	Dinas Kebudayaan dan Pariw isata
1.17 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja yang akuntabel		100	500	Dinas Kebudayaan dan Pariw isata
				Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
1.19 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		75	425	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
1.19 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya aparatur		70	405	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
1.19 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya laporan keuangan yang akuntabel		80	435	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
1.19 - 22				Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dalam Melakukan Pencegahan Dini Dalam Penanggulangan Korban Bencana		75	425	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya cakupan pelayanan Administrasi perkantoran		5	30	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas pelayanan Aparatur sesuai Tupoksi		80	455	Biro Humas dan Protokol
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		100	500	Badan Pengelolaan Infrastruktur
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		90	450	Kantor Penghubung Daerah

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		75	425	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran		20	100	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Adanya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Dokumen Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		47	235	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya ATK Penunjang Operasional kantor		30	150	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Buku-Buku Peraturan dan Blanko bagi Aparat dan Pelayanan Administrasi Kantor		1000	5000	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya makanan dan Minuman bagi PNS dan Tamu Biro Pemerintahan Kampung		150	750	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksanannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Keluar daerah		40	200	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekretariat MRP secara baik dan berkelanjutan		100	500	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terw ujudnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin aparatur		0	70	Biro Bina Mental Spiritual
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan Prasarana Aparartur		5	25	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur dibidang Kehumasan dan Keprotokolan		45	390	Biro Humas dan Protokol

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran		243	1240	Badan Pengelolaan Infrastruktur
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasaran		65	405	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya SDM dan Kinerja Aparatur		90	450	Kantor Penghubung Daerah
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya SDM dan Kinerja Aparatur		75	425	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana Peralatan Kerja PNS Biro pemkam		27	135	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana Kerja Yang nyaman Bagi PNS Biro Pemkam		25	125	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksannya Pemeliharaan Rutin dan kelengkapan Dokumen Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		47	235	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana Peralatan Kerja PNS Biro Pemkam		25	125	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan w aw asan sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat MRP Provinsi Papua		100	500	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dalam peningkatan disipin pegaw ai dalam berpakaian		85	425	Dinas Pendapatan Daerah
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dalam peningkatan disipin pegaw ai dalam berpakaian		85	425	Sekretariat Daerah

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Terw ujudnya profesionalisme dan akuntabilitas kedisiplinan pegaw ai		0	2250	Biro Bina Mental Spiritual
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase tingkat disiplin Pegaw ai meningkat menjadi lebih baik dan efektif		40	305	Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dalam peningkatan disipin pegaw ai dalam berpakaian		85	425	Biro Umum dan Perlengkapan
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Persentase Kehadiran dan Disiplin Pegaw ai		2	10	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Profesionalisme Aparatur		60	425	Biro Humas dan Protokol
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya Peningkatan Prestasi dan Disiplin Aparatur		100	100	Badan Kepegaw aian dan DIKLAT Aparatur
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Mew ujudkan keseragaman demi meningkatnya pelayanan kepada Dew an dan Masyarakat		177	964	Sekretariat Dew an Perw akilan Rakyat Papua
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100	500	Badan Pengelolaan Infrastruktur
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dalam peningkatan disipin pegaw ai dalam berpakaian		85	425	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas penunjang kedisiplinan Pegaw ai		122	1530	Inspektorat Provinsi
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur		65	395	Kantor Satuan Polisi Pamong Praia
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Pegaw ai Dalam Berpakaian		90	450	Kantor Penghubung Daerah
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Pegaw ai Dalam Berpakaian		75	425	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Aparatur yang Taat/Mematuhi Aturan Pegawai		50	250	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya Atribut Bagi Aparat kampung		1300	12150	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		12	60	Biro Hukum
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Mewujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur dalam peningkatan mutu pelayanan		85	425	Dinas Pendapatan Daerah
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur yang tedidik dan terlatih		32	925	Biro Bina Mental Spiritual
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Mewujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur dalam peningkatan mutu pelayanan		85	425	Biro Umum dan Perlengkapan
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Building bagi Aparatur		6	30	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya wawasan pengetahuan,ketrampilan dan profesionalisme aparatur		66	145	Badan Pengelolaan Infrastruktur
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Mewujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur dalam peningkatan mutu pelayanan		85	425	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Mutu Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kelancaran Pelayanan Pemerintah		90	450	Kantor Penghubung Daerah
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Mutu Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kelancaran Pelayanan Pemerintah		75	425	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur		12	60	Biro Hukum
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terbinanya Aparat Yang Memahami Manajemen dalam Melaksanakan Pemerintahan kampung		0	350	Biro Pemerintahan Kampung

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan Kinerja Inspektorat		8	40	Inspektorat Provinsi
1.20 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		90	450	Kantor Penghubung Daerah
1.20 - 43				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP	Meningkatnya Kelancaran Rapat-Rapat dan Penyelenggaraan Kegiatan MRP		100	500	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
1.20 - 76				Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Meningkatkan Koordinasi dan Kunjungan Pejabat Pemerintah Provinsi Papua		90	450	Kantor Penghubung Daerah
				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.22 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksanaya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dilingkungan BPMKBKK		12	60	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
1.22 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya kelancaran tugas rutin kantor yang memadai		12	60	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
1.22 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pelayanan aparatur yang profesional		45	225	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
				Urusan Kearsipan					
1.24 - 15				Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya sistem administrasi kearsipan guna peningkatan dan pengayaan data informasi		85	425	Biro Umum dan Perlengkapan
1.24 - 15				Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya sistem administrasi kearsipan guna peningkatan dan pengayaan data informasi		85	425	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
				Urusan Komunikasi dan Informatika					
1.25 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya SDM DPTIK		30	110	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatkan pengetahuan peraturan perundangan		400	1000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Pertanian					
2.01 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang memadai		7	35	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terw ujudnya layananan administrasi perkantoran yang profesional		100	500	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarna aparatur yang memadai		8	40	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur		100	500	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam perpakaian dinas		475	2800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Kedisiplinan kerja aparatur melalui penyedian pakain dinas		224	1120	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dinas		13	165	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur		30	180	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan dinas		5	25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan yang akuntabel		100	500	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 26				Program Perencanaan Pembangunan	Kualitas perencanaan terukur		75	500	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Urusan Kehutanan					
2.02 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Surat yang di proses		650	3610	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kebersihan yang digunakan		12	75	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan kerja yang dilakukan peraw atan		30	200	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah alat tulis kantor yang digunakan		50	250	Dinas Kehutanan dan Konservasi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
2.02 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah cetakan dan penggandaan		30	150	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan bacaan yang dibutuhkan		90	450	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang dibutuhkan		50	250	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga Satpam yang di pekerjakan		6	30	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Sarana kendaraan dinas/ operasional		1	15	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah bangunan kantor yang dibangun		1	5	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan gedung kantor		20	100	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah meubelair yang di butuhkan		50	250	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Perangkat sistem information center kehutanan		0	5	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah prasarana yang direhabilitasi		1	5	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah bangunan kantor yang direhabilitasi		1	5	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah bangunan kantor yang di bangun		2	10	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah bangunan gedung kantor yang dilakukan peraw atan		1	5	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan peraw atan		15	100	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah unit pengandaan tanah		5	25	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Pakaian dinas aparatur kehutanan		250	1500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Pelatihan kew irausahaan bagi aparatur kehutanan yang purna tugas		5	25	Dinas Kehutanan dan Konservasi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
2.02 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Fasilitasi kegiatan kepramukaan		185	950	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 4				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi pindah dari dan antar unit kerja dalam lingkup Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua		10	75	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur kehutanan yang mengikuti diklat		30	150	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan tahunan		1	5	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah		1	15	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		1	5	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan keuangan tahunan		1	5	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan keuangan bulanan		12	60	Dinas Kehutanan dan Konservasi
				Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral					
2.03 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		10	90	Dinas Pertambangan dan Energi
2.03 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana untuk medukung pelayanan pemerintahan		40	95	Dinas Pertambangan dan Energi
2.03 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Meningkatnya Disiplin PNS		80	90	Dinas Pertambangan dan Energi
2.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Meningkatnya Aparatur PNS yang Bersertifikasi Teknis		30	90	Dinas Pertambangan dan Energi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
2.03 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		30	90	Dinas Pertambangan dan Energi
				Urusan Kelautan dan Perikanan					
2.05 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan sumberdayanya		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Urusan Perdagangan					
2.06 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD		100	500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.06 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai dengan Standart daerah		100	500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.06 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur		100	500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.06 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur		100	500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.06 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Pelaporan capaian Kinerja		100	500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	**Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.**						

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Kesehatan					
1.02 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan laporan kinerja		4	20	Dinas Kesehatan
				Urusan Perencanaan Pembangunan					
1.06 - 21				Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan		6	5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 - 27				Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan		100	500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 - 28				Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Tersedianya Data dan Informasi Hasil Litbang IPTEK		20	62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Urusan Lingkungan Hidup					
1.08 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan fungsi sarana kantor		90	465	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
				Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
1.15 - 19				Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tingkat Ketersedian Data dan Informasi Untuk Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan kota baik dari Segi Jumlah, Jenis maupun akurasinya		10	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Sarana Prasarana untuk Mendukung Pelayanan Pemerintah		11	60	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
1.20 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Renja, RKA dan Perubahan APBD Biro Pemkam		3	15	Biro Pemerintahan Kampung
				Urusan Kehutanan					
2.02 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Pelayanan hari-hari besar		3	25	Dinas Kehutanan dan Konservasi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi.	**Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.**	**Peningkatan Sinergitas antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah.**						
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Mew ujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam melakukan pelayanan birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi		85	425	Dinas Pendapatan Daerah
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Mew ujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam melakukan pelayanan birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi		85	425	Sekretariat Daerah
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Mew ujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam melakukan pelayanan birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi		85	425	Biro Umum dan Perlengkapan
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Mew ujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam melakukan pelayanan birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi		85	425	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1.20 - 28				Pembinaan Pemuda Lembaga Keagamaan	Meningkatnya Interaksi dan arus Informasi antara Pemerintah dan Publik (stake holder) melalui Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi		70	440	Biro Humas dan Protokol
1.20 - 29				Program Peningkatan Pengaw asan dan Akuntabilitas Aparatur	Meningkatnya Citra Pemda yang Positif dimata Publik		60	425	Biro Humas dan Protokol

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 30				Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Pelayanan/Penyelenggaraan kegiatan/acara keprotokolan		75	450	Biro Humas dan Protokol
1.20 - 78				Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Informasi dalam bentuk buku panduan, dan audio visual		90	450	Kantor Penghubung Daerah
				Urusan Komunikasi dan Informatika					
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan/perundang-undangan tentang kominfo di daerah		3	0	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Tersedianya portal citizen berupa media informasi bagi masyrakat		4	11	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 17				Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatkan ketrampilan masyrakat dan aparatur		240	1705	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 18				Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan POSTEL bagi pemerintah kab/kota sesuai kewenangan kerja daerah		2	25	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 18				Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan peraturan POSTEL bagi penyelenggara jasa POSTEL di daerah		53	200	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 18				Program kerjasama informasi dengan mas media	Memberikan informasi kegiatan Dinas PTIK dalm hal pelayanan publik		3	15	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Urusan Kelautan dan Perikanan					
2.05 - 25				Program Pengembangan Data dan Informasi	Data dan informasi kelautan dan perikanan online, up to date dan mudah diakses		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN.	**Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**	**Mendorong Peningkatan Kesadaran dan Ketaatan terhadap Hukum dan Peraturan yang berlaku.**						

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 58				Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah SKPD yang dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dan laporan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan		6	30	Inspektorat Provinsi
1.20 - 58				Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan		9	50	Inspektorat Provinsi
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik.	**Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**	**Memantapkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengintegrasian Perencanaan, Penganggaran serta Pengawasan melalui Sistem Informasi Manajemen.**						
				Urusan Kesehatan					
1.02 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Persentase Capaian Realisasi Keuangan Sesuai Dengan Rencana		100	500	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan yang diselesaikan		6	30	Rumah Sakit Jiwa Abepura
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlatihnya Aparatur / para Pejabat pada SKPD yang membidangi Pemerintahan kampung dalam Pengelolaan keuangan Kampung		176	350	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Mewujudkan peningkatan pemenuhan kualitas penyelenggaraan sistem penyelenggaran keuangan yang tertib dan akurat		85	425	Biro Umum dan Perlengkapan

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Mew ujudkan peningkatan pemenuhan kualitas penyelenggaraan sistem penyelenggaran keuangan yang tertib dan akurat		85	425	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1.20 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan Biro Pemkam Untuk Laporan Akhir Tahun		1	5	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 17				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan yang akuntable		85	425	Dinas Pendapatan Daerah
1.20 - 17				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan yang akuntable		85	425	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1.20 - 18				Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Terw ujudnya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua		85	425	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1.20 - 19				Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terw ujudnya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah distrik / desa / kampung di Provinsi Papua		85	425	Dinas Pendapatan Daerah
1.20 - 19				Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terw ujudnya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah distrik / desa / kampung di Provinsi Papua		85	425	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1.20 - 26				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pengaw asan Terhadap Harga Pembelian/Pengadaan		85	425	Biro Umum dan Perlengkapan
1.20 - 29				Program Peningkatan Pengaw asan dan Akuntabilitas Aparatur	Hasil pengaw asan yang dapat ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan		46	230	Inspektorat Provinsi
1.20 - 29				Program Peningkatan Pengaw asan dan Akuntabilitas Aparatur	Terw ujudnya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel		40	200	Inspektorat Provinsi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 44				Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Terw ujudnya kajian-kajian serta data sumber pendapatan daerah demi peningkatan PAD		85	425	Dinas Pendapatan Daerah
	Tertatanya Sistem dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan.	**Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**	**Melakukan Perubahan Pola Pikir Aparatur melalui Pendidikan dan Pembinaan Kepribadian Aparatur.**						
				Urusan Kesehatan					
1.02 - 4				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Jumlah Pegaw ai yang purna tugas		5	25	Dinas Kesehatan
				Urusan Pekerjaan Umum					
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan Jumlah kegiatan pengembangan dan pengelolaan		0	5	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan data		0	5	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah fasilitator masyarakat program pembangunan infrastruktur		0	8	Dinas Pekerjaan Umum
				Urusan Lingkungan Hidup					
1.08 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	meningkatnya Disiplin Aparatur		90	475	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dan meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	490	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
				Urusan Penanaman Modal					
1.16 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	500	Badan Koordinasi Penanaman Modal
1.16 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor BKPM Provinsi Papua		100	500	Badan Koordinasi Penanaman Modal
1.16 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin pegaw ai BKPM Provinsi Papua		100	500	Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.16 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur BKPM Provinsi Papua yang profesional		52	260	Badan Koordinasi Penanaman Modal
1.16 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan SKPD		100	500	Badan Koordinasi Penanaman Modal
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekretariat MRP secara baik dan berkelanjutan		100	500	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mew ujudkan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima		85	425	Dinas Pendapatan Daerah
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mew ujudkan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima		85	425	Sekretariat Daerah
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Prosentase Pelayanan Manajemen Administrasi yang Prima yang mendukung tercapainya Aparatur Profesional		0	19495	Biro Bina Mental Spiritual
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat sebanyak 1000 surat		1000	5000	Biro Tata Pemerintahan
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Tugas Kantor selama		12	60	Biro Hukum
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang lebih Efektif dan Efisien		100	500	Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mew ujudkan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima		85	425	Biro Umum dan Perlengkapan
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan		12	60	Sekretariat Dew an Perw akilan Rakyat Papua
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mew ujudkan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima		85	425	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya fasilitas penunjang kelancaran pelaksanaan tugas rutin kantor		350	1750	Inspektorat Provinsi
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Pemerintah		75	395	Kantor Satuan Polisi Pamong Praia
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja kesekretariatan kantor		72	360	Inspektorat Provinsi
1.20 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan kantor		1	5	Inspektorat Provinsi
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatgnya sarana prasarana kantor		20000000	250000000	Biro Hukum
1.20 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Mew ujudkan Pelayanan yang mendukung kegiatan Kedew anan		67	298	Sekretariat Dew an Perw akilan Rakyat Papua
1.20 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Aparatur		80	400	Biro Tata Pemerintahan
1.20 - 4				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Mew ujudkan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan purna tugas PNS		85	425	Dinas Pendapatan Daerah
1.20 - 4				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Mew ujudkan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan purna tugas PNS		85	425	Sekretariat Daerah
1.20 - 4				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Mew ujudkan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan purna tugas PNS		85	425	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Adanya Pelatihan, Sertifikasi, dan Diklat-diklat Penjenjangan guna meningkatkan SDM Aparatur Biro Tata Pemerintahan		40	200	Biro Tata Pemerintahan
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah presentase Kinerja Aparatur menjadi efektif dan efisien		43	215	Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
1.20 - 24				Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Laporan HAsil Pemeriksaan Khusus atas surat pengaduan masyarakat		0	20	Inspektorat Provinsi
1.20 - 55				Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatkan kualitas bahan kebijakan pembenahan birokrasi dan pemantapan kelembagaan		43	215	Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 67				Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Mew ujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kebijakan Pembangunan yang berkesinambungan		600	3000	Biro Tata Pemerintahan
1.20 - 68				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Adanya Koordinasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota dan Distrik		29	145	Biro Tata Pemerintahan
1.20 - 71				Program Pengembangan Kampung	Tersusunnya Kode dan data Wilayah Pemerintahan Kampung se Provinsi Papua		300	400	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 71				Program Pengembangan Kampung	Terbangunnya Model Balai Kampung untuk setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Papua		39	75	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 72				Program Pembinaan Otonomi Kampung	Terlaksananya Pembinaan Kampung Contoh di 15 Kab/Kota se Provinsi Papua		12	50	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 72				Program Pembinaan Otonomi Kampung	Terlaksananya Sistem Website Data Base Kampung di Provinsi Papua		0	29	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 72				Program Pembinaan Otonomi Kampung	Terlaksananya Sistem Penyusunan Peraturan Kampung yang Benar dan Pemerintahan Kampung di Provinsi Papua		0	2070	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 73				Program Pembinaan Adat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Lembaga Masyarakat Adat Se Provinsi Papua		0	29	Biro Pemerintahan Kampung
				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.22 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentasi meningkatnya sistem capaian laporan		3	15	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
				Urusan Kearsipan					
1.24 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dapat diselenggarakan administrasi Perkantoran Selama Lima Tahun		12	60	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.24 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		2140	335	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.24 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplian Aparatur		143	1036	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.24 - 4				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Penghargaan Untu PNS Yang Telah Selesai Melaksanakan Tugas		11	23	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.24 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur		**22**	69	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.24 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		9	45	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.24 - 15				Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya Sistem Administrasi Kearsipan di Provinsi Papua		0	5	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Urusan Komunikasi dan Informatika					
1.25 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran		10	90	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan fasilitas ruang kerja di gedung baru		0	2	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		90	95	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya laporan capaian kinerja dan keuangan		30	90	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya disiplin pegaw ai di SKPD		20	187	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Penyediaan media infokom/MMC bagi masyarakat/komunitas		1	32	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Penyediaan sarana informasi publik/masyarakat		2	6	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya penyiaran informasi pembangunan pemerintah di RRI dan TV		2	60	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan kualitas pelayanan internet gratis kepada masyarakat		0	30	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan layanan perizinan penyiaran lebih baik dan cepat		4	14	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Menyediakan data lembaga penyiaran untuk masyarakat		3	5	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 16				Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Menyediakan data dan kondisi peralatan TIK		41	193	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 16				Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Meningkatkan dan mengarahkan pembangunan TIK Prov. Papua		0	25	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 16				Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Meningkatkan pemahaman pembangunan TIK kab/kota		0	10	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 17				Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terpasangnya jaringan internet di lembaga pendidikan		2	10	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 18				Program kerjasama informasi dengan mas media	Mempublikasikan penyelenggaraan jasa POSTEL daerah secara nasional (Pekan Informasi Nasional)		1	5	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Urusan Kehutanan					
2.02 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sarana komunikasi dan sumberdaya yang digunakan		12	60	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		150	750	Dinas Kehutanan dan Konservasi
				Urusan Kelautan dan Perikanan					
2.05 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat pelayanan administrasi perkantoran		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan.	**Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**	**Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan.**						
				Urusan Pekerjaan Umum					
1.03 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan Konsultasi Manajemen Kabupaten (KMK) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		0	20	Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.03 - 31				Peningkatan Jalan dan Jembatan	fdbf		0	0	Dinas Pekerjaan Umum
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 48				Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan kerja sama antar lembaga / instansi dalam pelaksanaan tugas		100	250	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.20 - 71				Program Pengembangan Kampung	Program Untuk Mengembalikan Harga Diri Orang Papua Bahw a Mempunyai Kemampuan Untuk Membangun Diri Dan Kampung Sendiri Melalui Semangat Gotong Royong Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat, Dan Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Papua Kepada PEMDA		5	25	Biro Pemerintahan Kampung
				Urusan Kearsipan					
1.24 - 16				Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah Dokumen/ Arsip Milik Pemerintah Daerah Yang Diselamatkan dan Dilestarikan		3500	17500	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.24 - 18				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Cakupan Pelayanan Kearsipan Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sw asta dan Masyarakat		1000	5000	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.24 - 19				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Jumlah Khasanah Arsip Pemerintah Provinsi Papua		6	10	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya Pola Pikir (Mind set) Aparatur Pemerintah Daerah.	**Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**							
				Urusan Kesehatan					
1.02 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Aparatur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya		80	490	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
				Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.19 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana		70	425	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat MRP Provinsi Papua		100	500	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya SDM Kehumasan dan Keprotokolan		50	395	Biro Humas dan Protokol
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pemahaman dan daya serap Aparatur terhadap implementasi kinerja		111	595	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
1.20 - 72				Program Pembinaan Otonomi Kampung	Meningkatnya Kapasitas Aparat Desa / Kampung, Khususnya Dalam Menyongsong Otonomi Kampung		5	25	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 73				Program Pembinaan Adat	Merupakan Wadah Penyaluran Aspirasi Komunitas Adat Dalam Hubungannya Dengan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Masyarakat Kampung di Berbagai Bidang Dan Aspek		5	25	Biro Pemerintahan Kampung
	Meningkatnya Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota.	**Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar wilayah dan antar sektor dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.**	**Pembentukan dan berjalannya badan Koordinasi Wilayah Pembangunan berdasarkan 5 Wilayah Adat.**						
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur		12	60	Biro Hukum
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur / anggota pengamanan		150	1000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Adanya hasil Rekomendasi Bidang Aparatur kampung Se Provinsi Papua		260	650	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlatihnya para Sekretaris Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung		270	750	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlatihnya Aparat Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung		232	580	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terbinanya Kampung contoh di Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua		96	52	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 16				Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Optimalnya peran pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		85	425	Sekretariat Daerah
1.20 - 16				Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Optimalnya peran pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		85	425	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
1.20 - 25				Program Peningkatan Kerja sama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Daerah		7	10	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
1.20 - 71				Program Pengembangan Kampung	Tersedianya Sarana dan Kelengkapan bagi Kantor Kampung di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua		0	114	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 71				Program Pengembangan Kampung	Terlaksananya Fasilitasi dan Identifikasi Kelayakan Pemerintahan Kampung		0	75	Biro Pemerintahan Kampung
1.20 - 75				Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota		9	45	Biro Hukum
1.20 - 76				Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pelayanan dan pemberian dokumentasi dan informasi hukum pada aparatur dan masyarakat		721	3605	Biro Hukum
				Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral					

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
2.03 - 18				Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan	Prosentase Meningkatnya Laporan Evaluasi Koordinasi Program Pembangungan Bidang Pertambangan dan Energi		10	95	Dinas Pertambangan dan Energi
	Terbentuknya Badan Koordinasi wilayah Pembangunan berdasarkan 5 wilayah Adat.	**Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar wilayah dan antar sektor dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.**	**Pembentukan dan berjalannya badan Koordinasi Wilayah Pembangunan berdasarkan 5 Wilayah Adat.**						
	Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku).	**Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar wilayah dan antar sektor dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.**	**Pembentukan dan berjalannya badan Koordinasi Wilayah Pembangunan berdasarkan 5 Wilayah Adat.**						
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 30				Program Kerjasama Pembangunan	Peningkatan Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Daerah		100	500	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
	Terwujudnya Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua..	**Penguatan Fungsi Koordinasi antar Lembaga Daerah dan Penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Otsus.**	**Peningkatan Kerjasama, Kemitraan dan Penguatan Kapasitas Lembaga DPRP serta Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga DPRP dalam rangka Penyusunan Perdasus dan Perdasi.**						
	Rekonstruksi Undang-undang No. 21/2001 menjadi Undang-undang Otonomi Khusus Plus (UU Pemerintahan Papua).	**Penguatan Fungsi Koordinasi antar Lembaga Daerah dan Penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Otsus.**	**Penyusunan Rancangan UU Otsus Plus (UU Pemerintah Papua).**						
	Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya..	**Penguatan Fungsi Koordinasi antar Lembaga Daerah dan Penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Otsus.**	**Pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.**						

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 15				Program peningkatan kapasitas lembaga perw akilan rakyat daerah	Menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah		56	335	Sekretariat Dew an Perw akilan Rakyat Papua
1.20 - 20				Program peningkatan sistem pengaw asan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Mew ujudkan peningkatan pengaw asan internal secara berkala dalam mengaw al seluruh pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah		85	425	Dinas Pendapatan Daerah
1.20 - 20				Program peningkatan sistem pengaw asan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Mew ujudkan peningkatan pengaw asan internal secara berkala dalam mengaw al seluruh pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah		85	425	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.22 - 25				Pengembangan Data dan Informasi	Meningkatnya sistem data dan informasi sebagai pusat informasi kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah		85	425	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	Terw ujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan.	**Optimalisasi pengawasan dan pengendalian kependudukan**	**Penyerasian Pengendalian Penduduk.**						
				Urusan Pekerjaan Umum					
1.03 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Aparatur		0	0	Dinas Pekerjaan Umum
				Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil					
1.10 - 15				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan		100	500	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	Terw ujudnya masyarakat yang religius.	**Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial.**	**Mendorong kemandirian peran lembaga keagamaan.**						

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 63				Program Pembinaan Mental Spritual	Terwujudnya pembinaan dan peningkatan mental spiritual keagamaan		330	3515	Biro Bina Mental Spiritual
1.20 - 63				Program Pembinaan Mental Spritual	Jumlah Masyarakat yang diberikan layanan dan pembinaan		133	1700	Biro Bina Mental Spiritual
1.20 - 65				Program Pemberdayaan Sarana Keagamaan	Tersedianya bantuan sarana dan prasarana yang fungsional		95	925	Biro Bina Mental Spiritual
	Terwujudnya layanan sosial yang berkualitas.	**Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial.**	**Pembinaan dan pemberdayaan PMKS dan KAT.**						
				Urusan Kesehatan					
1.02 - 24				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah pemulangan/pemakaman pasien miskin		7	50	Rumah Sakit Jiwa Abepura
1.02 - 26				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah Jenis Pelayanan Kesehatan Jiwa		13	114	Rumah Sakit Jiwa Abepura
1.02 - 27				Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Angka Per 100 sarana dan prasarana RS yang terpelihara		100	500	Rumah Sakit Jiwa Abepura
				Urusan Sosial					
1.13 - 15				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase fakir miskin, keluarga rentan, KAT dan PMKS lainnya yanf diberdayakan		90	450	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
1.13 - 16				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial		90	450	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
1.13 - 22				Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase kelembagaan sosial masyarakat yang aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial		90	450	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.13 - 23				Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial		90	450	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
1.13 - 24				Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial		90	450	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
1.13 - 25				Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial	Persenatase kualitas perencanaan dan penganggaran kesejahteraan sosial		90	450	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
1.13 - 26				Peningkatan Sarana dan prasarana infrastruktur bagi masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun		100	500	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 9				Program Pemerintahan Umum	Meningkatnya pelayanan pemerintahan umum		85	425	Sekretariat Daerah
1.20 - 54				Program Peningkatan Waw asan Masyarakat Terhadap Pembangunan	Meningkatkan Waw asan Masyarakat Terhadap Pembangunan		85	425	Sekretariat Daerah
				Urusan Komunikasi dan Informatika					
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Mempublikasikan KIM ke tingkat naisonal di PIN (Pekan Informasi Nasional)		1	19	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 18				Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatkan kualitas group tari tradisional dalam mengikuti festival pertura		2	15	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Terw ujudnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	**Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial.**	**Memfasiltasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan mendorong keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.**						
	Lestarinya budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua	**Revitalisasi nilai-nilai budaya.**	**Mempertahankan dan mengembangkan Budaya dan Seni Papua.**						

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Kebudayaan dan Pariwisata					
1.17 - 16				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Masyarakat yang memahami dan melestarikan kekayaan budaya		100	500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.17 - 17				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah masyarakat yang memahami, mengaktualisasikan dan melestariakan keragaman budaya		80	500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 75				Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Meningkatkan Keragaman Budaya Papua		90	450	Kantor Penghubung Daerah
	Meningkatnya prestasi olahraga.	**Optimalisasi pembinaan olahraga dan pemuda.**	**Mendorong pembinaan Olahraga berprestasi dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan internasional.**						
	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan.	**Optimalisasi pembinaan olahraga dan pemuda.**	**Mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.**						
				Urusan Kesehatan					
1.02 - 29				Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan Kunjungan Balita		23	246	Dinas Kesehatan
				Urusan Pemuda dan Olah Raga					
1.18 - 20				Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Prestasi Olahraga di PON		7	55	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
				Urusan Kearsipan					
1.24 - 21				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Konvensional dan Elektronik		73254	150000	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	**Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan.**	**Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan Kesehatan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga agama dan sosial lainnya.**						

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Kesehatan					
1.02 - 7				Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah Masyarakat pedalaman yang memerlukan rujukan di dirujuk		100	500	Dinas Kesehatan
1.02 - 15				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan dan kesinambungan obat pelayanan kesehatan Dasar di seluruh sarana Pelayanan Kesehatan		100	500	Dinas Kesehatan
1.02 - 15				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Angka per 100 pasien yang mendapatkan obat		100	500	Rumah Sakit Jiw a Abepura
1.02 - 16				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Keluarga Raw an Kesehatan Dibina (KepMenkes 279/'06)		5	155	Dinas Kesehatan
1.02 - 16				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Keberhasilan Penanganan Kasus Yang Spesifik		60	415	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02 - 16				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan ke Kabupaten untuk pelayanan kesehatan jiw a		0	290	Rumah Sakit Jiw a Abepura
1.02 - 16				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah KLB yang ditangani kurang dari 24 Jam		50	410	Dinas Kesehatan
1.02 - 16				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Petugas RS/PKM di kabupaten yang dilatih dalam memberikan pelayanan kesehatan jiw a		0	75	Rumah Sakit Jiw a Abepura
1.02 - 18				Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pengobatan Tradisional dan Komplementer yang terstandarisasi		3	43	Dinas Kesehatan
1.02 - 18				Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Jumlah Penelitian Kasiat obat Tradisional asli Papua		1	5	Dinas Kesehatan
1.02 - 18				Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Pengembangan Obat Asli Daerah		2	10	Dinas Kesehatan
1.02 - 19				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Angka Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat		25	214	Dinas Kesehatan
1.02 - 19				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pola Hidup Sehat		85	490	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.02 - 19				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Rasio Posyandu per Kampung		87	480	Dinas Kesehatan
1.02 - 20				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada anak Balita		16	77	Dinas Kesehatan
1.02 - 20				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vitamin A pada anak Balita		34	296	Dinas Kesehatan
1.02 - 21				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak (Rumah Sehat)		24	216	Dinas Kesehatan
1.02 - 21				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak		41	272	Dinas Kesehatan
1.02 - 22				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan penderita baru TB Paru BTA (+)		43	344	Dinas Kesehatan
1.02 - 22				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pengobatan penderita TB Paru BTA + (Succes Rate)		75	411	Dinas Kesehatan
1.02 - 22				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk		58	249	Dinas Kesehatan
1.02 - 22				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Diagnosa malaria		89	448	Dinas Kesehatan
1.02 - 22				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya Angka Kesakitan Kusta per 10.000 penduduk		7	24	Dinas Kesehatan
1.02 - 22				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV		24	246	Dinas Kesehatan
1.02 - 22				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa/Kelurahan UCI		21	241	Dinas Kesehatan
1.02 - 23				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Standar Pelayanan Minimal Dalam Penanganan Gawat Darurat (SOP)		100	500	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02 - 24				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua (Kartu Papua Sehat)		100	500	Dinas Kesehatan
1.02 - 29				Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan nifas		18	236	Dinas Kesehatan

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.02 - 29				Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan Kunjungan Bayi Neonatus (KN 1)		58	366	Dinas Kesehatan
1.02 - 29				Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan Kunjungan Bayi		15	197	Dinas Kesehatan
1.02 - 30				Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Jumlah Lansia yang terlayani sesuai standar		6	150	Dinas Kesehatan
1.02 - 32				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu (K4)		26	303	Dinas Kesehatan
1.02 - 32				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1)		73	424	Dinas Kesehatan
1.02 - 32				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		50	356	Dinas Kesehatan
1.02 - 32				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Kn)		38	336	Dinas Kesehatan
1.02 - 33				Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Cakupan Dokumen Profil kesehatan Kabupaten Kota		48	410	Dinas Kesehatan
1.02 - 33				Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Persentase Program Kegiatan Dalam Renstra Dan Renja Terakomodir Dalam APBD		100	500	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02 - 33				Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Cakupan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan SIK terintegrasi		0	263	Dinas Kesehatan
1.02 - 33				Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Cakupan Sinkronisasi Program antara Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota		15	75	Dinas Kesehatan
1.02 - 35				Program peningkatan kesehatan perorangan	Meningkatnya Rujukan Keluarga Miskin yang sulit akses pelayanan kesehatan		50	410	Dinas Kesehatan
1.02 - 35				Program peningkatan kesehatan perorangan	Tingkat Kepuasaan Pasien Terhadap Pelayanan Jaminan Kesehatan		100	500	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02 - 35				Program peningkatan kesehatan perorangan	Angka per 100 Pasien asli Papua yang mendapatkan pelayanan jamkespa		100	500	Rumah Sakit Jiwa Abepura

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.02 - 36				Program Sumberdaya Kesehatan	Rasio Bidan per Kampung		47	367	Dinas Kesehatan
1.02 - 36				Program Sumberdaya Kesehatan	Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan		80	490	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
1.02 - 36				Program Sumberdaya Kesehatan	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan promotif - preventif		0	3053	Rumah Sakit Jiw a Abepura
1.02 - 36				Program Sumberdaya Kesehatan	Angka per 100 pasien yang mendapatkan pelayanan kuratif-rehabilitatif		100	500	Rumah Sakit Jiw a Abepura
1.02 - 37				Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Cakupan Jenis Pemeriksaan Laboratorium		80	435	Dinas Kesehatan
				Urusan Pemberdayaan Perempuan					
1.11 - 25				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kebijakan Daerah yang melaksanakan Perlindungan Anak		0	8	Biro Pemberdayaan Perempuan
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 68				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kebijakan Daerah yang melaksanakan Perlindungan Anak		0	8	Biro Pemberdayaan Perempuan
				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.22 - 24				Program Peningkatan Hidup dan Perlindungan	Prosentase pelayanan peningkatan hidup dan perlindungan		100	500	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil.	**Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan.**	**Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga agama.**						

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Pendidikan					
1.01 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas layanan		45	500	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		45	500	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 4				Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Meningkatnya Produktifitas kerja aparatur		45	500	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya produktifitas kerja aparatur		45	500	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi		45	500	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 15				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya APK PAUD		2954	960	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 16				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya AMP SMP Reguler		3498	885	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 16				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya APM SD Reguler		6964	2075	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 17				Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya AMP SMA Reguler		2872	895	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 17				Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya APK SMK		408	910	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 18				Program Pendidikan Non Formal	Menurunnya Aggka Buta Aksara		53632	325000	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 19				Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya APS PLB		3046	5970	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 22				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan		45	340	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 23				Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi	Meningkatnya % anak Papua masuk Program Studi Keahlian Khusus		50	2900	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 26				Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Meningkatnya APK PAUD Pendidikan Layanan Khusus KAT		0	190	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 26				Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Meningkatnya APM SD Pendidikan Layanan Khusus KAT		0	435	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 26				Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Meningkatnya APM SMP Pendidikan Layanan Khusus KAT		0	2870	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.01 - 26				Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Meningkatnya APM SMA Pendidikan Layanan Khusus		0	6200	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.01 - 46				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase capaian program		75	400	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
				Urusan Pemberdayaan Perempuan					
1.11 - 1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Menunjang kelancaran Tugas Pokok Biro Pemberdayaan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi dan kebutuhan lain		12	60	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan dalam rangka memberikan pelayanan Prima		7	35	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 3				Program peningkatan disiplin aparatur	Menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan dalam rangka Peningkatan disiplin aparatur		2	10	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan dalam rangka Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur		15	75	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 6				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan Biro Pemberdayaan Perempuan		7	35	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 17				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Kelurahan/Kampung yang melaksanakan Pembinaan Peran Perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera		73	23	Biro Pemberdayaan Perempuan

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.11 - 17				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Pendamping Korban KTPA		60	440	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 17				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Sinode/Klasis yang melaksanakan Pembinaan terhadap Pelaku/Korban KTPA		0	40	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 25				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kebijakan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Perempuan		1	9	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 25				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kajian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak		0	1	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 25				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kab/Kota Layak Anak		0	4	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 25				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kajian Kekerasan Terhadap Perempuan di ranah Publik		1	1	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 25				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Buku Profil Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak di Provinsi Papua		0	16	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 26				adad	Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender		19	35	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 26				adad	Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Pokja PUG		17	80	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 26				adad	Jumlah KIE, Bidang Pemberdayaan **a** Perlindungan Anak		8	172	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 26				adad	Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan/pengaduan di unit layanan terpadu		45	250	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 26				adad	Jumlah Tenaga Pendamping terlatih		0	740	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 26				adad	Jumlah Pencapaian target SPM		2	52	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 27				Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Adanya Kebijakan dalam Pelaksanaan Program PP & PA		3	15	Biro Pemberdayaan Perempuan

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.11 - 27				Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Perempuan yang Terlatih		380	330	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 27				Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Paud Holistik dan Integratif		0	24	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 27				Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Kader Paud Holistik dan Integratif		0	90	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 27				Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Menumbuhkan Kesadaran tentang Perlindunagn Perempuan dan Anak		0	4	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 27				Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah orang yang memahami/mengetahui Regulasi PPA		0	950	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.11 - 27				Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah orang yang memahami/mengetahui Regulasi PPA		0	950	Biro Pemberdayaan Perempuan
				Urusan Pemuda dan Olah Raga					
1.18 - 16				Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya proporsi tenaga kepeloporan dan pionir pemuda dalam pembangunan		47	1450	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.18 - 20				Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga/ perolehan medali emas Asean Games		0	4	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.18 - 20				Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga/ perolehan medali emas Arafura Youth Games		2	14	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
1.18 - 20				Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga/ medali emas POPNAS		0	21	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Aparatur Perbatasan yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		20	25	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
1.20 - 21				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Pengawasan melalui Pelatihan Pengembangan Tenga Kerja Pemeriksa		40	480	Inspektorat Provinsi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 67				Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Kelurahan/Kampung yang melaksanakan Pembinaan Peran Perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera		73	23	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 67				Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Pendamping Korban KTPA		60	440	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 67				Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Sinode/Klasis yang melaksanakan Pembinaan terhadap Pelaku/Korban KTPA		0	40	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 68				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kebijakan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Perempuan		1	9	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 68				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kajian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak		0	1	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 68				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kab/Kota Layak Anak		0	4	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 68				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kajian Kekerasan Terhadap Perempuan di rana Publik		0	1	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 68				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Buku Profil Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak di Provinsi Papua		0	16	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 69				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender		19	35	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 69				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Pokja PUG		17	80	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 69				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah KIE, Bidang Pemberdayaan **a** Perlindungan Anak		8	172	Biro Pemberdayaan Perempuan

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.20 - 69				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan/pengaduan di unit layanan terpadu		45	250	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 69				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Tenaga Pendamping terlatih		0	740	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 69				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pencapaian target SPM		2	52	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 70				Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Adanya Kebijakan dalam Pelaksanaan Program PP & PA		3	15	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 70				Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Perempuan yang Terlatih		380	330	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 70				Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Menumbuhkan Kesadaran tentang Perlindunagn Perempuan dan Anak		0	4	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 70				Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Kader Paud Holistik dan Integratif		0	24	Biro Pemberdayaan Perempuan
1.20 - 70				Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah orang yang memahami/mengetahui Regulasi PPA		0	950	Biro Pemberdayaan Perempuan
				Urusan Kepegawaian					
1.21 - 17				Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Provinsi Papua		100	100	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
				Urusan Kearsipan					
1.24 - 22				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Standar Nasional Yang Dibangun		118	500	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Urusan Komunikasi dan Informatika					
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya pengetahuan kelompok informasi masyarakat		2	5	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sebagai tenaga teknisi hardware		40	200	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.25 - 18				Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat, pedagang tentang peraturan penjualan cd/cvc bajakan		3	5	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 18				Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatkan kualitas SDM Papua		5	33	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Urusan Pertanian					
2.01 - 40				Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Meningkatnya kapasitas penyuluh di 28 kab/kota		0	25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 40				Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Meningkatkan kualitas kelembagaan petani di 28 kab/kota		0	25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 40				Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Meningkatnya keterampilan aparatur dan non aparatur 1500 orang		0	1500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 40				Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Meningkatnya ketrampilan w idyasw ara 6 orang		6	30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 40				Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Terdidiknya 1600 siswa SMK		190	1600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 40				Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Terbangunnya saraa pendidikan di SMK		5	25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Urusan Perindustrian					
2.07 - 17				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Tingkat Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Tepat guna, khususnya bagi IKM		2	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif.	**Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis keunggulan lokal daerah.**	**Menyiapkan prosedur, perijinan investasi.**						
				Urusan Penanaman Modal					
1.16 - 15				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya Promosi Potensi Investasi Dalam dan Luar Negeri		6	40	Badan Koordinasi Penanaman Modal
1.16 - 18				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Tersedianya jenis izin yang dilayani melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		15	109	Badan Koordinasi Penanaman Modal
1.16 - 19				Program Peningkatan Daya Saing Investasi	Meningkatnya Persetujuan dan Realisasi Investasi		9	80	Badan Koordinasi Penanaman Modal
1.16 - 20				Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku		34	648	Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Kehutanan					
2.02 - 15				Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pemegang ijin yang dibina		20	200	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 15				Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	IUPHHK-HA yang dibina dalam pelaksanaan silvikultur		15	150	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 15				Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Usaha industri perkayuan yang mendapatkan ijin		42	210	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 15				Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Luas hutan tanaman rakyat yang dibangun		0	2500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 15				Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Jumlah agenda pameran yang diikuti		5	35	Dinas Kehutanan dan Konservasi
				Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral					
2.03 - 20				Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral	Prosentase Meningkatnya Layanan Informasi Sekor Pertambangan dan Energi		20	90	Dinas Pertambangan dan Energi
				Urusan Kelautan dan Perikanan					
2.05 - 26				Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	Konsumsi ikan (kh/kap/org):34,26; ekspor hasil perikanan (US$/tahun):18.903.551; jumlah unit pengolahan ikan yang bersertifikasi (unit/tahun) : 12 unit		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05 - 27				Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap :264.030 ton; nilai produksi perikanan tangkap : 9.026,nilai tukar nelayan : 101, pendapatan nelayan pemilik/bln : rp.2.555.000; pendapatan nelayan buruh/bln : rp.1.825.000		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Tercapainya stabilitas makro ekonomi.	**Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis keunggulan lokal daerah.**	**Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi.**						

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Perencanaan Pembangunan					
1.06 - 22				Program perencanaan pembangunan ekonomi	Terlaksananya Pembangunan Ekonomi		100	500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Urusan Pemberdayaan Perempuan					
1.11 - 17				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan yang terlatih di Bidang Ekonomi		503	270	Biro Pemberdayaan Perempuan
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 67				Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Perempuan yang terlatih di Bidang Ekonomi		503	270	Biro Pemberdayaan Perempuan
				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.22 - 20				Program Pengembangan Strategi Pembangunan Kampung (PROSPEK)	Prosentase Meningkatnya Program Strategi Pembangunan Kampung (PROSPEK)		100	500	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
1.22 - 21				Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Prosentase meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kampung		100	500	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
1.22 - 22				Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	Prosentase program penguatan kapasitas kelembagaan distrik dan kampung		100	500	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
				Urusan Pertanian					
2.01 - 16				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan daerah akan beras		88000	90920	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 16				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan daerah akan kedelai		3732	5550	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 16				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan daerah akan bawang merah		201	595	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 16				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatkan cadangan pangan daerah 200 ton		38	200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 26				Program Perencanaan Pembangunan	Tersusunnya program kegiatan pertanian dan ketahanan pangan selama 5 tahun		1	5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
2.01 - 26				Program Perencanaan Pembangunan	Terevaluasinya program kegiatan pertanian dan ketahanan pangan setiap tahun		1	5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 36				Program Peningkatan Diversifikasi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Tersedianya data dan informasi PPH		70	450	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 36				Program Peningkatan Diversifikasi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Tersedianya data dan informasi akses pangan		25	358	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 36				Program Peningkatan Diversifikasi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		40	358	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 37				Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Pertanian	Tersedianya peralatan pengolahan hasil/pasca panen untuk meningkatkan hasil produk pertanian		0	9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 37				Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Pertanian	Tersedianya sarana pasar tani untuk meningkatkan pemasaran hasil produk pertanian		0	9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 37				Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Pertanian	Tersedianya sarana pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian		0	9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 37				Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Pertanian	Meningkatkan kapasitas petani dalam pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian		5	25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 38				Program Pengembangan Kawasan Agribisnis dan Daerah Khusus	Terbangunnya kawasan agribisnis 5553 Ha		2664	2030	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 38				Program Pengembangan Kawasan Agribisnis dan Daerah Khusus	Terbangunnya kawasan pertanian tanaman hortikultura di daerah perbatasan 500 Ha		0	500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 38				Program Pengembangan Kawasan Agribisnis dan Daerah Khusus	Terbangunnya kawasan pertanian tanaman hortikultura di daerah prioritas		0	8750	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 39				Program Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Peningkatan luas tanam ubijalar		200	5000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 39				Program Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Produksi ubu jalar		4160	104000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
2.01 - 39				Program Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Meningkatnya areal tanaman spesifik lokal buah matoa		50	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.01 - 39				Program Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Meningkatnya areal tanaman spesifik lokal buah merah		90	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Urusan Perdagangan					
2.06 - 15				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pelaksanaan kegiatan Perdagangan Daerah yang terkendali dan terlindungi		10450	107859	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.06 - 17				Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Presentase nilai Ekspor Komoditas Unggulan daerah		5	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.06 - 18				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Pengutan Institusi Pasar dalam Negeri		10	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK.	**Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis keunggulan lokal daerah.**	**Mendorong tumbuh dan berkembangnya produktivitas koperasi dan UKMK.**						
				Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
1.15 - 16				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha Baru UMKM		4249	24653	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1.15 - 17				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UKM (Unit Usaha)		18056	140001	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1.15 - 18				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Kelembagaan Koperasi yang memenuhi ketentuan Good Corporate Governance		1282	9940	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.22 - 23				Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kampung Kelurahan dan Kawasan Miskin Perkotaan	Prosentase peningkatan pendapatan Masyarakat kampung, kelurahan dan kawasan miskin perkotaan		100	500	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah.	**Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis keunggulan lokal daerah.**	**Mendorong produktivitas industri kecil dan menengah.**						

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Perindustrian					
2.07 - 16				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menegah	Tingkat Produktivitas Kualitas dan Hasil Produk Industri Kecil dan Menengah		4172	42800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.07 - 18				Program Penataan Struktur Industri	Meningkatnya Sinergitas Pengembangan Industri		4241	24606	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah.	**Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis keunggulan lokal daerah.**	**Revitalisasi dan reorganisasi BUMD.**						
				Urusan Kehutanan					
2.02 - 15				Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Perusahaan kehutanan daerah yang di bangun		0	4	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja.	**Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis keunggulan lokal daerah.**	**Pembukaan dan perluasan lap. Kerja.**						
				Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil					
1.10 - 16				Program Pembinaan Kependudukan	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat		240	1200	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
				Urusan Tenaga Kerja					
1.14 - 5				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Keitrampilan Teknis Aparatur di Bid. Hubungan Industrial		14	25	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1.14 - 15				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Memperluas Kesempatan Kerja dalam rangka Pengurangan Pengangguran		100	500	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1.14 - 18				Program Peningkatan Kualitas Aparatur Produktivitas dan Kewirausahaan	Tersedianya Aparatur yang berkualitas dan berwibawa		25	125	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1.14 - 19				Program Pengiolahan dan Penyebarluasan Informasi Produktivitas	Terciptanya Penyebaran Informasi Produktivitas di Masyarakat		4	48	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1.14 - 20				Program Peningkatan Kualitas dan Pengukuran Tenaga Kerja	Tersedianya Tenaga Kerja yang Kompeten dan Kompetitiv		100	500	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.14 - 21				Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Memperluas Kesempatan Kerja dalam rangka Pengurangan Pengangguran		20	1830	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1.14 - 22				Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja,Meningkatnya Pengembangan Dunia usaha		139	780	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1.14 - 23				Program Pengawasan Ketenagakerjaan Pembinaan Perlindungan dan Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan	Terlaksananaya Pembinaan Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenaga Kerjaan		20	100	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah.	**Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis keunggulan lokal daerah.**	**Revitalisasi fungsi lembaga promosi pariwisata.**						
				Urusan Pariwisata					
2.04 - 15				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dipasarkan		10	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04 - 16				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan		50	250	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.04 - 17				Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kerjasama kemitraan pariwisata		100	500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat.		**Mendorong pertumbuhan wilayah2 strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah shg dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yg dapat menggerakan wilayah tertinggal.**						
				Urusan Lingkungan Hidup					
1.08 - 16				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Pembangunan berkelanjutan		90	445	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.08 - 17				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam		85	450	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08 - 26				Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Emisi GRK dan Peningkatan Serapan GRK		0	445	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
				Urusan Pertanian					
2.01 - 15				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Menigkatnya pendapatan petani		20	125	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 16				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Terpenuhinya konsumsi protein hewani masyarakat Kapita/hari		75	500	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 17				Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pendapatan petani		75	400	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 18				Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produktivitas hasil perkebunan		75	500	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 19				Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi hasil perkebunan		148803	152776	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 20				Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Meningkatnya produktivitas tanaman		0	23	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 21				Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Menurunnya angka kematian ternak, angka penularan penyakit hewan ke manusia dan		70	500	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 22				Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi daging meningkat 6,5%/Tahun		5	30	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 22				Program peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan produksi telur % (ton/tahun)		5	30	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 22				Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rata-Rata Populasi ternak meningkat 6,6%/Tahun		5	30	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 23				Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya hasil pemasaran produk peternakan masyarakat		50	400	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.01 - 24				Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Kelahiran dan Mutu performance ternak meningkat		50	500	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Urusan Kehutanan					
2.02 - 7				Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen perencanaan program pembangunan kehutanan		1	5	Dinas Kehutanan dan Konservasi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
2.02 - 7				Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen perencanaan teknis kehutanan		0	15	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 7				Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen tindak lanjut Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi		1	10	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 7				Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Sistem Informasi Kehutanan berbasis spasial		1	5	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 7				Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Peta penyebaran potensi hasil hutan		0	14	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 7				Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan Papua		0	1	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 7				Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau		0	1	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 7				Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Laporan pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan		10	100	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 7				Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pelayanan pengukuran dan perpetaan		1	5	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 7				Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Data statistik, Profil Hutan, Buletin Kehutanan		3	15	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 11				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Kehutanan	Jumlah aparatur kehutanan yang mengikuti peningkatan kapasitas perencanaan kehutanan		5	75	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 11				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Kehutanan	Jumlah aparatur kehutanan yang mengikuti peningkatan kapasitas pengelolaan produksi hutan alam		0	75	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 11				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Kehutanan	Jumlah aparatur kehutanan yang mengikuti diklat pelindungan dan konservasi hutan		0	75	Dinas Kehutanan dan Konservasi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
2.02 - 11				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Kehutanan	Jumlah aparatur kehutanan yang mengikuti diklat rehabilitasi hutan dan lahan		0	75	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 11				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Kehutanan	Jumlah rancangan regulasi yang dihasilkan		9	20	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 16				Program rehabilitasi hutan dan lahan	Dokumen perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		0	1	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 16				Program rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah jenis benih tanaman hutan yang di produksi		19	25	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 16				Program rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah bibit yang di produksi		150000	850000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 16				Program rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah sumber benih yang dikelola		15	25	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 16				Program rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah agenda penanaman pohon		10	50	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 16				Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas kaw asan CA Cycloop yang dilakukan penanaman		10	50	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 16				Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas areal yang dilakukan rehabilitasi		160	150	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 16				Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas w ilayah mangrove yang dikelola		5	100	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 16				Program rehabilitasi hutan dan lahan	Kinerja pengelolaan UPTD BPTH dalam produksi bibit		10	100	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 16				Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas areal hutan cadangan pangan dan agroforestry		50	150	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 16				Program rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah Kab/Kota yang dibina		19	100	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kajian pengembangan w isata alam		0	15	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Pembangunan Obyek Daya Tarik Wisata Alam		0	15	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Operasi pengamanan hutan		9	50	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kelompok pengamanan hutan masyarakat adat yang di bentuk		0	15	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kasus kehutanan yang di proses penyidikan oleh PPNS Kehutanan		2	25	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Masyarakat yang mengikuti penyuluhan kehutanan		150	2000	Dinas Kehutanan dan Konservasi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Meningkatnya kinerja penangkaran satw a burung dan flora anggrek sebagai media pengembangan konservasi, iptek dan w isata alam		10	100	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kinerja pengelolaan Kebun Botani Kehutanan Papua		10	250	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kinerja pengamanan dan pengaw asan peredaran hasil hutan		10	100	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kinerja pengamanan dan pengaw asan peredaran hasil hutan		10	100	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kinerja pengamanan dan pengaw asan peredaran hasil hutan		10	100	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kinerja pengamanan dan pengaw asan peredaran hasil hutan		10	100	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 20				Program perencanaan dan pengembangan hutan	Stakeholder yang memahami kebijakan KPH		5	100	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 20				Program perencanaan dan pengembangan hutan	Kajian kelembagaan KPH		5	25	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 20				Program perencanaan dan pengembangan hutan	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dibangun		5	25	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 20				Program perencanaan dan pengembangan hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan jangka Panjang dan Jangka Tahunan		5	50	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 20				Program perencanaan dan pengembangan hutan	SDM Aparatur Kehutanan yang mengikuti diklat Calon Kepala KPH		5	150	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 20				Program perencanaan dan pengembangan hutan	Kelompok Bisnis Mandiri (KBM) yang dibentuk		0	75	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 20				Program perencanaan dan pengembangan hutan	Keputusan tentang Tata Hubungan Kerja KPH		0	25	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 20				Program perencanaan dan pengembangan hutan	KPH yang di bina dan di evaluasi		5	45	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 21				Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Masyarakat adat yang mengikuti pelatihan		58	100	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 21				Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Wilayah hutan adat yang dilakukan pemetaan partisipatif		2	15	Dinas Kehutanan dan Konservasi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
2.02 - 21				Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Usaha pemanfaatan kayu dan industri kayu rakyat yang mendapatkan sertifikasi		8	50	Dinas Kehutanan dan Konservasi
				Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral					
2.03 - 27				Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Prosentase Meningkatnya Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi		20	70	Dinas Pertambangan dan Energi
2.03 - 29				Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan	Prosentase Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Pertambangan		10	80	Dinas Pertambangan dan Energi
				Urusan Kelautan dan Perikanan					
2.05 - 20				Program pengembangan budidaya perikanan	Volume produksi perikanan budidaya:3.170 ton; jumlah benih dengan mutu terjamin: 15,85 juta ekor; jumlah induk/calon induk unggul:15.200 juta ekor		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05 - 21				Program pengembangan perikanan tangkap	Volume produksi perikanan tangkap: 264.030 ton; nilai produksi perikanan tangkap:9.026; nilai tukar nelayan: 101; pendapatan nelayan pemilik/bln:rp.2.555.000 ; pendapatan nelayan buruh/bln:rp.1.825.000		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05 - 22				Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Jumlah kawasan potensi perikanan dan kelompok masyarakat mandiri yang disuluh dan dibina		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05 - 28				Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	Volume produksi perikanan budidaya:3.170 ton; jumlah benih dengan mutu terjamin:15,85 juta ekor; jumlah induk/calon induk unggul :15.200 juta ekor		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
2.05 - 29				Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luas kawasan konservasi lautt dan perairan : 1.090.347 ha/tahun; jumlah pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang dikelola : 2 pulau		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05 - 30				Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan	Rasio Penyelesaian kasus tindak pidana perikanan papua bebas ilegal fishing		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05 - 31				Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rasio penyelesaian kasus tindak pidana perikanan papua bebas illegal fishing		100	500	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak rakyat.		**Mengembangkan usaha pemanfaatan kayu, pengembangan industri kayu rakyat, pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.**						
				Urusan Kehutanan					
2.02 - 21				Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Usaha pemanfaatan kayu masyarakat adat yang dibangun		10	25	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 21				Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Industri kayu rakyat yang dibangun		10	25	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 21				Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu yang dibangun		10	45	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 21				Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Usaha pengembangan wisata alam yang dibangun		0	10	Dinas Kehutanan dan Konservasi
				Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral					
2.03 - 26				Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pertambangan Umum		50	85	Dinas Pertambangan dan Energi
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah.	**Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah.**	**Pengembangan wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan sarana dan prasarana untuk mengurangi kesenjangan inter dan antar wilayah.**						

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.07 - 18				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan; meningkatkan mobilitas barang dan manusia antar wilayah yang berbasis pelayanan murah dan handal		43	320	Dinas Perhubungan
1.07 - 21				Studi Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tesedianya data/dokumen Pendukung Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		25	350	Dinas Perhubungan
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 60				Program Kerjasama Hubungan Luar Negeri	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Hubungan Luar Negeri		13	15	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah.	**Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah.**							
				Urusan Pekerjaan Umum					
1.03 - 24				Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, raw a dan jaringan pengairan lainnya	Terbangunnya jaringan irigasi untuk pertanian		0	500	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 24				Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, raw a dan jaringan pengairan lainnya	Terbangunya sarana bendung untuk irigasi pertanian		0	500	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 24				Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, raw a dan jaringan pengairan lainnya	Terjaganya kualitas jaringan irigasi untuk pertanian		0	500	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 28				Program pengendalian banjir	Tersedianya dokumen perencanaan fisik		0	500	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 28				Program pengendalian banjir	terbangunya bangunan pengendali banjir		0	500	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 28				Program pengendalian banjir	Terkendalinya pengawasan teknis kegiatan		0	500	Dinas Pekerjaan Umum
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 31				Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terlaksananya Pengembangan Wilayah		20	100	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.	**Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah.**							
				Urusan Komunikasi dan Informatika					
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi		4	20	Badan Pengelolaan Infrastruktur
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan pelayanan bidang kominfo		0	60	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Tersedianya portal layanan government dan data pemerintahan yang terupdate		4	27	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan jaringan komunikasi di kab/kota		12	10	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan.	**Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah.**							
				Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral					
2.03 - 17				Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pembangunan infrastruktur energi dan listrik		255	1035	Badan Pengelolaan Infrastruktur
2.03 - 28				Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Prosentase Meningkatnya Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi		20	75	Dinas Pertambangan dan Energi
	Meningkatnya ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni.	**Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah.**							
				Urusan Perumahan Rakyat					

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
1.04 - 15				Program Pengembangan Perumahan	Berkurangnya Jumlah Rumah yang Layak Huni Pertahun		42	54600	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1.04 - 16				Program Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan Kwalitas lingkungan Perumahan Pada Wilayah Distrik/kampung Yang Miskin		1	360	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1.04 - 21				Program Penyuluhan, Pengarahan, Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi Lokal.	Terlaksanaya Penyuluhan, Pendaftaran dan seleksi serta bantuan peralatan perbekalan Transmigran Lokal		4	16	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 73				Program Pembinaan Adat	Terwujudnya Pembangunan Model Rumah Adat di Kab/Kota di Priovinsi Papua		0	5	Biro Pemerintahan Kampung
	Meningkatnya ketersediaan air bersih.	**Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah.**							
				Urusan Pekerjaan Umum					
1.03 - 25				Program penyediaan dan pengolahan air baku	Terbangunanya jaringan air baku		0	500	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 25				Program penyediaan dan pengolahan air baku	Tersedianya dokumen perencanaan teknis		0	500	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 25				Program penyediaan dan pengolahan air baku	Terkendalinya pengawasan teknis kegiatan		0	500	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 25				Program penyediaan dan pengolahan air baku	Terbangunya longstorage dan embung		0	500	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 26				Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Tersediannya dokumen pendukung perencanaan teknis		0	500	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 26				Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Meningkatnya kinerja operasional dan pemeliharaan fisik		0	500	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 26				Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Terkendalinya pengawasan teknis kegiatan		0	500	Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral					
2.03 - 22				Program Pelayanan Air Bersih	Prosentase Meningkatnya Pelayanan Air Bersih		30	85	Dinas Pertambangan dan Energi
2.03 - 22				Program Pelayanan Air Bersih	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan air bersih		7	545	Badan Pengelolaan Infrastruktur
	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.	**Sosialisasi rencana tata ruang dan penegakan hukum serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.**	**Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan.**						
				Urusan Pekerjaan Umum					
1.03 - 16				Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya sarana persampahan		0	0	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 30				Program pembangunan infrastruktur pedesaaan	Tersedianya dokumen Rencana Induk Bidang air minum		0	0	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 30				Program pembangunan infrastruktur pedesaaan	Terbangunnya jalan lingkungan permukiman masyarakat		0	0	Dinas Pekerjaan Umum
1.03 - 30				Program pembangunan infrastruktur pedesaaan	Tersedianya air minum yang bersih dan sehat pada Desa Raw an Air/Pesisir /Terpencil		0	0	Dinas Pekerjaan Umum
				Urusan Perumahan Rakyat					
1.04 - 15				Program Pengembangan Perumahan	Pengembangan Perumahan		0	500	Dinas Pekerjaan Umum
1.04 - 15				Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya rumah sehat yang layak huni		1	5	Dinas Pekerjaan Umum
1.04 - 15				Program Pengembangan Perumahan	Tersusunnya study kelayakan dan perencanaan teknik (DED)		1	5	Dinas Pekerjaan Umum
1.04 - 15				Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman yang sehat		1	5	Dinas Pekerjaan Umum
				Urusan Penataan Ruang					
1.05 - 16				Program Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang		0	250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
				Urusan Perencanaan Pembangunan					
1.06 - 17				Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang		0	250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 - 26				Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup			0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 - 29				Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup			0	250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Urusan Pemuda dan Olah Raga					
1.18 - 21				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbangunnya sarana dan prasarana olah raga yang baik		0	0	Dinas Pekerjaan Umum
				Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral					
2.03 - 25				Program Pembinaan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Meningkatnya Produk Perundang-Undangan		0	60	Dinas Pertambangan dan Energi
	Papua sebagai paru-paru dunia.	**Penurunan emisi GRK dan peningkatan serapan GRK.**	**Memperkuat implementasikan RAD GRK.**						
				Urusan Lingkungan Hidup					
1.08 - 19				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Presentase Status Lingkungan Hidup		90	455	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08 - 21				Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Meningkatnya Pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan		85	450	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 36				Program Pengembangan Kawasan Tertinggal dan Perbatasan	Jumlah Pengembangan Kawasan Perbatasan		50	100	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
				Urusan Kehutanan					
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Model pengembangan jasa lingkungan Carbon Trade		0	15	Dinas Kehutanan dan Konservasi
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Usaha wisata alam		0	10	Dinas Kehutanan dan Konservasi

Tabel 7.1 (lanjutan)

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		SPKD
							Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	2	2	2	6	3	4	4	5	7
2.02 - 17				Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Usaha IUPHHK Restorasi Ekosistem		0	10	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan.	**Sosialisasi proses perizinan dan penegakan hukum.**	**Peningkatan kapasitas sistem perizinan lingkungan.**						
	Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan.	**Sosialisasi dan implementasi pembangunan berkelanjutan.**	**Peningkatan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.**						
				Urusan Pemerintahan Umum					
1.20 - 30				Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Kerjasama Pembangunan Perbatasan		6	10	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
				Urusan Kepegawaian					
1.21 - 15				Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat Struktural		80	1200	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
				Urusan Komunikasi dan Informatika					
1.25 - 15				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Menigkatkan pelayanan pemerintahan dengan membangun aplikasi government		3	5	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN


INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2014	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SPMD
						2014		2015		2016		2017		2018		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Misi 1 : Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI																
	1.04	Urusan Pemerintahan Wajib														
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Ketahanan Pangan	Terbentuknya Pemerintahan Perkotaan	Paket	1	1	850.000.000	1	850.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	5
	1.16	Program Pemberdayaan Kelembagaan Ketahanan Pangan	Terbentuknya Pemerintahan Perkotaan	Paket	1	1	450.000.000	1	450.000.000	1	900.000.000	1	475.000.000	1	475.000.000	5
	1.17 – 17	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terbentuknya Pemerintahan Perkotaan	Kegiatan	1	1										
	1.17	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan nilai-nilai budaya	Orang	150	150	2.141.008.150	150	2.311.220.310	150	2.558.522.311	150	2.744.674.542	150	2.965....	
	1.17 – 18	Program Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Budaya	Jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan kerjasama budaya	Orang	150	150	7.004.700.000	150	7.787.709.000	150	8.628.999.000	150	9.465.979.000	150	10.2...	
	1.18	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri														
	1.18 – 1	Program Pemeliharaan Hubungan Kelembagaan Pemerintah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tahun	75	80	1.167.000.000	85	1.283.000.000	90	1.397.000.000	95	1.982.000.000	100		
	1.18 – 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Penanganan Tindak Kriminal	Terselesaikannya penanaman masyarakat tentang pentingnya di lingkungan	2000 Orang	400	400	2.000.000.000	400	2.150.000.000	400	2.300.000.000	400	2.400.000.000	400		
	1.19 – 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terselesaikannya penanaman masyarakat tentang pentingnya di lingkungan di Papua	2000 orang	400	400	1.880.000.000	400	1.900.000.000	400	2.125.000.000	400	2.275.000.000	400		
	1.19 – 18	Program Pemberdayaan wawasan kebangsaan	Terselesaikannya penanaman masyarakat tentang di lingkungan (Komando, UOD, LAA, Bhineka Tunggal Ika dan lain)	2000 Orang	1.300	1.300	1.785.000.000	1.300	2.000.000.000	1.300	2.200.000.000	1.300	2.510.000.000	1.30...		





BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Provinsi Papua berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi SKPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

Pencapaian target kinerja program(*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-

tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berkaitan dengan pencapaian visi dan misi, maka ditetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan Harapan Seluruh Rakyat (HASRAT) Papua. Prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

I. BIDANG PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Mengevaluasi dan melanjutkan program-program pembangunan saat ini berdasarkan prioritas kebutuhan, ketersediaan pendanaan, dan jangka waktu pemanfaatan.
2. Singkronisasi dan harmonisasi hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum berjalan harmonis dan strategis.
3. Penegakkan hukum, stabilitas keamanan, ketertiban umum dan HAM melalui pemantapan koordinasi kerja antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
4. Peningkatan kualitas iman, ketaqwaan, dan emosional masyarakat dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya
5. Memperkuat kapasitas kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka memperpendek jalur birokrasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pusat di daerah
6. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa. dan disiplin dalam melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat
7. Penyelesaian persoalan tapal batas antar Negara, provinsi dan antar kabupaten yang menjadi potensi konflik dalam pembangunan
8. Penataan kembali sistem pemerintahan di Provinsi Papua yang mengalami distorsi akibat mis-manajemen dari pengambil kebijakan daerah.
9. Sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

II. BIDANG PENGUATAN OTONOMI KHUSUS

1. Kompensasi dan rekonsiliasi bagi masyarakat adat yang menyatakan diri untuk memisahkan diri dari NKRI akibat tuntutan adat yang masih membelenggu;
2. Pembangunan semesta sebagai tindak lanjut rekonsiliasi yang berkomitmen dan konsisten;
3. Penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat adat dalam pembangunan;

4. Penguatan kedudukan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 melalui legitimasi Peraturan Pemerintah, Perdasus dan Perdasi;
5. Proteksi, keberpihakkan dan pemberdayaan masyarakat asli Papua diberbagai bidang dalam kerangka Otonomi Khusus;

III. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
2. Pemantapan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas SDM untuk menjawab tantangan pembangunan;
3. Pengembangan dan peningkatan budaya, seni, olah raga dan intelektualitas sebagai wujud aktualisasi jati diri orang papua;
4. Penanganan orang yang berkebutuhan khusus dan manula sebagai komponen yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan;
5. Pengurangan tingkat kematian ibu dan anak yang masih sangat tinggi serta peningkatan asupan gizi yang memadai;
6. Pemberian jaminan sosial bagi manula, orang yang berkebutuhan khusus dan ibu rumah tangga asli Papua;
7. Pembebasan biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga tidak mampu;
8. Pengembangan prestasi olah raga, kreatifitas seni dan penguatan budaya lokal;
9. Pengembangan hak-hak masyarakat adat Papua;
10. Penguatan dan pemberdayaan kapasitas perempuan;
11. Pengembangan kapasitas kelembagaan kampung.

IV. BIDANG PERKONOMIAN

1. Pengembangan perekonomian rakyat berbasis komoditas, pengolahan dan pemasaran serta inovasi;
2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan *public utilitas* untuk menunjang pertumbuhan ekonomi lokal;
3. Menurunkan, harga-harga bahan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan;
4. Peningkatan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah;
5. Memberikan kemudahan, keringanan dan insentif bagi pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja.

V. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRASARANA

1. Penyelesaian dan implementasi rencana tata ruang dan tata wilayah yang hingga saat ini belum didukung oleh suatu dokumen sebagai acuan pembangunan;
2. Mewujudkan Provinsi Papua Terang dengan ketersediaan pasokan listrik dan air bersih bagi seluruh masyarakat kawasan pesisir sampai pegunungan;
3. Pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat papua berbasis lokal;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur kampung;
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur-infrastruktur lintas daerah.

Urusan pemerintahan yang kewenangan penyelenggaraannya dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua, dapat dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) bidang pembangunan :

1. Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi urusan pendidikan, perpustakaan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, olah raga dan kepemudaan, kebudayaan, Keluarga Berencana, ;
2. Bidang Infrastruktur, meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral, Komunikasi dan Informatika;
3. Bidang perekonomian, meliputi urusan koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal daerah, perdagangan, industri, pemberdayaan masyarakat dan kampung, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.
4. Bidang Pemerintahan, meliputi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah, Kepegawaian, kearsipan.

Berdasarkan pengelompokan tersebut diatas dan mempertimbangkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah serta arah kebijakan pembangunan daerah pada lima tahun kedepan, maka dapat ditetapkan Rencana Kebutuhan Indikatif pendanaan selama periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Rakyat : 30-37 persen

a. Urusan pendidikan : minimal 15 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerah. Pemenuhan 15 persen anggaran pendidikan merupakan wujud implementasi HASRAT Papua yaitu pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Ini juga menjadi program prioritas tahun 2013-2018, yaitu Penuntasan Buta aksara dan Wajib Belajar 9 tahun serta pencanangan wajib belajar 12 tahun.

b. Urusan kesehatan : alokasi diarahkan ke proporsi 15 persen dari total kapasitas riil pendanaan daerah. Alokasi pembiayaan diprioritaskan pada pelayanan kesehatan yang murah, mudah dan berkualitas. Program prioritas diprioritaskan pada Kesehatan Ibu, bayi dan balita, pemenuhan gizi.
c. Urusan perpustakaan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, sosial, kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan masing-masing mendapat proporsi alokasi sampai dengan sebesar 7 persen dari total kapasitas riil pendanaan daerah.

2. Bidang Infrastruktur dan Prasarana : 30 Persen

a. Urusan Pekerjaan Umum : minimal 18 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerah. Pemenuhan 18 persen anggaran merupakan wujud implementasi HASRAT Papua dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga mendorong penurunan harga-harga barang di daerah-pegunungan, selain itu meningkatkan pemenuhan energi listrik, kebutuhan perumahan yang layak huni dan ketersediaan air bersih. Program prioritas tahun 2013-2018 adalah pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, bandara dan dermaga; program pembangunan rumah layak huni, dan program air bersih.
b. Urusan Perhubungan : minimal 8 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerah. Pemenuhan 10 persen anggaran dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah khususnya sarana transportasi udara, laut dan ASDP. Program prioritas tahu 2013-2018 akan difokuskan pada pembangunan dan peningkatan sarana dan parasarana perhubungan udara, pembangunan dan peningkatan pelabuhan dan dermaga.
c. Urusan Energi dan SDM minimal 3 persen dari kapasitas riil pendanaan daerah, Urusan Lingkungan Hidup dan urusan perencanaan serta komunikasi dan informatika minimal 1 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerah.

3. Bidang Perekonomian Rakyat : 15 persen

a. Urusan yang termasuk dalam urusan rumpun hijau seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, minimal 10 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerah. Pemenuhan 10 persen anggaran ini merupakan wujud Impelementasi peninglatan perekonomian berbasis masyarakat, peningkatan ketahanan pangan untuk mendukung Generasi Emas (GEMAS) Papua khususnya pemenuhan makananan bergizi bagi Ibu Hamil dan Balita (Program 1000 hari kehidupan pertama).

b. Urusan Koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan serat pariwisata mendapatkan anggaran minimal 5 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerahyang diprioritaskan pada membentuk dan mengatur sistem pengolahan dan penjualan komoditas unggulan daerah.

4. Bidang Pemerintahan Umum: 18 persen

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah, Kepegawaian, kearsipan serta komunikasi dan informasi mempunyai proporsi sebesar 18 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerah.

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi 1 : Mewujudkan Suasana Aman,Tentram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI																		
	1.04	**Urusan Perumahan Rakyat**																
	1.04 - 17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Tersusunnya Perencanaan Permukiman	Paket	1	1	650.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	5	3.450.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.14	**Urusan Tenaga Kerja**																
	1.14 - 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tersusunnya Perencanaan Kerja makro Mikro	Kegiatan	1	1	450.000.000	1	450.000.000	1	900.000.000	1	475.000.000	1	475.000.000	5	2.750.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.17	**Urusan Kebudayaan dan Pariwisata**																
	1.17 - 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah masyarakat yang memahami dan melestarikan nilai budaya	Orang	100	150	2.141.006.100	150	2.311.233.010	150	2.508.522.311	150	2.744.874.542	150	2.983.167.722	750	13.589.004.685	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1.17 - 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah masyarakat yang ikut mengembangkan pengelolaan kekayaan budaya	Orang	100	100	7.034.700.000	100	7.767.705.000	100	8.626.656.000	100	9.485.679.000	100	10.314.326.650	500	44.406.066.650	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1.19	**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**																
	1.19 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan adminstrasi perkantoran	Tahun	75	80	1.187.000.000	85	1.253.000.000	90	1.307.000.000	95	1.362.000.000	100	1.450.000.000	450	7.559.737.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
	1.19 - 16	Porgram Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tersosialisasinya pemahaman masyarakat tentang kantrantibmas di daerah	2000 Orang	400	400	2.000.000.000	400	2.150.000.000	400	2.285.000.000	400	2.425.000.000	400	2.600.000.000	2.000	12.963.000.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
	1.19 - 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Tersosialisasinya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan di daerah	2000 orang	400	400	1.850.000.000	400	1.950.000.000	400	2.125.000.000	400	2.275.000.000	400	2.425.000.000	2.000	13.105.920.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
	1.19 - 18	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Tersosialisasinya pemahaman masyarakat tentang 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI)	2000 Orang	3.300	1.300	1.765.000.000	1.300	2.020.000.000	1.300	2.200.000.000	1.300	2.510.000.000	1.300	2.495.000.000	6.500	13.145.563.500	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
	1.19 - 19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ketertiban dan keamanan di daerah	2000 orang	1.000	400	2.700.000.000	400	2.850.000.000	400	3.100.000.000	400	3.100.000.000	400	3.700.000.000	2.000	17.198.000.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
	1.19 - 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemberantasan penyakit masyarakat	10000 orang	500	2.000	1.800.000.000	2.000	1.900.000.000	2.000	2.075.000.000	2.000	2.075.000.000	2.000	2.200.000.000	10.000	10.850.000.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
	1.19 - 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang Politik	5000 orang	2.400	1.000	1.750.000.000	1.000	1.835.000.000	1.000	1.970.000.000	1.000	2.030.000.000	1.000	2.045.000.000	5.000	11.119.600.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.19 - 23	Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Undang-undang Ormas/LSM	3000 orang	1.100	600	900.000.000	600	1.000.000.000	600	1.100.000.000	600	1.150.000.000	600	1.200.000.000	3.000	6.277.920.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
	1.20	**Urusan Pemerintahan Umum**																
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Prosentase Pelayanan Manajemen Administrasi yang Prima yang mendukung tercapainya Aparatur Profesional	Buah	100	100	10.139.250.000	100	11.123.000.000	100	9.885.000.000	100	12.195.000.000	100	10.302.500.000	500	53.644.750.000	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Sarana Prasarana yang mendukung tercapainya Pelaksanaan Tupoksi Aparatur	unit	100	20	15.239.026.000	20	10.510.000.000	20	9.130.000.000	20	7.680.000.000	20	6.395.000.000	100	48.954.026.000	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Tugas Rutin Kantor	unit	**44**	**44**	1.961.585.000	**44**	1.817.743.500	**44**	1.962.017.850	**44**	1.745.719.635	**44**	1.920.291.599	220	10.599.707.584	Inspektorat Provinsi
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Adanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 4 untuk digunakan oleh PNS Biro Tata Pemerintahan	Unit	32	4	866.000.000	0	72.600.000	4	992.860.000	0	87.846.000	4	1.135.860.000	12	3.727.166.000	Biro Tata Pemerintahan
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase jumlah sarana dan Prasarana lebih memadai dan tepat fungsi	Unit	100	100	486.350.000	100	595.600.000	100	615.500.000	100	256.500.000	100	258.600.000	500	2.457.570.000	Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana penunjang w aw asan aparatur	buku	100	100	1.961.585.000	100	1.817.743.500	100	1.962.017.850	100	1.745.719.635	100	1.920.291.599	500	10.599.707.584	Inspektorat Provinsi
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	bulan	12	12	162.140.000	12	178.354.000	12	196.189.400	12	215.808.340	12	237.389.174	60	1.137.280.914	Biro Hukum
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	12 Bulan	12	12	162.140.000	12	178.354.000	12	196.189.400	12	215.808.340	12	237.389.174	60	1.137.280.914	Biro Hukum
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat Prestasi Kerja dan Disiplin Aparatur	Orang	100	20	11.380.784.140	20	13.250.650.000	20	13.501.350.000	20	15.150.650.000	20	16.250.650.000	100	69.534.084.140	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan SDM Aparatur Inspektorat yang mengikuti Diklat PIM II, PIM III dan PIM IV	Orang	32	32	440.220.000	32	484.242.000	32	532.666.200	32	585.932.820	32	644.526.102	160	3.087.787.122	Inspektorat Provinsi
	1.20 - 20	Program peningkatan sistem pengaw asan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Bulan	24	12	1.050.000.000	12	1.075.000.000	12	825.000.000	12	825.000.000	12	825.000.000	60	5.034.600.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Pedoman Kepegawaian Pemerintah Provinsi Papua	Buku	100	100	5.100.000.000	100	5.210.000.000	100	5.220.000.000	100	5.330.000.000	100	5.340.000.000	500	26.200.000.000	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
	1.20 - 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pembentukan produk hukum daerah dan peningkatan SDM perancang produk hukum	Keputusan Gub	250	250	3.511.370.000	250	3.862.507.000	250	4.248.757.700	250	4.673.633.470	250	5.140.996.817	1.250	22.648.264.987	Biro Hukum
	1.20 - 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pembentukan produk hukum daerah dan peningkatan SDM perancang produk hukum	Keputusan Gubernur	250	250	3.511.370.000	250	3.862.507.000	250	4.248.757.700	250	4.673.633.470	250	5.140.996.817	1.250	22.648.264.987	Biro Hukum
	1.20 - 32	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	65	75	1.775.000.000	75	1.875.000.000	75	1.950.000.000	75	1.175.000.000	75	1.175.000.000	375	8.925.000.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	1.20 - 38	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Admnistrasi Kepegawaian PNS di Lingkungan Provinsi Papua	Orang	2.351	2.351	1.550.000.000	2.400	2.000.000.000	2.450	2.100.000.000	3.500	2.400.000.000	2.550	2.800.000.000	13.251	10.850.000.000	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
	1.20 - 39	Program penerapan kepemerintahan yang baik	Meningkatnya Prosentase Efisiensi dan Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Baik	Buku	50	50	1.900.966.215	50	2.000.000.000	50	2.100.000.000	50	2.150.000.000	50	2.200.000.000	250	10.350.966.215	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
	1.20 - 41	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Terlaksananya proses penanganan perkara di lembaga peradilan	Orang	40	60	380.650.000	40	400.000.000	40	450.000.000	40	450.000.000	40	550.000.000	220	2.230.650.000	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
	1.20 - 41	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Penanganan Perkara, Perdata, TUN, Uji Materiil	Perkara	23	23	1.953.990.000	23	2.149.389.000	23	2.364.327.900	23	2.600.760.690	23	2.860.836.759	115	11.929.304.349	Biro Hukum
	1.20 - 59	Program Pengembangan dan Pengamanan Negara	Jumlah Batas dan Pos Pengamanan Perbatasan yang Berfungsi Baik	PPLB	2	2	10.700.000.000	2	10.500.000.000	2	11.677.500.000	2	5.887.500.000	2	4.387.500.000	10	43.152.500.000	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
	1.20 - 64	Program Pembinaan Lembaga Keagamaan	Tercapainya satu kesepakatan dalam evaluasi dana bantuan oleh pemerintah dan lembaga keagamaan	136	94	136	1.100.000.000	136	1.100.000.000	136	1.100.000.000	136	1.100.000.000	136	1.100.000.000	680	5.500.000.000	Biro Bina Mental Spiritual
	1.20 - 66	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Terlaksananya Penataan dan Pemutahiran Arsip /Dokumen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Dokumen	100	20	1.360.280.000	20	1.360.280.000	20	1.380.000.000	20	1.400.000.000	20	1.450.000.000	100	6.950.560.000	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
	1.20 - 73	Program Pembinaan Adat	Teridentifikasi dan Tertatanya Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua	Kabupaten /Kota	0	1	6.500.000.000	1	7.150.000.000	1	7.865.000.000	1	8.651.500.000	1	9.516.650.000	5	39.683.150.000	Biro Pemerintahan Kampung

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 73	Program Pembinaan Adat	Tersusunnya Produk Hukum Adat di Provinsi Papua	Perdasus	0	2	6.500.000.000	2	7.150.000.000	2	7.865.000.000	2	8.651.500.000	2	9.516.650.000	10	39.683.150.000	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 74	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Peraturan Daerah	Meningkatnya Nilai Budaya Papua		90	90	449.460.000	90	494.406.000	90	543.846.600	90	598.231.260	90	658.054.386	450	2.743.998.246	Kantor Penghubung Daerah
	1.20 - 77	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Peraturan Daerah	Meningkatnya pengembangan pembinaan kemasyarakatan dan kemahasiswaan		90	90	160.000.000	90	176.000.000	90	193.600.000	90	212.960.000	90	234.256.000	450	976.816.000	Kantor Penghubung Daerah
	1.21	**Urusan Kepegawaian**																
	1.21 - 18	Program Pengembangan Data dan informasi	Tervalidasinya data dan Informasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Dokumen	100	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	20	3.000.000.000	100	15.000.000.000	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus																		
	1.01	**Urusan Pendidikan**																
	1.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran	Persen	45	100	3.396.178.953	100	4.726.391.625	100	5.330.409.491	100	5.774.601.540	100	6.279.559.406	500	29.917.781.218	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran	Persen	45	100	2.172.685.000	100	2.607.222.000	100	3.128.666.400	100	3.754.399.680	100	4.505.279.616	500	17.912.992.696	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
	1.01 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase capaian program	Persen	75	80	2.481.127.000	80	2.977.352.400	80	3.572.822.880	80	4.287.387.456	80	5.144.864.947	400	20.797.079.683	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
	1.01 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase capaian program	Persen	75	80	479.815.000	80	575.778.000	80	690.933.600	80	829.120.320	80	994.944.384	400	3.650.426.304	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
	1.01 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase capaian program	Persen	75	80	585.780.000	80	702.936.000	80	843.523.200	80	1.012.227.840	80	1.214.673.408	400	4.809.740.448	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
	1.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase capaian program	Persen	75	80	315.000.000	80	378.000.000	80	453.600.000	80	544.320.000	80	653.184.000	400	2.559.104.000	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
	1.02	**Urusan Kesehatan**																
	1.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	80	90	8.209.900.000	100	10.237.375.000	100	11.268.872.687	100	172.089.647.000	100	19.954.869.000	490	221.760.663.687	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
	1.02 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Dalam Menunjang Kinerja Aparatur	Persentase	80	90	4.247.870.000	95	9.012.200.000	100	11.359.000.000	90	14.229.997.000	100	16.613.133.390	475	55.462.200.390	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
	1.02 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Tenaga Medis, Paramedis Dan Non Medis	Persentase	80	90	1.138.300.000	100	1.199.467.000	100	1.499.327.000	100	1.874.162.000	100	2.342.703.000	490	8.053.959.000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
	1.02 - 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Jumlah Pegawai yang purna tugas	Orang	5	5	75.000.000	5	82.500.000	5	90.750.000	5	99.825.000	5	109.807.500	25	457.882.500	Dinas Kesehatan
	1.02 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Building Aparatur	Orang	20	20	1.258.472.600	20	1.384.000.000	20	1.522.400.000	20	1.674.640.000	20	1.842.104.000	100	8.825.682.600	Dinas Kesehatan
	1.02 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Aparatur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	80	90	3.756.000.000	100	4.663.750.000	100	5.798.437.000	100	7.216.799.000	100	8.989.915.000	490	30.424.901.000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.02 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Building Aparatur	Orang	20	20	930.368.400	20	1.069.923.660	20	1.230.412.209	20	1.414.974.040	20	1.697.968.848	100	7.152.663.157	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
	1.02 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah petugas RSJD yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	Orang	14	30	316.000.000	30	347.600.000	30	382.360.000	30	420.596.000	30	460.000.000	150	1.926.556.000	Rumah Sakit Jiwa Abepura
	1.02 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan laporan kinerja	Buah	4	4	173.862.000	4	191.248.000	4	210.373.000	4	231.411.000	4	254.551.000	20	1.235.307.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Persentase Capaian Realisasi Keuangan Sesuai Dengan Rencana	Persentase	100	100	95.000.000	100	118.750.000	100	148.437.000	100	185.546.000	100	231.933.000	500	779.666.000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
	1.02 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya bahan informasi keuangan	Buku/Tahun	5	10	174.857.500	15	201.086.125	20	231.249.044	25	265.936.400	30	319.123.679	100	1.344.302.748	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
	1.02 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan yang diselesaikan	Dokumen	6	6	92.000.000	6	92.000.000	6	105.600.000	6	115.600.000	6	121.360.000	30	526.560.000	Rumah Sakit Jiwa Abepura
	1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya angka gizi buruk, jumlah kematian masyarakat orang asli papua	Orang/Tahun	1.000	2.000	49.934.032.000	3.000	57.675.348.400	4.000	66.628.104.580	5.000	76.984.064.971	6.000	92.380.877.965	20.000	386.841.287.916	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
	1.02 - 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Persentase	100	100	2.237.500.000	100	2.709.375.000	100	3.249.300.000	100	3.986.523.000	100	4.933.154.000	500	17.115.852.000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
	1.02 - 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Masih rendahnya tingtkat pengetahuan tenaga kesehatan papua sesuia bidang profesi pelayanan	Paket/Tahun	20	25	860.775.000	30	989.891.250	35	1.138.374.938	40	1.309.131.179	45	1.505.500.856	175	6.552.173.223	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
	1.02 - 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terbangunnya prasarana kesehatan yang baik	Unit	0	0	200.200.000.000	0	225.000.000.000	0	250.000.000.000	0	-	0	925.000.000.000	0	1.600.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.02 - 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan	Persentase	90	100	77.736.000.000	100	97.747.500.000	100	127.184.373.000	100	164.580.467.000	100	1.180.561.019.000	500	1.647.809.359.000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
	1.02 - 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah kunjungan penderita meningkat serta kurangnya sarana penunjang pelayanan	Gedung/Unit/Tahun	3	6	282.527.128.000	8	289.032.553.600	10	296.839.064.320	12	306.206.877.184	14	317.448.252.621	50	1.521.936.365.725	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
	1.02 - 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Yang Berfungsi Baik	Persentase	80	85	8.001.250.000	90	5.251.562.000	100	6.564.453.000	100	8.205.566.000	100	10.257.011.000	475	38.279.842.000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.02 - 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiw a/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah polik, kendaraan operasional yang laik pakai berkurang	Paket/Tahun	3	6	4.359.480.000	9	5.231.376.000	12	6.277.651.200	15	7.533.181.440	18	9.039.817.728	60	36.074.406.368	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
	1.03	**Urusan Pekerjaan Umum**																
	1.03 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Surat	Surat	2.000	2.000	5.182.340.000	2.000	5.836.957.000	2.000	6.160.678.500	2.000	6.616.188.350	2.000	6.926.249.185	10.000	30.722.413.035	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyedia jasa dalam 1 tahun	Bulan	12	12	5.182.340.000	12	5.836.957.000	12	6.160.678.500	12	6.616.188.350	12	6.926.249.185	60	30.722.413.035	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah orang jasa pengamanan	Orang	8	8	5.182.340.000	8	5.836.957.000	8	6.160.678.500	8	6.616.188.350	8	6.926.249.185	40	30.722.413.035	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah set perlengkapan	Set	0	1	46.497.750.000	0	773.938.000.000	1	761.040.000.000	0	760.240.000.000	1	255.517.000.000	3	2.597.232.750.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah set peralatan	Set	0	1	46.497.750.000	1	773.938.000.000	0	761.040.000.000	1	760.240.000.000	1	255.517.000.000	4	2.597.232.750.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung pemeliharaan	Unit	0	1	46.497.750.000	1	773.938.000.000	0	761.040.000.000	1	760.240.000.000	1	255.517.000.000	4	2.597.232.750.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan	Unit	0	19	46.497.750.000	18	773.938.000.000	20	761.040.000.000	24	760.240.000.000	32	255.517.000.000	113	2.597.232.750.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan pemeliharaan gedung	Unit	0	1	46.497.750.000	1	773.938.000.000	1	761.040.000.000	1	760.240.000.000	1	255.517.000.000	5	2.597.232.750.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung yg direhabilitasi	Unit	0	1	46.497.750.000	1	773.938.000.000	1	761.040.000.000	1	760.240.000.000	1	255.517.000.000	5	2.597.232.750.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung direhabilitasi	Unit	0	0	46.497.750.000	1	773.938.000.000	0	761.040.000.000	0	760.240.000.000	0	255.517.000.000	1	2.597.232.750.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung yang ditata	Unit	0	0	46.497.750.000	1	773.938.000.000	0	761.040.000.000	0	760.240.000.000	0	255.517.000.000	1	2.597.232.750.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung yang ditata	Unit	0	0	46.497.750.000	1	773.938.000.000	0	761.040.000.000	0	760.240.000.000	0	255.517.000.000	1	2.597.232.750.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung yang dibangun	Unit	0	0	46.497.750.000	1	773.938.000.000	1	761.040.000.000	0	760.240.000.000	0	255.517.000.000	2	2.597.232.750.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung yang dipelihara	Unit	0	0	46.497.750.000	0	773.938.000.000	0	761.040.000.000	1	760.240.000.000	1	255.517.000.000	2	2.597.232.750.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pakaian pegaw ai	Orang	0	523	450.000.000	525	615.999.825	525	650.000.000	525	650.000.000	525	650.000.000	2.623	3.015.999.825	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	orang	0	4	17.624.000.000	4	15.955.000.000	4	14.545.500.000	4	15.148.050.000	4	15.384.355.000	20	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Akutansi Manajemen Keuangan Bidang Ke-Pu-An	orang	0	0	17.624.000.000	60	15.955.000.000	0	14.545.500.000	60	15.148.050.000	0	15.384.355.000	120	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi (Construction Audit) Bidang Ke-Pu-An	orang	0	0	17.624.000.000	0	15.955.000.000	60	14.545.500.000	60	15.148.050.000	60	15.384.355.000	180	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kualifikasi Jabatan Fungsional Bidang Ke-Pu-An	orang	0	60	17.624.000.000	0	15.955.000.000	60	14.545.500.000	0	15.148.050.000	60	15.384.355.000	180	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Manajemen Aset Bidang Ke-Pu-An	orang	0	0	17.624.000.000	60	15.955.000.000	60	14.545.500.000	60	15.148.050.000	60	15.384.355.000	240	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan monitoring & evaluasi program pemberdayaan kampung	Dokumen	0	0	17.624.000.000	1	15.955.000.000	0	14.545.500.000	1	15.148.050.000	0	15.384.355.000	2	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Fasilitasi Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Bidang Ke-PU-an	orang	0	0	17.624.000.000	60	15.955.000.000	60	14.545.500.000	60	15.148.050.000	60	15.384.355.000	240	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen data klasifikasi aset	Dokumen	0	0	17.624.000.000	1	15.955.000.000	0	14.545.500.000	1	15.148.050.000	1	15.384.355.000	3	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Pembuatan Data Klasifikasi Aset Bidang Ke-Pu-An	orang	0	0	17.624.000.000	0	15.955.000.000	0	14.545.500.000	60	15.148.050.000	0	15.384.355.000	60	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Teknis Sistem Perpajakan Bidang Ke-Pu-An	orang	0	0	17.624.000.000	0	15.955.000.000	0	14.545.500.000	60	15.148.050.000	0	15.384.355.000	60	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Manajemen Kepegawaian Tentang Hak Dan Kewajiban Serta Disiplin Pegawai Bidang Ke-Pu-An	orang	0	0	17.624.000.000	60	15.955.000.000	0	14.545.500.000	0	15.148.050.000	60	15.384.355.000	120	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Tata Persuratan dan Arsip Bidang Ke-Pu-An	orang	0	0	17.624.000.000	60	15.955.000.000	60	14.545.500.000	60	15.148.050.000	60	15.384.355.000	240	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan penyiapan evaluasi	Dokumen	0	1	17.624.000.000	1	15.955.000.000	1	14.545.500.000	1	15.148.050.000	1	15.384.355.000	5	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimtek Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Ke-Pu-An	orang	0	0	17.624.000.000	0	15.955.000.000	60	14.545.500.000	0	15.148.050.000	0	15.384.355.000	60	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Budaya Kerja Prestatif Bidang Ke-Pu-An	orang	0	0	17.624.000.000	60	15.955.000.000	0	14.545.500.000	60	15.148.050.000	0	15.384.355.000	120	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Administrasi Kontrak Konstruksi Bidang Ke-Pu-An	Orang	0	0	17.624.000.000	0	15.955.000.000	60	14.545.500.000	0	15.148.050.000	60	15.384.355.000	120	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Perencanaan Air Mnum Bidang Ke-Pu-an	orang	0	0	17.624.000.000	60	15.955.000.000	0	14.545.500.000	60	15.148.050.000	0	15.384.355.000	120	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan Koordinasi, Advisory dan Pemantauan	Dokumen	0	0	17.624.000.000	1	15.955.000.000	0	14.545.500.000	0	15.148.050.000	0	15.384.355.000	1	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Akutansi Keuangan Bidang Ke-Pu-an	orang	0	60	17.624.000.000	60	15.955.000.000	60	14.545.500.000	60	15.148.050.000	60	15.384.355.000	300	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimtek Teknis Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bidang Ke-Pu-an	orang	0	60	17.624.000.000	0	15.955.000.000	60	14.545.500.000	0	15.148.050.000	0	15.384.355.000	120	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan yang dimonitor dan dievaluasi	Dokumen	0	8	17.624.000.000	8	15.955.000.000	8	14.545.500.000	8	15.148.050.000	8	15.384.355.000	40	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan Konsultasi Manajemen Kabupaten (KMK) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Dokumen	0	4	17.624.000.000	4	15.955.000.000	4	14.545.500.000	4	15.148.050.000	4	15.384.355.000	20	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimtek Penanggulangan Abrasi Pantai	orang	0	60	17.624.000.000	0	15.955.000.000	0	14.545.500.000	60	15.148.050.000	0	15.384.355.000	120	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimtek Pemeliharaan Rutin Jalan	orang	0	60	17.624.000.000	0	15.955.000.000	60	14.545.500.000	0	15.148.050.000	0	15.384.355.000	120	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan Jumlah kegiatan pengembangan dan pengelolaan	Dokumen	0	1	17.624.000.000	1	15.955.000.000	1	14.545.500.000	1	15.148.050.000	1	15.384.355.000	5	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan	Dokumen	0	1	17.624.000.000	1	15.955.000.000	1	14.545.500.000	1	15.148.050.000	1	15.384.355.000	5	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	dJuamtalah fasilitator masyarakat program pembangunan infrastruktur	Kabupaten	0	0	17.624.000.000	0	15.955.000.000	8	14.545.500.000	0	15.148.050.000	0	15.384.355.000	8	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Sosialisasi Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Ke-Pu-An	orang	0	60	17.624.000.000	0	15.955.000.000	60	14.545.500.000	0	15.148.050.000	60	15.384.355.000	180	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah laporan kegiatan penyelesaian temuan	Dokumen	0	1	17.624.000.000	1	15.955.000.000	1	14.545.500.000	1	15.148.050.000	1	15.384.355.000	5	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Kabupaten yang dimonitor melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dokumen	0	0	17.624.000.000	29	15.955.000.000	29	14.545.500.000	29	15.148.050.000	29	15.384.355.000	116	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan	Orang	0	0	17.624.000.000	60	15.955.000.000	60	14.545.500.000	0	15.148.050.000	60	15.384.355.000	180	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengawasan Pekerjaan Jalan dan Jembatan	Orang	0	0	17.624.000.000	0	15.955.000.000	0	14.545.500.000	60	15.148.050.000	0	15.384.355.000	60	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Mind Setting	Orang	0	0	17.624.000.000	0	15.955.000.000	0	14.545.500.000	60	15.148.050.000	0	15.384.355.000	60	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana Banjir	Orang	0	0	17.624.000.000	0	15.955.000.000	60	14.545.500.000	0	15.148.050.000	60	15.384.355.000	120	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis OP Jaringan Irigasi	Orang	0	0	17.624.000.000	0	15.955.000.000	60	14.545.500.000	0	15.148.050.000	60	15.384.355.000	120	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung	Orang	0	0	17.624.000.000	0	15.955.000.000	0	14.545.500.000	60	15.148.050.000	0	15.384.355.000	60	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Orang	0	0	17.624.000.000	0	15.955.000.000	0	14.545.500.000	60	15.148.050.000	0	15.384.355.000	60	78.656.905.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	0	1	422.794.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	5	2.302.794.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan keuangan semesteran	Dokumen	0	1	422.794.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	5	2.302.794.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	0	1	422.794.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	5	2.302.794.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Renja, RKA dan Perubahan APBD	Dokumen	0	3	422.794.000	3	470.000.000	3	470.000.000	3	470.000.000	3	470.000.000	15	2.302.794.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 31	Peningkatan Jalan dan Jembatan	fdbf	ff	0	0	238.000.000.000	0	222.800.000.000	0	223.000.000.000	0	394.500.000.000	0	348.500.000.000	0	1.426.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.06	**Urusan Perencanaan Pembangunan**																

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.06 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	"Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	Bulan	12	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	60	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.06 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianyan Sarana dan Prasarana kantor	Bulan	12	12	237.000.000	12	245.000.000	12	245.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	60	1.227.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.06 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur	Persen	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	500	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.06 - 15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase capaian program	Persen	75	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	400	-	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
	1.06 - 16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase capaian program	Persen	75	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	400	-	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
	1.06 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Dokumen	6	1	949.985.000	1	1.037.085.000	1	850.000.000	1	1.100.000.000	1	750.000.000	5	4.687.070.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.06 - 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian program	Persen	75	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	400	-	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
	1.06 - 27	Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persen	100	100	4.153.660.000	100	4.656.650.000	100	11.365.000.000	100	4.431.300.000	100	4.588.200.000	500	29.194.810.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.06 - 28	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Tersedianya Data dan Informasi Hasil Litbang IPTEK	Dokumen	20	13	4.566.575.000	10	4.983.675.000	12	2.936.350.000	13	2.000.000.000	14	2.600.000.000	62	17.086.600.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.08	**Urusan Lingkungan Hidup**																
	1.08 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	lancarnya urusan administrasi Perkantoran	Tahun	87	90	2.362.871.200	95	2.574.158.320	96	2.806.574.152	98	3.062.231.567	**99**	3.343.454.725	478	16.070.081.964	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	1.08 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan fungsi sarana kantor	Tahun	90	90	1.142.594.200	95	1.256.853.620	95	1.382.538.982	95	1.520.792.880	90	1.672.872.169	465	8.014.373.851	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	1.08 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	meningkatnya Disiplin Aparatur	Tahun	90	90	164.890.000	95	181.379.000	100	199.516.900	95	219.468.590	95	241.415.449	475	1.156.569.939	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	1.08 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	satuan	95	95	3.052.500.000	90	1.582.750.000	95	2.816.025.000	90	2.152.627.500	95	3.192.890.250	465	13.071.792.750	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	1.08 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dan meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tahun	100	100	100.500.000	100	110.550.000	100	121.605.000	95	133.765.500	95	147.142.050	490	668.562.550	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	1.10	**Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**																
	1.10 - 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase capaian program	Persen	75	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	400	-	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
	1.13	**Urusan Sosial**																
	1.13 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	3.736.467.900	100	4.110.114.690	100	4.522.941.159	100	4.977.322.525	100	5.470.562.652	500	26.214.197.926	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
	1.13 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia	Unit	100	100	8.784.991.600	100	9.663.490.760	100	10.629.839.836	100	11.692.823.819	100	12.862.106.201	500	61.619.608.216	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.13 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur yang meningkat	%	100	100	229.350.000	100	252.285.000	100	277.513.500	100	305.264.850	100	335.791.335	500	1.608.704.685	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
	1.13 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase meningkatnya SDM Pegawai yang terlatih	%	100	100	358.050.000	100	393.855.000	100	433.240.500	100	476.564.550	100	524.221.005	500	2.511.431.055	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
	1.13 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	%	100	100	82.500.000	100	90.750.000	100	99.825.000	100	109.807.500	100	120.788.250	500	578.670.750	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
	1.15	**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**																
	1.15 - 19	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tingkat Ketersedian Data dan Informasi Untuk Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan kota baik dari Segi Jumlah, Jenis	persen	10	15	727.648.000	18	836.795.200	20	962.314.480	**22**	1.106.661.652	25	1.272.660.900	100	4.906.080.232	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	1.16	**Urusan Penanaman Modal**																
	1.16 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100	100	1.864.354.500	100	2.050.789.950	100	2.255.868.945	100	2.481.455.840	100	2.729.601.424	500	13.246.425.159	Badan Koordinasi Penanaman Modal
	1.16 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor BKPM Provinsi Papua	100 Persen	100	100	1.103.423.280	100	1.213.765.608	100	1.335.142.169	100	1.468.656.386	100	1.615.522.024	500	7.839.932.747	Badan Koordinasi Penanaman Modal
	1.16 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin pegawai BKPM Provinsi Papua	100 Persen	100	100	67.200.000	100	73.920.000	100	81.312.000	100	89.443.200	100	98.387.520	500	477.462.720	Badan Koordinasi Penanaman Modal
	1.16 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur BKPM Provinsi Papua yang profesional	52 Orang	52	52	263.470.000	52	289.817.000	52	318.798.700	52	350.678.570	52	385.746.427	260	1.871.980.697	Badan Koordinasi Penanaman Modal
	1.16 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan SKPD	100 Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	500	-	Badan Koordinasi Penanaman Modal
	1.17	**Urusan Kebudayaan dan Pariwisata**																
	1.17 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	paket	300	100	3.380.686.100	100	3.718.754.710	100	4.090.630.181	100	4.499.693.199	100	4.949.662.519	500	23.712.777.709	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1.17 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	paket	100	100	8.770.330.400	100	9.647.363.440	100	10.612.099.784	100	11.673.309.762	100	12.840.640.739	500	61.130.408.125	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1.17 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang displin	orang	180	180	-	180	312.800.000	180	-	180	344.080.000	180	-	900	914.480.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1.17 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang berkompetensi	Orang	100	100	1.285.955.000	100	1.414.550.500	100	1.556.005.550	100	1.711.606.105	100	1.882.766.716	500	9.019.933.871	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.17 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja yang akuntabel	paket	100	100	260.700.000	100	286.770.000	100	315.447.000	100	346.991.700	100	381.690.870	500	1.828.599.570	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1.19	**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**																
	1.19 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana	Unit	70	75	225.000.000	80	255.000.000	85	285.000.000	90	310.000.000	95	350.000.000	425	1.634.100.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
	1.19 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Stel	75	75	90.000.000	80	100.000.000	85	110.000.000	90	130.000.000	95	140.000.000	425	684.113.500	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
	1.19 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya aparatur	Orang	70	75	760.000.000	75	920.000.000	80	880.000.000	85	940.000.000	90	900.000.000	405	5.041.046.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
	1.19 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya laporan keuangan yang akuntabel	Dokumen	80	85	155.000.000	85	165.000.000	85	175.000.000	90	190.000.000	90	200.000.000	435	1.040.000.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
	1.19 - 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dalam Melakukan Pencegahan Dini Dalam Penanggulangan Korban Bencana	Tahun	75	75	83.900.000.000	80	58.875.000.000	85	69.080.000.000	90	68.318.000.000	95	70.592.300.000	425	355.294.430.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.20	**Urusan Pemerintahan Umum**																
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan	Bulan	12	12	28.692.197.300	12	33.382.337.995	12	37.070.281.244	12	41.293.523.112	12	45.885.437.546	60	210.328.320.197	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	2.789.648.000	100	3.068.613.000	100	3.375.475.000	100	3.713.023.000	100	4.084.324.000	500	17.031.083.000	Badan Pengelolaan Infrastruktur
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima	Bulan	85	85	17.453.583.427	85	17.453.583.427	85	17.453.583.427	85	17.453.583.427	85	17.453.583.427	425	104.721.500.562	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Prosentase Pelayanan Manajemen Administrasi yang Prima yang mendukung tercapainya Aparatur Profesional	Buah	0	3.899	2.155.250.000	3.899	2.185.250.000	3.899	2.221.500.000	3.899	2.251.500.000	3.899	2.297.000.000	19.495	11.110.500.000	Biro Bina Mental Spiritual
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat sebanyak 1000 surat	surat	1.000	1.000	3.451.900.000	1.000	3.797.090.000	1.000	4.176.799.000	1.000	4.594.479.000	1.000	5.053.927.000	5.000	24.502.595.000	Biro Tata Pemerintahan
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya cakupan pelayanan Administrasi perkantoran	Kegiatan	5	6	4.754.400.000	6	5.229.840.000	6	5.752.824.000	6	6.328.106.400	6	6.960.917.040	30	29.026.087.440	Biro Pemerintahan Kampung

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas pelayanan Aparatur sesuai Tupoksi	Buah	80	85	3.184.000.000	90	3.269.900.000	90	3.502.800.000	95	3.524.700.000	95	3.646.600.000	455	20.092.525.000	Biro Humas dan Protokol
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekretariat MRP secara baik dan berkelanjutan	Persen	100	100	7.021.571.000	100	7.515.196.000	100	7.673.576.000	100	8.235.932.000	100	8.401.273.000	500	45.662.200.000	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mew ujudkan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima	Bulan	85	85	27.920.238.000	85	27.920.238.000	85	27.920.238.000	85	27.920.238.000	85	27.920.238.000	425	167.521.428.000	Sekretariat Daerah
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya fasilitas penunjang kelancaran pelaksanaan tugas rutin kantor	surat	350	350	1.012.605.000	350	1.133.536.250	350	1.250.857.375	350	1.380.505.737	350	1.523.803.329	1.750	7.206.307.691	Inspektorat Provinsi
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Pemerintah	%	75	75	6.876.931.000	75	7.083.705.000	75	7.191.625.000	85	7.211.050.000	85	7.180.500.000	395	42.191.811.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		90	90	4.098.718.000	90	4.508.589.800	90	4.959.448.780	90	5.455.393.658	90	6.000.933.024	450	25.023.083.262	Kantor Penghubung Daerah
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun	75	75	3.850.000.000	80	3.885.000.000	85	4.070.000.000	90	4.255.000.000	95	4.440.000.000	425	23.326.450.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	20	20	2.255.000.000	20	2.255.000.000	20	2.255.000.000	20	2.225.000.000	20	2.247.000.000	100	11.237.000.000	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Tugas Kantor selama	Bulan	12	12	1.720.049.750	12	1.940.245.913	12	2.194.194.750	12	2.482.894.938	12	2.805.754.494	60	12.578.976.845	Biro Hukum
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang lebih Efektif dan Efisien	Unit	100	100	1.026.823.000	100	1.100.108.000	100	1.100.368.000	100	1.105.168.000	100	1.114.638.800	500	6.456.428.800	Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mew ujudkan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima	%	85	85	11.225.759.725	85	11.225.759.725	85	11.225.759.725	85	11.225.759.725	85	11.225.759.725	425	67.354.558.350	Dinas Pendapatan Daerah
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mew ujudkan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima	%	85	85	33.732.298.000	85	31.436.900.000	85	32.597.700.000	85	33.657.390.000	85	34.592.800.000	425	186.216.602.000	Biro Umum dan Perlengkapan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Adanya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Dokumen Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	47	47	4.754.400.000	47	5.229.840.000	47	5.752.824.000	47	6.328.106.400	47	6.960.917.040	235	29.026.087.440	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja kesekretariatan kantor	Orang Bulan	72	72	1.012.605.000	72	1.133.536.250	72	1.250.857.375	72	1.380.505.737	72	1.523.803.329	360	7.206.307.691	Inspektorat Provinsi
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya ATK Penunjang Operasional kantor	Jenis	30	30	4.754.400.000	30	5.229.840.000	30	5.752.824.000	30	6.328.106.400	30	6.960.917.040	150	29.026.087.440	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan kantor	tahun	1	1	1.012.605.000	1	1.133.536.250	1	1.250.857.375	1	1.380.505.737	1	1.523.803.329	5	7.206.307.691	Inspektorat Provinsi
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Buku-Buku Peraturan dan Blanko bagi Aparat dan Pelayanan Administrasi Kantor	Buku	1.000	1.000	4.754.400.000	1.000	5.229.840.000	1.000	5.752.824.000	1.000	6.328.106.400	1.000	6.960.917.040	5.000	29.026.087.440	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya makanan dan Mnuman bagi PNS dan Tamu Biro Pemerintahan Kampung	Orang	150	150	4.754.400.000	150	5.229.840.000	150	5.752.824.000	150	6.328.106.400	150	6.960.917.040	750	29.026.087.440	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksanannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Keluar	Wilayah	40	40	4.754.400.000	40	5.229.840.000	40	5.752.824.000	40	6.328.106.400	40	6.960.917.040	200	29.026.087.440	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	daerah Mew ujudkan Pelayanan yang mendukung kegiatan Kedew anan	Bulan/Tahun/Unit	67	58	29.196.185.400	72	33.095.042.460	60	37.530.671.004	54	42.578.781.046	54	44.658.941.941	298	213.524.335.851	Sekretariat Dew an Perw akilan Rakyat Papua
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	Unit	243	248	928.500.000	248	1.101.350.000	248	1.211.485.000	248	1.332.634.000	248	1.466.097.000	1.240	6.040.066.000	Badan Pengelolaan Infrastruktur
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Mew ujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam melakukan pelayanan birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	%	85	85	5.835.557.650	85	3.563.416.650	85	3.489.097.650	85	5.909.876.650	85	3.489.097.650	425	25.631.143.900	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terw ujudnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin aparatur	Paket	0	14	1.900.000.000	14	1.900.000.000	14	1.900.000.000	14	1.900.000.000	14	1.900.000.000	70	9.500.000.000	Biro Bina Mental Spiritual
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan Prasarana Aparartur	Kegiatan	5	5	1.600.000.000	5	1.760.000.000	5	1.936.000.000	5	2.429.600.000	5	2.672.560.000	25	10.398.160.000	Biro Pemerintahan Kampung

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur dibidang Kehumasan dan Keprotokolan	Unit	45	60	11.012.100.000	70	1.563.000.000	80	1.549.000.000	85	1.449.000.000	95	1.375.000.000	390	17.484.715.000	Biro Humas dan Protokol
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekretariat MRP secara baik dan berkelanjutan	Persen	100	100	4.491.314.000	100	3.733.575.000	100	3.946.575.000	100	4.131.932.000	100	4.301.732.000	500	23.858.326.000	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Mewujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam melakukan pelayanan birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	%	85	85	1.875.000.000	85	2.625.000.000	85	2.125.000.000	85	1.375.000.000	85	1.375.000.000	425	10.750.000.000	Sekretariat Daerah
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasaran	Persen	65	75	1.384.030.000	75	1.550.000.000	85	1.350.000.000	85	525.000.000	85	525.000.000	405	5.858.116.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya SDM dan Kinerja Aparatur		90	90	6.407.759.500	90	7.048.535.450	90	7.753.388.995	90	8.528.727.895	90	9.381.600.685	450	39.120.012.525	Kantor Penghubung Daerah
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya SDM dan Kinerja Aparatur	Tahun	75	75	8.200.000.000	80	3.960.000.000	85	2.270.000.000	90	1.630.000.000	95	1.640.000.000	425	23.925.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Sarana Prasarana untuk Mendukung Pelayanan Pemerintah	Unit	11	10	1.650.000.000	10	1.650.000.000	10	1.700.000.000	15	1.300.000.000	15	1.300.000.000	60	7.600.000.000	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatgnya sarana prasarana kantor	12 Bulan	20.000.000	30.000.000	695.554.050	40.000.000	765.109.455	50.000.000	841.620.400	60.000.000	925.782.440	70.000.000	1.053.166.334	250.000.000	4.431.279.679	Biro Hukum
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Mewujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam melakukan pelayanan birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	%	85	85	65.649.668.875	85	10.674.668.875	85	11.499.668.875	85	10.674.668.875	85	10.674.668.875	425	242.848.013.250	Dinas Pendapatan Daerah
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Mewujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam melakukan pelayanan birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	%	85	85	229.913.410.000	85	90.757.700.000	85	86.000.000.000	85	81.500.000.000	85	81.500.000.000	425	605.249.615.000	Biro Umum dan Perlengkapan
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana Peralatan Kerja PNS Biro	Uniat	27	27	1.600.000.000	27	1.760.000.000	27	1.936.000.000	27	2.429.600.000	27	2.672.560.000	135	10.398.160.000	Biro Pemerintahan Kampung

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	pTemrsekadmianya Sarana Kerja Yang nyaman Bagi PNS Biro Pemkam	unit	25	25	1.600.000.000	25	1.760.000.000	25	1.936.000.000	25	2.429.600.000	25	2.672.560.000	125	10.398.160.000	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksannya Pemeliharaan Rutin dan kelengkapan Dokumen Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan	47	47	1.600.000.000	47	1.760.000.000	47	1.936.000.000	47	2.429.600.000	47	2.672.560.000	235	10.398.160.000	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana Peralatan Kerja PNS Biro Pemkam	Unit	25	25	1.600.000.000	25	1.760.000.000	25	1.936.000.000	25	2.429.600.000	25	2.672.560.000	125	10.398.160.000	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya Peningkatan Prestasi dan Disiplin Aparatur	orang/bulan	100	20	1.170.000.000	20	13.920.650.000	20	14.870.650.000	20	15.820.650.000	20	16.920.650.000	100	62.702.600.000	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Mewujudkan keseragaman demi meningkatnya pelayanan kepada Dewan dan Masyarakat	stel	177	184	1.512.940.000	195	1.664.234.000	195	1.830.657.400	195	2.013.723.140	195	2.215.095.454	964	10.612.049.994	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	100	100	130.000.000	100	143.000.000	100	157.300.000	100	173.030.000	100	190.334.000	500	793.664.000	Badan Pengelolaan Infrastruktur
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dalam peningkatan disipin pegawai dalam berpakaian	%	85	85	400.000.000	85	-	85	400.000.000	85	-	85	400.000.000	425	1.200.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya profesionalisme dan akuntabilitas kedisiplinan pegawai	stel pakaian	0	450	322.500.000	450	330.000.000	450	345.000.000	450	375.000.000	450	375.000.000	2.250	1.747.500.000	Biro Bina Mental Spiritual
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Aparatur	Orang	80	80	64.000.000	80	64.000.000	80	64.000.000	80	64.000.000	80	64.000.000	400	488.000.000	Biro Tata Pemerintahan
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Persentase Kehadiran dan Disiplin Pegawai	Kegiatan	2	2	2.741.850.000	2	3.016.035.000	2	3.317.638.500	2	3.649.402.350	2	4.014.342.585	10	16.739.268.435	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Profesionalisme Aparatur	Stel	60	75	600.000.000	80	600.000.000	85	600.000.000	90	600.000.000	95	600.000.000	425	3.100.000.000	Biro Humas dan Protokol
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat MRP Provinsi Papua	Persen	100	100	859.087.000	100	859.087.000	100	945.000.000	100	945.000.000	100	945.000.000	500	5.412.261.000	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dalam peningkatan disipin pegawai dalam berpakaian	%	85	85	-	85	188.000.000	85	-	85	188.000.000	85	-	425	376.000.000	Sekretariat Daerah
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas penunjang kedisiplinan Pegawai	stell	122	306	241.800.000	306	265.980.000	306	292.578.000	306	321.835.800	306	354.019.380	1.530	1.609.513.180	Inspektorat Provinsi

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Persen	65	75	875.000.000	75	850.000.000	75	950.000.000	85	375.000.000	85	950.000.000	395	421.071.925.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praia
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Pegaw ai Dalam Berpakaian		90	90	68.750.000	90	75.625.000	90	83.187.500	90	91.506.250	90	100.656.874	450	419.725.624	Kantor Penghubung Daerah
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Pegaw ai Dalam Berpakaian	Orang	75	75	500.000.000	80	525.000.000	85	550.000.000	90	575.000.000	95	600.000.000	425	3.116.370.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Aparatur yang Taat/Mematuhi Aturan Pegaw ai	Orang	50	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	250	375.000.000	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase tingkat disiplin Pegaw ai meningkat menjadi lebih baik dan efektif	Orang	40	40	68.000.000	45	68.000.000	60	68.000.000	70	69.000.000	90	69.500.000	305	408.505.000	Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dalam peningkatan disipin pegaw ai dalam berpakaian	%	85	85	-	85	544.500.000	85	-	85	544.500.000	85	-	425	1.089.000.000	Dinas Pendapatan Daerah
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dalam peningkatan disipin pegaw ai dalam berpakaian	%	85	85	1.130.000.000	85	380.000.000	85	465.000.000	85	465.000.000	85	490.000.000	425	3.300.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
	1.20 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya Atribut Bagi Aparat kampung	Kampung	1.300	2.430	2.741.850.000	2.430	3.016.035.000	2.430	3.317.638.500	2.430	3.649.402.350	2.430	4.014.342.585	12.150	16.739.268.435	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Mew ujudkan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan purna tugas PNS	%	85	85	905.000.000	85	905.000.000	85	905.000.000	85	905.000.000	85	905.000.000	425	5.430.000.000	Sekretariat Daerah
	1.20 - 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Mew ujudkan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan purna tugas PNS	%	85	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	425	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	1.20 - 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Mew ujudkan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan purna tugas PNS	%	85	85	150.000.000	85	150.000.000	85	150.000.000	85	150.000.000	85	150.000.000	425	950.000.000	Dinas Pendapatan Daerah
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pemahaman dan daya serap Aparatur terhadap implementasi kinerja	org/bln	111	109	6.011.160.000	120	6.707.404.000	121	7.487.541.600	122	8.064.373.405	123	9.000.602.086	595	42.326.681.091	Sekretariat Dew an Perw akilan Rakyat Papua
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya w aw asan pengetahuan,ketra mpilan dan profesionalisme aparatur	orang	66	25	556.400.000	27	612.040.000	29	673.244.000	31	740.568.000	33	814.625.000	145	3.396.877.000	Badan Pengelolaan Infrastruktur
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur yang tedidik dan	orang	32	185	1.000.000.000	185	1.000.000.000	185	1.000.000.000	185	1.000.000.000	185	1.000.000.000	925	5.000.000.000	Biro Bina Mental Spiritual

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	tAedralantyiah Pelatihan, Sertifikasi, dan Diklat-diklat Penjenjangan guna meningkatkan SDM Aparatur Biro Tata Pemerintahan	Orang	40	40	350.000.000	40	400.000.000	40	450.000.000	40	500.000.000	40	550.000.000	200	2.628.000.000	Biro Tata Pemerintahan
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Building bagi Aparatur	Kegiatan	6	6	8.236.855.000	6	9.060.540.500	6	9.966.594.550	6	10.963.254.005	6	12.059.579.406	30	50.286.823.461	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan w aw asan sumber daya aparatur di lingkungan Sekretariat MRP Provinsi Papua	Persen	100	100	2.920.000.000	100	2.920.000.000	100	3.030.000.000	100	3.030.000.000	100	3.030.000.000	500	17.846.710.000	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Mew ujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur dalam peningkatan mutu pelayanan	%	85	85	3.440.500.000	85	800.200.000	85	3.440.500.000	85	800.200.000	85	3.440.500.000	425	12.722.100.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur / anggota pengamanan	orang	150	200	6.510.194.000	200	6.310.817.000	200	6.062.767.000	200	4.032.400.000	200	4.032.400.000	1.000	30.021.344.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Mutu Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kelancaran Pelayanan Pemerintah		90	90	719.180.000	90	791.098.000	90	870.207.800	90	957.228.580	90	1.052.951.438	450	4.390.665.818	Kantor Penghubung Daerah
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Mutu Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kelancaran Pelayanan Pemerintah	Orang	75	75	850.000.000	80	367.500.000	85	935.000.000	90	402.500.000	95	420.000.000	425	3.275.650.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur	Bulan	12	12	1.222.335.000	12	1.405.685.250	12	1.546.253.775	12	1.700.879.152	12	1.870.967.067	60	8.809.020.244	Biro Hukum
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah presentase Kinerja Aparatur menjadi efektif dan efisien	Orang	43	43	4.290.760.000	43	4.064.000.000	43	3.910.000.000	43	3.710.000.000	43	3.960.000.000	215	23.023.570.000	Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya SDM Kehumasan dan Keprotokolan	Orang	50	60	1.040.000.000	70	1.225.000.000	80	1.030.000.000	90	1.030.000.000	95	1.030.000.000	395	5.855.000.000	Biro Humas dan Protokol
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Mew ujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur dalam peningkatan mutu pelayanan	%	85	85	3.000.596.000	85	3.000.596.000	85	3.000.596.000	85	3.000.596.000	85	3.000.596.000	425	18.003.576.000	Dinas Pendapatan Daerah

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Mewujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur dalam peningkatan mutu pelayanan	%	85	85	3.500.000.000	85	-	85	-	85	-	85	-	425	5.560.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Adanya hasil Rekomendasi Bidang Aparatur kampung Se Provinsi Papua	Orang	260	130	8.236.855.000	130	9.060.540.500	130	9.966.594.550	130	10.963.254.005	130	12.059.579.406	650	50.286.823.461	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur		12	12	1.222.335.000	12	1.405.685.250	12	1.546.253.775	12	1.700.879.152	12	1.870.967.067	60	8.809.020.244	Biro Hukum
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlatihnya para Sekretaris Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Orang	270	150	8.236.855.000	150	9.060.540.500	150	9.966.594.550	150	10.963.254.005	150	12.059.579.406	750	50.286.823.461	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlatihnya Aparat Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Orang	232	116	8.236.855.000	116	9.060.540.500	116	9.966.594.550	116	10.963.254.005	116	12.059.579.406	580	50.286.823.461	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terbinanya Kampung contoh di Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua	Kampung	96	12	8.236.855.000	10	9.060.540.500	10	9.966.594.550	10	10.963.254.005	10	12.059.579.406	52	50.286.823.461	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terbinanya Aparat Yang Memahami Manajemen dalam Melaksanakan Pemerintahan kampung	orang	0	70	8.236.855.000	70	9.060.540.500	70	9.966.594.550	70	10.963.254.005	70	12.059.579.406	350	50.286.823.461	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlatihnya Aparatur / para Pejabat pada SKPD yang membidangi Pemerintahan kampung dalam Pengelolaan keuangan Kampung	Aparat Kampung	176	70	8.236.855.000	70	9.060.540.500	70	9.966.594.550	70	10.963.254.005	70	12.059.579.406	350	50.286.823.461	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Mewujudkan peningkatan pemenuhan kualitas penyelenggaraan sistem penyelenggaran keuangan yang tertib dan akurat	%	85	85	5.260.000.000	85	5.260.000.000	85	5.260.000.000	85	5.260.000.000	85	5.260.000.000	425	31.560.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	1.20 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan Kinerja Inspektorat	Dokumen	8	8	215.870.000	8	237.457.000	8	261.202.700	8	287.322.970	8	316.055.267	40	1.522.307.937	Inspektorat Provinsi
	1.20 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		90	90	47.850.000	90	52.635.000	90	57.898.500	90	63.688.350	90	70.057.185	450	292.129.035	Kantor Penghubung Daerah

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Mew ujudkan peningkatan pemenuhan kualitas penyelenggaraan sistem penyelenggaran keuangan yang tertib dan akurat	%	85	85	460.000.000	85	460.000.000	85	460.000.000	85	460.000.000	85	460.000.000	425	2.418.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
	1.20 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan Biro Pemkam Untuk Laporan Akhir Tahun	Laporan	1	1	1.050.000.000	1	1.155.000.000	1	1.270.500.000	1	1.397.550.000	1	1.537.305.000	5	6.410.355.000	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Renja, RKA dan Perubahan APBD Biro Pemkam	Dokumen	3	3	1.050.000.000	3	1.155.000.000	3	1.270.500.000	3	1.397.550.000	3	1.537.305.000	15	6.410.355.000	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perw akilan rakyat daerah	Menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah	produk hukum	56	67	200.724.009.800	67	220.446.644.655	67	241.701.994.172	67	270.956.273.694	67	303.898.593.184	335	1.413.365.758.505	Sekretariat Dew an Perw akilan Rakyat Papua
	1.20 - 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/w akil kepala daerah	Optimalnya peran pelayanan kedinasan kepala daerah/w akil kepala daerah	%	85	85	98.071.342.000	85	98.071.342.000	85	98.071.342.000	85	98.071.342.000	85	98.071.342.000	425	588.428.052.000	Sekretariat Daerah
	1.20 - 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/w akil kepala daerah	Optimalnya peran pelayanan kedinasan kepala daerah/w akil kepala daerah	%	85	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	425	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	1.20 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan yang akuntable	%	85	85	31.549.550.000	85	31.549.550.000	85	31.549.550.000	85	31.549.550.000	85	31.549.550.000	425	191.511.600.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	1.20 - 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan yang akuntable	%	85	85	2.264.744.400	85	2.264.744.400	85	2.264.744.400	85	2.264.744.400	85	2.264.744.400	425	13.588.466.400	Dinas Pendapatan Daerah
	1.20 - 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua	%	85	85	5.133.650.000	85	5.133.650.000	85	5.133.650.000	85	5.133.650.000	85	5.133.650.000	425	30.801.900.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	1.20 - 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah distrik / desa / kampung di Provinsi Papua	%	85	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	425	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	1.20 - 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah distrik / desa / kampung di Provinsi Papua	%	85	85	1.160.660.500	85	1.160.660.500	85	1.160.660.500	85	1.160.660.500	85	1.160.660.500	425	6.963.963.000	Dinas Pendapatan Daerah

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Mewujudkan peningkatan pengawasan internal secara berkala dalam mengawal seluruh pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	%	85	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	425	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	1.20 - 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Mewujudkan peningkatan pengawasan internal secara berkala dalam mengawal seluruh pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	%	85	85	1.421.835.965	85	1.421.835.965	85	1.421.835.965	85	1.421.835.965	85	1.421.835.965	425	8.531.015.790	Dinas Pendapatan Daerah
	1.20 - 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Laporan HAsil Pemeriksaan Khusus atas surat pengaduan masyarakat	Obrik (LHP)	0	4	350.000.000	4	385.000.000	4	4.235.000.000	4	332.750.000	4	366.025.000	20	5.668.775.000	Inspektorat Provinsi
	1.20 - 25	Program Peningkatan Kerja sama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Dokumen	7	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	10	2.500.000.000	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
	1.20 - 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Harga Pembelian/Pengadaan	%	85	85	500.000.000	85	500.000.000	85	500.000.000	85	500.000.000	85	500.000.000	425	2.675.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
	1.20 - 28	Pembinaan Pemuda Lembaga Keagamaan	Meningkatnya Interaksi dan arus Informasi antara Pemerintah dan Publik (stake holder) melalui Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi	Tahun	70	80	9.752.645.000	85	9.971.120.000	90	10.301.888.000	90	10.511.978.000	95	10.844.140.000	440	56.642.271.000	Biro Humas dan Protokol
	1.20 - 29	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Hasil pengawasan yang dapat ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan	Obrik (LHP)	46	46	11.795.000.000	46	12.974.500.000	46	14.271.950.000	46	15.699.145.000	46	17.269.059.500	230	80.140.804.500	Inspektorat Provinsi
	1.20 - 29	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Meningkatnya Citra Pemda yang Positif dimata Publik	Tahun	60	70	9.289.500.000	80	10.117.000.000	85	10.375.000.000	90	10.485.000.000	100	10.365.000.000	425	54.359.150.000	Biro Humas dan Protokol
	1.20 - 29	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	SKPD	40	40	11.795.000.000	40	12.974.500.000	40	14.271.950.000	40	15.699.145.000	40	17.269.059.500	200	80.140.804.500	Inspektorat Provinsi
	1.20 - 30	Program Kerjasama Pembangunan	Peningkatan Hubungan Kerjasama antara Pemerintah Daerah	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	500	1.260.353.000	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
	1.20 - 30	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Pelayanan/Penyelenggaraan kegiatan/acara keprotokolan	Paket	75	80	750.000.000	85	800.000.000	90	800.000.000	95	800.000.000	100	850.000.000	450	4.300.000.000	Biro Humas dan Protokol

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 43	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP	Meningkatnya Kelancaran Rapat-Rapat dan Penyelenggaraan Kegiatan MRP	Persen	100	100	36.824.138.000	100	40.663.876.000	100	54.812.019.000	100	49.981.881.000	100	54.765.600.000	500	262.828.514.000	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
	1.20 - 44	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Terw ujudnya kajian-kajian serta data sumber pendapatan daerah demi peningkatan PAD	%	85	85	3.513.478.800	85	3.513.478.800	85	3.513.478.800	85	3.513.478.800	85	3.513.478.800	425	21.080.872.800	Dinas Pendapatan Daerah
	1.20 - 48	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan kerja sama antar lembaga / instansi dalam pelaksanaan tugas	Orang	100	50	1.300.014.000	50	1.100.000.000	50	800.000.000	50	750.000.000	50	800.000.000	250	5.200.014.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	1.20 - 55	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatkan kualitas bahan kebijakan pembenahan birokrasi dan pemantapan kelembagaan	SKPD	43	43	7.438.000.000	43	8.100.000.000	43	6.250.000.000	43	7.070.000.000	43	6.250.000.000	215	40.485.260.000	Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
	1.20 - 58	Program Peningkatan Kinerja Pengaw asan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah SKPD yang dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dan laporan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	sidang	6	6	3.306.661.500	6	3.637.327.650	6	4.001.060.415	6	4.401.166.457	6	4.841.283.101	30	23.072.449.123	Inspektorat Provinsi
	1.20 - 58	Program Peningkatan Kinerja Pengaw asan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	kegiatan	9	10	3.306.661.500	10	3.637.327.650	10	4.001.060.415	10	4.401.166.457	10	4.841.283.101	50	23.072.449.123	Inspektorat Provinsi
	1.20 - 67	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Mew ujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kebijakan Pembangunan yang berkesinambungan	Orang	600	600	5.400.000.000	600	7.200.000.000	600	8.900.000.000	600	10.000.000.000	600	11.600.000.000	3.000	46.543.600.000	Biro Tata Pemerintahan
	1.20 - 68	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Adanya Koordinasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota dan Distrik	Kab/Kota	29	29	4.200.000.000	29	4.950.000.000	29	5.500.000.000	29	5.800.000.000	29	4.600.000.000	145	27.650.000.000	Biro Tata Pemerintahan
	1.20 - 71	Program Pengembangan Kampung	Program Untuk Mengembalikan Harga Diri Orang Papua Bahw a Mempunyai Kemampuan Untuk Membangun Diri Dan Kampung Sendiri Melalui Semangat Gotong Royong Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat, Dan Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Papua Kepada PEMDA	Kegiatan	5	5	20.459.025.000	5	15.844.927.500	5	17.429.420.250	5	19.172.362.275	5	21.089.598.503	25	93.995.333.528	Biro Pemerintahan Kampung

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 71	Program Pengembangan Kampung	Tersusunnya Kode dan data Wilayah Pemerintahan Kampung se Provinsi Papua	Orang	300	80	20.459.025.000	80	15.844.927.500	80	17.429.420.250	80	19.172.362.275	80	21.089.598.503	400	93.995.333.528	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 71	Program Pengembangan Kampung	Terbangunnya Model Balai Kampung untuk setiap Kabupaten/Kota se Provinsi Papua	Balai Kampung	39	15	20.459.025.000	15	15.844.927.500	15	17.429.420.250	15	19.172.362.275	15	21.089.598.503	75	93.995.333.528	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 71	Program Pengembangan Kampung	Tersedianya Sarana dan Kelengkapan bagi Kantor Kampung di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua	Jenis	0	54	20.459.025.000	15	15.844.927.500	15	17.429.420.250	15	19.172.362.275	15	21.089.598.503	114	93.995.333.528	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 71	Program Pengembangan Kampung	Terlaksananya Fasilitasi dan Identifikasi Kelayakan Pemerintahan Kampung	Kabupaten /Kota	0	15	20.459.025.000	15	15.844.927.500	15	17.429.420.250	15	19.172.362.275	15	21.089.598.503	75	93.995.333.528	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 72	Program Pembinaan Otonomi Kampung	Meningkatnya Kapasitas Aparat Desa / Kampung, Khususnya Dalam Menyongsong Otonomi Kampung	Kegiatan	5	5	5.023.800.000	5	5.526.180.000	5	6.078.798.000	5	6.686.677.800	5	7.355.345.580	25	30.670.801.380	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 72	Program Pembinaan Otonomi Kampung	Terlaksananya Pembinaan Kampung Contoh di 15 Kab/Kota se Provinsi Papua	Kampung	12	10	5.023.800.000	10	5.526.180.000	10	6.078.798.000	10	6.686.677.800	10	7.355.345.580	50	30.670.801.380	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 72	Program Pembinaan Otonomi Kampung	Terlaksananya Sistem Website Data Base Kampung di Provinsi Papua	Kabupaten /Kota	0	6	5.023.800.000	6	5.526.180.000	6	6.078.798.000	6	6.686.677.800	5	7.355.345.580	29	30.670.801.380	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 72	Program Pembinaan Otonomi Kampung	Terlaksananya Sistem Penyusunan Peraturan Kampung yang Benar dan Pemerintahan Kampung di Provinsi Papua	Buku	0	414	5.023.800.000	414	5.526.180.000	414	6.078.798.000	414	6.686.677.800	414	7.355.345.580	2.070	30.670.801.380	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 73	Program Pembinaan Adat	Merupakan Wadah Penyaluran Aspirasi Komunitas Adat Dalam Hubungannya Dengan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Masyarakat Kampung di Berbagai Bidang Dan Aspek	Kegiatan	5	5	6.500.000.000	5	7.150.000.000	5	7.865.000.000	5	8.651.500.000	5	9.516.650.000	25	39.683.150.000	Biro Pemerintahan Kampung
	1.20 - 73	Program Pembinaan Adat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Lembaga Masyarakat Adat Se Provinsi Papua	kabupaten /kota	0	6	6.500.000.000	6	7.150.000.000	6	7.865.000.000	6	8.651.500.000	5	9.516.650.000	29	39.683.150.000	Biro Pemerintahan Kampung

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 75	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Kab/Kota	9	9	2.184.650.000	9	2.403.115.000	9	2.643.426.500	9	2.907.769.150	9	3.198.546.065	45	13.337.506.715	Biro Hukum
	1.20 - 76	Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pelayanan dan pemberian dokumentasi dan informasi hukum pada aparatur dan masyarakat	Orang	721	721	2.106.200.000	721	2.316.820.000	721	2.548.502.000	721	2.803.352.200	721	3.083.687.420	3.605	12.858.561.620	Biro Hukum
	1.20 - 76	Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Meningkatkan Koordinasi dan Kunjungan Pejabat Pemerintah Provinsi Papua		90	90	1.813.515.000	90	1.994.866.500	90	2.194.353.150	90	2.413.788.465	90	2.655.167.312	450	11.071.690.427	Kantor Penghubung Daerah
	1.20 - 78	Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Meningkatnya Informasi dalam bentuk buku panduan, dan audio visual		90	90	160.000.000	90	176.000.000	90	193.600.000	90	212.960.000	90	234.256.000	450	976.816.000	Kantor Penghubung Daerah
	1.22	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																
	1.22 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksanaya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dilingkungan BPMKaKK	60 bulan	12	12	2.478.029.500	12	2.952.753.125	12	3.395.741.943	12	3.773.929.384	12	4.309.020.203	60	19.052.172.155	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
	1.22 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya kelancaran tugas rutin kantor yang memadai	60 bulan	12	12	728.525.000	12	837.803.750	12	963.474.313	12	1.107.995.460	12	1.274.194.778	60	5.545.493.301	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
	1.22 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pelayanan aparatur yang profesional	270 orang	45	45	690.000.000	45	793.500.000	45	912.525.000	45	1.049.403.750	45	1.206.814.312	225	5.252.243.062	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
	1.22 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentasi meningkatnya sistem capaian laporan	18 Laporan	3	3	747.387.300	3	859.495.395	3	988.419.704	3	1.136.682.659	3	1.307.185.058	15	5.689.072.116	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
	1.22 - 25	Pengembangan Data dan Informasi	Meningkatnya sistem data dan informasi sebagai pusat informasi kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah	%	85	85	-	85	-	85	-	85	-	85	-	425	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	1.24	**Urusan Kearsipan**																
	1.24 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dapat diselenggarakan administrasi Perkantoran Selama Lima	Bulan	12	12	4.809.766.000	12	5.290.742.600	12	5.819.816.860	12	6.401.798.546	12	7.041.978.401	60	30.764.102.407	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1.24 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	TMaehnuingkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit	2.140	50	50.005.278.562.500	65	55.005.806.418.750	45	60.506.387.060.625	75	66.557.025.766.688	100	73.212.728.343.357	335	305.287.226.151.920	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1.24 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplian Aparatur	Stel	143	181	275.000.000	213	302.500.000	213	332.750.000	213	366.025.000	216	402.627.500	1.036	1.678.902.500	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.24 - 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Penghargaan Untu PNS Yang Telah Selesai Melaksanakan Tugas	Orang	11	2	85.000.000	6	93.500.000	2	102.850.000	3	113.135.000	10	124.448.500	23	518.933.500	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1.24 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Orang	22	8	366.110.000	11	402.721.000	13	442.993.100	17	487.292.410	20	536.021.651	69	2.235.138.161	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1.24 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan	9	9	217.320.000	9	239.052.000	9	262.957.200	9	289.252.920	9	318.178.212	45	1.326.760.332	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1.24 - 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya Sistem Administrasi Kearsipan di	Dokumen	0	1	1.700.000.000	1	1.870.000.000	1	2.057.000.000	1	2.262.700.000	1	2.488.970.000	5	10.535.220.000	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1.24 - 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	PMreonvliingski aPtanpyuaa sistem administrasi kearsipan guna peningkatan dan pengayaan data informasi	%	85	85	-	85	-	85	-	85	750.000.000	85	-	425	750.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	1.24 - 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya sistem administrasi kearsipan guna peningkatan dan pengayaan data informasi	%	85	85	10.200.000.000	85	-	85	-	85	-	85	-	425	10.200.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan
	1.24 - 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah Dokumen/ Arsip Milik Pemerintah Daerah Yang Diselamatkan dan Dilestarikan	3243	3.500	3.500	892.505.000	3.500	981.755.500	3.500	1.079.931.050	3.500	1.187.924.155	3.500	1.306.716.570	17.500	6.052.032.275	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1.24 - 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Cakupan Pelayanan Kearsipan Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat	Orang	1.000	1.000	776.000.000	1.000	853.600.000	1.000	938.960.000	1.000	1.032.856.000	1.000	1.136.141.600	5.000	5.047.557.600	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1.24 - 19	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Jumlah Khasanah Arsip Pemerintah Provinsi Papua	Buku	6	2	312.059.000	2	343.264.900	2	377.591.390	2	415.350.529	2	456.885.582	10	1.905.151.401	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1.25	**Urusan Komunikasi dan Informatika**																
	1.25 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran	tahun	10	10	6.235.000.000	10	6.235.000.000	10	6.235.000.000	40	6.235.000.000	20	6.235.000.000	90	31.175.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan fasilitas ruang kerja di gedung baru	gedung	0	2	9.070.000.000	0	9.070.000.000	0	9.070.000.000	0	9.070.000.000	0	9.070.000.000	2	45.350.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	pegawai	90	15	300.000.000	15	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	25	300.000.000	95	1.500.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya SDM DPTIK	orang	30	25	1.270.000.000	25	1.270.000.000	20	1.270.000.000	20	1.270.000.000	20	1.270.000.000	110	6.350.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatkan pengetahuan peraturan perundangan	orang	400	200	1.270.000.000	200	1.270.000.000	200	1.270.000.000	200	1.270.000.000	200	1.270.000.000	1.000	6.350.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.25 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya laporan capaian kinerja dan keuangan	laporan/buku	30	15	75.000.000	15	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	90	375.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya disiplin pegawai di SKPD	SKPD	20	23	33.800.000.000	41	33.800.000.000	41	33.800.000.000	41	33.800.000.000	41	33.800.000.000	187	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Penyediaan media infokom/MMC bagi masyarakat/komunitas	layanan	1	5	33.800.000.000	6	33.800.000.000	7	33.800.000.000	7	33.800.000.000	7	33.800.000.000	32	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Penyediaan sarana informasi publik/masyarakat	layanan	2	2	33.800.000.000	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	6	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya penyiaran informasi pembangunan pemerintah di RRI dan TV	layanan	2	12	33.800.000.000	12	33.800.000.000	12	33.800.000.000	12	33.800.000.000	12	33.800.000.000	60	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan kualitas pelayanan internet gratis kepada masyarakat	layanan	0	6	33.800.000.000	6	33.800.000.000	6	33.800.000.000	6	33.800.000.000	6	33.800.000.000	30	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan/perunda ng-undangan tentang kominfo di daerah		3	0	33.800.000.000	0	33.800.000.000	0	33.800.000.000	0	33.800.000.000	0	33.800.000.000	0	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan layanan perizinan penyiaran lebih baik dan cepat	layanan	4	2	33.800.000.000	3	33.800.000.000	3	33.800.000.000	3	33.800.000.000	3	33.800.000.000	14	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Menyediakan data lembaga penyiaran untuk masyarakat	data	3	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	5	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Tersedianya portal citizen berupa media informasi bagi masyrakat	layanan	4	3	33.800.000.000	2	33.800.000.000	2	33.800.000.000	2	33.800.000.000	2	33.800.000.000	11	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 16	Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Menyediakan data dan kondisi peralatan TIK	SKPD	41	29	600.000.000	41	600.000.000	41	600.000.000	41	600.000.000	41	600.000.000	193	3.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 16	Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Meningkatkan dan mengarahkan pembangunan TIK Prov. Papua	layanan	0	25	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	25	3.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 16	Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Meningkatkan pemahaman pembangunan TIK kab/kota	layanan	0	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	10	3.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 17	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatkan ketrampilan masyrakat dan aparatur	orang	240	341	3.800.000.000	341	3.800.000.000	341	3.800.000.000	341	3.800.000.000	341	3.800.000.000	1.705	19.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 17	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terpasangnya jaringan internet di lembaga pendidikan	lembaga	2	2	3.800.000.000	2	3.800.000.000	2	3.800.000.000	2	3.800.000.000	2	3.800.000.000	10	19.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.25 - 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan POSTEL bagi pemerintah kab/kota sesuai kew enangan kerja daerah	layanan	2	5	2.850.000.000	5	2.850.000.000	5	2.850.000.000	5	2.850.000.000	5	2.850.000.000	25	14.250.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan peraturan POSTEL bagi penyelenggara jasa POSTEL di daerah	layanan	53	40	2.850.000.000	40	2.850.000.000	40	2.850.000.000	40	2.850.000.000	40	2.850.000.000	200	14.250.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Mempublikasikan penyelenggaraan jasa POSTEL daerah secara nasional (Pekan Informasi Nasional)	layanan	1	1	2.850.000.000	1	2.850.000.000	1	2.850.000.000	1	2.850.000.000	1	2.850.000.000	5	14.250.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Memberikan informasi kegiatan Dinas PTIK dalm hal pelayanan publik	layanan	3	3	2.850.000.000	3	2.850.000.000	3	2.850.000.000	3	2.850.000.000	3	2.850.000.000	15	14.250.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	2.01	**Urusan Pertanian**																
	2.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang memadai	Jenis	7	7	3.438.200.000	7	3.700.000.000	7	2.225.000.000	7	4.145.000.000	7	4.210.000.000	35	20.810.730.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terw ujudnya layananan administrasi perkantoran yang profesional	Persen	100	100	1.481.450.000	100	1.629.595.000	100	1.792.555.000	100	1.971.810.000	100	2.168.992.000	500	11.184.427.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarna aparatur yang memadai	Jenis	8	8	7.870.000.000	8	8.315.000.000	8	8.820.000.000	8	9.290.000.000	8	9.820.000.000	40	467.728.250.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	3.862.500.000	100	3.582.500.000	100	3.527.500.000	100	2.428.500.000	100	1.127.500.000	500	15.818.575.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam perpakaian dinas	Stel	475	500	900.000.000	525	975.000.000	550	1.050.000.000	600	1.125.000.000	625	1.200.000.000	2.800	458.575.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Kedisiplinan kerja aparatur melalui penyedian pakain dinas	224	224	224	224.000.000	224	246.400.000	224	268.800.000	224	291.200.000	224	313.600.000	1.120	1.447.750.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dinas		13	20	350.000.000	25	400.000.000	30	450.000.000	40	500.000.000	50	550.000.000	165	2.567.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	orang	30	28	400.000.000	38	400.000.000	38	484.000	38	532.400.000	38	585.640.000	180	2.235.124.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan dinas	dokumen	5	5	290.000.000	5	320.000.000	5	350.000.000	5	380.000.000	5	410.000.000	25	2.000.245.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan yang akuntabel	Persen	100	100	610.000.000	100	671.000.000	100	738.100.000	100	811.910.000	100	893.101.000	500	3.774.111.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2.01 - 26	Program Perencanaan Pembangunan	Kualitas perencanaan terukur	(%)	75	100	2.180.000.000	100	1.958.000.000	100	2.153.800.000	100	2.369.180.000	100	2.606.098.000	500	12.997.078.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.02	**Urusan Kehutanan**																
	2.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Surat yang di proses	Surat	650	680	3.930.000.000	690	4.388.250.000	720	4.935.250.000	740	5.364.702.000	780	5.902.353.200	3.610	27.985.555.200	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sarana komunikasi dan sumberdaya yang digunakan	Bulan	12	12	3.930.000.000	12	4.388.250.000	12	4.935.250.000	12	5.364.702.000	12	5.902.353.200	60	27.985.555.200	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kebersihan yang digunakan	Orang	12	15	3.930.000.000	15	4.388.250.000	15	4.935.250.000	15	5.364.702.000	15	5.902.353.200	75	27.985.555.200	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan kerja yang dilakukan peraw atan	Unit	30	40	3.930.000.000	40	4.388.250.000	40	4.935.250.000	40	5.364.702.000	40	5.902.353.200	200	27.985.555.200	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah alat tulis kantor yang digunakan	Unit	50	50	3.930.000.000	50	4.388.250.000	50	4.935.250.000	50	5.364.702.000	50	5.902.353.200	250	27.985.555.200	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah cetakan dan penggandaan	Unit	30	30	3.930.000.000	30	4.388.250.000	30	4.935.250.000	30	5.364.702.000	30	5.902.353.200	150	27.985.555.200	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan bacaan yang dibutuhkan	Judul	90	90	3.930.000.000	90	4.388.250.000	90	4.935.250.000	90	5.364.702.000	90	5.902.353.200	450	27.985.555.200	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang dibutuhkan	Kali	50	50	3.930.000.000	50	4.388.250.000	50	4.935.250.000	50	5.364.702.000	50	5.902.353.200	250	27.985.555.200	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kali	150	150	3.930.000.000	150	4.388.250.000	150	4.935.250.000	150	5.364.702.000	150	5.902.353.200	750	27.985.555.200	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga Satpam yang di pekerjakan	Orang	6	6	3.930.000.000	6	4.388.250.000	6	4.935.250.000	6	5.364.702.000	6	5.902.353.200	30	27.985.555.200	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Sarana kendaraan dinas/ operasional	Unit	1	3	5.475.000.000	3	6.073.500.000	3	6.739.500.000	3	4.772.685.000	3	5.271.306.000	15	33.231.991.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	Unit	1	1	5.475.000.000	1	6.073.500.000	1	6.739.500.000	1	4.772.685.000	1	5.271.306.000	5	33.231.991.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	20	20	5.475.000.000	20	6.073.500.000	20	6.739.500.000	20	4.772.685.000	20	5.271.306.000	100	33.231.991.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah meubelair yang di butuhkan	Unit	50	50	5.475.000.000	50	6.073.500.000	50	6.739.500.000	50	4.772.685.000	50	5.271.306.000	250	33.231.991.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Perangkat sistem information center kehutanan	Unit	0	1	5.475.000.000	1	6.073.500.000	1	6.739.500.000	1	4.772.685.000	1	5.271.306.000	5	33.231.991.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah prasarana yang direhabilitasi	Unit	1	1	5.475.000.000	1	6.073.500.000	1	6.739.500.000	1	4.772.685.000	1	5.271.306.000	5	33.231.991.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah bangunan kantor yang direhabilitasi	Unit	1	1	5.475.000.000	1	6.073.500.000	1	6.739.500.000	1	4.772.685.000	1	5.271.306.000	5	33.231.991.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah bangunan kantor yang di bangun	Unit	2	2	5.475.000.000	2	6.073.500.000	2	6.739.500.000	2	4.772.685.000	2	5.271.306.000	10	33.231.991.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah bangunan gedung kantor yang dilakukan peraw atan	Unit	1	1	5.475.000.000	1	6.073.500.000	1	6.739.500.000	1	4.772.685.000	1	5.271.306.000	5	33.231.991.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan peraw atan	Unit	15	20	5.475.000.000	20	6.073.500.000	20	6.739.500.000	20	4.772.685.000	20	5.271.306.000	100	33.231.991.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2.02 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah unit pengandaan tanah	Unit	5	5	5.475.000.000	5	6.073.500.000	5	6.739.500.000	5	4.772.685.000	5	5.271.306.000	25	33.231.991.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pakaian dinas aparatur kehutanan	Stel	250	300	1.090.000.000	300	1.028.500.000	300	1.131.350.000	300	1.329.485.000	300	1.448.357.000	1.500	6.877.692.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pelayanan hari-hari besar	Kali	3	5	1.090.000.000	5	1.028.500.000	5	1.131.350.000	5	1.329.485.000	5	1.448.357.000	25	6.877.692.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pelatihan kewirausahaan bagi aparatur kehutanan yang purna tugas	Orang	5	5	1.090.000.000	5	1.028.500.000	5	1.131.350.000	5	1.329.485.000	5	1.448.357.000	25	6.877.692.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Fasilitasi kegiatan kepramukaan	Orang	185	190	1.090.000.000	190	1.028.500.000	190	1.131.350.000	190	1.329.485.000	190	1.448.357.000	950	6.877.692.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi pindah dari dan antar unit kerja dalam lingkup Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua	Orang	10	15	165.000.000	15	181.500.000	15	199.650.000	15	219.615.000	15	241.576.500	75	1.157.341.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur kehutanan yang mengikuti diklat	Orang	30	30	1.815.000.000	30	1.996.500.000	30	2.196.150.000	30	2.415.765.000	30	2.657.341.500	150	12.730.756.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan tahunan	Laporan	1	1	385.000.000	1	423.500.000	1	465.850.000	1	512.435.000	1	563.678.500	5	2.700.463.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Laporan	1	1	385.000.000	1	423.500.000	11	465.850.000	1	512.435.000	1	563.678.500	15	2.700.463.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Laporan	1	1	385.000.000	1	423.500.000	1	465.850.000	1	512.435.000	1	563.678.500	5	2.700.463.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan keuangan tahunan	Laporan	1	1	385.000.000	1	423.500.000	1	465.850.000	1	512.435.000	1	563.678.500	5	2.700.463.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan keuangan bulanan	Laporan	12	12	385.000.000	12	423.500.000	12	465.850.000	12	512.435.000	12	563.678.500	60	2.700.463.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.03	**Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**																
	2.03 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen	10	10	2.484.168.000	10	2.594.083.000	10	2.598.571.000	40	2.719.925.000	20	2.725.355.000	90	15.430.270.000	Dinas Pertambangan dan Energi
	2.03 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana untuk medukung pelayanan pemerintahan	Persen	40	15	13.004.730.000	20	7.732.703.000	20	2.742.703.000	20	3.004.472.000	20	3.137.572.000	95	40.429.928.000	Dinas Pertambangan dan Energi
	2.03 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Meningkatnya Disiplin PNS	persen	80	15	135.000.000	15	103.000.000	20	-	20	105.000.000	20	-	90	675.100.000	Dinas Pertambangan dan Energi
	2.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Meningkatnya Aparatur PNS yang Bersertifikasi Teknis	persen	30	15	2.964.420.000	15	3.038.462.000	20	3.038.462.000	20	3.143.668.000	20	3.057.268.000	90	16.334.000.000	Dinas Pertambangan dan Energi

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2.03 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Meningkatnya Aparatur PNS yang Bersertifikasi Teknis	persen	30	15	2.964.420.000	15	3.038.462.000	20	3.038.462.000	20	3.143.668.000	20	3.057.268.000	90	16.334.000.000	Dinas Pertambangan dan Energi
	2.03 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persen	30	15	400.600.000	15	400.600.000	20	400.600.000	20	400.600.000	20	400.600.000	90	2.403.600.000	Dinas Pertambangan dan Energi
	2.03 - 18	Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan	Prosentase Meningkatnya Laporan Evaluasi Koordinasi Program Pembangungan Bidang Pertambangan dan Energi	persen	10	15	2.359.664.000	20	2.495.630.000	20	2.595.630.000	20	2.745.192.000	20	2.855.192.000	95	14.410.972.000	Dinas Pertambangan dan Energi
	2.05	**Urusan Kelautan dan Perikanan**																
	2.05 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat pelayanan administrasi perkantoran	bulan	100	100	4.896.210.000	100	5.385.831.000	100	5.924.415.000	100	6.516.855.000	100	7.168.540.000	500	32.404.001.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2.05 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Paket	100	100	602.550.000	100	1.942.805.000	100	2.556.037.000	100	501.640.700	100	551.804.770	500	7.055.689.470	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2.05 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Paket	100	100	243.700.000	100	568.070.000	100	294.877.000	100	474.365.000	100	356.801.000	500	2.171.513.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2.05 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan sumberdayanya	Orang	100	100	1.822.975.000	100	1.910.938.000	100	2.184.366.000	100	2.167.034.000	100	2.749.507.000	500	12.232.585.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2.05 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Dokumen	100	100	408.700.000	100	449.570.000	100	494.528.000	100	543.980.000	100	598.378.000	500	2.883.556.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2.05 - 25	Program Pengembangan Data dan Informasi	Data dan informasi kelautan dan perikanan online, up to date dan mudah diakses	situs/web/ tahun	100	100	250.000.000	100	665.000.000	100	566.500.000	100	623.150.000	100	855.465.000	500	3.195.915.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2.06	**Urusan Perdagangan**																
	2.06 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD	Persen	100	100	4.028.369.000	100	4.632.624.850	100	5.327.519.078	100	6.126.646.340	100	7.045.643.492	500	27.160.802.760	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.06 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai dengan Standart daerah	Persen	100	100	10.838.548.000	100	2.372.880.200	100	2.706.312.230	100	3.089.759.064	100	3.530.722.925	500	22.538.222.419	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.06 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	Persen	100	100	616.564.000	100	-	100	709.049.000	100	-	100	815.406.000	500	2.141.019.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.06 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur	Persen	100	100	1.313.200.000	100	1.510.180.000	100	1.736.707.000	100	1.997.213.050	100	2.296.795.007	500	8.854.095.057	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.06 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Pelaporan capaian Kinerja	Persen	100	100	127.350.000	100	146.452.500	100	168.420.375	100	193.683.431	100	222.735.946	500	858.642.252	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia																		
	1.01	**Urusan Pendidikan**																
	1.01 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas layanan	Persen	45	100	5.845.000.000	100	5.997.000.000	100	2.525.000.000	100	2.632.000.000	100	2.740.000.000	500	22.884.000.000	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	%	45	100	209.000.000	100	-	100	210.000.000	100	-	100	215.000.000	500	843.000.000	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Meningkatnya Produktifitas kerja aparatur	%	45	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	500	-	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya produktifitas kerja aparatur	Persen	45	100	588.500.000	100	629.695.000	100	773.773.650	100	720.937.806	100	771.403.452	500	4.034.309.908	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi	Persen	45	100	250.250.000	100	270.867.503	100	291.878.225	100	1.108.309.701	100	320.191.380	500	2.406.496.809	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya APK PAUD	Persen	2.954	192	64.912.420.000	192	71.403.662.000	192	78.544.028.200	192	86.398.431.020	192	95.038.274.122	960	455.350.815.342	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya AMP SMP Reguler	APM	3.498	177	1.025.253.600.000	177	1.218.693.960.000	177	1.340.563.356.000	177	1.474.619.691.600	177	1.622.081.660.760	885	7.598.903.268.360	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya APM SD Reguler	APM	6.964	415	1.025.253.600.000	415	1.218.693.960.000	415	1.340.563.356.000	415	1.474.619.691.600	415	1.622.081.660.760	2.075	7.598.903.268.360	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 17	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya AMP SMA Reguler	APM	2.872	179	463.225.500.000	179	507.740.050.000	179	555.214.055.000	179	589.735.460.500	179	647.379.006.550	895	3.161.099.072.050	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 17	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya APK SMK	APK	408	182	463.225.500.000	182	507.740.050.000	182	555.214.055.000	182	589.735.460.500	182	647.379.006.550	910	3.161.099.072.050	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 18	Program Pendidikan Non Formal	Menurunnya Aggka Buta Aksara	orang	53.632	65.000	81.325.000.000	65.000	84.143.750.000	65.000	87.213.662.500	65.000	90.557.703.875	65.000	88.492.099.646	325.000	493.332.216.021	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 19	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya APS PLB	APS	3.046	1.194	1.012.000.000	1.194	1.113.200.000	1.194	1.224.520.000	1.194	1.346.972.000	1.194	1.481.669.200	5.970	9.738.361.200	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	45	50	3.900.040.000	60	4.347.760.000	70	4.781.162.120	80	4.525.758.280	80	4.976.761.153	340	25.161.481.553	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 23	Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi	Meningkatnya % anak Papua masuk Program Studi Keahlian Khusus	orang	50	580	20.000.000.000	580	21.000.000.000	580	22.100.000.000	580	-	580	-	2.900	83.100.000.000	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 26	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Meningkatnya APK PAUD Pendidikan Layanan Khusus KAT	APK	0	38	173.030.000.000	38	132.680.000.000	38	137.227.000.000	38	150.689.700.000	38	164.248.670.000	190	816.875.370.000	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 26	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Meningkatnya APM SD Pendidikan Layanan Khusus KAT	APM	0	87	173.030.000.000	87	132.680.000.000	87	137.227.000.000	87	150.689.700.000	87	164.248.670.000	435	816.875.370.000	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 26	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Meningkatnya APM SMP Pendidikan Layanan Khusus KAT	APM	0	574	173.030.000.000	574	132.680.000.000	574	137.227.000.000	574	150.689.700.000	574	164.248.670.000	2.870	816.875.370.000	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 26	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Meningkatnya APM SMA Pendidikan Layanan Khusus	AMP	0	1.240	173.030.000.000	1.240	132.680.000.000	1.240	137.227.000.000	1.240	150.689.700.000	1.240	164.248.670.000	6.200	816.875.370.000	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.01 - 46	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase capaian program	Persen	75	80	101.451.999.000	80	121.742.398.800	80	146.090.878.560	80	175.309.054.272	80	210.370.865.126	400	825.645.195.758	Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.02	**Urusan Kesehatan**																
	1.02 - 7	Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah Masyarakat pedalaman yang memerlukan rujukan di dirujuk	%	100	100	908.929.000	100	999.822.000	100	1.099.804.000	100	1.209.784.000	100	1.330.763.000	500	6.458.031.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan dan kesinambungan obat pelayanan kesehatan Dasar di seluruh sarana Pelayanan Kesehatan	%	100	100	31.680.811.800	100	34.848.892.980	100	38.333.782.278	100	42.167.160.505	100	46.383.876.556	500	222.215.262.119	Dinas Kesehatan
	1.02 - 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Angka per 100 pasien yang mendapatkan obat	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	500	-	Rumah Sakit Jiwa Abepura
	1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Keluarga Rawan Kesehatan Dibina (KepMenkes 279/'06)	%	5	15	4.532.683.000	20	4.597.751.000	30	5.024.026.000	40	5.106.429.000	50	5.421.944.000	155	29.042.595.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Keberhasilan Penanganan Kasus Yang Spesifik	Persentase	60	70	2.125.000.000	75	2.656.250.000	80	3.320.350.000	90	4.150.390.000	100	5.187.988.000	415	17.439.978.000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
	1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan ke Kabupaten untuk pelayanan kesehatan jiwa	Kabupaten	0	58	-	58	-	58	-	58	-	58	-	290	-	Rumah Sakit Jiwa Abepura
	1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah KLB yang ditangani kurang dari 24 Jam	%	50	60	4.532.683.000	70	4.597.751.000	80	5.024.026.000	100	5.106.429.000	100	5.421.944.000	410	29.042.595.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Petugas RS/PKM di kabupaten yang dilatih dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa	Orang	0	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	75	-	Rumah Sakit Jiwa Abepura
	1.02 - 18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pengobatan Tradisional dan Komplementer yang terstandarisasi	%	3	5	100.000.000	7	110.000.000	9	121.000.000	10	133.100.000	12	146.410.000	43	610.510.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Jumlah Penelitian Kasiat obat Tradisional asli Papua	Kali	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	5	610.510.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Pengembangan Obat Asli Daerah	Kegiatan	2	2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	2	133.100.000	2	146.410.000	10	610.510.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Angka Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	25	32	4.936.688.000	38	5.430.358.000	**44**	5.973.393.000	50	6.570.732.000	50	7.227.806.000	214	34.684.444.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pola Hidup Sehat	Persentase	85	90	400.000.000	100	500.000.000	100	625.000.000	100	781.300.000	100	976.600.000	490	3.282.900.000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
	1.02 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Rasio Posyandu per Kampung	%	87	90	4.936.688.000	93	5.430.358.000	97	5.973.393.000	100	6.570.732.000	100	7.227.806.000	480	34.684.444.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada anak Balita	%	16	16	6.543.387.500	16	7.197.726.000	15	7.917.498.000	15	8.709.247.800	15	9.580.172.180	**77**	45.897.168.480	Dinas Kesehatan
	1.02 - 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vitamin A pada anak Balita	%	34	43	6.543.387.500	52	7.197.726.000	61	7.917.498.000	70	8.709.247.800	70	9.580.172.180	296	45.897.168.480	Dinas Kesehatan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.02 - 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak (Rumah Sehat)	%	24	35	1.229.567.000	37	1.352.524.000	44	1.487.776.000	50	1.635.494.000	50	1.800.190.000	216	8.735.118.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak	%	41	46	1.229.567.000	51	1.352.524.000	55	1.487.776.000	60	1.635.494.000	60	1.800.190.000	272	8.735.118.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan penderita baru TB	%	43	52	17.606.676.900	61	19.367.344.590	71	21.304.079.049	80	23.434.486.954	80	25.777.935.648	344	123.004.747.141	Dinas Kesehatan
	1.02 - 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	PCarkup BaTnA (+) pengobatan penderita TB Paru BTA + (Succes Rate)	%	75	78	17.606.676.900	80	19.367.344.590	83	21.304.079.049	85	23.434.486.954	85	25.777.935.648	411	123.004.747.141	Dinas Kesehatan
	1.02 - 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	%	58	55	17.606.676.900	56	19.367.344.590	48	21.304.079.049	45	23.434.486.954	45	25.777.935.648	249	123.004.747.141	Dinas Kesehatan
	1.02 - 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Diagnosa malaria	%	89	89	17.606.676.900	89	19.367.344.590	90	21.304.079.049	90	23.434.486.954	90	25.777.935.648	448	123.004.747.141	Dinas Kesehatan
	1.02 - 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya Angka Kesakitan Kusta per 10.000 penduduk	per 1000 Pddk	7	6	17.606.676.900	5	19.367.344.590	5	21.304.079.049	4	23.434.486.954	4	25.777.935.648	24	123.004.747.141	Dinas Kesehatan
	1.02 - 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV	%	24	33	17.606.676.900	42	19.367.344.590	51	21.304.079.049	60	23.434.486.954	60	25.777.935.648	246	123.004.747.141	Dinas Kesehatan
	1.02 - 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	%	21	31	17.606.676.900	40	19.367.344.590	50	21.304.079.049	60	23.434.486.954	60	25.777.935.648	241	123.004.747.141	Dinas Kesehatan
	1.02 - 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Standar Pelayanan Minimal Dalam Penanganan Gawat Darurat (SOP)	Persentase	100	100	2.237.500.000	100	2.709.375.000	100	3.249.300.000	100	3.986.523.000	100	4.933.154.000	500	17.115.852.000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
	1.02 - 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua (Kartu Papua Sehat)	%	100	100	78.000.000.000	100	85.800.000.000	100	94.380.000.000	100	103.818.000.000	100	114.199.800.000	500	546.757.554.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah pemulangan/pemakaman pasien miskin	Orang	7	10	60.000.000	10	70.000.000	10	80.000.000	10	90.000.000	10	100.000.000	50	400.000.000	Rumah Sakit Jiwa Abepura
	1.02 - 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah Jenis Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jenis	13	16	18.750.000.000	20	18.437.500.000	24	23.676.250.000	25	22.853.625.000	29	32.450.412.500	114	116.167.787.500	Rumah Sakit Jiwa Abepura
	1.02 - 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Angka Per 100 sarana dan prasarana RS yang terpelihara	%	100	100	795.000.000	100	916.500.000	100	1.099.800.000	100	1.216.260.000	100	1.459.512.000	500	5.487.072.000	Rumah Sakit Jiwa Abepura
	1.02 - 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan nifas	%	18	28	1.600.000.000	39	1.760.000.000	49	1.936.000.000	60	2.129.600.000	60	2.342.560.000	236	11.186.596.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan Kunjungan Bayi Neonatus (KN 1)	%	58	63	1.600.000.000	69	1.760.000.000	74	1.936.000.000	80	2.129.600.000	80	2.342.560.000	366	11.186.596.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan Kunjungan Bayi	%	15	24	1.600.000.000	32	1.760.000.000	41	1.936.000.000	50	2.129.600.000	50	2.342.560.000	197	11.186.596.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan Kunjungan Balita	%	23	33	1.600.000.000	42	1.760.000.000	51	1.936.000.000	60	2.129.600.000	60	2.342.560.000	246	11.186.596.000	Dinas Kesehatan
	1.02 - 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Jumlah Lansia yang terlayani sesuai standar	%	6	10	1.387.000.000	20	1.408.200.000	30	1.359.020.000	40	1.190.692.000	50	908.261.000	150	7.638.173.000	Dinas Kesehatan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.02 - 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu (K4)	%	26	39	4.286.603.200	51	4.715.263.000	63	5.186.789.000	75	5.705.467.500	75	6.276.012.650	303	30.067.047.350	Dinas Kesehatan
	1.02 - 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1)	%	73	77	4.286.603.200	81	4.715.263.000	86	5.186.789.000	90	5.705.467.500	90	6.276.012.650	424	30.067.047.350	Dinas Kesehatan
	1.02 - 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	50	58	4.286.603.200	65	4.715.263.000	73	5.186.789.000	80	5.705.467.500	80	6.276.012.650	356	30.067.047.350	Dinas Kesehatan
	1.02 - 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Kn)	%	38	48	4.286.603.200	59	4.715.263.000	69	5.186.789.000	80	5.705.467.500	80	6.276.012.650	336	30.067.047.350	Dinas Kesehatan
	1.02 - 33	Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Cakupan Dokumen Profit kesehatan Kabupaten Kota	%	48	60	2.665.942.000	70	6.240.536.200	80	7.682.589.820	100	9.143.848.802	100	10.626.233.682	410	38.346.370.504	Dinas Kesehatan
	1.02 - 33	Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Persentase Program Kegiatan Dalam Renstra Dan Renja Terakomodir Dalam APBD	Persentase	100	100	750.000.000	100	750.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	3.600.000.000	500	6.900.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
	1.02 - 33	Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Cakupan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan SIK terintegrasi	%	0	19	2.665.942.000	38	6.240.536.200	56	7.682.589.820	75	9.143.848.802	75	10.626.233.682	263	38.346.370.504	Dinas Kesehatan
	1.02 - 33	Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Cakupan Sinkronisasi Program antara Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Program	15	15	2.665.942.000	15	6.240.536.200	15	7.682.589.820	15	9.143.848.802	15	10.626.233.682	75	38.346.370.504	Dinas Kesehatan
	1.02 - 35	Program peningkatan kesehatan perorangan	Meningkatnya Rujukan Keluarga Miskin yang sulit akses pelayanan kesehatan	%	50	60	-	70	-	80	-	100	-	100	-	410	-	Dinas Kesehatan
	1.02 - 35	Program peningkatan kesehatan perorangan	Tingkat Kepuasaan Pasien Terhadap Pelayanan Jaminan Kesehatan	Persentase	100	100	69.375.000.000	100	84.218.750.000	100	102.773.437.000	100	125.966.796.000	100	154.958.496.000	500	537.292.479.000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
	1.02 - 35	Program peningkatan kesehatan perorangan	Angka per 100 Pasien asli Papua yang mendapatkan pelayanan jamkespa	%	100	100	5.275.000.000	100	6.122.500.000	100	7.338.750.000	100	8.806.500.000	100	10.423.800.000	500	37.966.550.000	Rumah Sakit Jiwa Abepura
	1.02 - 36	Program Sumberdaya Kesehatan	Rasio Bidan per Kampung	%	47	47	26.974.225.650	60	29.669.037.155	73	32.653.277.116	87	35.938.541.691	100	39.580.725.093	367	188.451.397.705	Dinas Kesehatan
	1.02 - 36	Program Sumberdaya Kesehatan	Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit Tipe B	Persentase	80	90	3.664.950.000	100	4.202.000.000	100	4.040.500.000	100	4.444.305.000	100	5.180.381.000	490	21.532.136.000	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
	1.02 - 36	Program Sumberdaya Kesehatan	PJuemndlaidhi kpaennduduk yang mendapatkan pelayanan promotif -	Orang	0	500	10.634.000.000	550	11.227.000.000	605	12.820.000.000	666	13.413.000.000	732	14.977.000.000	3.053	63.071.000.000	Rumah Sakit Jiwa Abepura
	1.02 - 36	Program Sumberdaya Kesehatan	pA megv kean pt ief r 100 pasien yang mendapatkan pelayanan kuratif - rehabilitati f	%	100	100	10.634.000.000	100	11.227.000.000	100	12.820.000.000	100	13.413.000.000	100	14.977.000.000	500	63.071.000.000	Rumah Sakit Jiwa Abepura
	1.02 - 37	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Cakupan Jenis Pemeriksaan Laboratorium	%	80	83	17.973.990.000	85	19.771.389.000	87	21.748.528.000	90	23.922.881.000	90	26.310.339.000	435	127.701.117.000	Dinas Kesehatan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.03	**Urusan Pekerjaan Umum**																
	1.03 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Aparatur	Gedung	0	0	46.497.750.000	0	773.938.000.000	0	761.040.000.000	0	760.240.000.000	0	255.517.000.000	0	2.597.232.750.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.10	**Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**																
	1.10 - 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan	100 Org	100	100	3.865.110.000	100	7.895.000.000	100	4.120.000.000	100	3.175.000.000	100	4.525.000.000	500	24.030.110.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.11	**Urusan Pemberdayaan Perempuan**																
	1.11 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Menunjang kelancaran Tugas Pokok Biro Pemberdayaan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi dan kebutuhan lain	Bulan	12	12	1.924.417.000	12	2.116.858.700	12	2.328.544.570	12	2.561.399.027	12	2.817.538.930	60	11.748.758.227	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan dalam rangka memberikan pelayanan Prima	Kegiatan	7	7	620.745.000	7	517.819.500	7	569.601.450	7	626.561.595	7	689.217.755	35	3.023.945.300	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan dalam rangka Peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan	2	2	85.900.000	2	94.490.000	2	103.939.000	2	114.332.900	2	125.766.190	10	524.428.090	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan dalam rangka Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Kegiatan	15	15	116.500.000	15	128.150.000	15	140.965.000	15	155.061.500	15	170.567.650	75	711.244.150	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Biro Pemberdayaan Perempuan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan Biro Pemberdayaan Perempuan	Dokumen	7	7	107.400.000	7	118.140.000	7	129.954.000	7	142.949.400	7	157.244.340	35	655.687.740	Biro Pemberdayaan Perempuan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.11 - 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Kelurahan/Kampung yang melaksanakan Pembinaan Peran Perempuan menuju keluarga sehat dan	Kelurahan/ Kampung	73	3	948.970.000	5	3.170.000.000	5	3.427.000.000	5	3.409.700.000	5	3.720.670.000	23	14.676.340.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Pendamping Korban KTPA	Orang	60	40	948.970.000	120	3.170.000.000	120	3.427.000.000	80	3.409.700.000	80	3.720.670.000	440	14.676.340.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Sinode/Klasis yang melaksanakan Pembinaan terhadap Pelaku/Korban KTPA	Sinode/Klasis	0	8	948.970.000	8	3.170.000.000	8	3.427.000.000	8	3.409.700.000	8	3.720.670.000	40	14.676.340.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 25	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kebijakan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Perempuan	Draf Forum	1	0	595.000.000	3	2.380.000.000	2	1.320.000.000	2	1.952.000.000	2	1.794.700.000	9	8.041.700.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 25	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kajian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kajian	0	0	595.000.000	0	2.380.000.000	0	1.320.000.000	1	1.952.000.000	0	1.794.700.000	1	8.041.700.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 25	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kab/Kota Layak Anak	Kab/Kota	0	2	595.000.000	2	2.380.000.000	0	1.320.000.000	0	1.952.000.000	0	1.794.700.000	4	8.041.700.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 25	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kebijakan Daerah yang melaksanakan Perlindungan Anak	Kebijakan	0	0	595.000.000	2	2.380.000.000	2	1.320.000.000	2	1.952.000.000	2	1.794.700.000	8	8.041.700.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 25	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kajian Kekerasan Terhadap Perempuan di ranah Publik	Kajian	1	0	595.000.000	0	2.380.000.000	0	1.320.000.000	1	1.952.000.000	0	1.794.700.000	1	8.041.700.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 25	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Buku Profil Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak di Provinsi Papua	Buku Profil	0	9	595.000.000	1	2.380.000.000	2	1.320.000.000	2	1.952.000.000	2	1.794.700.000	16	8.041.700.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 26	adad	Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Persen	19	7	1.748.600.000	7	5.120.000.000	7	4.412.000.000	7	4.973.200.000	7	7.947.520.000	35	24.201.320.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 26	adad	Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Pokja PUG	Persen	17	16	1.748.600.000	16	5.120.000.000	16	4.412.000.000	16	4.973.200.000	16	7.947.520.000	80	24.201.320.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 26	adad	Jumlah KIE, Bidang Pemberdayaan a Perlindungan Anak	KIE	8	2	1.748.600.000	43	5.120.000.000	42	4.412.000.000	42	4.973.200.000	43	7.947.520.000	172	24.201.320.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 26	adad	Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan/pengaduan di unit layanan terpadu	Orang	45	50	1.748.600.000	50	5.120.000.000	50	4.412.000.000	50	4.973.200.000	50	7.947.520.000	250	24.201.320.000	Biro Pemberdayaan Perempuan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.11 - 26	adad	Jumlah Tenaga Pendamping terlatih	Orang	0	30	1.748.600.000	180	5.120.000.000	180	4.412.000.000	180	4.973.200.000	170	7.947.520.000	740	24.201.320.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 26	adad	Jumlah Pencapaian target SPM	Persen	2	5	1.748.600.000	10	5.120.000.000	10	4.412.000.000	10	4.973.200.000	17	7.947.520.000	52	24.201.320.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 27	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Adanya Kebijakan dalam Pelaksanaan Program PP & PA	Rumus Hasil Rakornis	3	3	1.552.468.000	3	5.155.000.000	3	6.267.000.000	3	6.959.500.000	3	7.801.950.000	15	27.735.918.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 27	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Perempuan yang Terlatih	Orang/Perempuan	380	30	1.552.468.000	60	5.155.000.000	70	6.267.000.000	70	6.959.500.000	100	7.801.950.000	330	27.735.918.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 27	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Paud Holistik dan Integratif	Kab/Kota	0	0	1.552.468.000	0	5.155.000.000	8	6.267.000.000	8	6.959.500.000	8	7.801.950.000	24	27.735.918.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 27	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Kader Paud Holistik dan Integratif	Orang	0	0	1.552.468.000	0	5.155.000.000	30	6.267.000.000	30	6.959.500.000	30	7.801.950.000	90	27.735.918.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 27	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Menumbuhkan Kesadaran tentang Perlindunagn Perempuan dan Anak	Paket	0	0	1.552.468.000	1	5.155.000.000	1	6.267.000.000	1	6.959.500.000	1	7.801.950.000	4	27.735.918.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 27	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah orang yang memahami/mengetahui Regulasi PPA	Orang	0	30	1.552.468.000	170	5.155.000.000	170	6.267.000.000	290	6.959.500.000	290	7.801.950.000	950	27.735.918.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.11 - 27	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah orang yang memahami/mengetahui Regulasi PPA	Orang	0	30	1.552.468.000	170	5.155.000.000	170	6.267.000.000	290	6.959.500.000	290	7.801.950.000	950	27.735.918.000	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.13	**Urusan Sosial**																
	1.13 - 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase fakir miskin, keluarga rentan, KAT dan PMKS lainnya yanf diberdayakan	%	90	90	8.544.498.600	90	9.398.948.460	90	10.338.843.306	90	11.372.727.637	90	12.510.000.401	450	59.932.744.404	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
	1.13 - 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	%	90	90	3.509.548.900	90	3.860.503.790	90	4.246.554.169	90	4.671.209.586	90	5.138.330.544	450	24.616.645.989	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
	1.13 - 22	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase kelembagaan sosial masyarakat yang aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial	%	90	90	3.317.704.500	90	3.649.474.950	90	4.014.422.445	90	4.415.864.689	90	4.857.451.158	450	23.271.012.742	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.13 - 23	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	%	90	90	240.350.000	90	264.385.000	90	290.823.500	90	319.905.850	90	351.896.435	450	1.685.860.785	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
	1.13 - 24	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	%	90	90	4.887.256.000	90	5.375.981.600	90	5.913.579.760	90	6.504.937.736	90	7.155.431.509	450	34.280.146.605	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
	1.13 - 25	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial	Persenatase kualitas perencanaan dan penganggaran kesejahteraan sosial	%	90	90	959.282.500	90	1.055.210.750	90	1.160.731.825	90	1.276.805.008	90	1.404.485.509	450	6.728.590.592	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
	1.13 - 26	Peningkatan Sarana dan prasarana infrastruktur bagi masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun	%	100	100	17.500.000.000	100	-	100	-	100	-	100	-	500	17.500.000.000	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir
	1.17	**Urusan Kebudayaan dan Pariwisata**																
	1.17 - 16	Program Pengeblaan Kekayaan Budaya	Jumlah Masyarakat yang memahami dan melestarikan kekayaan budaya	Orang	100	100	1.495.000.000	100	1.709.900.000	100	2.343.960.000	100	1.769.756.000	100	1.957.731.600	500	9.796.347.600	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1.17 - 17	Program Pengeblaan Keragaman Budaya	Jumlah masyarakat yang memahami, mengaktualisasika n dan melestariakan	orang	80	100	8.221.017.000	100	9.925.093.700	100	9.744.938.110	100	10.786.140.732	100	12.883.859.305	500	54.740.428.847	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1.18	**Urusan Pemuda dan Olah Raga**																
	1.18 - 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya proporsi tenaga kepeloporan dan pionir pemuda dalam pembangunan	orang	47	290	8.195.000.000	290	9.014.500.000	290	9.915.950.000	290	10.907.545.000	290	11.998.299.500	1.450	57.481.294.500	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.18 - 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Prestasi Olahraga di PON	Medali	7	11	20.882.000.000	11	22.750.200.000	11	24.025.220.000	11	25.427.742.000	11	27.970.516.200	55	139.675.678.200	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.18 - 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga/ perolehan medali emas Asean Games	medali	0	0	20.882.000.000	1	22.750.200.000	0	24.025.220.000	0	25.427.742.000	3	27.970.516.200	4	139.675.678.200	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.18 - 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga/ perolehan medali emas Arafura Youth Games	medali	2	0	20.882.000.000	7	22.750.200.000	0	24.025.220.000	7	25.427.742.000	0	27.970.516.200	14	139.675.678.200	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga
	1.18 - 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga/ medali emas PORNAS	medali	0	2	20.882.000.000	0	22.750.200.000	7	24.025.220.000	0	25.427.742.000	12	27.970.516.200	21	139.675.678.200	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20	**Urusan Pemerintahan Umum**																
	1.20 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Aparatur Perbatasan yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	20	5	800.000.000	5	800.000.000	5	800.000.000	5	800.000.000	5	800.000.000	25	4.000.000.000	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
	1.20 - 9	Program Pemerintahan Umum	Meningkatnya pelayanan pemerintahan umum	%	85	85	4.000.000.000	85	4.000.000.000	85	4.000.000.000	85	4.000.000.000	85	4.000.000.000	425	24.000.000.000	Sekretariat Daerah
	1.20 - 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Pengawasan melalui Pelatihan Pengembangan Tenga Kerja Pemeriksa	Orang	40	96	2.069.840.000	96	2.276.824.000	96	2.504.506.400	96	2.754.957.040	96	3.030.452.744	480	13.875.580.184	Inspektorat Provinsi
	1.20 - 54	Program Peningkatan Wawasan Masyarakat Terhadap Pembangunan	Meningkatkan Wawasan Masyarakat Terhadap Pembangunan	%	85	85	-	85	-	85	-	85	-	85	300.000.000.000	425	300.000.000.000	Sekretariat Daerah
	1.20 - 63	Program Pembinaan Mental Spritual	Terwujudnya pembinaan dan peningkatan mental spiritual keagamaan	-	330	706	52.800.000.000	706	52.800.000.000	705	52.150.000.000	705	52.250.000.000	693	52.300.000.000	3.515	262.300.000.000	Biro Bina Mental Spiritual
	1.20 - 63	Program Pembinaan Mental Spritual	Jumlah Masyarakat yang diberikan layanan dan pembinaan	133	133	340	52.800.000.000	340	52.800.000.000	340	52.150.000.000	340	52.250.000.000	340	52.300.000.000	1.700	262.300.000.000	Biro Bina Mental Spiritual
	1.20 - 65	Program Pemberdayaan Sarana Keagamaan	Tersedianya bantuan sarana dan prasarana yang fungsional	tempat/rumah ibadah	95	180	2.931.000.000	180	2.931.000.000	185	2.981.000.000	185	3.031.000.000	195	3.056.000.000	925	14.930.000.000	Biro Bina Mental Spiritual
	1.20 - 67	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Kelurahan/Kampung yang melaksanakan Pembinaan Peran Perempuan menuju keluarga sehat dan	Kelurahan/ Kampung	73	3	-	5	-	5	-	5	-	5	-	23	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 67	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Pendamping Korban KTPA	Orang	60	40	-	120	-	120	-	80	-	80	-	440	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 67	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Sinode/Klasis yang melaksanakan Pembinaan terhadap Pelaku/Korban KTPA	Sinode/Klasis	0	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	40	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 68	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kebijakan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Perempuan	Draf Forum	1	0	-	3	-	2	-	2	-	2	-	9	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 68	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kajian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kajian	0	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-	Biro Pemberdayaan Perempuan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 68	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kab/Kota Layak Anak	Kab/Kota	0	2	-	2	-	0	-	0	-	0	-	4	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 68	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kebijakan Daerah yang melaksanakan Perlindungan Anak	Kebijakan	0	0	-	2	-	2	-	2	-	2	-	8	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 68	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kajian Kekerasan Terhadap Perempuan di rana Publik	Kajian	0	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 68	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Buku Profil Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak di Provinsi Papua	Buku Profit	0	9	-	1	-	2	-	2	-	2	-	16	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 69	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Persen	19	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-	35	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 69	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Pokja PUG	Persen	17	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	80	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 69	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah KIE, Bidang Pemberdayaan a Perlindungan Anak	KIE	8	2	-	43	-	42	-	42	-	43	-	172	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 69	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan/pengaduan di unit layanan terpadu	Orang	45	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	250	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 69	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Tenaga Pendamping terlatih	Orang	0	30	-	180	-	180	-	180	-	170	-	740	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 69	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pencapaian target SPM	Persen	2	5	-	10	-	10	-	10	-	17	-	52	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 70	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Adanya Kebijakan dalam Pelaksanaan Program PP & PA	Rumus Hasil Rakornis	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	15	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 70	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Perempuan yang Terlatih	Orang/Perempuan	380	30	-	60	-	70	-	70	-	100	-	330	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 70	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Menumbuhkan Kesadaran tentang Perlindunagn Perempuan dan Anak	Paket	0	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 70	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah Kader Paud Holistik dan Integratif	Orang	0	0	-	0	-	8	-	8	-	8	-	24	-	Biro Pemberdayaan Perempuan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20 - 70	Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah orang yang memahami/mengetahui Regulasi PPA	Orang	0	30	-	170	-	170	-	290	-	290	-	950	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.20 - 75	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Meningkatkan Keragaman Budaya Papua		90	90	357.500.000	90	393.250.000	90	432.575.000	90	475.832.500	90	523.415.750	450	2.182.573.250	Kantor Penghubung Daerah
	1.21	**Urusan Kepegawaian**																
	1.21 - 17	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Provinsi Papua	Orang/SKPD	100	20	32.939.737.000	20	33.420.000.000	20	34.750.000.000	20	36.400.000.000	20	37.850.000.000	100	175.359.737.000	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
	1.22	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																
	1.22 - 24	Program Peningkatan Hidup dan Perlindungan	Prosentase pelayanan peningkatan hidup dan perlindungan	100 persen	100	100	1.386.714.000	100	1.386.714.000	100	1.386.714.000	100	1.386.714.000	100	1.386.714.000	500	8.320.284.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
	1.24	**Urusan Kearsipan**																
	1.24 - 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Konvensional dan Elektronik	Orang	73.254	30.000	4.102.152.500	30.000	4.512.367.750	30.000	4.963.604.525	30.000	5.459.964.978	30.000	5.310.795.083	150.000	26.250.814.836	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1.24 - 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Standar Nasional Yang Dibangun	Unit/Koleksi	118	100	5.688.497.500	100	6.257.347.250	100	6.883.081.975	100	7.571.390.173	100	8.328.529.190	500	34.910.841.088	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1.25	**Urusan Komunikasi dan Informatika**																
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya pengetahuan kelompok informasi masyarakat	layanan	2	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	5	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Mempublikasikan KIM ke tingkat naisonal di PIN (Pekan Informasi Nasional)	layanan	1	3	33.800.000.000	4	33.800.000.000	4	33.800.000.000	4	33.800.000.000	4	33.800.000.000	19	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sebagai tenaga teknisi hardware	orang	40	40	33.800.000.000	40	33.800.000.000	40	33.800.000.000	40	33.800.000.000	40	33.800.000.000	200	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat, pedagang tentang peraturan penjualan cd/cvc bajakan	layanan	3	1	2.850.000.000	1	2.850.000.000	1	2.850.000.000	1	2.850.000.000	1	2.850.000.000	5	14.250.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatkan kualitas group tari tradisional dalam mengikuti festival pertura	group	2	3	2.850.000.000	3	2.850.000.000	3	2.850.000.000	3	2.850.000.000	3	2.850.000.000	15	14.250.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatkan kualitas SDM Papua	layanan	5	5	2.850.000.000	7	2.850.000.000	7	2.850.000.000	7	2.850.000.000	7	2.850.000.000	33	14.250.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2.01	**Urusan Pertanian**																
	2.01 - 40	Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Meningkatnya kapasitas penyuluh di 28 kab/kota	kab/kota	0	5	9.380.000.000	5	9.380.000.000	5	9.380.000.000	5	9.380.000.000	5	9.380.000.000	25	54.984.586.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 40	Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Meningkatkan kualitas kelembagaan petani di 28 kab/kota	kab/kota	0	5	9.380.000.000	5	9.380.000.000	5	9.380.000.000	5	9.380.000.000	5	9.380.000.000	25	54.984.586.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 40	Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Meningkatnya keterampilan aparatur dan non aparatur 1500 orang	orang	0	300	9.380.000.000	300	9.380.000.000	300	9.380.000.000	300	9.380.000.000	300	9.380.000.000	1.500	54.984.586.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 40	Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Meningkatnya ketrampilan widyaswara 6 orang	orang	6	6	9.380.000.000	6	9.380.000.000	6	9.380.000.000	6	9.380.000.000	6	9.380.000.000	30	54.984.586.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 40	Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Terdidiknya 1600 siswa SMK	siswa	190	320	9.380.000.000	320	9.380.000.000	320	9.380.000.000	320	9.380.000.000	320	9.380.000.000	1.600	54.984.586.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 40	Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Terbangunnya saraa pendidikan di SMK	unit	5	5	9.380.000.000	5	9.380.000.000	5	9.380.000.000	5	9.380.000.000	5	9.380.000.000	25	54.984.586.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.07	**Urusan Perindustrian**																
	2.07 - 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Tingkat Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Tepat guna, khususnya bagi IKM	persen	2	5	1.501.360.000	15	2.287.329.000	20	2.630.428.350	30	3.024.992.603	30	3.478.741.494	100	12.922.851.447	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Misi 4 : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal																		
	1.06	**Urusan Perencanaan Pembangunan**																
	1.06 - 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Terlaksananya Pembangunan Ekonomi	Persen	100	100	1.068.393.000	100	1.100.000.000	100	1.125.000.000	100	1.150.000.000	100	1.200.000.000	500	5.643.393.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.08	**Urusan Lingkungan Hidup**																
	1.08 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terw ujudnya Pembangunan berkelanjutan	kegiatan	90	90	9.300.000.000	90	6.150.000.000	85	8.650.000.000	90	6.225.000.000	90	8.575.000.000	445	38.900.000.000	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	1.08 - 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Kegiatan	85	90	3.850.000.000	90	4.300.000.000	90	5.200.000.000	90	4.750.000.000	90	4.750.000.000	450	22.850.000.000	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	1.08 - 26	Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Emisi GRK dan Peningkatan Serapan GRK	1 Tahun	0	85	3.500.000.000	90	3.700.000.000	90	3.950.000.000	90	4.200.000.000	90	6.600.000.000	445	21.950.000.000	Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	1.10	**Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**																
	1.10 - 16	Program Pembinaan Kependudukan	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat	orang	240	240	3.300.000.000	240	3.350.000.000	240	2.700.000.000	240	2.700.000.000	240	2.670.000.000	1.200	17.260.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.11	**Urusan Pemberdayaan Perempuan**																
	1.11 - 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan yang terlatih di Bidang Ekonomi	Perempuan	503	30	948.970.000	60	3.170.000.000	60	3.427.000.000	60	3.409.700.000	60	3.720.670.000	270	14.676.340.000	Biro Pemberdayaan Perempuan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.14	**Urusan Tenaga Kerja**																
	1.14 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Keitrampilan Teknis Aparatur di Bid. Hubungan Industrial	14 Orang	14	5	825.000.000	5	825.000.000	5	825.000.000	5	825.000.000	5	825.000.000	25	4.125.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.14 - 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Memperluas Kesempatan Kerja dalam rangka Pengurangan Pengangguran	100 Orng	100	100	10.421.950.000	100	14.255.740.000	100	13.513.247.000	100	14.267.159.250	100	17.426.493.377	500	71.561.939.627	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.14 - 18	Program Peningkatan Kualitas Aparatur Produktivitas dan Kewirausahaan	Tersedianya Aparatur yang berkualitas dan berwibawa	100 Orang	25	25	320.000.000	25	400.000.000	25	200.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	125	1.920.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.14 - 19	Program Pengiolahan dan Penyebarluasan Informasi Produktivitas	Terciptanya Penyebaran Informasi Produktivitas di Masyarakat	52 Paket	4	8	1.168.000.000	8	1.390.000.000	8	1.435.000.000	12	1.570.000.000	12	1.475.000.000	48	7.038.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.14 - 20	Program Peningkatan Kualitas dan Pengukuran Tenaga Kerja	Tersedianya Tenaga Kerja yang Kompeten dan Kompetitiv	60 Org	100	100	1.020.000.000	100	1.110.000.000	100	940.000.000	100	1.380.000.000	100	1.570.000.000	500	6.020.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.14 - 21	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Memperluas Kesempatan Kerja dalam rangka Pengurangan Pengangguran	100 %	20	300	2.500.000.000	350	6.450.000.000	380	3.280.000.000	400	3.050.000.000	400	4.050.000.000	1.830	19.630.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.14 - 22	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja,Meningkatnya Pengembangan Dunia usaha	139 Kasus	139	145	3.050.000.000	150	3.155.000.000	155	3.240.000.000	160	3.345.000.000	170	3.630.000.000	780	16.620.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.14 - 23	Program Pengawasan Ketenagakerjaan Pembinaan Perlindungan dan Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan	Terlaksananaya Pembinaan Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenaga Kerjaan	100 Org	20	20	2.190.100.000	20	2.500.000.000	20	2.600.000.000	20	2.700.000.000	20	2.650.000.000	100	12.878.900.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.15	**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**																
	1.15 - 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha Baru UMKM	unit	4.249	4.461	3.119.339.000	4.685	3.541.899.500	4.919	4.025.587.175	5.165	4.577.652.651	5.423	5.208.619.198	24.653	20.473.097.524	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	1.15 - 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UKM (Unit Usaha)	Unit	18.056	20.764	1.455.698.000	23.879	1.674.053.000	27.461	1.925.161.000	31.580	2.213.935.000	36.317	2.546.025.250	140.001	9.814.872.250	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	1.15 - 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Kelembagaan Koperasi yang memenuhi ketentuan Good Corporate Governance	Unit	1.282	1.474	4.809.740.000	1.695	5.531.201.000	1.950	6.030.256.150	2.242	6.934.794.573	2.579	3.777.398.759	9.940	27.083.390.482	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	1.16	**Urusan Penanaman Modal**																
	1.16 - 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya Promosi Potensi Investasi Dalam dan Luar Negeri	40 kali promosi	6	8	3.800.000.000	8	4.180.000.000	8	4.595.000.000	8	5.057.000.000	8	5.558.200.000	40	25.690.200.000	Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.16 - 18	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Tersedianya jenis izin yang dilayani melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	109 Izin	15	20	2.800.000.000	30	1.380.000.000	40	1.518.000.000	10	1.670.500.000	9	1.835.500.000	109	12.004.000.000	Badan Koordinasi Penanaman Modal
	1.16 - 19	Program Peningkatan Daya Saing Investasi	Meningkatnya Persetujuan dan Realisasi Investasi	80 Perusahaan	9	12	4.600.000.000	14	4.760.000.000	16	3.586.000.000	18	2.129.600.000	20	4.155.000.000	80	20.030.600.000	Badan Koordinasi Penanaman Modal
	1.16 - 20	Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku	195 Perusahaan	34	74	2.100.000.000	97	2.310.000.000	125	2.535.000.000	157	2.795.000.000	195	3.070.000.000	648	14.610.000.000	Badan Koordinasi Penanaman Modal
	1.20	**Urusan Pemerintahan Umum**																
	1.20 - 67	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Perempuan yang terlath di Bidang Ekonomi	Perempuan	503	30	-	60	-	60	-	60	-	60	-	270	-	Biro Pemberdayaan Perempuan
	1.22	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																
	1.22 - 20	Program Pengembangan Strategi Pembangunan Kampung (PROSPEK)	Prosentase Meningkatnya Program Strategi Pembangunan Kampung (PROSPEK)	100 persen	100	100	10.773.560.000	100	13.408.272.000	100	19.589.926.400	100	18.527.911.680	100	17.433.494.016	500	80.294.464.096	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
	1.22 - 21	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Prosentase meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kampung	100 persen	100	100	11.889.353.500	100	11.889.353.500	100	11.389.353.500	100	10.889.353.500	100	10.889.353.500	500	60.650.071.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
	1.22 - 22	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	Prosentase program penguatan kapasitas kelembagaan distrik dan	100 persen	100	100	5.083.250.000	100	6.082.400.000	100	6.083.250.000	100	6.083.250.000	100	6.083.250.000	500	31.198.650.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
	1.22 - 23	Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kampung Kelurahan dan Kawasan Miskin Perkotaan	kParomspeunntagse peningkatan pendapatan Masyarakat kampung, kelurahan dan kawasan miskin perkotaan	100 persen	100	100	5.773.750.000	100	5.273.750.000	100	5.273.750.000	100	5.273.750.000	100	5.273.750.000	500	30.401.862.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
	2.01	**Urusan Pertanian**																
	2.01 - 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Menigkatnya pendapatan petani	(%)	20	25	1.850.000.000	25	1.990.000.000	25	2.141.751.000	25	2.306.312.000	25	2.484.850.000	125	11.125.383.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan daerah akan beras	ton	88.000	15.530	46.484.000.000	16.680	47.449.000.000	17.860	50.061.000.000	19.120	49.912.000.000	21.730	54.015.704.000	90.920	260.675.379.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Terpenuhinya konsumsi protein hewani masyarakat Kapita/hari	(gram)	75	100	2.650.000.000	100	2.782.500.000	100	2.921.625.000	100	3.067.706.000	100	3.221.092.000	500	15.001.323.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2.01 - 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan daerah akan kedelai	ton	3.732	910	46.484.000.000	980	47.449.000.000	1.140	50.061.000.000	1.220	49.912.000.000	1.300	54.015.704.000	5.550	260.675.379.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan daerah akan bawang merah	ton	201	100	46.484.000.000	105	47.449.000.000	110	50.061.000.000	130	49.912.000.000	150	54.015.704.000	595	260.675.379.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatkan cadangan pangan daerah 200 ton	ton	38	40	46.484.000.000	40	47.449.000.000	40	50.061.000.000	40	49.912.000.000	40	54.015.704.000	200	260.675.379.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pendapatan petani	(%)	75	80	6.040.000.000	80	6.404.500.000	80	6.782.725.000	80	7.122.711.000	80	7.479.497.000	400	38.079.433.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produktivitas hasil perkebunan	(%)	75	100	4.500.000.000	100	4.950.000.000	100	5.445.000.000	100	5.989.500.000	100	6.588.450.000	500	28.285.950.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi hasil perkebunan	(Ton)	148.803	2.976	39.500.000.000	7.589	44.339.000.000	15.639	44.809.500.000	41.111	41.874.250.000	85.461	43.782.750.000	152.776	215.707.995.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Meningkatnya produktivitas tanaman	(%)	0	3	4.500.000.000	5	4.726.000.000	5	4.961.000.000	5	5.209.000.000	5	5.469.000.000	23	24.865.000.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Menurunnya angka kematian ternak, angka penularan penyakit hewan ke manusia dan	(%)	70	100	8.500.000.000	100	9.350.000.000	100	10.285.000.000	100	11.313.500.000	100	12.444.850.000	500	54.396.100.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi daging meningkat 6,5%/Tahun	5%	5	6	55.650.000.000	6	59.365.000.000	6	63.451.500.000	6	39.662.900.000	6	41.779.190.000	30	269.395.595.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan produksi telur % (ton/tahun)	%	5	6	55.650.000.000	6	59.365.000.000	6	63.451.500.000	6	39.662.900.000	6	41.779.190.000	30	269.395.595.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rata-Rata Populasi ternak meningkat 6,6%/Tahun	%	5	6	55.650.000.000	6	59.365.000.000	6	63.451.500.000	6	39.662.900.000	6	41.779.190.000	30	269.395.595.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya hasil pemasaran produk peternakan masyarakat	(%)	50	80	1.050.000.000	80	1.155.000.000	80	1.270.500.000	80	1.397.550.000	80	1.537.305.000	400	6.768.855.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Kelahiran dan Mutu performance ternak meningkat	(%)	50	100	2.500.000.000	100	2.750.000.000	100	3.025.000.000	100	3.327.500.000	100	3.660.250.000	500	16.270.330.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	2.01 - 26	Program Perencanaan Pembangunan	Tersusunnya program kegiatan pertanian dan ketahanan pangan selama 5 tahun	tahun	1	1	1.192.000.000	1	1.310.000.000	1	1.441.000.000	1	1.585.000.000	1	1.675.000.000	5	8.286.851.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 26	Program Perencanaan Pembangunan	Terevaluasinya program kegiatan pertanian dan ketahanan pangan setiap tahun	tahun	1	1	1.192.000.000	1	1.310.000.000	1	1.441.000.000	1	1.585.000.000	1	1.675.000.000	5	8.286.851.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 36	Program Peningkatan Diversifikasi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Tersedianya data dan informasi PPH	%	70	80	940.000.000	85	1.140.000.000	90	1.340.000.000	95	1.500.000.000	100	1.620.000.000	450	7.783.656.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2.01 - 36	Program Peningkatan Diversifikasi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Tersedianya data dan informasi akses pangan	%	25	41	940.000.000	57	1.140.000.000	73	1.340.000.000	87	1.500.000.000	100	1.620.000.000	358	7.783.656.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 36	Program Peningkatan Diversifikasi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	40	41	940.000.000	57	1.140.000.000	73	1.340.000.000	87	1.500.000.000	100	1.620.000.000	358	7.783.656.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 37	Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Pertanian	Tersedianya peralatan pengolahan hasil/pasca panen untuk meningkatkan hasil produk pertanian	unit	0	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	1	1.500.000.000	1	1.600.000.000	5	1.700.000.000	9	8.533.600.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 37	Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Pertanian	Tersedianya sarana pasar tani untuk meningkatkan pemasaran hasil produk pertanian	unit	0	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	1	1.500.000.000	1	1.600.000.000	5	1.700.000.000	9	8.533.600.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 37	Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Pertanian	Tersedianya sarana pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian	unit	0	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	1	1.500.000.000	1	1.600.000.000	5	1.700.000.000	9	8.533.600.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 37	Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Pertanian	Meningkatkan kapasitas petani dalam pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	%	5	5	1.300.000.000	5	1.400.000.000	5	1.500.000.000	5	1.600.000.000	5	1.700.000.000	25	8.533.600.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 38	Program Pengembangan Kaw asan Agribisnis dan Daerah Khusus	Terbangunnya kaw asan agribisnis 5553 Ha	Ha	2.664	375	11.580.000.000	385	12.290.000.000	400	13.010.000.000	425	13.585.000.000	445	14.205.000.000	2.030	64.670.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 38	Program Pengembangan Kaw asan Agribisnis dan Daerah Khusus	Terbangunnya kaw asan pertanian tanaman hortikultura di daerah perbatasan 500 Ha	Ha	0	100	11.580.000.000	100	12.290.000.000	100	13.010.000.000	100	13.585.000.000	100	14.205.000.000	500	64.670.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 38	Program Pengembangan Kaw asan Agribisnis dan Daerah Khusus	Terbangunnya kaw asan pertanian tanaman hortikultura di daerah prioritas	Ha	0	1.475	11.580.000.000	1.610	12.290.000.000	1.765	13.010.000.000	1.870	13.585.000.000	2.030	14.205.000.000	8.750	64.670.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 39	Program Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Peningkatan luas tanam ubijalar	ha	200	1.000	4.750.000.000	1.000	4.750.000.000	1.000	3.500.000.000	1.000	4.750.000.000	1.000	4.750.000.000	5.000	23.514.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 39	Program Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Produksi ubu jalar	4160	4.160	20.800	4.750.000.000	20.800	4.750.000.000	20.800	3.500.000.000	20.800	4.750.000.000	20.800	4.750.000.000	104.000	23.514.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 39	Program Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Meningkatnya areal tanaman spesifik lokal buah matoa	Ha	50	20	4.750.000.000	20	4.750.000.000	20	3.500.000.000	20	4.750.000.000	20	4.750.000.000	100	23.514.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.01 - 39	Program Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Meningkatnya areal tanaman spesifik lokal buah merah	Ha	90	20	4.750.000.000	20	4.750.000.000	20	3.500.000.000	20	4.750.000.000	20	4.750.000.000	100	23.514.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2.02	**Urusan Kehutanan**																
	2.02 - 7	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen perencanaan program pembangunan kehutanan	Dokumen	1	1	8.105.000.000	1	7.433.500.000	1	8.378.450.000	1	9.458.215.000	1	10.694.340.500	5	51.019.505.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 7	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen perencanaan teknis kehutanan	Dokumen	0	3	8.105.000.000	3	7.433.500.000	3	8.378.450.000	3	9.458.215.000	3	10.694.340.500	15	51.019.505.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 7	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen tindak lanjut Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi	Dokumen	1	2	8.105.000.000	2	7.433.500.000	2	8.378.450.000	2	9.458.215.000	2	10.694.340.500	10	51.019.505.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 7	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Sistem Informasi Kehutanan berbasis spasial	Unit	1	1	8.105.000.000	1	7.433.500.000	1	8.378.450.000	1	9.458.215.000	1	10.694.340.500	5	51.019.505.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 7	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Peta penyebaran potensi hasil hutan	Peta	0	2	8.105.000.000	3	7.433.500.000	3	8.378.450.000	3	9.458.215.000	3	10.694.340.500	14	51.019.505.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 7	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan Papua	Dokumen	0	1	8.105.000.000	0	7.433.500.000	0	8.378.450.000	0	9.458.215.000	0	10.694.340.500	1	51.019.505.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 7	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	Dokumen	0	1	8.105.000.000	0	7.433.500.000	0	8.378.450.000	0	9.458.215.000	0	10.694.340.500	1	51.019.505.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 7	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Laporan pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan	Izin	10	20	8.105.000.000	20	7.433.500.000	20	8.378.450.000	20	9.458.215.000	20	10.694.340.500	100	51.019.505.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 7	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pelayanan pengukuran dan perpetaan	Unit	1	1	8.105.000.000	1	7.433.500.000	1	8.378.450.000	1	9.458.215.000	1	10.694.340.500	5	51.019.505.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 7	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan Dan Pemantapan Kawasan Hutan	Data statistik, Profil Hutan, Buletin Kehutanan	Judul	3	3	8.105.000.000	3	7.433.500.000	3	8.378.450.000	3	9.458.215.000	3	10.694.340.500	15	51.019.505.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Kehutanan	Jumlah aparatur kehutanan yang mengikuti peningkatan kapasitas perencanaan kehutanan	Orang	5	15	1.980.000.000	15	2.178.000.000	15	2.395.800.000	15	2.635.380.000	15	2.898.918.000	75	13.888.098.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Kehutanan	Jumlah aparatur kehutanan yang mengikuti peningkatan kapasitas pengelolaan produksi hutan alam	Orang	0	15	1.980.000.000	15	2.178.000.000	15	2.395.800.000	15	2.635.380.000	15	2.898.918.000	75	13.888.098.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Kehutanan	Jumlah aparatur kehutanan yang mengikuti diklat pelindungan dan konservasi hutan	Orang	0	15	1.980.000.000	15	2.178.000.000	15	2.395.800.000	15	2.635.380.000	15	2.898.918.000	75	13.888.098.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Kehutanan	Jumlah aparatur kehutanan yang mengikuti diklat rehabilitasi hutan dan lahan	Orang	0	15	1.980.000.000	15	2.178.000.000	15	2.395.800.000	15	2.635.380.000	15	2.898.918.000	75	13.888.098.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2.02 - 11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Kehutanan	Jumlah rancangan regulasi yang dihasilkan	Regulasi	9	4	1.980.000.000	4	2.178.000.000	4	2.395.800.000	4	2.635.380.000	4	2.898.918.000	20	13.888.098.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Perusahaan kehutanan daerah yang di bangun	Unit	0	0	16.225.000.000	1	18.537.500.000	1	21.648.250.000	1	24.783.275.000	1	29.017.862.500	4	120.961.887.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pemegang ijin yang dibina		20	30	16.225.000.000	35	18.537.500.000	40	21.648.250.000	45	24.783.275.000	50	29.017.862.500	200	120.961.887.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	IUPHHK-HA yang dibina dalam pelaksanaan silvikultur	Unit	15	20	16.225.000.000	25	18.537.500.000	30	21.648.250.000	35	24.783.275.000	40	29.017.862.500	150	120.961.887.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Usaha industri perkayuan yang mendapatkan ijin	Unit	42	42	16.225.000.000	42	18.537.500.000	42	21.648.250.000	42	24.783.275.000	42	29.017.862.500	210	120.961.887.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Luas hutan tanaman rakyat yang dibangun	Ha	0	500	16.225.000.000	500	18.537.500.000	500	21.648.250.000	500	24.783.275.000	500	29.017.862.500	2.500	120.961.887.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Jumlah agenda pameran yang diikuti	Kali	5	7	16.225.000.000	7	18.537.500.000	7	21.648.250.000	7	24.783.275.000	7	29.017.862.500	35	120.961.887.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Dokumen perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Judul	0	1	17.990.000.000	0	19.984.000.000	0	23.206.400.000	0	26.995.840.000	0	31.025.372.000	1	134.101.612.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah jenis benih tanaman hutan yang di produksi	Unit	19	5	17.990.000.000	5	19.984.000.000	5	23.206.400.000	5	26.995.840.000	5	31.025.372.000	25	134.101.612.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah bibit yang di produksi	Bibit	150.000	170.000	17.990.000.000	170.000	19.984.000.000	170.000	23.206.400.000	170.000	26.995.840.000	170.000	31.025.372.000	850.000	134.101.612.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah sumber benih yang	Ha	15	5	17.990.000.000	5	19.984.000.000	5	23.206.400.000	5	26.995.840.000	5	31.025.372.000	25	134.101.612.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	dJuikmelaohla agenda penanaman pohon	Agenda	10	10	17.990.000.000	10	19.984.000.000	10	23.206.400.000	10	26.995.840.000	10	31.025.372.000	50	134.101.612.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas kawasan CA Cy cloop yang dilakukan penanaman	Ha	10	10	17.990.000.000	10	19.984.000.000	10	23.206.400.000	10	26.995.840.000	10	31.025.372.000	50	134.101.612.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas areal yang dilakukan rehabilitasi	Ha	160	30	17.990.000.000	30	19.984.000.000	30	23.206.400.000	30	26.995.840.000	30	31.025.372.000	150	134.101.612.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas wilayah mangrov e yang dikelola	Ha	5	20	17.990.000.000	20	19.984.000.000	20	23.206.400.000	20	26.995.840.000	20	31.025.372.000	100	134.101.612.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Kinerja pengelolaan UPTD BPTH dalam produksi bibit	Persen	10	20	17.990.000.000	20	19.984.000.000	20	23.206.400.000	20	26.995.840.000	20	31.025.372.000	100	134.101.612.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas areal hutan cadangan pangan dan agroforestry	Ha	50	30	17.990.000.000	30	19.984.000.000	30	23.206.400.000	30	26.995.840.000	30	31.025.372.000	150	134.101.612.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah Kab/Kota yang dibina	Kab/Kota	19	20	17.990.000.000	20	19.984.000.000	20	23.206.400.000	20	26.995.840.000	20	31.025.372.000	100	134.101.612.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 17	Perlindungan dan konserv asi sumber daya hutan	Kajian pengembangan wisata alam	Judul	0	3	17.675.000.000	3	19.862.500.000	3	22.352.750.000	3	25.192.825.000	3	28.437.867.500	15	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 17	Perlindungan dan konserv asi sumber daya hutan	Pembangunan Obyek Daya Tank Wisata Alam	Unit	0	3	17.675.000.000	3	19.862.500.000	3	22.352.750.000	3	25.192.825.000	3	28.437.867.500	15	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 17	Perlindungan dan konserv asi sumber daya hutan	Operasi pengamanan hutan	Kali	9	10	17.675.000.000	10	19.862.500.000	10	22.352.750.000	10	25.192.825.000	10	28.437.867.500	50	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 17	Perlindungan dan konserv asi sumber daya hutan	Kelompok pengamanan hutan masyarakat adat yang di bentuk	Unit	0	3	17.675.000.000	3	19.862.500.000	3	22.352.750.000	3	25.192.825.000	3	28.437.867.500	15	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 17	Perlindungan dan konserv asi sumber daya hutan	Kasus kehutanan yang di proses penyidikan oleh PPNS Kehutanan	Kasus	2	5	17.675.000.000	5	19.862.500.000	5	22.352.750.000	5	25.192.825.000	5	28.437.867.500	25	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 17	Perlindungan dan konserv asi sumber daya hutan	Masy arakat yang mengikuti penyuluhan kehutanan	Orang	150	200	17.675.000.000	300	19.862.500.000	400	22.352.750.000	500	25.192.825.000	600	28.437.867.500	2.000	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2.02 - 17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Meningkatny a kinerja penangkaran satw a burung dan flora anggrek sebagai media pengembangan konservasi, iptek dan w isata alam	Persen	10	20	17.675.000.000	20	19.862.500.000	20	22.352.750.000	20	25.192.825.000	20	28.437.867.500	100	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kinerja pengelolaan Kebun Botani Kehutanan Papua	Persen	10	20	17.675.000.000	30	19.862.500.000	50	22.352.750.000	70	25.192.825.000	80	28.437.867.500	250	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kinerja pengamanan dan pengaw asan peredaran hasil hutan	Persen	10	20	17.675.000.000	20	19.862.500.000	20	22.352.750.000	20	25.192.825.000	20	28.437.867.500	100	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kinerja pengamanan dan pengaw asan peredaran hasil hutan	Persen	10	20	17.675.000.000	20	19.862.500.000	20	22.352.750.000	20	25.192.825.000	20	28.437.867.500	100	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kinerja pengamanan dan pengaw asan peredaran hasil hutan	Persen	10	20	17.675.000.000	20	19.862.500.000	20	22.352.750.000	20	25.192.825.000	20	28.437.867.500	100	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kinerja pengamanan dan pengaw asan peredaran hasil hutan	Persen	10	20	17.675.000.000	20	19.862.500.000	20	22.352.750.000	20	25.192.825.000	20	28.437.867.500	100	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Stakeholder yang memahami kebijakan KPH	Orang	5	20	13.580.000.000	20	15.988.000.000	20	18.846.800.000	20	22.243.480.000	20	26.282.228.000	100	108.490.508.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Kajian kelembagaan KPH	Judul	5	5	13.580.000.000	5	15.988.000.000	5	18.846.800.000	5	22.243.480.000	5	26.282.228.000	25	108.490.508.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dibangun	Unit	5	5	13.580.000.000	5	15.988.000.000	5	18.846.800.000	5	22.243.480.000	5	26.282.228.000	25	108.490.508.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan jangka Panjang dan Jangka	Judul	5	10	13.580.000.000	10	15.988.000.000	10	18.846.800.000	10	22.243.480.000	10	26.282.228.000	50	108.490.508.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	TSDahMu Anpanaratur Kehutanan yang mengikuti diklat Calon Kepala KPH	Orang	5	30	13.580.000.000	30	15.988.000.000	30	18.846.800.000	30	22.243.480.000	30	26.282.228.000	150	108.490.508.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Kelompok Bisnis Mandiri (KBM) yang dibentuk	Unit	0	5	13.580.000.000	5	15.988.000.000	5	18.846.800.000	55	22.243.480.000	5	26.282.228.000	75	108.490.508.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Keputusan tentang Tata Hubungan Kerja KPH	Judul	0	5	13.580.000.000	5	15.988.000.000	5	18.846.800.000	5	22.243.480.000	5	26.282.228.000	25	108.490.508.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	KPH yang di bina dan di evaluasi	Unit	5	5	13.580.000.000	10	15.988.000.000	10	18.846.800.000	10	22.243.480.000	10	26.282.228.000	45	108.490.508.000	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 21	Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Masyarakat adat yang mengikuti pelatihan	Orang	58	20	25.775.000.000	20	30.572.500.000	20	36.293.750.000	20	43.119.925.000	20	51.268.077.500	100	208.779.252.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 21	Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Usaha pemanfaatan kayu masyarakat adat yang dibangun	Unit	10	5	25.775.000.000	5	30.572.500.000	5	36.293.750.000	5	43.119.925.000	5	51.268.077.500	25	208.779.252.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2.02 - 21	Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Industri kayu rakyat yang dibangun	Unit	10	5	25.775.000.000	5	30.572.500.000	5	36.293.750.000	5	43.119.925.000	5	51.268.077.500	25	208.779.252.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 21	Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu yang dibangun	Unit	10	5	25.775.000.000	10	30.572.500.000	10	36.293.750.000	10	43.119.925.000	10	51.268.077.500	45	208.779.252.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 21	Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Usaha pengembangan wisata alam yang dibangun	Unit	0	2	25.775.000.000	2	30.572.500.000	2	36.293.750.000	2	43.119.925.000	2	51.268.077.500	10	208.779.252.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 21	Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Wilayah hutan adat yang dilakukan pemetaan	Wilayah	2	3	25.775.000.000	3	30.572.500.000	3	36.293.750.000	3	43.119.925.000	3	51.268.077.500	15	208.779.252.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 21	Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	pUasarthiasipatif pemanfaatan kayu dan industri kayu rakyat yang mendapatkan sertifikasi	Unit	8	10	25.775.000.000	10	30.572.500.000	10	36.293.750.000	10	43.119.925.000	10	51.268.077.500	50	208.779.252.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.03	**Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**																
	2.03 - 20	Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral	Prosentase Meningkatnya Layanan Informasi Sekor Pertambangan dan Energi	persen	20	15	4.500.000.000	15	3.350.000.000	20	3.200.000.000	20	2.800.000.000	20	2.700.000.000	90	17.962.778.000	Dinas Pertambangan dan Energi
	2.03 - 26	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pertambangan Umum	persen	50	10	3.191.150.000	15	3.084.050.000	20	3.154.920.000	20	3.281.450.000	20	3.374.200.000	85	18.778.588.000	Dinas Pertambangan dan Energi
	2.03 - 27	Program Penelitian, Mtigasi dan Pelayanan Geologi	Prosentase Meningkatnya Penelitian, Mtigasi dan Pelayanan Geologi	Persen	20	10	3.111.000.000	10	3.422.100.000	15	3.764.310.000	15	4.140.741.000	20	4.554.814.000	70	22.041.340.000	Dinas Pertambangan dan Energi
	2.03 - 29	Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan	Prosentase Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Pertambangan	persen	10	5	2.248.100.000	10	2.472.910.000	15	2.720.201.000	20	2.992.221.000	30	3.291.441.900	80	15.845.706.900	Dinas Pertambangan dan Energi
	2.04	**Urusan Pariwisata**																
	2.04 - 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dipasarkan	paket	10	20	13.176.550.000	20	13.393.860.000	20	14.320.000.000	20	15.054.364.000	20	16.215.000.000	100	72.477.601.000	Dinas Kebudayaan dan Pariw isata
	2.04 - 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	paket	50	50	11.178.894.000	50	9.775.000.000	50	10.989.300.000	50	6.476.500.000	50	7.532.050.000	250	45.951.744.000	Dinas Kebudayaan dan Pariw isata
	2.04 - 17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kerjasama kemitraan pariwisata	paket	100	100	6.957.961.000	100	6.961.250.000	100	7.879.910.000	100	8.490.291.000	100	8.020.412.400	500	40.498.439.400	Dinas Kebudayaan dan Pariw isata
	2.05	**Urusan Kelautan dan Perikanan**																
	2.05 - 20	Program pengembangan budidaya perikanan	Volume produksi perikanan budidaya:3.170 ton; jumlah benih dengan mutu terjamin: 15,85 juta ekor; jumlah induk/calon induk unggul:15.200 juta ekor	ekor/tahun	100	100	6.958.950.000	100	12.704.355.000	100	13.972.791.000	100	15.227.070.100	100	15.988.444.370	500	72.964.910.470	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2.05 - 31	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rasio penyelesaian kasus tindak pidana perikanan papua bebas illegal fishing	Kawasan/Tahun	100	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	500	737.760.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2.06	**Urusan Perdagangan**																
	2.06 - 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pelaksanaan kegiatan Perdagangan Daerah yang terkendali dan terlindungi	unit	10.450	13.560	1.094.200.000	15.450	1.258.330.000	18.657	1.447.079.500	25.205	1.664.141.425	34.987	1.913.762.640	107.859	7.514.713.565	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.06 - 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Presentase nilai Ekspor Komoditas Unggulan daerah	Persen	5	10	735.650.000	15	845.997.500	20	972.897.125	25	1.118.831.692	30	1.286.656.445	100	4.960.032.762	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.06 - 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Pengutan Institusi Pasar dalam Negeri	Persentase	10	15	707.210.000	18	813.291.500	20	935.285.225	**22**	1.075.578.008	25	1.236.914.709	100	4.768.279.442	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.07	**Urusan Perindustrian**																
	2.07 - 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menegah	Tingkat Produktivitas Kualitas dan Hasil Produk Industri Kecil dan Menengah	unit	4.172	5.215	496.805.000	6.519	821.325.750	8.148	944.524.612	10.186	1.086.203.304	12.732	1.249.133.800	42.800	4.597.992.466	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2.07 - 18	Program Penataan Struktur Industri	Meningkatnya Sinergitas Pengembangan Industri	Unit	4.241	4.453	219.000.000	4.676	251.850.000	4.909	289.627.500	5.155	333.071.625	5.413	383.032.369	24.606	1.476.581.494	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Misi 5 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.																		
	1.03	**Urusan Pekerjaan Umum**																
	1.03 - 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	meningkatnya akses Jalan Baru	KM	0	5	1.430.600.000.000	5	1.442.100.000.000	5	1.433.000.000.000	5	1.666.470.000.000	5	1.514.270.000.000	25	7.486.440.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terbangunanya Akses Jembatan Baru	M¹	0	10	1.430.600.000.000	10	1.442.100.000.000	10	1.433.000.000.000	10	1.666.470.000.000	10	1.514.270.000.000	50	7.486.440.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangunnya saluran air limbah	M¹	0	0	82.870.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	82.870.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen	0	0	82.870.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	82.870.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya sarana persampahan	Unit	0	0	82.870.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	82.870.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Jalan dan Jembatan Yang Terpelihara	Km	0	200	66.500.000.000	200	-	200	-	200	-	200	-	1.000	66.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terbangunnya jaringan irigasi untuk pertanian	M¹	0	100	82.405.953.100	100	48.494.884.200	100	51.199.444.400	100	50.066.313.200	100	45.731.313.200	500	277.897.908.100	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terbangunya sarana bendung untuk irigasi pertanian	AA2	0	100	82.405.953.100	100	48.494.884.200	100	51.199.444.400	100	50.066.313.200	100	45.731.313.200	500	277.897.908.100	Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.03 - 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terjaganya kualitas jaringan irigasi untuk pertanian	M²	0	100	82.405.953.100	100	48.494.884.200	100	51.199.444.400	100	50.066.313.200	100	45.731.313.200	500	277.897.908.100	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Terbangunanya jaringan air baku	AA2	0	100	25.050.000.000	100	64.400.000.000	100	72.675.000.000	100	77.105.000.000	100	82.295.500.000	500	321.525.500.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Tersedianya dokumen perencanaan	Ha	0	100	25.050.000.000	100	64.400.000.000	100	72.675.000.000	100	77.105.000.000	100	82.295.500.000	500	321.525.500.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Terkendalinya pengawasan teknis kegiatan	M²	0	100	25.050.000.000	100	64.400.000.000	100	72.675.000.000	100	77.105.000.000	100	82.295.500.000	500	321.525.500.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Terbangunya longstorage dan embung	Ha	0	100	25.050.000.000	100	64.400.000.000	100	72.675.000.000	100	77.105.000.000	100	82.295.500.000	500	321.525.500.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Tersediannya dokumen pendukung perencanaan teknis	Dokumen	0	100	11.840.000.000	100	4.300.000.000	100	3.225.000.000	100	2.225.000.000	100	1.500.000.000	500	23.090.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Meningkatnya kinerja operasional dan pemeliharaan fisik	Ha	0	100	11.840.000.000	100	4.300.000.000	100	3.225.000.000	100	2.225.000.000	100	1.500.000.000	500	23.090.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Terkendalinya pengawasan teknis kegiatan	Ha	0	100	11.840.000.000	100	4.300.000.000	100	3.225.000.000	100	2.225.000.000	100	1.500.000.000	500	23.090.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 28	Program pengendalian banjir	Tersedianya dokumen perencanaan fisik	Dokumen	0	100	86.375.000.000	100	88.550.000.000	100	101.900.000.000	100	98.104.000.000	100	98.700.000.000	500	473.629.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 28	Program pengendalian banjir	terbangunya bangunan pengendali banjir	M²	0	100	86.375.000.000	100	88.550.000.000	100	101.900.000.000	100	98.104.000.000	100	98.700.000.000	500	473.629.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 28	Program pengendalian banjir	Terkendalinya pengawasan teknis kegiatan	M²	0	100	86.375.000.000	100	88.550.000.000	100	101.900.000.000	100	98.104.000.000	100	98.700.000.000	500	473.629.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 30	Program pembangunan infrastruktur pedesaaan	Tersedianya dokumen Rencana Induk Bidang air minum	Dok	0	0	268.332.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	268.332.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 30	Program pembangunan infrastruktur pedesaaan	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan,pembangunan infrastruktur transportasi terpadu	Dokumen	4	12	8.622.000.000	12	9.484.200.000	12	10.432.620.000	12	11.475.882.000	12	12.623.470.000	60	52.638.172.000	Badan Pengelolaan Infrastruktur
	1.03 - 30	Program pembangunan infrastruktur pedesaaan	Terbangunnya jalan lingkungan permukiman masyarakat	M	0	0	268.332.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	268.332.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 30	Program pembangunan infrastruktur pedesaaan	Tersedianya air minum yang bersih dan sehat pada Desa Rawan Air/Pesisir /Terpencil	Unit	0	0	268.332.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	268.332.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.03 - 32	Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Perencanaan Jalan dan Jembatan	Dokumen	0	0	34.850.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	34.850.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03 - 33	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Pengawasan Jalan dan Jembatan	Dokumen	0	0	32.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	32.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.04	**Urusan Perumahan Rakyat**																
	1.04 - 15	Program Pengembangan Perumahan	Pengembangan Perumahan	Unit Rumah	0	100	439.963.000.000	100	-	100	-	100	-	100	-	500	439.963.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.04 - 15	Program Pengembangan Perumahan	Berkurangnya Jumlah Rumah yang Layak Huni Pertahun	65.000 unit	42	2.600	2.601.395.390.000	13.000	2.601.760.350.000	13.000	2.601.820.000.000	13.000	2.601.930.000.000	13.000	2.601.890.000.000	54.600	13.008.795.740.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.04 - 15	Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya rumah sehat yang layak huni	Unit Rumah	1	1	439.963.000.000	1	-	1	-	1	-	1	-	5	439.963.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.04 - 15	Program Pengembangan Perumahan	Tersusunnya study kelayakan dan perencanaan teknik (DED)	Dokument	1	1	439.963.000.000	1	-	1	-	1	-	1	-	5	439.963.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.04 - 15	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman yang sehat	M'	1	1	439.963.000.000	1	-	1	-	1	-	1	-	5	439.963.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	1.04 - 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan Kwalitas lingkungan Perumahan Pada Wilayah Distrik/kampung Yang Miskin	360 unit	1	72	450.000.000	72	762.000.000	72	840.000.000	72	890.000.000	72	890.000.000	360	3.832.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.04 - 21	Program Penyuluhan, Pengarahan, Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi Lokal.	Terlaksanaya Penyuluhan, Pendaftaran dan seleksi serta bantuan peralatan perbekalan Transmigran Lokal	20 UPT	4	4	96.000.000	4	90.000.000	4	75.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	16	441.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
	1.05	**Urusan Penataan Ruang**																
	1.05 - 16	Program Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	0	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	250	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.06	**Urusan Perencanaan Pembangunan**																
	1.06 - 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	persen	0	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	250	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.06 - 26	Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup		.....	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.06 - 29	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	.....	.....	0	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	250	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.20	**Urusan Pemerintahan Umum**																
	1.20 - 30	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Kerjasama Pembangunan Perbatasan	Agenda	6	2	1.006.150.000.000	2	206.190.000.000	2	226.309.000.000	2	259.505.350.000	2	305.378.590.000	10	2.003.532.940.000	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
	1.20 - 31	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terlaksananya Pengembangan Wilayah	%	20	20	4.650.000.000	20	4.515.000.000	20	4.164.000.000	20	4.639.800.000	20	5.364.150.000	100	23.332.950.000	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
	1.20 - 36	Program Pengembangan Kawasan Tertinggal dan Perbatasan	Jumlah Pengembangan Kawasan Perbatasan	%	50	20	7.300.000.000	20	13.805.000.000	20	1.793.000.000	20	2.055.350.000	20	2.411.970.000	100	27.365.320.000	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
	1.20 - 60	Program Kerjasama Hubungan Luar Negeri	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Hubungan Luar Negeri	Agenda	13	3	7.800.000.000	3	9.300.000.000	3	7.220.000.000	3	6.492.000.000	3	6.803.300.000	15	37.615.300.000	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
	1.20 - 73	Program Pembinaan Adat	Terwujudnya Pembangunan Model Rumah Adat di Kab/Kota di Priovinsi Papua	Unit	0	1	6.500.000.000	1	7.150.000.000	1	7.865.000.000	1	8.651.500.000	1	9.516.650.000	5	39.683.150.000	Biro Pemerintahan Kampung
	1.21	**Urusan Kepegawaian**																
	1.21 - 15	Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat Struktural	Orang	80	240	11.000.000.000	240	11.200.000.000	240	11.400.000.000	240	11.600.000.000	240	11.800.000.000	1.200	57.000.000.000	Badan Kepegawaian dan DIKLAT Aparatur
	1.25	**Urusan Komunikasi dan Informatika**																
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi	Dokumen	4	3	2.735.000.000	5	3.536.500.000	4	2.878.150.000	4	3.165.965.000	4	3.482.562.000	20	15.798.177.000	Badan Pengelolaan Infrastruktur
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan pelayanan bidang kominfo	layanan	0	12	33.800.000.000	12	33.800.000.000	12	33.800.000.000	12	33.800.000.000	12	33.800.000.000	60	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Tersedianya portal layanan government dan data pemerintahan yang terupdate	layanan	4	5	33.800.000.000	5	33.800.000.000	5	33.800.000.000	6	33.800.000.000	6	33.800.000.000	27	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan jaringan komunikasi di kab/kota	kab/kota	12	2	33.800.000.000	2	33.800.000.000	2	33.800.000.000	2	33.800.000.000	2	33.800.000.000	10	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	1.25 - 15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Menigkatkan pelayanan pemerintahan dengan membangun aplikasi government	layanan	3	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	1	33.800.000.000	5	169.000.000.000	Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	2.02	**Urusan Kehutanan**																
	2.02 - 17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Model pengembangan jasa lingkungan Carbon Trade	Unit	0	3	17.675.000.000	3	19.862.500.000	3	22.352.750.000	3	25.192.825.000	3	28.437.867.500	15	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Usaha wisata alam	Unit	0	2	17.675.000.000	2	19.862.500.000	2	22.352.750.000	2	25.192.825.000	2	28.437.867.500	10	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi
	2.02 - 17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Usaha IUPHHK Restorasi Ekosistem	Unit	0	2	17.675.000.000	2	19.862.500.000	2	22.352.750.000	2	25.192.825.000	2	28.437.867.500	10	129.270.942.500	Dinas Kehutanan dan Konservasi

Tabel 8.1 (lanjutan)

Misi Gubernur	Kode Program	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SPKD
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2.03	**Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**																
	2.03 - 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pembangunan infrastruktur energi dan listrik	Dokumen	255	206	8.535.000.000	208	11.082.500.000	206	11.105.750.000	208	12.141.325.000	207	13.388.458.000	1.035	56.253.033.000	Badan Pengelolaan Infrastruktur
	2.03 - 22	Program Pelayanan Air Bersih	Prosentase Meningkatnya Pelayanan Air Bersih	Persen	30	15	5.441.650.000	15	5.985.815.000	15	6.584.396.000	20	7.242.834.000	20	7.967.117.000	85	40.298.460.000	Dinas Pertambangan dan Energi
	2.03 - 22	Program Pelayanan Air Bersih	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan air bersih	Dokumen	7	109	4.160.000.000	109	7.076.000.000	109	7.783.600.000	109	8.561.960.000	109	9.418.156.000	545	36.999.716.000	Badan Pengelolaan Infrastruktur
	2.03 - 25	Program Pembinaan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Meningkatnya Produk Perundang-Undang an	persen	0	5	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	15	2.000.000.000	20	2.000.000.000	60	10.891.650.000	Dinas Pertambangan dan Energi
	2.03 - 28	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Prosentase Meningkatnya Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	persen	20	10	34.566.697.000	10	38.078.365.000	15	41.949.450.000	20	46.217.118.000	20	47.111.311.000	75	234.679.839.000	Dinas Pertambangan dan Energi
J U M L A H							**6.893.674.872.825**		**71.758.464.946.380**		**82.250.865.359.351**		**89.172.326.805.332**		**95.607.413.151.053**		**99.266.584.979.142**	

BAB IX

INDIKATOR KINERJA DAERAH







BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran keberhasilan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indicator kinerja tujuan dan sasaran (impact/dampak) dari capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) serta kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2)

menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk mengukur keberhasilan inilah, maka diperlukan satu indikator yang ditetapkan dan disepakati bersama dan mampu menggambarkan kemajuan capaian pembangunan, khususnya di era otonomi khusus Papua. Indikator kinerja juga diharapkan disepakati oleh publik sebagai subyek pembangunan untuk memastikan terjadinya transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1.1.	**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**									
1.1.1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**									
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	%	10,48	8,9	8	8	8	8	10,55	(=)
1.1.1.2	Laju Inflasi	%	4,52	3,4	3	2,5	2,5	2,5	2,5	(<)
1.1.1.3	PDRB per kapita	Juta Rp	24,71	25,5	26,5	27,5	27,5	28	24	(>)
1.1.1.4	Gini Rasio	%	0,44	0,39	0,37	0,35	0,32	0,3	0.22	(<)
1.2.	**Kesejahteraan Sosial**									
1.2.1	**Pendidikan**									
1.2.1.1	Angka melek huruf	%	75,83	76	79	82	84	86	86	(=)
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	**Tahun**	6,87	6,9	7	7,25	7,5	7,8	8	(=)
1.2.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	74,03	74,03	74,03	74,03	74,03	74,03	29,17	(<)
1.2.1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	44,74	44,74	44,74	44,74	44,74	44,74	16,92	(<)
1.2.1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	33,61	12,96	(<)
1.3.	**Kesehatan**									
1.3.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jiwa/ 1000/KH	54	50	45	40	35	32	32	(<)
1.3.2	Angka Kematian Balita (AKABA)	Jiwa/ 1000/KH	115	298	298.00	298.00	298.00	34		(<)
1.3.3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jiwa/ 1000/KH	364	346	328	310	292	275		(<)
1.3.4	Angka Usia Harapan Hidup	Usia	68.11	68.18	68.40	68.19	68.22	68.23	68.36	(>)
1.3.5	Gizi Buruk	%	2.58	2.34	1.10	2.38	2.26	2.20	1.75	(>)
1.4.	**Ketenagakerjaan**									
1.4.1	Rasiopenduduk yang Bekerja	%	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	(=)
1.4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76.99	77.17	77.69	77.20	77.25	77.28	77.58	(=)
1.4.2.1	- Angkatan Kerja	Orang	1.255.368	1.283.624	1.423.907	1.279.383	1.293.065	1.300.320	1,352,066	(>)
1.4.2.2	- Bukan Angkatan Kerja	Orang	336.072	341.921	355.043	343.519	344.962	345.727	356	(>)
1.4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.51	4.41	4.01	4.42	4.38	4.36	4.19	(>)

Tabel 9.1 (lanjutan)

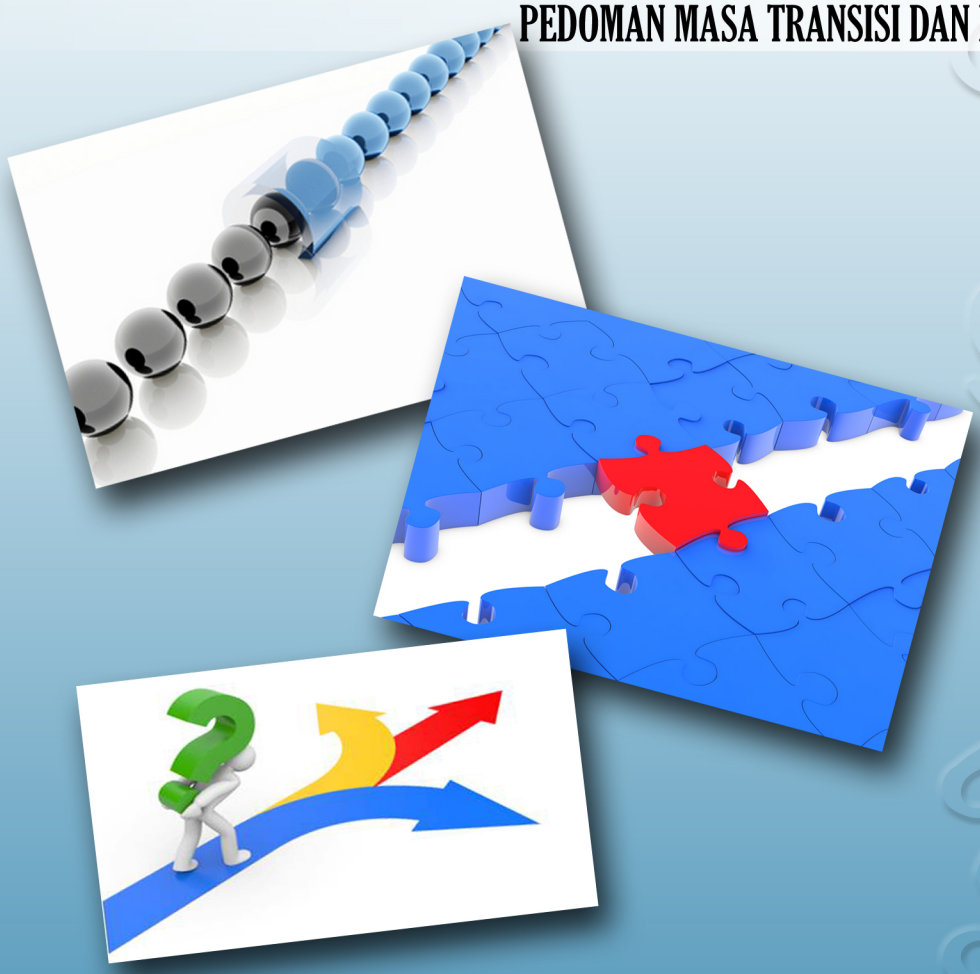
NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
2.	**PELAYANAN UMUM**									
2.1	**Pelayanan Urusan Wajib**									
2.1.1	**Pendidikan**									
2.1.1.1	**Pendidikan Dasar**									
2.1.1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI		85.44	81.18	84.1	85	85.1	85.3	67.07	(<)
2.1.1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs								62.07	(<)
2.1.1.1.3	Rasio Ketersediaan Sekolah		33.98	34.69	37.04	34.76	35.00	35.13	36.39	(>)
2.1.1.1.3	Rasio Guru Terhadap Murid		397.76	390.42	329.41	395.34	389.64	386.62	372.63	(>)
2.1.1.2	**Pendidikan Menengah**									
2.1.1.2.1	Angkapartisipasisekolah								48.81	(>)
2.1.2	**Kesehatan**									
2.1.2.1	Rumah Sakit	Gedung	36	38	39	40	42	44	28	(>)
2.1.2.2	- Rumah Sakit Umum	Gedung	35	37	38	40	41	43	28	(>)
2.1.2.4	PUSKESMAS	Gedung								
2.1.2.5	- Puskesmas Perawatan	Gedung	92	93	94	95	96		87	(>)
2.1.2.6	- Puskesmas non-Perawatan	Gedung	247	248	249	250	251	252	227	(>)
1.3.4	Angka Usia Harapan Hidup	Usia	68.11	68.18	68.40	68.19	68.22	68.23	68.36	(>)
1.3.5	Gizi Buruk	%	2.58	2.34	1.10	2.38	2.26	2.20	1.75	(>)
1.4.	**Ketenagakerjaan**									
1.4.1	Rasiopenduduk yang Bekerja	%	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	(=)
1.4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76.99	77.17	77.69	77.20	77.25	77.28	77.58	(=)
1.4.2.1	- Angkatan Kerja	Orang	1.255.368	1.283.624	1.423.907	1.279.383	1.293.065	1.300.320	1,352,066	(>)
1.4.2.2	- Bukan Angkatan Kerja	Orang	336071,99	341920,77	355042.64	343518.82	344961.76	345726.96	356,088	(>)
1.4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.51	4.41	4.01	4.42	4.38	4.36	4.19	(>)
2.	**PELAYANAN UMUM**									
2.1	**Pelayanan Urusan Wajib**									

Tabel 9.1 (lanjutan)

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						STANDAR	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
2.1.1	**Pendidikan**									
2.1.1.1	**Pendidikan Dasar**									
2.1.1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI		85.44	81.18	84.1	85	85.1	85.3	67.07	(<)
2.1.1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs								62.07	(<)
2.1.1.1.3	Rasio Ketersediaan Sekolah		33.98	34.69	37.04	34.76	35.00	35.13	36.39	(>)
2.1.1.1.3	Rasio Guru Terhadap Murid		397.76	390.42	329.41	395.34	389.64	386.62	372.63	(>)
2.1.1.2	**Pendidikan Menengah**									
2.1.1.2.1	Angkapartisipasisekolah								48.81	(>)
2.1.2	**Kesehatan**									
2.1.2.1	Rumah Sakit	Gedung	36	38	39	40	42	44	28	(>)
2.1.2.2	- Rumah Sakit Umum	Gedung	35	37	38	40	41	43	28	(>)
2.1.2.4	PUSKESMAS	Gedung								
2.1.2.5	- Puskesmas Perawatan	Gedung	92	93	94	95	96		87	(>)
2.1.2.6	- Puskesmas non-Perawatan	Gedung	247	248	249	250	251	252	227	(>)
2.2	**PelayananUrusanPilihan**									
2.2.1	**Pertanian**									
2.2.1.1	Kontribusi Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB	%	8.34	8.35	8.39	8.34	8.35	8.35	8.36	(<)
2.2.1.2	Kontribusi Sektor Tanaman Perkebunan PDRB	%	0.79	0.80	0.83	0.80	0.80	0.80	0.82	(<)
2.2.1.3	Kontribusi Sektor Peternakan dan Hasilnya PDRB	%	1.11	1.13	1.18	1.13	1.14	1.14	1.17	(<)
2.2.1.4	Kontribusi Sektor Kehutanan PDRB	%	2.39	2.38	2.30	2.39	2.38	2.38	2.35	(<)
2.2.1.5	Kontribusi Sektor Perikanan PDRB	%	4.32	4.32	4.29	4.33	4.33	4.32	4.33	(<)
3.	**DAYA SAING DAERAH**									
3.1	**Kemampuan Ekonomi**									
3.1.1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**									
3.1.1.1	Rasio Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita	%	27.44	27.48	29.38	27.22	27.39	27.48	27.60	(>)
3.2.1	**Perhubungan**									
3.2.1.1	Rasiopanjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.011	(>)

BAB X

PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN







BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 disusun berdasarkan sasaran pokok RPJPD tahun 2005-2025 untuk potongan tahun 2013-2018. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di akhir periode RPJMD maka perlu ditetapkan pedoman dan kaidah masa transisi.

10.1 Pedoman Transisi

Penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi Papua dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi dengan pembangunan Nasional.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD dan RENJA. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Gubernur Papua wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
2. Masyarakat dan dunia usaha agar turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran pembangunan dengan menyelaraskan upaya-upaya masing-masing komponen sesuai bidang kehidupan atau usahanya;
3. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
4. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD;
6. Bappeda Provinsi Papua harus menerjemahkan RPJMD kedalam RKPD tiap tahun sesuai kebijakan, prioritas, dan program indikatif yang telah ditetapkan dalam RPJMD;

7. Bappeda Provinsi Papua melaksanakan pengendalalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;
8. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2013 - 2018 ini dengan sebaik-baiknya;
9. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2013 hingga 2018;
10. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuatvisi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Propinsi Papua Tahun 2013-2018, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja-SKPD);
11. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota supaya berpedoman pada RPJMD Propinsi Papua Tahun 2013 – 2018;
12. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Papua dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/ Dinas/Unit Satuan Kerjadan RPJMD Kabupaten/Kota;
13. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.

Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua 2013-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018 kedalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten/Kota, maka Bapeda Provinsi Papua berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.

BAB XI

PENUTUP











BAB XI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua. RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018 akan menjadi pendorong dalam membangun Provinsi Papua menuju Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Papua tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, kerjasama yang kuat antara pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah daerah, komitmen dan dukungan DPRP , serta kerjasama masyarakat Provinsi Papua.


PAPUA
LUKAS ENEMBE, S.IP, MH
GUBERNUR PAPUA
KLEMEN TINAL, SE, MM
WAKIL GUBERNUR PAPUA
GERBANGMAS HASRAT PAPUA
GERAKAN BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA
HARAPAN SELURUH RAKYAT PAPUA